



BUPATI BULELENG
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI BULELENG
NOMOR 27 TAHUN 2024

TENTANG

MASTERPLAN SMART CITY KABUPATEN BULELENG TAHUN 2024-2033

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULELENG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan perlu disusun perencanaan *smart city* dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi;
 - b. bahwa untuk memberikan kepastian hukum serta dalam rangka mewujudkan konsep *smart city* di Kabupaten Buleleng yang terarah, terpadu, sistematis dan tepat sasaran, perlu pengaturan mengenai perencanaan *smart city*;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang *Masterplan Smart City* Kabupaten Buleleng Tahun 2024-2033;

- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2022 tentang Perkotaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6840);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG *MASTERPLAN SMART CITY* KABUPATEN BULELENG TAHUN 2024-2033.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Buleleng.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buleleng.
3. Bupati adalah Bupati Buleleng.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Buleleng
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng.
6. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
7. *Masterplan* adalah rencana induk pedoman pembangunan dan pengembangan program dan kegiatan.
8. *Smart City* adalah kota yang dapat memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya secara efektif dan efisien untuk pembangunan dan pengelolaan kota yang berkelanjutan, pelayanan publik yang prima dan peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas dengan didukung

implementasi teknologi informasi dan komunikasi.

9. Buleleng *Smart City* adalah Daerah yang cerdas dalam memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya secara efektif dan efisien untuk pembangunan dan pengelolaan kota yang berkelanjutan, pelayanan publik yang prima dan peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas dengan didukung implementasi teknologi informasi dan komunikasi.
10. *Masterplan Smart City* Daerah adalah dokumen perencanaan multisektoral dan terintegrasi yang berisikan panduan pembangunan konsep masa kini dan masa depan Daerah yang berfungsi menetapkan arah kebijakan, regulasi, strategi, tujuan, sasaran, arah prioritas dan target pembangunan menuju Buleleng *Smart City*.
11. Peta Jalan adalah sebuah perencanaan yang menggambarkan tahapan, proses dan arah perkembangan dari waktu ke waktu.
12. Program adalah instrumen kebijakan yang berisikan satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta untuk memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat.
13. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/Program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
14. Indikator Kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian Kinerja suatu Program atau kegiatan.
15. Pengendalian adalah proses kontrol manajerial terhadap Program/kegiatan melalui upaya sistematis untuk memastikan pelaksanaannya sesuai dengan standar, rencana, tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya.
16. Evaluasi adalah proses mengukur/menilai sejauh mana Program/kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana, tujuan, sasaran dan Kinerja yang hendak

dicapai.

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan inovasi pembangunan Daerah menuju Buleleng *Smart City*.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini, untuk memberikan kepastian hukum bagi Perangkat Daerah dalam perencanaan dan penyelenggaraan Program serta kegiatan yang mendukung pencapaian Buleleng *Smart City*.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. *Masterplan Smart City* Daerah; dan
- b. Pengendalian dan Evaluasi *Masterplan Smart City* Daerah.

BAB II

MASTERPLAN SMART CITY DAERAH

Pasal 5

- (1) *Masterplan Smart City* Daerah merupakan dokumen perencanaan dan pengelolaan *Smart City* yang memuat arah kebijakan, strategi pengembangan dan penyelarasan Program Perangkat Daerah untuk kurun waktu Tahun 2024 sampai dengan Tahun 2033 secara berkesinambungan dalam upaya percepatan pencapaian visi pembangunan Daerah.
- (2) *Masterplan Smart City* Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai:
 - a. pedoman bagi seluruh Perangkat Daerah dalam mengembangkan inovasi pembangunan Daerah guna

- mewujudkan Buleleng *Smart City*; dan
- b. pedoman bagi seluruh Perangkat Daerah dalam merencanakan, menyusun anggaran serta melaksanakan Program dan kegiatan yang mendukung pencapaian Buleleng *Smart City*.
- (3) *Masterplan Smart City* Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. BUKU I Analisis Strategis *Smart City* Daerah Tahun 2024-2033;
 - b. BUKU II *Masterplan Smart City* Daerah Tahun 2024-2033;
 - c. BUKU III *Executive Summary Masterplan Smart City* Daerah Tahun 2024-2033; dan
 - d. BUKU IV *Quick Win Smart City* Daerah Tahun 2024-2033.
- (4) *Masterplan Smart City* Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Dalam rangka mendukung sosialisasi *Masterplan Smart City* Daerah ditetapkan logo *Smart City* Daerah yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PENGENDALIAN DAN EVALUASI *MASTERPLAN SMART CITY* DAERAH

Pasal 6

Pengendalian dan Evaluasi *Masterplan Smart City* Daerah bertujuan untuk:

- a. konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaan dan hasil rencana penerapan Buleleng *Smart City*;
- b. konsistensi antara pelaksanaan Buleleng *Smart City* dengan rencana pembangunan jangka menengah Daerah dan rencana pembangunan jangka panjang Daerah;
- c. konsistensi antara pelaksanaan Buleleng *Smart City*

dengan Peta Jalan tahapan pembangunan Buleleng *Smart City*;

- d. konsistensi antara pelaksanaan Buleleng *Smart City* dengan visi dan misi Buleleng *Smart City* serta visi misi Daerah; dan
- e. kesesuaian antara capaian pelaksanaan Buleleng *Smart City* dengan indikator Program pembangunan Buleleng *Smart City*.

Pasal 7

Pengendalian dan Evaluasi *Masterplan Smart City* Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, meliputi:

- a. pengendalian dan Evaluasi terhadap kebijakan perencanaan Program *Masterplan Smart City* Daerah;
- b. pengendalian dan Evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Program *Masterplan Smart City* Daerah; dan
- c. Evaluasi terhadap capaian hasil pelaksanaan *Masterplan Smart City* Daerah.

Bagian Kesatu

Pengendalian dan Evaluasi Terhadap Kebijakan Perencanaan
Program *Masterplan Smart City* Daerah

Pasal 8

Pengendalian dan Evaluasi terhadap kebijakan perencanaan Program *Masterplan Smart City* Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a mencakup pengendalian terhadap implementasi kebijakan dalam *Masterplan Smart City* Daerah pada dokumen perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

Pasal 9

- (1) Pengendalian dan Evaluasi terhadap kebijakan perencanaan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 mencakup perumusan strategi dan

kebijakan, rencana Program dan kegiatan, indikator keberhasilan, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif, Indikator Kinerja *output* dan *outcomes* yang mengacu pada *Masterplan Smart City* Daerah.

- (2) Hasil pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa perumusan kebijakan perencanaan Perangkat Daerah telah berpedoman pada *Masterplan Smart City* Daerah.

Bagian Kedua

Pengendalian dan Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Program *Masterplan Smart City* Daerah

Pasal 10

Pengendalian dan Evaluasi terhadap pelaksanaan rencana Program *Masterplan Smart City* Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b mencakup pengendalian terhadap pelaksanaan Program dan kegiatan yang telah sejalan/sesuai dengan rencana Program dan kegiatan dalam *Masterplan Smart City* Daerah dan telah direncanakan dan dianggarkan pada dokumen perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

Pasal 11

- (1) Pengendalian dan Evaluasi terhadap pelaksanaan rencana Program *Masterplan Smart City* Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 mencakup Indikator Kinerja Program/kegiatan, rencana Program, kegiatan, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pemantauan dan supervisi terhadap pelaksanaan rencana strategis dan rencana kerja Perangkat Daerah.
- (3) Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dapat menjamin:

- a. Indikator Kinerja, rencana Program, kegiatan, serta pendanaan indikatif *Masterplan Smart City* Daerah, telah dipedomani dalam menyusun Indikator Kinerja dan kelompok sasaran, Program, kegiatan, dana indikatif dan prakiraan maju rencana strategis dan rencana kerja Perangkat Daerah; dan
 - b. visi, misi, tujuan dan sasaran *Masterplan Smart City* Daerah telah dijabarkan dalam tujuan dan sasaran rencana strategis dan rencana kerja Perangkat Daerah.
- (4) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa Indikator Kinerja Perangkat Daerah, rencana program, kegiatan, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam upaya mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran *Masterplan Smart City* Daerah.

Bagian Ketiga

Evaluasi Terhadap Capaian Hasil Pelaksanaan *Masterplan Smart City* Daerah

Pasal 12

- (1) Pengendalian dan Evaluasi terhadap capaian hasil pelaksanaan *Masterplan Smart City* Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, mencakup indikasi rencana Program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan untuk mencapai misi, tujuan dan sasaran, dalam upaya mewujudkan visi Buleleng *Smart City*.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui penilaian hasil pelaksanaan *Masterplan Smart City* Daerah.
- (3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan untuk mengetahui:
 - a. realisasi antara rencana Program dan kegiatan *Masterplan Smart City* Daerah dengan capaian rencana Program dan kegiatan dalam rencana kerja

- pembangunan Daerah; dan
- b. realisasi antara capaian rencana Program yang direncanakan dalam *Masterplan Smart City* Daerah dengan Program/kegiatan dalam rencana strategis dan rencana kerja setiap Perangkat Daerah.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan untuk memastikan bahwa visi, misi, tujuan dan sasaran *Masterplan Smart City* Daerah dapat dicapai untuk mewujudkan visi pembangunan Daerah secara keseluruhan.

Pasal 13

- (1) Pengendalian dan Evaluasi *Masterplan Smart City* Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dilakukan oleh dewan *Smart City* dan tim pelaksana *Smart City*.
- (2) Dewan *Smart City* dan tim pelaksana *Smart City* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Pengendalian dan Evaluasi *Masterplan Smart City* Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Hasil pengendalian dan Evaluasi *Masterplan Smart City* Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Bupati.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buleleng.

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal 18 September 2024
Pj. BUPATI BULELENG,

Ttd.

KETUT LIHADNYANA

Diundangkan di Singaraja
pada tanggal 18 September 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG,

Ttd.

GEDE SUYASA

BERITA DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2024 NOMOR 27

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum,

ttd

Made Bayu Waringin, S.H., M.H.

NIP. 198107162008031001

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BULELENG
NOMOR 27 TAHUN 2024
TENTANG
MASTERPLAN SMART CITY KABUPATEN
BULELENG TAHUN 2024-2033

BUKU I
ANALISIS STRATEGIS SMART CITY KABUPATEN BULELENG
TAHUN 2024-2033



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	vi
1. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Maksud dan Tujuan	2
2. ANALISIS MASA DEPAN.....	4
2.1. Analisis Visi Pembangunan Daerah.....	4
2.1.1. Visi Pembangunan Daerah dalam RPD	4
2.1.2. Pemetaan Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangun Daerah pada Dimensi <i>Smart City</i>	6
2.1.3. Analisis Perilaku, Harapan Masyarakat dan <i>Stakeholder</i> Daerah	15
2.1.4. Analisis Daya Saing Daerah	15
2.1.5. Analisis Kelembagaan dan Pemerintah Daerah yang relevan dengan Kebutuhan Seluruh <i>Stakeholder</i> yang Ada	16
2.2. Analisis Kondisi Eksternal.....	17
2.2.1. Analisis Tren dan Perkembangan Politik.....	17
2.2.2. Analisis Tren dan Perkembangan Ekonomi.....	19
2.2.3. Analisis Tren dan Perkembangan Sosial Budaya.....	20
2.2.4. Analisis Tren dan Perkembangan Teknologi	21
2.2.5. Analisis Tren dan Perkembangan Lingkungan	22
2.2.6. Analisis Tren dan Perkembangan Peraturan Perundang-undangan.....	23
3. ANALISIS KESIAPAN DAERAH	27
3.1. Analisis Nature	28
3.1.1. Kondisi Geografi dan Demografi	28
3.1.2. Pertanian, Perkebunan dan Perikanan.....	30
3.1.3. Sektor Perkebunan.....	32
3.1.4. Sektor Perikanan	33
3.1.5. Energi.....	34
3.1.6. Aspek Lingkungan Hidup.....	34
3.2. Analisis Struktur Daerah.....	35

3.2.1.	Analisis Kualitas SDM Daerah.....	35
3.2.2.	Analisis Kualitas Sumber Daya Pemerintahan	36
3.2.3.	Analisis Kapasitas Keuangan Daerah	38
3.3.	Analisis Infrastruktur	40
3.3.1.	Analisis Kesiapan Infrastruktur Fisik Daerah.....	40
3.3.2.	Analisis Kesiapan Infrastruktur Digital Daerah.....	41
	Sumber : Kertas Kerja Bimbingan Teknis 1 Kabupaten Buleleng 2023	42
3.3.3.	Analisis Kesiapan Infrastruktur Sosial Daerah	42
3.4.	Analisis Suprastruktur Daerah	43
3.4.1.	Analisis Kesiapan Kebijakan Daerah	43
3.4.2.	Analisis Kesiapan Kelembagaan Daerah	44
3.4.3.	Analisis Kesiapan Organisasi Masyarakat Daerah	45
3.5.	Analisis Culture	46
4.	ANALISIS STRATEGI PEMBANGUNAN <i>SMART CITY</i>	48
4.1.	Analisis Gap (Kesenjangan)	48
4.1.1.	Analisis Gap (Kesenjangan) <i>Smart Governance</i>	49
4.1.2.	Analisis Gap (Kesenjangan) <i>Smart Branding</i>	51
4.1.3.	Analisis Gap (Kesenjangan) <i>Smart Economy</i>	53
4.1.4.	Analisis Gap (Kesenjangan) <i>Smart Living</i>	56
4.1.5.	Analisis Gap (Kesenjangan) <i>Smart Society</i>	58
4.1.6.	Analisis Gap (Kesenjangan) <i>Smart Environment</i>	60
4.2.	Analisis SWOT.....	63
4.2.1.	Analisis SWOT <i>Smart Governance</i>	63
	Sumber: Bimbingan Teknis Tahap 1 Kabupaten Buleleng 2023	64
4.2.2.	Analisis SWOT <i>Smart Branding</i>	64
	Sumber : Bimbingan Teknis Tahap 1 Kabupaten Buleleng 2023	65
4.2.3.	Analisis SWOT <i>Smart Economy</i>	66
	Sumber : Bimbingan Teknis Tahap 1 Kabupaten Buleleng 2023	66
4.2.4.	Analisis SWOT <i>Smart Living</i>	67
	Sumber : Bimbingan Teknis Tahap 1 Kabupaten Buleleng 2023	68
4.2.5.	Analisis SWOT <i>Smart Society</i>	68
	Sumber : Bimbingan Teknis Tahap 1 Kabupaten Buleleng 2023	69
4.2.6.	Analisis SWOT <i>Smart Environment</i>	70
4.3.	Analisis TOWS untuk setiap dimensi <i>Smart City</i>	72

4.3.1.	Analisis TOWS <i>Smart Governance</i>	72
4.3.2.	Analisis TOWS <i>Smart Branding</i>	74
4.3.3.	Analisis TOWS <i>Smart Economy</i>	77
4.3.4.	Analisis TOWS <i>Smart Living</i>	79
4.3.5.	Analisis TOWS <i>Smart Society</i>	83
4.3.6.	Analisis TOWS <i>Smart Environment</i>	85
5.	ANALISIS VISI PEMBANGUNAN <i>SMART CITY</i>	88
5.1.	Visi dan Misi <i>Smart City</i>	88
5.1.1.	Visi <i>Smart City</i> Kabupaten Buleleng	88
5.1.2.	Misi <i>Smart City</i> Kabupaten Buleleng	89
5.2.	Sasaran <i>Smart City</i> Daerah	91
6.	PENUTUP	97

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Pemetaan Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah pada Dimensi <i>Smart City</i>	9
Tabel 2. 2 Harapan Masyarakat	15
Tabel 2. 3 Sebaran Anggota Dewan Berdasarkan Partai	18
Tabel 3. 1 Tabel Kondisi Ekonomi Tingkat Kemiskinan Kabupaten Buleleng	20
Tabel 3. 2 Tabel Angka Persoalan Sampah Kabupaten Buleleng	22
Tabel 3. 3 Produk Hukum di Kabupaten Buleleng	26
Tabel 3. 4 Pembagian Daerah Administrasi di Kab.Buleleng	30
Tabel 3. 5 Potensi Luas Perkebunan subsektor Perkebunan Rakyat Buleleng 2021	32
Tabel 3. 6 Jumlah Pelanggan Listrik Menurut Kecamatan di Kabupaten Buleleng, 2018-2022..	34
Tabel 3. 7 Analisis Kualitas SDM Daerah.....	35
Tabel 3. 8 Analisis Kualitas SDM Pemerintahan	37
Tabel 3. 9 Analisis Kapasitas Keuangan Daerah	39
Tabel 3. 10. Analisis Kesiapan Infrastruktur Fisik Daerah.....	40
Tabel 3. 11 Analisis Kesiapan Infrastruktur Digital Daerah.....	41
Tabel 3. 12. Analisis Kesiapan Infrastruktur Sosial Daerah	42
Tabel 3. 13 Analisis Kesiapan Kebijakan Daerah	44
Tabel 3. 14. Analisis Kesiapan Kelembagaan Daerah	45
Tabel 3. 15 Analisis Kesiapan Organisasi Masyarakat Daerah	46
Tabel 4. 1 Analisis Kesenjangan (Gap) <i>Smart Governance</i>	49
Tabel 4. 2 Analisis Gap (Kesenjangan) <i>Smart Branding</i>	52
Tabel 4. 3 Analisis Gap (Kesenjangan) <i>Smart Economy</i>	54
Tabel 4. 4 Analisis Gap (Kesenjangan) <i>Smart Living</i>	56
Tabel 4. 5 Analisis Gap (Kesenjangan) <i>Smart Society</i>	58
Tabel 4. 6 Analisis Gap (Kesenjangan) <i>Smart Environment</i>	61
Tabel 4. 7 SWOT <i>Smart Governance</i>	63
Tabel 4. 8 SWOT <i>Smart Branding</i>	64

Tabel 4. 9 SWOT <i>Smart Economy</i>	66
Tabel 4. 10 SWOT <i>Smart Living</i>	67
Tabel 4. 11 SWOT <i>Smart Society</i>	69
Tabel 4. 12 SWOT <i>Smart Environment</i>	70
Tabel 4. 13 TOWS <i>Smart Governance</i>	72
Tabel 4. 14 TOWS <i>Smart Branding</i>	74
Tabel 4. 15 TOWS <i>Smart Economy</i>	77
Tabel 4. 16 TOWS <i>Smart Living</i>	80
Tabel 4. 17 TOWS <i>Smart Society</i>	83
Tabel 4. 18 TOWS <i>Smart Environment</i>	86
Tabel 5. 1 Misi <i>Smart City</i> Kabupaten Buleleng	89
Tabel 5. 2 Sasaran <i>Smart City</i> Kabupaten Buleleng	93

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 2 Dimensi <i>Smart City</i>	6
Gambar 2. 3 Hubungan antara standar ISO 37120 dan 37122	25
Gambar 3. 1 Peta Sebaran Sinyal di Kabupaten Buleleng.....	21
Gambar 3. 2 Aspek Kesiapan <i>Smart City</i> Daerah.....	27
Gambar 3. 3 Peta Wilayah Kabupaten Buleleng	29
Gambar 3. 4 Potensi Lahan Kabupaten Buleleng	31

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Peraturan Menteri Kominfo No. 22/2021 tentang Rencana Strategis Kemenkominfo 2020- 2024, Kemenkominfo menyampaikan bahwa 63 Kabupaten/kota dari 150 target terbentuknya Kabupaten/Kota Cerdas tersebut berada kawasan Destinasi Pariwisata Prioritas dan enam kabupaten/kota berada di kawasan Ibu Kota Negara. Dengan demikian Gerakan *Smart City* ini menjadi sangat penting. Di daerah, *Smart City* menjadi area tanggungjawab Urusan Komunikasi dan Informatika. Komunikasi dan Informatika menjadi salah satu urusan wajib yang harus dilaksanakan oleh Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Pemerintah daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah menurut asas otonomi, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, sekaligus meningkatkan daya saing daerah.

Smart City merupakan sebuah konsep kota cerdas yang dapat membantu masyarakat dalam mengelola sumber daya yang ada dengan efisien dan memberikan informasi yang tepat kepada masyarakat atau lembaga dalam melakukan kegiatannya. Lahirnya konsep *Smart City* tumbuh seiring dengan semakin majunya perkembangan teknologi informasi yang menyebar ke berbagai kalangan, baik golongan tua dan muda serta kaya dan miskin. Adapun konsep *Smart City* ini masyarakat semakin mudah dalam memanfaatkan pelayanan publik yang di sediakan oleh pemerintah. Dengan kemajuan teknologi segala aspek yang sifatnya masih konvensional bisa dipangkas melalui kecepatan teknologi secara cepat. Sebab salah satu kendala dalam pelayanan public terutama di daerah, terkadang aparatur tingkat bawah atau biasa disebut street level bureaucracy cenderung kurang fleksibel, tidak responsive dan cenderung kaku terhadap aturan. Penerapan *Smart City* di Indonesia yang sudah berjalan saat ini dan bisa dikatakan berhasil memberikan dampak yang baik selama 5 tahun adalah Kota Bandung dan Kota Surabaya. Dua kota ini merupakan pionir pembangunan *Smart City* yang ada di Indonesia. Beragam penghargaan didapatkan oleh kedua daerah ini sebagai percontohan konsep *Smart City* yang baik. Sehingga

dalam implementasinya, Kota Surabaya dan Kota Bandung sudah memberikan kontribusi yang baik bagi pembangunan tata ruang kota dan manajemen kota yang *sustainable*.

Adapun menurut Stephen Ezell (*Vice President Global Innovation Policy Information Technology and Innovation Foundation*), salah satu keuntungan konsep *Smart City* adalah menciptakan perencanaan dan pengembangan kota layak huni yang lebih baik di masa depan, konsep *Smart City* juga membuat *e-government* dapat lebih cepat implikasinya kepada masyarakat, konsep *Smart City* juga membuat sistem transportasi lebih efisien dan terintegrasi sehingga meningkatkan mobilitas masyarakatnya, menciptakan rumah dan bangunan yang hemat energi, serta lingkungannya juga bisa menjadi lebih lestari karena konsep pengaturan limbah dan pengelolaan air yang lebih maju. *Smart City* juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan pelayanan Kesehatan

1.2.Maksud dan Tujuan

Perlu komitmen bersama dan perencanaan yang matang, menyeluruh melibatkan semua pihak dari tingkat daerah maupun pusat, warga baik secara individu maupun komunitas, pemerintah, dan sektor swasta harus melibatkan diri dan berperan aktif untuk membangun *Smart City*. Buku 1 ini berisi Analisis Strategis *Smart City* Kabupaten Buleleng, Buku 1 menjadi dasar penyusunan *Master Plan Smart City* Kabupaten Buleleng dan Rencana *Quick Wins Smart City* Kabupaten Buleleng yang selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan perkembangan eksternal yang sedang berlangsung. Tujuan disusunnya Buku 1 ini adalah untuk menyediakan:

- a. Analisis Masa Depan (*Outlook Analysis*) berupa analisis visi dan harapan pembangunan daerah ke depan serta analisis kondisi eksternal yang dapat mempengaruhi perkembangan daerah;
- b. Analisis Kesiapan *Smart City* (*Smart City Readiness*) baik dari sisi *nature* (alam), struktur (sumber daya), infrastruktur, suprastruktur (kebijakan dan kelembagaan), serta *culture* (sosial budaya);
- c. Analisis Kesenjangan (*Gap Analysis*) antara visi masa depan dengan kondisi saat ini;

- d. Analisis Strategi Pembangunan *Smart City* dengan memperhatikan *Strengths* (kekuatan), *Weaknesses* (kelemahan), *Opportunities* (kesempatan) dan *Threats* (ancaman);
- e. Analisis Visi Pembangunan *Smart City*.

Semua analisis yang dilakukan untuk memberikan gambaran langsung mengenai analisis strategis *Smart City* daerah Kabupaten Buleleng

2. ANALISIS MASA DEPAN

2.1. Analisis Visi Pembangunan Daerah

Visi adalah pandangan jangka panjang tentang masa depan yang diinginkan oleh suatu organisasi, perusahaan, atau individu. Visi menggambarkan gambaran ideal dari tujuan-tujuan besar yang ingin dicapai dan arah yang ingin diikuti. Visi yang baik harus menginspirasi, memotivasi, dan menjadi landasan bagi rencana dan keputusan organisasi. Visi merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan diakhir periode perencanaan pembangunan daerah. *Smart City* harus memiliki visi dan misi yang selaras dengan visi misi pembangunan daerah hal ini perlu diperhatikan untuk mencapai kualitas perencanaan yang berkelanjutan, maka pada setiap tingkatan dan tahapan perencanaan harus selaras dan konsisten. Apabila program *Smart City* belum termasuk dalam RPJD dan RPD daerah, maka daerah perlu segera menyesuaikan.

2.1.1. Visi Pembangunan Daerah dalam RPD

Analisis masa depan Kabupaten Buleleng diawali dengan melihat Visi pembangunan daerah Kabupaten Buleleng. Visi dan misi RPD Kabupaten Buleleng 2023-2026 adalah visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang disampaikan kepada rakyat Buleleng. Berdasarkan perhitungan atas potensi daerah Kabupaten Buleleng, faktor-faktor strategis lain yang mungkin mempengaruhi pembangunan daerah Kabupaten Buleleng, tantangan yang dihadapi dalam kurun waktu 20 tahun yang akan datang, dan berpedoman pada amanat pembangunan sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, maka dirumuskan Visi Pembangunan Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2005-2025 sebagai berikut:

“Buleleng Kerta Raharja Mengantarkan Bali Dwipa Jaya Berlandaskan Tri Hita Karana”

Visi Pembangunan Buleleng “Buleleng Kerta Raharja Mengantarkan Bali Dwipa Jaya Berlandaskan Tri Hita Karana” merupakan kondisi yang ingin dicapai tahun 2025. Visi tersebut bermakna

1. **Mandiri** mengandung makna: Kemampuan Pemerintah Daerah bersama masyarakat Buleleng mengelola pembangunan daerah sesuai kewenangan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.
2. **Sejahtera** mengandung makna: Terpenuhi hak dasar masyarakat untuk kehidupan yang berkualitas.
3. **Berdaya Saing** mengandung makna: Kemampuan daerah dalam mengatasi tantangan dengan peranan potensi dan keunggulan komparatif dan kompetitif untuk peningkatan nilai tambah daerah.
4. **Berlandaskan Tri Hita Karana** mengandung makna: Berlandaskan hubungan yang harmonis antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan lingkungan alam dan isinya, dan manusia dengan manusia.

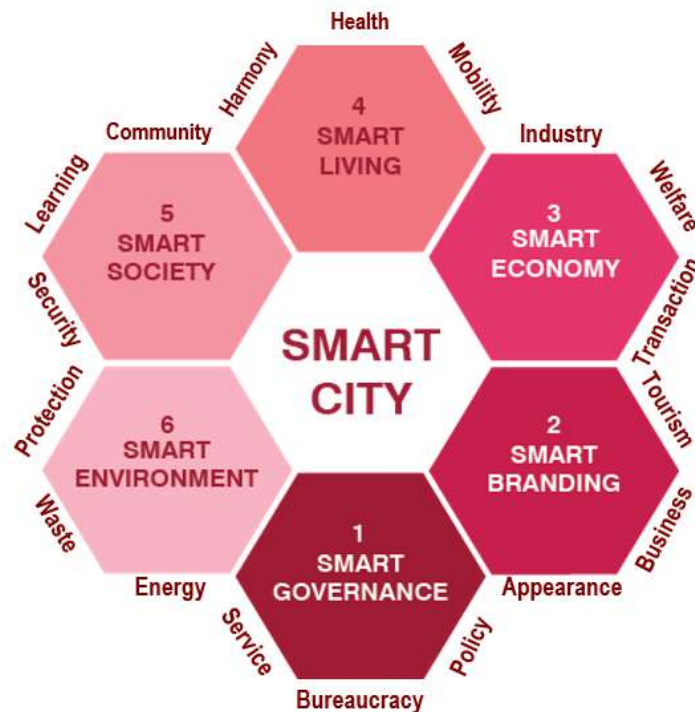
Untuk mewujudkan visi tersebut maka tindakan yang akan dilakukan selama periode 2017-2022 adalah sebagai berikut:

1. Memantapkan Pembangunan Ekonomi untuk Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif;
2. Pengembangan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis pada Produk Unggulan Daerah.
3. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Profesional, Berbudaya dan Berintegritas;
4. Memantapkan Partisipasi Pemangku Kepentingan Dalam Pembangunan.
5. Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur Daerah untuk Pemenuhan Pelayanan Publik.
6. Mewujudkan Pembangunan Buleleng yang Berbudaya dan Berkelanjutan (*Sustainable Development*).

Sedangkan tema fokus pembangunan dan perumusan arah kebijakan 2023-2026 yang tertuang dalam RPD Kabupaten Buleleng “**Peningkatan Produktivitas untuk Penguatan Daya Saing Daerah**”

2.1.2. Pemetaan Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangun Daerah pada Dimensi *Smart City*

Dalam kerangka pikir *Smart City* terdapat 6 (enam) dimensi yang memiliki peran yang sama penting, terintegrasi dan memperkuat semua dimensi.



Gambar 1. 1 Dimensi *Smart City*

Sumber: Materi Bimbingan Teknis 1 *Smart City* 2023







Keenam dimensi tersebut adalah:

1. *Smart Governance*: gambaran tata kelola pemerintahan yang dilaksanakan secara pintar, yaitu tata kelola pemerintahan yang mampu mengubah pola-pola tradisional dalam birokrasi sehingga menghasilkan *business process* yang lebih cepat, efektif, efisien, komunikatif dan selalu melakukan perbaikan. *Smart Governance* harus dapat dimplementasikan ke dalam tiga unsur dalam tata kelola, yaitu pelayanan (*service*), birokrasi (*bureaucracy*), dan kebijakan (*policy*).







2. *Smart Branding*, yaitu inovasi dalam memasarkan daerahnya sehingga mampu meningkatkan daya saing daerah dengan mengembangkan tiga elemen, yaitu pariwisata, bisnis, dan wajah kota. *Smart Branding* didasarkan pada pemikiran bahwa sebuah kota tidak lagi harus mampu memenuhi kebutuhan-kebutuhannya dengan hanya memanfaatkan potensi lokal-nya, tetapi harus juga mampu menarik partisipasi masyarakat, baik dari dalam maupun luar daerah, serta pelaku bisnis dan investor untuk ikut mendorong percepatan pembangunan daerahnya.
3. *Smart Economy*, dimaksudkan untuk mewujudkan ekosistem perekonomian di daerah yang mampu memenuhi tantangan di era informasi yang disruptif dan menuntut tingkat adaptasi yang cepat seperti saat ini. Oleh karena itu terdapat tiga elemen dalam *Smart Economy*, yaitu ekosistem industri, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan ekosistem transaksi keuangan. Modal sosial seperti kepercayaan, gotong royong, toleransi, penghargaan, saling memberi dan saling menerima serta kolaborasi sosial memiliki pengaruh yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi melalui berbagai mekanisme seperti meningkatnya rasa tanggung jawab terhadap kepentingan publik, meluasnya partisipasi dalam proses demokrasi, menguatnya keserasian masyarakat dan menurunnya tingkat kejahatan.
4. *Smart Living* menjadi salah satu dimensi dalam *Smart City* untuk menjamin kelayakan taraf hidup masyarakat di dalamnya. Kehidupan yang cerdas menjamin kelayakan taraf hidup masyarakat di dalam suatu kota. Kelayakan taraf hidup ini dapat dinilai dari tiga elemen, yaitu kelayakan pola hidup, kelayakan kualitas kesehatan, dan kelayakan moda transportasi untuk mendukung mobilitas orang dan barang.
5. *Smart Society*, merupakan dimensi yang banyak membahas tentang manusia sebagai unsur utama sebuah kota, dimana dimensi fisik dan virtual dari kehidupan warga kota semakin terjalin secara intensif dengan mediasi teknologi. Ada tiga elemen di dalam *Smart Society*, yaitu komunitas warga (*community*), ekosistem pembelajaran (*learning*), dan sistem keamanan (*security*).
6. *Smart Environment*, yang menunjukkan adanya perhatian bagi lingkungan hidup dalam pembangunan kota yang sama besarnya dengan perhatian yang diberikan terhadap pembangunan infrastruktur fisik maupun pembangunan bagi sarana dan prasarana bagi warga. Elemen utama pada dimensi ini adalah perlindungan air, udara dan tanah,

pengelolaan energi, serta sampah. *Smart Environment* berarti lingkungan yang bisa memberikan kenyamanan, keberlanjutan sumber daya, keindahan fisik maupun non fisik, visual maupun tidak, bagi masyarakat dan publik. Menurut undang-undang tentang penataan ruang, mensyaratkan 30% lahan perkotaan harus difungsikan untuk ruang terbuka hijau baik privat maupun publik. Lingkungan yang bersih tertata merupakan contoh dari penerapan lingkungan yang pintar. Sasaran dari *Smart Environment* adalah mewujudkan tata kelola lingkungan yang baik, bertanggung-jawab, dan berkelanjutan

Tabel 2. 1 Pemetaan Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah pada Dimensi *Smart City*




No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Dimensi <i>Smart City</i>					
						Smart Governance	Smart Branding	Smart Economy	Smart Living	Smart Society	Smart Environment
1	Mewujudkan masyarakat Buleleng yang unggul, kompetitif, dan bertaqwa kepada Tuhan, dengan jalan membangun sumberdaya manusia yang berkualitas, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, serta memiliki daya saing, melalui penyelenggaraan pendidikan dan pelayanan kesehatan yang berkualitas untuk semua warga masyarakat.	Terwujudnya SDM unggul dan kompetitif	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Umur harapan hidup						
				Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	Rata-rata lama sekolah						
					Rata-rata harapan lama sekolah						
					Angka Partisipasi Sekolah (APS)						
				Meningkatnya kesetaraan dan keadilan gender (KKG)	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)						
				Meningkatnya kompetensi ketenaga kerjaan	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)						

No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Dimensi Smart City					
						Smart Governance	Smart Branding	Smart Economy	Smart Living	Smart Society	Smart Environment
2	Mewujudkan masyarakat yang mampu memenuhi kebutuhan hidup, dengan jalan melaksanakan pembangunan bidang ekonomi untuk meningkatkan pendapatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, mengurangi pengangguran dan kemiskinan.	Terwujudnya perekonomian daerah yang berdaya saing	PDRB dan PDRB Perkapita	Meningkatnya produktivitas perekonomian daerah	Pertumbuhan ekonomi daerah						
				Meningkatnya pemberdayaan kawasan perdesaan	Indek Perkembangan Kawasan Perdesaan						
				Stabilitas harga - harga bahan pokok penting	Laju Inflasi						
		Meningkatnya penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial	Persentase penduduk miskin	Menurunnya penduduk miskin	Persentase penduduk miskin						
			Persentase PMKS tertangani	Meningkatnya penanganan PMKS	Persentase penanganan PMKS						
3	Mewujudkan keamanan daerah dan masyarakat,	Terwujudnya stabilitas keamanan dan	Persentase Penanganan, ketertiban	Meningkatnya rasa aman dan	Persentase Penanganan bencana						

No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Dimensi Smart City					
						Smart Governance	Smart Branding	Smart Economy	Smart Living	Smart Society	Smart Environment
	dengan menyelenggarakan pemerintahan yang baik, memperkuat sistem keamanan, meningkatkan peran masyarakat sipil, mendorong pengarusutamaan gender, menegakkan budaya hukum dan politik, dan memantapkan pelaksanaan otonomi daerah.	kenyamanan masyarakat	umum dan perlindungan masyarakat (Trantibum linmas)	nyaman masyarakat	Persentase Penanganan pelanggaran ketertiban umum (Trantibum)						
		Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien	Indeks reformasi birokrasi	Optimal implementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik (<i>Smart Governance</i>)	Terwujudnya reformasi birokrasi daerah yang berkualitas						
					Nilai sistem pemerintahan berbasis (SPBE)						
				Meningkatnya kualitas layanan publik	Persentase perangkat daerah dengan nilai indeks kepuasan masyarakat (IKM) baik						
				Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan	Nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP) daerah						
				Meningkatnya akuntabilitas keuangan	Indeks pengelolaan keuangan daerah						

No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Dimensi Smart City					
						Smart Governance	Smart Branding	Smart Economy	Smart Living	Smart Society	Smart Environment
4	Mewujudkan kebudayaan yang responsif terhadap perkembangan zaman dan lingkungan global, melalui pelestarian, pewarisan dan pengembangan nilai-nilai budaya yang dijiwai oleh agama Hindu, pemantapan kelembagaan, dan aktivitas budaya.	Terwujudnya adat dan budaya lokal yang lestari	Persentase pelestarian adat budaya	Meningkatnya kualitas manajemen ASN	Indeks merit sistem						
					Meningkatnya kualitas pengawasan internal yang akuntabel						
					Persentase Cagar budaya yang lestari						
					Persentase budaya tak benda yang lestari						
					Persentase desa adat yang lestari						
					Meningkatnya pelestarian adat dan budaya						
5	Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan,	Meningkatnya kualitas infrastruktur	Indeks infrastruktur wilayah	Meningkatnya kualitas	Persentase kondisi jalan dan jembatan mantap						

No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Dimensi Smart City					
						Smart Governance	Smart Branding	Smart Economy	Smart Living	Smart Society	Smart Environment
	dengan jalan melaksanakan pembangunan yang seimbang antar lapisan masyarakat, antar sektor, dan antar wilayah, mempertahankan dan meningkatkan kemampuan lingkungan untuk menopang pembangunan, sehingga pembangunan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat saat ini dengan tidak mengurangi hak generasi berikutnya akan sumberdaya alam.			infrastruktur publik	Persentase keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas perhubungan						
					Persentase infrastruktur pengairan yang mantap						
					Persentase capaian pelayanan air minum						
					Persentase pelayanan air limbah						
					Persentase panjang saluran drainase dalam kondisi baik						
					Persentase pengembangan sistem persampahan						
		Meningkatnya kualitas		Meningkatnya kualitas air	Indeks kualitas air						

No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Dimensi <i>Smart City</i>					
						<i>Smart Governance</i>	<i>Smart Branding</i>	<i>Smart Economy</i>	<i>Smart Living</i>	<i>Smart Society</i>	<i>Smart Environment</i>
		lingkungan hidup	Indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH)	Meningkatnya kualitas udara	Indeks kualitas udara						
				Meningkatnya tutupan lahan	Indeks tutupan lahan						
				Terwujudnya kesesuaian peruntukan ruang	Persentase ketaatan pemanfaatan ruang						

Sumber: RPD Kabupateng Buleleng 2023-2026

2.1.3. Analisis Perilaku, Harapan Masyarakat dan *Stakeholder* Daerah

Kabupaten Buleleng berusaha mewujudkan kemudahan akses masyarakat Buleleng berharap agar segera dibangun jalan pintas yang menghubungkan Singaraja dan Denpasar. Masyarakat berharap pengelolaan aset-aset provinsi di Kabupaten Buleleng yang jumlahnya cukup banyak. Dengan begitu aset aset itu bisa lebih dioptimalkan untuk kepentingan masyarakat, juga berharap adanya perhatian lebih pemerintah lewat kucuran anggaran lebih besar untuk mendanai berbagai kegiatan pembangunan di Buleleng seperti peningkatan infrastruktur jalan sekolah dan kesehatan. Masyarakat Buleleng juga berharap agar Buleleng menjadi barometer tatakelola pemerintahan yang baik pertama di Bali. Tabel 2.2, merupakan catatan harapan masyarakat Kabupaten Buleleng:

Tabel 2. 2 Harapan Masyarakat

Infrastruktur	Perlunya peningkatan dan pemerataan pembangunan infrastruktur, dan masyarakat pembangunan bandara segera di realisasikan
Budaya	Penguatan penggunaan bahasa Bali dalam percakapan sehari-hari
Sosial Ekonomi	Perlunya pemerataan pelayanan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial
Lingkungan	Perlunya peningkatan kesadaran masyarakat untuk mengelola sampah dari sumbernya

Sumber: Badan Pusat Statistik Buleleng 2023

2.1.4. Analisis Daya Saing Daerah

Daya saing daerah berkaitan dengan urusan pilihan pemerintah daerah. Secara umum, Daya Saing Daerah dapat diukur antara lain dari tingkat daya saing industri, sumber daya alam, sumber daya manusia, produk unggulan, efisiensi pelayanan birokrasi, efisiensi perdagangan, ketersediaan infrastruktur, keamanan, potensi pasar, kepastian hukum, dan sebagainya. Daya saing daerah merupakan salah satu aspek tujuan penyelenggaraan otonomi daerah sesuai dengan potensi, kekhasan, dan unggulan daerah. Suatu daya saing (*competitiveness*) merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan pembangunan ekonomi yang berhubungan dengan tujuan pembangunan daerah

dalam mencapai tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan. Penetapan Indikator Kinerja Daerah berdasarkan Aspek Daya Saing Daerah dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Penetapan Indikator Kinerja Daerah terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Aspek Daya Saing Daerah di Kabupaten Buleleng

NO	ASPEK/FOKUS/BIDAN G URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada Awal (2021)	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD (2026)
			2023	2024	2025	2026	
			ASPEK DAYA SAING DAERAH				
1.1.	Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB	21,01	21,01	21,03	21,04	21,05	21,05
1.2.	Indek Perkembangan Kawasan Perdesaan	60,49	61,50	62,00	63,00	64,50	64,50
1.3.	Nilai Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2,30	3,10	3,20	3,30	3,40	3,40
1.4.	Persentase Perangkat Daerah dengan nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) baik	85	90	90	90	95	95
1.5.	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Daerah	68,85	70	70,01	70,01	70,02	70,02
1.6.	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	0	77	78	79	80	80

Sumber : RPD Kab.Buleleng

2.1.5. Analisis Kelembagaan dan Pemerintah Daerah yang relevan dengan Kebutuhan Seluruh *Stakeholder* yang Ada

Kabupaten memiliki 9 kecamatan, 19 Kelurahan, dengan jumlah total 6.906 ASN dan jumlah penduduk 825, dengan support 39 SKPD Kabupaten Buleleng yang terdiri dari:

- | | |
|---|----------------------------------|
| 1) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga | 20) Dinas Kebudayaan |
| 2) Dinas Kesehatan | 21) Dinas Arsip dan Perpustakaan |
| 3) R S U D | 22) Dinas Pariwisata |
| 4) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang | 23) Dinas Pertanian |
| 5) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan | 24) Sekretariat Daerah |
| | 25) Sekretariat DPRD |

- | | |
|---|--|
| 6) Satuan Polisi Pamong Praja | 26) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
| 7) Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 27) Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah |
| 8) Dinas Pemadam Kebakaran | 28) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| 9) Dinas Sosial | 29) Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah |
| 10) Dinas Tenaga Kerja | 30) Inspektorat Daerah |
| 11) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 31) Kecamatan Gerokgak |
| 12) Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan | 32) Kecamatan Seririt |
| 13) Dinas Lingkungan Hidup | 33) Kecamatan Busungbiu |
| 14) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 34) Kecamatan Banjar |
| 15) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | 35) Kecamatan Sukasada |
| 16) Dinas Perhubungan | 36) Kecamatan Buleleng |
| 17) Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik | 37) Kecamatan Sawan |
| 18) Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | 38) Kecamatan Kubutambahan |
| 19) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 39) Kecamatan Tejakula |
| | 40) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |

2.2. Analisis Kondisi Eksternal

Pada bagian ini sebagaimana sudah merujuk pada misi yang telah dikonstruksikan dalam dokumen RPD Kabupaten Buleleng 2023-2026, untuk menuju program *Smart City* maka identifikasi awal dapat dirumuskan terkait dengan tren perkembangan Kabupaten Buleleng. Tentu beberapa aspek yang akan mempengaruhi kebijakan dan standar pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat atau *stakeholder* lainnya meliputi politik, ekonomi, sosial, lingkungan dan legal

2.2.1. Analisis Tren dan Perkembangan Politik

Seiring dengan perkembangan zaman tingkat modernisasi dan globalisasi informasi serta keberhasilan gerakan emansipasi perempuan dan feminisme, sikap dan peran perempuan khususnya, pandangan tentang dunia politik mulai mengalami pergeseran. Studi kausalitas politik educational menunjukan beberapa kelemahan baik dari proses maupun hasilnya, antara lain dalam aspek metode dan media pendidikan politik itu sendiri. Dimana pola indoktrinasi dan provokasi lebih mendominasi proses pendidikan politik selama ini kalangan masyarakat. Hal ini berdampak

pada lemahnya pemahaman dan wawasan masyarakat tentang politik, yang pada akhirnya berdampak pada rendahnya kapabilitas politik masyarakat secara umum

Di dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, hubungan antara kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dengan perangkat daerah secara jelas dapat dilihat melalui keterkaitan antara program perangkat daerah beserta indikator kinerja yang menjadi landasan proses penyelenggaraan pemerintahan dengan amanah dalam RPD yang direpresentasikan dalam permasalahan, isu strategis, tujuan, sasaran hingga indikator sasaran strategis di RPD. Sehingga, dalam perumusan program perangkat daerah perlu didukung oleh RPD agar program masing-masing perangkat daerah disusun dengan melihat tujuan dan sasaran pembangunan daerah.

Perkembangan politik yang ada di Kabupaten Buleleng memetakan perkembangan partai politik yang semakin massif, dengan didasari oleh aspirasi dan kondisi lingkungan masyarakat yang membutuhkan perantara dalam menentukan kebijakan, adapun sebaran anggota dewan berdasarkan partai di Kabupaten Buleleng sebagai berikut:

Tabel 2. 3 Sebaran Anggota Dewan Berdasarkan Partai

Partai Politik	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
PDIP	14	4	18
Golkar	7	-	7
Gerindra	4	1	5
Nasdem	3	2	5
Hanura	5	-	5
Demokrat	2	1	3
PKB	1	-	1
Perindo	1	-	1

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Buleleng, 2023

Jumlah anggota dewan di Kabupaten Buleleng didominasi oleh partai PDIP dalam menguasai perlemen di daerah. Hal ini menunjukkan bahwa ruang lingkup politik Kabupaten Buleleng ketertarikan masyarakat dalam memilih wakil rakyat dari partai PDIP cukup tinggi. Beberapa faktor dipengaruhi dari keterwakilan warga masyarakat dalam menyampaikan aspirasinya melalui

partai tersebut sehingga terjadi pendapatan suara di Kabupaten Buleleng itu tinggi untuk partai PDIP.

2.2.2. Analisis Tren dan Perkembangan Ekonomi

Kabupaten Buleleng merupakan salah satu Kabupaten yang sedang berkembang pesat yang ada di Bali. Sebagai Kabupaten yang padat akan penduduk dan aktivitas ekonomi, Kabupaten Buleleng kian hari kian membenahi diri agar bisa bersaing di Bali untuk menarik para wisatawan. Kabupaten Buleleng yang memiliki luas wilayah sebanyak 27.89 Km² yang terdiri dari sawah, tegalan, perkebunan, pekarangan, kuburan dan lain-lain. Kabupaten Buleleng memiliki penduduk sebanyak 82.827 jiwa. Sebagai kota yang memiliki kecenderungan penduduk yang tinggi dan dapat melayani seluruh wilayah perencanaan serta dalam skala regional serta di dukung oleh adanya fasilitas dan sarana prasarana. Perekonomian Kabupaten Buleleng lebih besar disektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang tersebar disembilan Kecamatan, yaitu Kecamatan Gerokgak, Busungbiu, Seririt, Banjar, Sukasada, Buleleng, Sawan, Kubutambahan, dan Tejakula. Kecamatan Buleleng merupakan kecamatan yang memiliki jumlah UMKM terbanyak, yaitu 278 UMKM.

Sebagaimana tertuang dalam RPD Kabupaten Buleleng 2023-2026 yang menjadi kelemahan dan kekurangan adalah sulitnya akses permodalan koperasi dan usaha kecil menengah, rendah kualitas kelembagaan dan organisasi manajemen koperasi berimbas kepada kurang optimalnya kinerja koperasi, pemanfaatan teknologi oleh Koperasi dan Usaha Kecil Menengah masih kurang berdampak kepada lemahnya akses pasar, belum optimalnya identifikasi potensi investasi kabupaten Buleleng, belum ditetapkannya regulasi terkait penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis resiko, tingkat kesadaran pelaku usaha belum sepenuhnya memahami perubahan regulasi, selain itu, kondisi ekonomi tingkat kemiskinan masyarakat tahun 2022 berada di 0.60 dan indeks keparahan kemiskinan berada di angka 0.09 :

Tabel 3. 1 Tabel Kondisi Ekonomi Tingkat Kemiskinan Kabupaten Buleleng

Tahun	Indeks Kedalaman Kemiskinan	Indeks Keparahan Kemiskinan
2018	0,62	0,13
2019	0,72	0,14
2020	0,53	0,08
2021	0,74	0,14
2022	0,60	0,09

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Buleleng, 2023

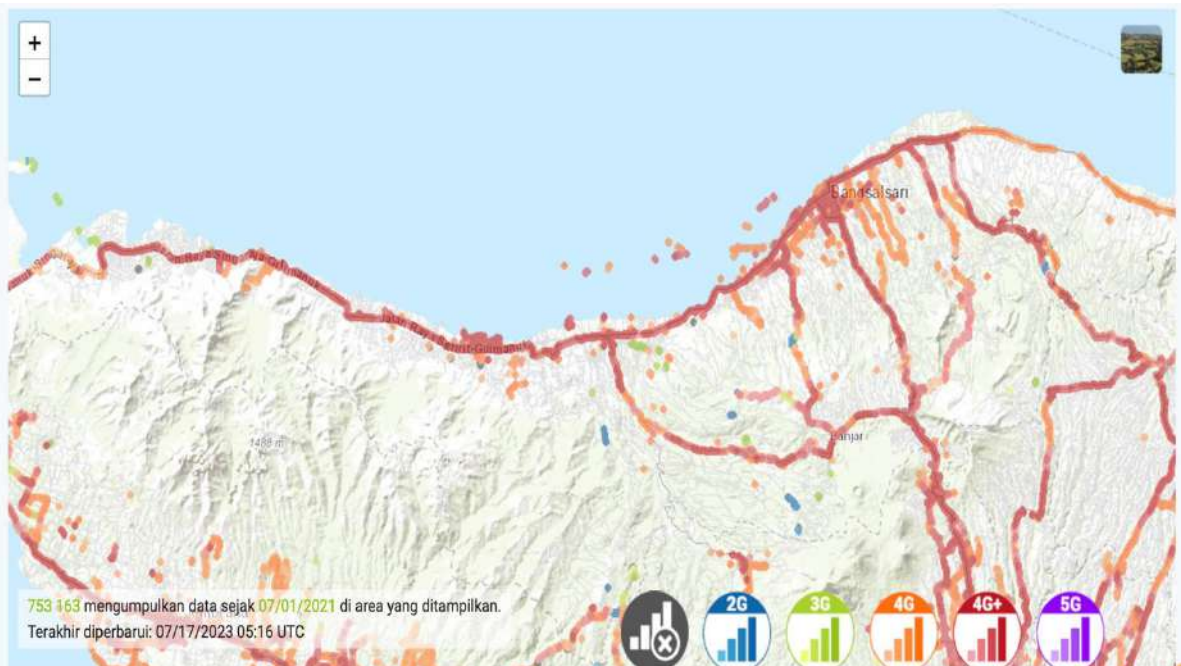
Kabupaten Buleleng perlu menurunkan indeks kemiskinan dengan memprioritaskan kualitas sumber daya manusia melalui program strategis pemerintah daerahnya.

2.2.3. Analisis Tren dan Perkembangan Sosial Budaya

Kabupaten Buleleng sebagai daerah tujuan wisata memiliki beberapa kelemahan, sehingga wisatawan yang berkunjung relative kecil bila dibandingkan daerah yang lainnya di Provinsi Bali. Kabupaten Buleleng memiliki potensi banyak daya Tarik wisata alam dan budaya yang dapat dikemas ke dalam berbagai jenis paket wisata seperti wisata spiritual dan ekowisata yang sedang disegani oleh wisatawan, terutama wisatawan mancanegara. Namun masih terdapat kelemahan di bidang pariwisata, seperti masih kurangnya pengetahuan dan keterampilan tenaga pariwisata dan ekonomi kreatif pengembangan destinasi pariwisata belum optimal, masih banyaknya usaha industri pariwisata yang belum memiliki standar usaha, belum optimalnya pengembangan pariwisata tematik di kawasan maupun desa wisata, kunjungan wisatawan dan lama tinggal wisatawan masih rendah, aksesibilitas menuju destinasi pariwisata masih belum optimal, penerapan konsep pengembangan kepariwisataan yang berbasis budaya dan lingkungan belum terintegrasi, belum optimalnya kerjasama antara pemerintah daerah, swasta, dan masyarakat dalam pengelolaan destinasi wisata. Lemahnya perlindungan dan pengenalan peninggalan sejarah dan nilai budaya kepala masyarakat, serta pengembangan terhadap kesenian lokal, lemahnya pemberdayaan masyarakat khususnya masyarakat adat yang ada di setiap wilayah menjadi sumber kelemahan perkembangan sosial budaya. Penurunan eksistensi Budaya lokal Bali mulai terlihat dari turunnya penggunaan Bahasa Daerah Bali dalam berkomunikasi sehari-hari, lebih-lebih terhadap penguasaan aksara Bali, pemahaman masyarakat terhadap warisan budaya termasuk nilai-nilai budaya dan cagar budaya masih sangat kurang, jika tidak dilakukan pelestarian, Buleleng lambat laun akan kehilangan ciri khas Budaya aslinya.

2.2.4. Analisis Tren dan Perkembangan Teknologi

Kabupaten Buleleng yang memiliki 40 SKPD untuk melayani masyarakat baru terdapat 36 SKPD yang memiliki sistem informasi, sedangkan yang lain belum. Hal ini yang perlu mendapatkan perhatian guna memberikan layanan publik kepada masyarakat. Karena salah satu cara untuk meningkatkan layanan publik kepada masyarakat adalah menggunakan aplikasi sistem informasi atau sistem informasi layanan publik berbasis teknologi informasi dan komunikasi, sehingga layanan yang diberikan tersebut dapat dilakukan secara cepat, tepat, transparan dan terawasi dengan baik. Kemudian pada saat ini belum terintegrasinya aplikasi-aplikasi yang ada di Pemkab Buleleng, dari hasil kajian tentang Data Center Pemkab Buleleng yang telah dilakukan, ternyata dari sejumlah sistem informasi yang telah ada saat ini terdapat beberapa saja yang terintegrasi satu sama lain. Sehingga menyebabkan terjadinya inefisiensi data, dimana satu data yang sama digunakan oleh beberapa sistem informasi. Kemudian dalam perkembangan akses sinyal pada Kabupaten Buleleng persebaran dapat dilihat pada Gambar 3.1



Gambar 3. 1 Peta Sebaran Sinyal di Kabupaten Buleleng

Sumber : nperf.com

Kabupaten Buleleng terus peningkatan kualitas sarana prasarana berbasis IT dalam rangka keamanan transaksi data dan informasi publik, mengembangkan infrastruktur TIK. Persebaran sinyal untuk mengakses internet belum merata, beberapa tempat masih sulit mengakses internet. Pemerataan akses internet menjadi tantangan dikarenakan kondisi geografis Kabupaten Buleleng, seperti di Kecamatan Tejakula dan Kecamatan Busungbiu, *blankspot area* akan berdampak lambatnya masyarakat mendapatkan informasi.

2.2.5. Analisis Tren dan Perkembangan Lingkungan

Masalah lingkungan yang di Kabupaten Buleleng adalah penanganan persoalan sampah, volume sampah yang dihasilkan biasanya sebanding dengan tingkat konsumsi terhadap barang/material yang digunakan sehari-hari. Belum optimalnya pengelolaan sampah di Kabupaten Buleleng karena rendah tingkat kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah, masyarakat masih dirasa kurang dalam menjaga lingkungan yang bersih. Selain itu sampah yang mengandung B3 dan limbah B3 yang dihasilkan masyarakat harus mendapat perhatian khusus. Selain memerlukan pengelolaan sampah, jenis sampah spesifik yang potensi pencemaran lingkungannya sangat tinggi ini tidak boleh dicampur dengan jenis sampah lainnya. Berikut Target dan capaian pengelolaan sampah di Kabupaten Buleleng:

Tabel 3. 2 Tabel Angka Persoalan Sampah Kabupaten Buleleng

Tahun	Jumlah Timbulan Sampah	Pengurangan				Penanganan			
		Target Jakstrada		Capaian		Target Jakstrada		Capaian	
2018	119.939.00	26.827.08	18 %	13.239.66	11.04	108.798.72	72 %	6.214.04	5.18%
2019	122.337.78	30.404.02	20 %	7.574.85	6.19%	121.616.11	80 %	52.846.93	43.20 %
2020	124.791.66	27.454.21	22 %	10.397.65	8.33%	93.593.00	75 %	53.098.88	42.55 %
2021	158.161.75	37.958.82	24 %	25.480.40	20.32 %	117.039.70	74 %	54.326.23	43.32 %

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Buleleng, 2023

Tabel 3.2 menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Buleleng terus berupaya untuk menangani persoalan sampah, hal ini dapat dilihat dari angka pencapaian yang tiap tahun nya meningkat. Penanganan sampah tidak hanya ditanggulangi dalam pengelolaan nya saja, akan tetapi kesadaran masyarakat juga sangat penting karena dalam penanganan sampah dibutuhkan kolaborasi antara Pemerintah Kabupaten Buleleng dan masyarakat untuk mengurangi intensitas sampah untuk menjadi pengelolaan yang baik. Selain itu di Kabupaten Buleleng masih belum terselenggaranya perencanaan lingkungan hidup yang baik karena jika mempunyai perencanaan yang baik akan mendatangkan manfaat sebagai berikut:

1. Sarana pendukung pengambilan keputusan dalam pemanfaatan ruang
2. Mengidentifikasi dan mempertimbangkan peluang-peluang baru yang melalui kajian secara sistematis dan cermat;
3. Dapat melindungi aset sumber daya alam serta lingkungan hidup untuk hidup generasi yang berkepanjangan;
4. Memfasilitasi kerjasama lintas sektor atau batas pencegahan konflik dengan berbagai sumber daya alam;
5. Penanganan pencemaran lingkungan sebagai bentuk menjaga kelestarian alam.

2.2.6. Analisis Tren dan Perkembangan Peraturan Perundang-undangan

Aspek dalam perkembangan produk hukum ataupun peraturan kebijakan yang dibuat kabupaten Buleleng berfungsi untuk memberikan kepengaturan yang bertujuan untuk bagi kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Seluruh misi dari arah pembangunan Kabupaten Buleleng merupakan sebuah satu kesatuan yang tentunya bertujuan untuk pengembangan kota. Peraturan Bupati Kabupaten yang merupakan produk hukum konteksnya adalah membuat perubahan masyarakat serta percepatan pelayanan.

a. Peraturan Perundang-undangan

Berikut peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum dan mendukung pengembangan *Smart City* di Indonesia:

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
4. Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 2019 Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
8. Peraturan Pemerintah No.34 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Kawasan Perkotaan
9. Peraturan Pemerintah No.13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
10. Peraturan Pemerintah No.50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025
11. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
12. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia
13. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024
14. Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak
15. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak.

16. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak.
17. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak.
18. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Panduan Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak.
19. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 13 Tahun 2016 tentang Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Komunikasi dan Informatika;
20. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika;

b. Standar Nasional Indonesia

Di samping peraturan perundang-undangan, terdapat Standar Nasional Indonesia yang terkait dengan *Smart City* yang merupakan adopsi dari standar International Standard Organization (ISO), yaitu:

1. SNI ISO 37120:2018 tentang pembangunan Perkotaan dan Masyarakat yang Berkelanjutan – Indikator-Indikator untuk Layanan Perkotaan dan Kualitas Hidup
2. SNI ISO 37122:2019 tentang Perkotaan dan masyarakat berkelanjutan – Indikator untuk kota cerdas.



Gambar 2. 1 Hubungan antara standar ISO 37120 dan 37122

Sumber : Materi Bimtek 1 *Smart City* 2023

Perkembangan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pembentukan Master Plan *Smart City* di Kabupaten Buleleng tercantum dalam Keputusan Bupati Buleleng Nomor 100.3.3.2/263/HK/2023 tentang Dewan *Smart City* Kabupaten Buleleng dan Keputusan Bupati Buleleng Nomor 100.3.3.2/264/HK/2023 Tentang Tim Pelaksana *Smart City* Kabupaten Buleleng, produk hukum yang meliputi Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Keputusan Sekretaris Daerah dan Keputusan Bupati Buleleng lainnya (Tabel 3.3) juga ikut mendukung pembangunan *Smart City* Kabupaten Buleleng

Tabel 3. 3 Produk Hukum di Kabupaten Buleleng

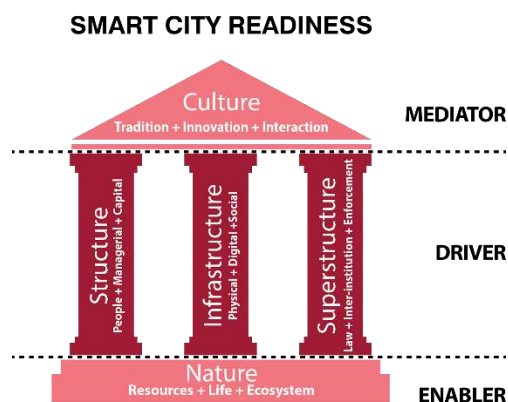
No	Produk Hukum	Jumlah
1	Peraturan Daerah	130
2	Peraturan Bupati	170
3	Keputusan Sekretaris Daerah	2
4	Keputusan Bupati Buleleng	20
Jumlah		322

Sumber : <https://jdih.bulelengkab.go.id>

3. ANALISIS KESIAPAN DAERAH

Untuk menilai kondisi daerah saat ini guna mendapatkan gambaran kapasitas dan kapabilitas daerah dalam menerapkan program-program pembangunan *Smart City* dilakukan melalui penyusunan analisis kesiapan daerah. Terdapat lima aspek utama yang menjadi komponen kajian, yaitu:

1. *Nature* atau komponen alamiah dari suatu daerah, yaitu sumber daya alam dan ekosistem lingkungan hidup.
2. Struktur, atau komponen inti dari sebuah daerah, yaitu sumber daya manusia, kapasitas keuangan daerah, dan sumber daya pemerintah daerah.
3. Infrastruktur, atau komponen sarana dan prasarana fisik daerah yang terdiri dari infrastruktur sosial, infrastruktur digital, dan infrastruktur fisik lainnya.
4. Suprastruktur, atau komponen kelembagaan dan non-fisik yang terdapat di daerah seperti lembaga sosial dan pemerintahan, regulasi dan kebijakan, dan hubungan antar-lembaga.
5. *Culture*, atau komponen budaya di daerah, seperti kesiapan masyarakat dan tradisi.



Gambar 3. 2 Aspek Kesiapan *Smart City* Daerah

Sumber: Materi Bimbingan Teknis 1 *Smart City* 2023

3.1. Analisis Nature

Analisis *nature* merupakan sebuah kondisi dimana terdapat potensi-potensi daerah dan lingkungan daerah untuk bisa dikembangkan menjadi sebuah sumber daya. Hal ini dapat dilihat bahwa sebuah kondisi lingkungan mempengaruhi budaya, sosial serta kebiasaan masyarakat setempat. Analisis *nature* dapat dikategorikan sebagai analisis untuk menunjang jangka panjang daerah dengan melihat kondisi-kondisi tertentu

3.1.1. Kondisi Geografi dan Demografi

Kabupaten Buleleng berada di belahan utara Pulau Bali, memanjang dari barat ke timur, dengan batas-batas di sebelah barat Kabupaten Jembrana, di sebelah selatan Kabupaten Tabanan, Badung, dan Bangli serta bagian timur berbatasan dengan Kabupaten Buleleng (Gambar 3.3). Sedangkan di sebelah utara berbatasan dengan laut Jawa dan Bali. Kabupaten Buleleng memiliki luas wilayah 1.365.88 km² atau 24.25% dari luas Provinsi Bali, dengan Panjang pantai 157 Km. secara administrasi Kabupaten Buleleng terdiri dari 9 Kecamatan, 129 Desa, 19 Kelurahan, dan 169 Desa Adat. Letak Kabupaten Buleleng secara geografis berada pada 8° 03' 40" – 8°23'00" LS dan 114°25'55"-115°27'28"BT berada di belahan Utara Pulau Bali memanjang dari Barat ke Timur. Kondisi geografis wilayah Kabupaten Buleleng cukup bervariasi, sebagian berupa daerah berbukit dan bergunung yang membentang di bagian selatan. Sedangkan di bagian Utara sepanjang pantai merupakan dataran rendah yang sempit dan kurang landai. Tipologi geografis yang demikian dikenal sebagai Nyegara Gunung, posisi yang cukup strategis menurut konsep Hindu yang menganut sistem hulu (ulun) dan hilir (teben)

Kabupaten Buleleng memiliki batas-batas wilayah dengan berbagai mata angin sebagai berikut:

1. Sebelah Barat: Kabupaten Jembrana
2. Sebelah Utara: Laut Bali
3. Sebelah Timur: Kabupaten Buleleng
4. Sebelah Selatan: Kabupaten Jembrana, Tabanan, Badung dan Bangli

Kabupaten Buleleng memiliki Ibukota dengan sebutan Kota Singaraja yang mana dikenal sebagai kota Pendidikan. Selain itu, Kabupaten Buleleng juga merupakan daerah perkebunan yang

Wilayah Kabupaten Buleleng yang luasnya 136.588 Ha secara administrasi terbagi dalam 9 Kecamatan dengan 129 desa, 19 kelurahan, 563 dusun/banjar dan 63 lingkungan.

Tabel 3. 4 Pembagian Daerah Administrasi di Kab.Buleleng

No	Kecamatan	Desa	Kelurahan	Dusun/banjar	Lingkungan	Desa Pakraman
1	Gerokgak	14	-	78	-	14
2	Seririt	20	1	85	5	25
3	Banjar	17	-	74	17	17
4	Busungbiu	15	-	43	-	16
5	Sukasada	14	1	64	5	21
6	Buleleng	12	17	41	53	21
7	Sawan	14	-	69	-	18
8	Kubutambahan	13	-	49	-	22
9	Tejekula	10	-	60	-	15
Jumlah		129	19	563	63	169

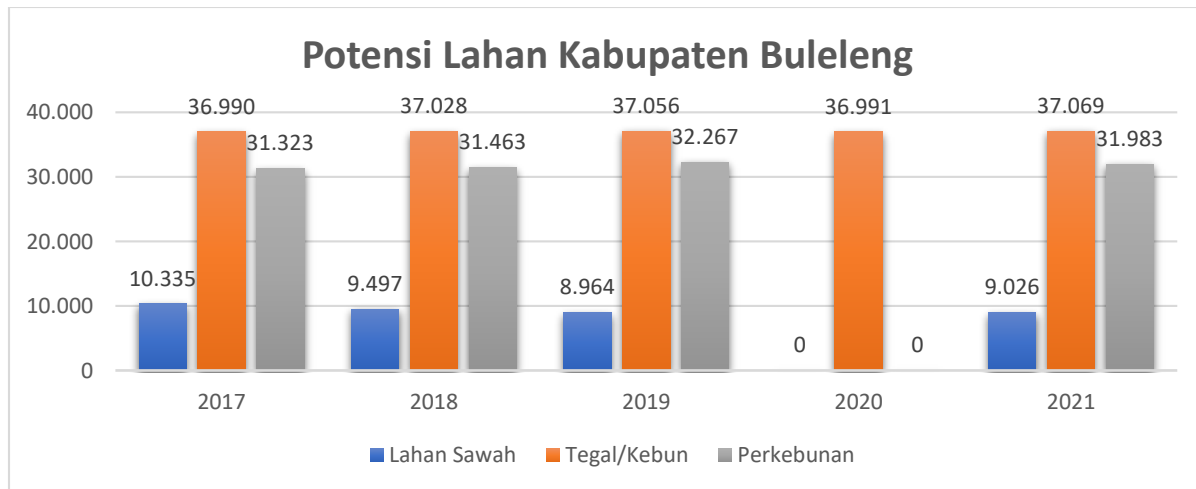
Sumber : <https://tarubali.baliprov.go.id/>

Iklim Kabupaten Buleleng yang terbagi menjadi 2 musim yaitu hujan dan kemarau sama seperti daerah lainnya punya intensitasnya tersendiri. intensitas hujan di Kabupaten Buleleng pada tahun 2022 pada bulan Februari dan Maret intensitasnya sangat tinggi. Kabupaten Buleleng berdasarkan klasifikasi *schmidthI* dan *Fergusoh* bervariasi mulai dari tipe iklim C (nilai Q =50,68) di Wanagiri Kecamatan Sukasada dan sekitarnya, sampai tipe F (nilai Q=170,73-244,33) di Pemuteran Kecamatan Gerogak dan sekitarnya. Suhu udara rata-rata berkisar 26,9⁰C-30,4⁰C; kelembaban udara rata-rata mencapai 78%-84%, curah hujan antara 1.913,6-2.812,6 mm/tahun, dan penyinaran matahari mencapai 66-77%. Kabupaten Buleleng memiliki iklim tropis yang dipengaruhi oleh angin musim dan terdapat musim kemarau dan penghujan. Faktor ketinggian tempat menentukan besarnya curah hujan. Curah hujan terendah di daerah pantai dan tertinggi di daerah pegunungan.

3.1.2. Pertanian, Perkebunan dan Perikanan

Saat ini sektor pertanian merupakan penyumbang terbesar PDRB Kabupaten Buleleng, jika dilihat berdasarkan data menunjukkan bahwa produk pertanian paling utama adalah pada sawah dengan jumlah produksi pada tahun 2021 sekitar 106.660,5 ton dengan luas panen seluas 19.014,07 Ha. Semakin langkanya lahan pertanian menyebabkan terjadinya persaingan penggunaan lahan,

sehingga mendorong pemanfaatan sumberdaya lahan secara optimal, terarah dan berkelanjutan dengan memperhatikan berbagai kebutuhan. Upaya peningkatan produktivitas pada dengan mengoptimalkan sumberdaya lahan yang masih tersisa dapat dilakukan dengan lebih efisien bila dilaskanakan pada lahan-lahan yang sesuai atau lahan yang dengan kondisi fisik yang sangat mendukung dan juga penggunaan teknologi tepat guna.



Gambar 3. 4 Potensi Lahan Kabupaten Buleleng

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Buleleng, 2023

Sektor pertanian merupakan satu aspek yang sangat penting dalam pertumbuhan ekonomi andalan hal ini terdapat di Kabupaten Buleleng. Tentu dalam beberapa tahun terakhir, kontribusi bidang pertanian terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Buleleng masih tetap mendominasi dibandingkan sektor ekonomi yang lainnya. Jika kita lihat sektor unggulan adalah sektor yang dapat dikembangkan lebih lanjut dan bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Sektor unggulan terbentuk dari pengembangan produksi terutama dalam bidang pertanian yang mana hal itu sangat baik di Kabupaten Buleleng. Sektor unggulan juga tidak hanya mampu memenuhi permintaan dari dalam daerah akan tetapi juga mampu memenuhi kebutuhan luar daerah, mengapa dikatakan sebagai sektor unggulan dalam bidang pertanian sebab sektor unggulan ini memiliki keunggulan baik secara maupun secara kompetitif. Berikut Luas Panen, produktivitas, Produksi Padi dan Setara Beras di Kabupaten Buleleng sebagai sektor ekonomi unggulan yang menjadi fokus dalam meningkatkan produktivitas pertanian.

3.1.3. Sektor Perkebunan

Perkebunan merupakan salah satu subsektor pertanian yang memiliki peran penting dalam pembangunan nasional. Dalam undang-undang dasar nomor 18, 2004 (pasal 4) tentang perkebunan subsektor perkebunan berfungsi meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Dengan hal ini Kabupaten Buleleng yang mempunyai 9 kecamatan memiliki potensi subsektor perkebunan. Kabupaten Buleleng memiliki wilayah pengembangan tanaman perkebunan rakyat (monokultur) yang cukup luas, adapun jumlah produksi komoditas perkebunan tahun 2021 mencapai 22.801 Ton. Komoditas yang diusahakan cukup beragam sesuai daerah adaptasi masing-masing jenis tanaman yaitu kopi robusta, cengkeh, vanili dan kakao di dataran sedang sedangkan kopi arabika di dataran tinggi dan kelapa dalam, tembakau Virginia serta jambu mete di dataran rendah.

Tabel 3. 5 Potensi Luas Perkebunan subsektor Perkebunan Rakyat Buleleng 2021

No	Komoditi	Luas Lahan (Hektar)	Produksi
1	Kopi Robusta	9.743,48	5.379,38
2	Kopi Arabika	1.938,45	1.114,49
3	Cengkeh	7.763,82	2.288,19
4	Kapok	234	35,57
5	Kakao	1.069,33	547,36
6	Tembakau Virginia	364,00	55,00
7	Tembakau Rajangan	50	70
8	Jambu Mete	1.444,25	494,61
9	Kelapa Dalam	8.339,54	9.482,39
10	Kelapa Genjah	188,03	97,41
11	Aren	93	30,17

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Buleleng, 2023

Jika dibandingkan dengan tanaman hortikultura, pasar komoditi perkebunan relatif lebih terbuka dan memiliki harga yang relatif stabil. Khusus untuk kopi arabika, petani kopi Kabupaten Buleleng sudah mampu menghasilkan biji kopi organik dan mendapatkan sertifikat *rainforest*. Namun pengembangan budidaya tanaman perkebunan masih menjadi tantangan karena perubahan iklim. Tantangan lainnya adalah belum adanya kepastian pasar dan fluktuasi harga seperti harga buah buahan yang selalu berubah.

3.1.4. Sektor Perikanan

Kabupaten Buleleng memiliki luas wilayah pesisir yang sangat potensial untuk dapat dioptimalkan pemanfaatannya, sehingga hasil perikanan yang ada di laut dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk kesejahteraan masyarakat. Sektor perikanan yang merupakan bagian dari sektor pertanian juga memberi kontribusi penting Kabupaten Buleleng. Kajian strategis pada sektor kelautan dan perikanan adalah pengembangan teknologi di bidang perikanan tangkap, di bidang perikanan budidaya, sistem pengolahan produk perikanan untuk meningkatkan nilai tambah dalam negeri, sekaligus meningkatkan kesejahteraan nelayan dan pembudidaya ikan lain. Sektor kelautan dan perikanan perlu menjadi perhatian yang sangat penting sebab sumberdaya yang dimiliki oleh Kabupaten Buleleng sangat potensial dengan Panjang garis pantai 157,05 km.

Pembangunan sektor pertanian dewasa ini diarahkan untuk menuju pertanian yang efisien dan tangguh, mengingat kebutuhan hasil-hasil pertanian yang terus meningkat sejalan dengan meningkatnya jumlah penduduk. Pertanian lahan kering merupakan kegiatan budidaya yang banyak mengalami hambatan. Salah satu faktor penghambatnya adalah terbatasnya air keberhasilan peningkatan produksi tanaman hortikultura di Indonesia tidak terlepas dari peran irigasi yang merupakan salah satu faktor produksi penting. Usaha untuk mencapai target produksi disatu sisi, dan teknologi tepat dan murah disisi lain telah mendorong penggunaan air secara berlebihan tanpa mempertimbangkan efisiensi penggunaan sumber daya yang tersedia Teknologi di bidang irigasi merupakan salah satu faktor penentu dalam upaya meningkatkan produksi pertanian, khususnya pada pertanian lahan kering. Oleh karena itu, sejalan dengan perkembangan dan kemajuan di bidang irigasi teknologi irigasi yang umum dilakukan oleh petani perlu disempurnakan berdasarkan penelitian dan pengkajian yang terbaru.

Irigasi tetes merupakan salah satu teknologi mutakhir dalam bidang irigasi yang telah berkembang hampir di seluruh dunia. Pada hakekatnya teknologi ini sangat cocok diterapkan pada kondisi lahan kering berpasir, air yang sangat terbatas, iklim yang kering dan komoditas yang diusahakan mempunyai nilai ekonomi yang tinggi. Namun tidak bisa dipungkiri bahwa teknologi ini mempunyai beberapa kelemahan, diantaranya diperlukan investasi yang cukup besar pada tahap awal, pemeliharaan jaringan irigasi yang sangat intensif serta hambatan-hambatan lain seperti penyumbatan (*clogging*) pada lubang-lubang tetes (*emitter*).

3.1.5. Energi

Kapasitas Listrik yang terpasang adalah total kapasitas dari seluruh mesin pembangkit listrik yang dioperasikan, listrik yang dibangkitkan adalah jumlah listrik yang dibangkitkan oleh seluruh mesin pembangkit listrik dan dinyatakan dalam satuan dasar *Watt hours*. Jumlah listrik/gas/ air bersih yang terjual adalah banyaknya listrik/gas/air bersih yang di salurkan kepada para pelanggan. Tabel 3.6 menunjukkan peningkatan jumlah pelanggan listrik di Kabupaten Buleleng terus meningkat.

Tabel 3. 6 Jumlah Pelanggan Listrik Menurut Kecamatan di Kabupaten Buleleng, 2018-2022

No	Kecamatan	2018	2019	2020	2021	2022
1	Garogak	24584	23569	30493	-	-
2	Seririt	31936	28721	27454	-	-
3	Busungbiu	12311	10981	14930	-	-
4	Banjar	19222	22670	23624	-	-
5	Sukasada	22372	21618	28407	-	-
6	Buleleng	46346	67873	57651	-	-
7	Sawan	17571	23000	21756	-	-
8	Kubutambahan	16102	16606	18654	-	-
9	Tejakula	16121	18601	19954	-	-
Kabupaten Buleleng		206565	233639	242925	-	-

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Buleleng, 2023

3.1.6. Aspek Lingkungan Hidup

Kajian lingkungan hidup dilakukan untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan keberlanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan kebijakan, rencana dan program. Telaah terhadap KLHS merupakan bentuk sinkronisasi agar dalam penyusunan rencana strategis Kabupaten Buleleng. Selain itu menyediakan data tentang kajian layanan/jasa ekosistem, kajian efisiensi pemanfaatan sumber daya alam, kajian tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi, kajian terhadap perubahan iklim. Kemudian memberikan evaluasi terhadap kebijakan, rencana dan program yang telah disusun oleh pemerintah Kabupaten Buleleng sesuai dengan kajian.

Kabupaten Buleleng akan menciptakan kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan sesuai dengan kondisi dan kemampuan lingkungan, sehingga fungsi lingkungan dan keselamatan masyarakat akibat degradasi lingkungan data diminimalkan.

3.2. Analisis Struktur Daerah




Analisis struktur daerah merupakan gambaran dimana kondisi mempunyai sumber daya yang tersedia. Analisis ini berkaitan erat dengan kualitas daerah yang mampu memelihara dan merawat untuk mendukung program *Smart City* daerah yaitu Kabupaten Buleleng. Untuk lebih detail dapat dilihat sebagai uraian tabel berikut.

3.2.1. Analisis Kualitas SDM Daerah

Analisis kualitas sumber daya daerah merupakan tolak ukur dari kualitas manusia yang dimiliki oleh setiap daerah. Hal ini Kabupaten Buleleng memiliki sebuah potensi-potensi sumber daya manusia yang bisa diberdayakan untuk kemajuan daerah dalam program *Smart City*. Kecakapan yang dimiliki oleh setiap individu berbeda-beda maka pemerintah harus bisa memetakan mana prioritas sumber daya manusia unggulan dan mana sumber daya manusia yang perlu peningkatan kapasitas.

Tabel 3. 7 Analisis Kualitas SDM Daerah

No	Komponen	Nilai/ Kondisi	Interpretasi		
			Baik	Sedang	Kurang
1	Jumlah komunitas minat bakat/ hobi/ kreatif di daerah	Baik	✓		
2	Adanya komunitas pengembang/ developer perangkat lunak TIK di daerah	Baik	✓		
3	Adanya digital startup di daerah	Baik	✓		
4	Adanya perguruan tinggi di daerah	Baik	✓		
5	Jumlah penerima beasiswa perguruan tinggi dari pemerintah daerah	Baik	✓		
6	Jumlah tindakan pelanggaran ketertiban umum dalam satu tahun	30%	✓		

No	Komponen	Nilai/ Kondisi	Interpretasi		
			Baik	Sedang	Kurang
7	Jumlah angka kriminalitas dalam satu tahun	0			
8	Jumlah tindakan perusakan fasilitas umum dalam satu tahun	0			
9	Jumlah kegiatan tawuran antar kelompok warga dalam satu tahun	0			

Sumber : Kertas Kerja Bimbingan Teknis 1 Kabupaten Buleleng

Buleleng *Creative Movement*, Melor Bali dan Komunitas Kreaititas Tanpa Batas, menjadi wadah bagi komunitas kreatif di Kabupaten Buleleng, bahkan Kabupaten Buleleng menyebut dirinya sebagai Kabupaten Kreatif. Dari segi jumlah pengembang perangkat lunak tidak diketahui berapa jumlah pengembang perangkat lunak di Kabupaten Buleleng, namun cukup banyak iklan yang mencantumkan pembuatan jasa website berlokasi di Kabupaten Buleleng. Terdapat Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri (STAHN) Mpu Kuturan Singaraja, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Buleleng (STIKes Buleleng), hal ini pun menunjukkan adanya siswa yang menerima beasiswa untuk melanjutkan dan meneruskan pendidikannya. Jumlah pelanggaran ketertiban umum, pengrusakan fasilitas umum dan kegiatan tawuran masih berada dalam kondisi yang baik sehingga menunjukkan Kabupaten Buleleng siap menjadi kabupaten pintar.

3.2.2. Analisis Kualitas Sumber Daya Pemerintahan

Analisis kualitas sumber daya pemerintah merupakan sebuah ukuran untuk bisa mengetahui kompetensi yang dimiliki oleh aparatur sipil negara. Hal ini dapat dikatakan bahwa sebuah kompetensi yang dimiliki oleh aparatur sipil negara bisa menunjang pelayanan masyarakat. Tidak hanya dari aparatur sipil negara saja akan tetapi semua sumber daya manusia yang bergerak di sektor pemerintah juga harus menunjang layanan masyarakat. Dengan adanya penerapan program *Smart City* ini, para sumber daya yang dimiliki oleh Kabupaten Buleleng harapan bisa memenuhi dan mengimplementasi apa yang sudah dirumuskan. Keberhasilan *Smart City* dapat diukur dari sumber daya yang menjalankan memahami dan mengerti apa program prioritas pemerintah daerah dalam *Smart City*.

Tabel 3. 8 Analisis Kualitas SDM Pemerintahan

No	Komponen	Nilai/Kondisi	Interpretasi		
			Baik	Sedang	Kurang
1	Persentase pegawai dengan jenjang pendidikan S2 ke atas	5,2 %			✓
2	Jumlah pegawai dengan latar belakang pendidikan Ilmu Komputer/Teknik Informatika	52	✓		
3	Jumlah relawan TIK di daerah	-			✓
4	Persentase jumlah unit komputer (PC & Laptop) terhadap jumlah pegawai	70%	✓		
5	Persentase pegawai berusia 50 tahun ke atas terhadap jumlah pegawai	36,6 %	✓		
6	Persentase pegawai berusia 40 -50 tahun terhadap jumlah pegawai	22,9 %	✓		
7	Persentase pegawai berusia 25 -40 tahun terhadap jumlah pegawai	40,5 %	✓		
8	Jumlah sistem informasi yang digunakan di pemerintah daerah	98		✓	
9	Persentase ketersediaan jaringan broadband access terhadap jumlah kantor pemerintahan	100%	✓		
10	Persentase ketersediaan jaringan LAN/WAN di kantor pemerintahan	100%	✓		
11	Jumlah lokasi wireless internet (hotspot) di kawasan perkantoran pemerintahan	Tersedia	✓		
12	Ketersediaan data center (baik yang dikelola sendiri maupun manage service) untuk kepentingan pemerintahan	Tersedia	✓		
13	Ketersediaan rencana dan SOP mitigasi bencana terhadap data pemerintahan	Tersedia	✓		
14	Ketersediaan sistem informasi perencanaan pembangunan daerah yang interoperable	Tersedia	✓		
15	Ketersediaan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah yang interoperable	Tersedia	✓		

No	Komponen	Nilai/Kondisi	Interpretasi		
			Baik	Sedang	Kurang
16	Ketersediaan sistem informasi kantor virtual pemerintah daerah yang interoperable	Tersedia	✓		
17	Ketersediaan sistem informasi monitoring dan evaluasi pembangunan daerah yang interoperabel	Tersedia	✓		
18	Ketersediaan sistem informasi pengelolaan kepegawaian daerah yang interoperabel	Tersedia	✓		
19	Ketersediaan sistem informasi pengelolaan legislasi daerah yang interoperabel	Tersedia	✓		
20	Ketersediaan sistem informasi pelayanan publik yang interoperable	Tersedia	✓		

Sumber: Kertas Kerja Bimbingan Teknis 1 Kabupaten Buleleng

Pada tabel di atas menunjukkan bahwa kapasitas sumber daya pemerintah pada Kabupaten Buleleng masih memiliki beberapa kekurangan dalam mengelola sumber daya yang ada. Adapun jumlah relawan TIK di daerah masih belum dimaksimalkan oleh Kabupaten Buleleng untuk mendukung kinerja pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan. Selain itu, jumlah sistem informasi yang disediakan oleh pemerintah Buleleng juga masih terdapat kekurangan. Dalam hal ini, belum terintegrasinya sistem informasi yang disediakan membuat informasi yang diterima oleh masyarakat menjadi tidak maksimal sehingga masyarakat tidak mendapatkan informasi yang up to date ketika ingin membutuhkan pelayanan dasar dari pemerintah daerah.

3.2.3. Analisis Kapasitas Keuangan Daerah

Analisis kapasitas keuangan daerah merupakan sebuah faktor yang sangat penting. Hal ini dikarenakan bahwa daerah bisa mengalokasikan keuangan nya untuk implementasi program *Smart City* sesuai dengan porsi nya. Tanpa mengesampingkan kepentingan yang sudah dirumuskan oleh kepala daerah, kapasitas keuangan daerah memiliki peran penting untuk bisa melakukan roda kebijakan dan program. *Smart City* yang sudah dirumuskan oleh Kabupaten Buleleng memerlukan sumber daya anggaran yang cukup besar. Maka dari itu, sektor keuangan menjadi penunjang yang sangat penting untuk keberhasilan program

Tabel 3. 9 Analisis Kapasitas Keuangan Daerah

No.	Komponen	Nilai/ Kondisi	Interpretasi		
			Baik	Sedang	Kurang
1	Persentase Nilai Pendapatan Asli Daerah terhadap Total Pendapatan Daerah	21,86%	✓		
2	Nilai Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Tahun Lalu (2021)	55.925.791.785,76	✓		
3	Persentase Belanja Pegawai terhadap Total Belanja Daerah (2021)	41,41	✓		
4	Persentase Belanja Infrastruktur terhadap Total Belanja Daerah	20,43	✓		
5	Jumlah Anggaran untuk Belanja <i>Smart City</i> yang dapat dialokasikan di dalam APBD Tahun 2022	Baik	✓		
6	Jumlah Anggaran untuk Belanja <i>Smart City</i> yang dapat dialokasikan di dalam APBD Tahun 2022	Baik	✓		
7	Jumlah program pembangunan untuk mendukung <i>Smart City</i> di daerah	Baik	✓		
8	Nilai investasi masuk yang mendukung pembangunan daerah	Baik	✓		
9	Jumlah sumber-sumber pendanaan pembangunan alternatif yang dapat digunakan untuk mendukung <i>Smart City</i>	Baik	✓		

Sumber: Kertas Kerja Bimbingan Teknis 1 Kabupaten Buleleng 2023

Dalam tabel diatas menunjukkan bahwa kondisi keuangan daerah Kabupaten Buleleng cukup baik, hal ini dapat dilihat dari SILPA yang cukup besar dan mencapai target dengan yang direncanakan. Kabupaten Buleleng yang mengandalkan pariwisata dan kearifan lokal mampu memberikan kontribusi untuk pendapatan asli daerah sehingga dalam pembangunan infrastruktur cukup berjalan dengan baik.

3.3. Analisis Infrastruktur

Analisis infrastuktur merupakan sebuah analisis yang dapat mengetahui sejauh mana perkembangan sebuah daerah dalam menunjang pelayanan masyarakat. Infrastruktur menjadi kunci utama untuk jalan moda pelayanan karena terdapat aspek-aspek percepatan dari segi sosial, ekonomi dan budaya.

3.3.1. Analisis Kesiapan Infrastruktur Fisik Daerah

Analisis kesiapan infrastruktur fisik daerah merupakan sebuah gambaran dimana kondisi yang sebenarnya pada daerah tersebut. Kabupaten Buleleng jika dilihat dari infrastuktur masih terdapat beberapa kekurangan untuk bisa menunjang kebutuhan masyarakat. Infrastruktur fisik daerah sangat lah penting sebagai tanda bahwa daerah tersebut mampu membangun daerah nya sendiri. Melalui *Smart City* ini terdapat peta infrastruktur yang menjadi fokus utama untuk pembangunan selanjutnya yang mana hal tersebut sebagai penunjang layanan masyarakat. Program *Smart City* bisa memberikan sebuah gambaran secara rinci untuk pembangunan infrastruktur fisik daerah sebab dapat mengetahui potensi kelemahan yang ada.

Tabel 3. 10. Analisis Kesiapan Infrastruktur Fisik Daerah

No	Komponen	Nilai/ Kondisi	Interpretasi		
			Baik	Sedang	Kurang
1	Persentase jalan kabupaten/kota dalam kondisi baik	Baik	✓		
2	Persentase panjang pedestrian (fasilitas pejalan kaki) per panjang jalan beraspal	Baik	✓		
3	Persentase lampu jalan yang berfungsi dengan baik	83%	✓		
4	Persentase rambu dan petunjuk jalan dalam kondisi baik	83%	✓		
5	Adanya kawasan perkantoran untuk kegiatan bisnis	Baik	✓		
6	Adanya kawasan perbelanjaan untuk kegiatan perdagangan masyarakat	Baik	✓		
7	Persentase sarana prasarana pendidikan dalam kondisi baik	85%	✓		

No	Komponen	Nilai/ Kondisi	Interpretasi		
			Baik	Sedang	Kurang
8	Persentase sarana prasarana pelayanan kesehatan dalam kondisi baik	89,5%	✓		

Sumber: Kertas Kerja Bimbingan Teknis 1 Kabupaten Buleleng 2023



Dalam tabel diatas menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur fisik daerah memberikan wujudnya nyata pembangunan di Kabupaten Buleleng, jika dilihat persentase tabel diatas bahwa pembangunan yang berupaa fisik sesuai dengan target apa yang direncanakan. Pemulihan dan percepatan infrastruktur pada Kabupaten Buleleng sangatlah penting untuk menunjang roda perekonomian masyarakat serta penunjangn aktivitas masyarakat. Selain itu, infrastruktur di Kabupaten Buleleng mempunya prioritas-prioritas tertentu dalam percepatan pembangunan karena melihat sebagaimana kebutuhan masyarakat yang membutuhkan akses infrastruktur.

3.3.2. Analisis Kesiapan Infrastruktur Digital Daerah

Analisis terhadap kesiapan infrastruktur digital daerah diperlukan untuk mengukur kesiapan daerah dalam melaksanakan program *Smart City*, mengingat di dalam konsep *Smart City*, teknologi merupakan enabler yang dapat memberikan percepatan terhadap hasil capaian dari *Smart City*.

Tabel 3. 11 Analisis Kesiapan Infrastruktur Digital Daerah

No	Komponen	Nilai/ Kondisi	Interpretasi		
			Baik	Sedang	Kurang
1	Persentase luas area dengan jaringan 4G atau 3G	Sedang		✓	
2	Tersedianya jaringan broadband access untuk masyarakat	Sedang		✓	
3	Jumlah lokasi wireless untuk publik	Sedang		✓	
4	Persentase rumah tangga yang terlayani listrik	Baik	✓		
5	Jumlah kejadian pemadaman listrik setiap bulan (dalam jam)	Baik	✓		

No	Komponen	Nilai/ Kondisi	Interpretasi		
			Baik	Sedang	Kurang
6	Jumlah sekolah yang memiliki akses internet	Baik			
7	Jumlah rumah sakit yang menggunakan sistem layanan elektronik/online	Baik			



Sumber : Kertas Kerja Bimbingan Teknis 1 Kabupaten Buleleng 2023




Dalam tabel diatas menunjukkan bahwa infrastruktur digital daerah di Kabupaten Buleleng masih memiliki beberapa kekurangan dan perlu adanya peningkatan infrastruktur digital daerah, antara lain jumlah persentase denagn jaringan 4G atau 3G, tersedianya jaringan broadband access untuk masyarakat, jumlah lokasi wireless untuk publik. Dari indikator tersebut dapat dilihat bahwa perlu adanya peningkatan infrastruktur dalam mendukung kebutuhan masyarakat sehingga masyarakat dapat terpenuhi kebutuhannya dalam mendapatkan akses sinyal telekomunikasi dan hak atas dasar lainnya. Sebab dasar dari *Smart City* adalah pemanfaatan teknologi dengan baik dan efektif

3.3.3. Analisis Kesiapan Infrastruktur Sosial Daerah

Analisis kesiapan infrastruktur sosial pada Kabupaten Buleleng terdapat prioritas utama pembangunan. Melalui *Smart City* dapat mengetahui dimana potensi-potensi kelemahan yang menjadi fokus utama untuk peningkatan infrastruktur sosial daerah. Maka, terdapat sarana dan prasarana yang menjadi perhatian penting untuk daerah sebagai perwujudan kota yang berkemajuan dalam penerapan *Smart City*

Tabel 3. 12. Analisis Kesiapan Infrastruktur Sosial Daerah

No	Komponen	Nilai/ Kondisi	Interpretasi		
			Baik	Sedang	Kurang
1	Adanya pusat kegiatan belajar masyarakat di tingkat kelurahan/desa	1 Desa 1 PAUD, 1 Desa memiliki lebih dari 1 SD radius 2km terdapat 1 SMP			
2	Adanya Ruang Terbuka Publik di tingkat RW	Baik			

No	Komponen	Nilai/ Kondisi	Interpretasi		
			Baik	Sedang	Kurang
3	Adanya aula/balai warga di tingkat kelurahan/desa	148 buah			
4	Jumlah fasilitas olahraga di tingkat kelurahan/desa	Program fasilitas olahraga per 10ribu penduduk			
5	Ketersediaan perpustakaan umum yang dikelola oleh pemerintah daerah	1 dinas perpustakaan daerah			

Sumber: Kertas Kerja Bimbingan Teknis 1 Kabupaten Buleleng 2023

Dalam tabel diatas menunjukkan bahwa terdapat infrastruktur sosial daerah Kabupaten Buleleng ketersediaan dan persentase ruang pendidikan untuk warga masyarakat Kabupaten Buleleng perlu adanya pemulihan kembali untuk menciptakan kecerdasan kehidupan bangsa. Dalam mendukung *Smart City* harus mengedepankan sumber daya manusia yang unggul dalam pengetahuan. Maka dari itu ruang dalam mengakses pengetahuan harus dibuka secara luas dan terbuka sehingga masyarakat dapat mengakses pendidikan secara adil dan bersama

3.4. Analisis Suprastruktur Daerah

Analisis suprastruktur daerah merupakan aspek-aspek daerah yang keterlibatan dalam penentuan kebijakan dan peraturan daerah dalam mewujudkan kemajuan sebuah daerah. Tergambarkan bahwa suprastruktur daerah yang memiliki potensi dan kewenangan agar mampu bisa memanfaatkan dengan baik sehingga keberhasilan rumusan kebijakan dan program dapat efisien dan efektif. Melalui *Smart City*, program yang sudah dicanangkan sebagaimana sesuai dengan pedomana RPD Kabupaten Buleleng mampu memberikan jalan keluar dalam permasalahan daerah

3.4.1. Analisis Kesiapan Kebijakan Daerah

Analisis kesiapan kebijakan daerah adalah merupakan aspek penting dalam pembangunan *Smart City* di Kabupaten Buleleng sebagai penentu arah pembangunan yang sudah dirumuskan dalam RPD. Melalui hal ini sinkronisasi kebijakan dengan *Smart City* harus selaras sehingga dapat terimplementasi dengan baik.

Tabel 3. 13 Analisis Kesiapan Kebijakan Daerah

No	Komponen	Nilai/ Kondisi	Interpretasi		
			Baik	Sedang	Kurang
1	Adanya Peraturan Daerah tentang Dewan <i>Smart City</i> Daerah	SK Bupati tentang Dewan <i>Smart City</i>	✓		
2	Adanya Peraturan Kepala Daerah tentang Tim Pelaksana <i>Smart City</i> Daerah	SK Bupati tentang Dewan <i>Smart City</i>	✓		
3	Adanya masterplan <i>Smart City</i> daerah	Baik	✓		
4	Adanya Peraturan Daerah tentang Masterplan <i>Smart City</i> Daerah	Baik	✓		
5	Adanya visi pembangunan <i>Smart City</i> yang selaras dengan visi misi pembangunan daerah	Baik	✓		
6	Adanya kepastian terhadap keberlanjutan program <i>Smart City</i> dalam jangka panjang	Baik	✓		
7	Adanya mekanisme evaluasi dan apresiasi kinerja terhadap aparatur dan organisasi yang berprestasi dalam melaksanakan program <i>Smart City</i>	Baik	✓		

Sumber: Kertas Kerja Bimbingan Teknis 1 Kabupaten Buleleng 2023

Dalam tabel diatas menunjukkan bahwa kesiapan Buleleng dalam menerapkan konsep *Smart City* sudah siap secara infrastruktur kebijakan, berdasarkan komponen yang sudah terpenuhi mulai dari adanya Tim *Smart City*, visi misi *Smart City* dan juga program yang dirumuskan dalam pengembangan *Smart City* diharapkan mampu membuat Buleleng dapat mewujudkan kota yang mandiri dan cerdas dengan memanfaatkan potensi-potensi daerah berbasis kearifan lokal

3.4.2. Analisis Kesiapan Kelembagaan Daerah

Analisis kesiapan kelembagaan daerah merupakan sebuah kebijakan untuk menentukan sumber daya yang menjalankan program *Smart City*. Terdapat pembagian kerja dalam menjalankan program

Smart City yang pembagian tersebut sudah diatur sesuai dengan kebutuhan daerah. Sumber daya yang menjalankan tersebut sebagaimana sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh daerah

Tabel 3. 14. Analisis Kesiapan Kelembagaan Daerah

No	Komponen	Nilai/ Kondisi	Interpretasi		
			Baik	Sedang	Kurang
1	Adanya Dewan <i>Smart City</i> Daerah	Baik	✓		
2	Adanya Tim Pelaksana <i>Smart City</i> Daerah	Baik	✓		
3	Adanya SOP <i>Smart City</i> daerah	Sedang		✓	
4	Adanya tata pamong yang bertugas sebagai anggota Tim Pelaksana <i>Smart City</i> di setiap OPD	Baik	✓		







Sumber: Kertas Kerja Bimbingan Teknis 1 Kabupaten Buleleng 2023

Jika dilihat dalam tabel diatas menunjukkan bahwa ada beberapa komponen yang harus di optimalkan dan peningkatan kualitas dalam segi Standart Opersional Prosedur (SOP) untuk pelaksanaan *Smart City*, peningkatan komponen tersebut dapat menjadi fokus perhatian Kabupaten Buleleng dalam melakukan akselerasi percepatan konsep *Smart City*. Aspek kelembagaan daerah sangat penting sebab dari hal ini terdapat tupoksi-tupoksi para perangkat daerah dalam menerapkan konsep *Smart City*.

3.4.3. Analisis Kesiapan Organisasi Masyarakat Daerah

Aspek ini menjadi salah satu aspek dalam kesiapan *Smart City* karena di dalam sebuah *Smart City*, aspek partisipasi masyarakat yang digerakkan di dalam organisasi kemasyarakatan merupakan salah satu inti dari *Smart City*.

Tabel 3. 15 Analisis Kesiapan Organisasi Masyarakat Daerah

No	Komponen	Nilai/ Kondisi	Interpretasi		
			Baik	Sedang	Kurang
1	Adanya lembaga pengabdian masyarakat dari perguruan tinggi di daerah	Baik			
2	Adanya forum-forum swadaya masyarakat pendukung <i>Smart City</i>	Baik			
3	Jumlah forum swadaya masyarakat pendukung <i>Smart City</i>	Baik			
4	Dukungan operasional pemerintah terhadap forum pendukung <i>Smart City</i>	Baik			
5	Jumlah forum pendukung <i>Smart City</i> yang memiliki sekretariat definitif	Baik			
6	Adanya partisipasi pakar dari perguruan tinggi lokal dalam Dewan <i>Smart City</i> Daerah	Baik			

Sumber: Kertas Kerja Bimbingan Teknis 1 Kabupaten Buleleng 2023

Jika dilihat dalam tabel diatas bahwa terdapat komponen-komponen yang sudah masuk dalam tabel organisasi masyarakat. Jika dilihat bahwa kesiapan organisasi masyarakat dalam menunjang pengembangan *Smart City* sudah berjalan cukup baik. Dukungan dari masyarakat yang cakap akan perkembangan teknologi berbasis *Smart City* tentunya memberikan dampak yang positif bagi perkembangan daerah sehingga nantinya dapat berkontribusi aktif dan berkelanjutan dalam penerapan konsep *Smart City*.

3.5. Analisis Culture

Sebanyak tiga tradisi warga Kabupaten Buleleng, Bali ditetapkan menjadi warisan budaya tak benda (WBTB) nasional oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) melalui tim ahli WBTB, tiga produk kebudayaan tersebut adalah keterampilan dan kemahiran kerajinan tradisional lukisan kaca Desa Nagasepaha, tradisi dan ekspresi lisan Megoak-goakan Desa Panji serta adat istiadat Masyarakat Ngusaba Bukakak, Desa Giri Emas. Selain itu Kabupaten Buleleng gencar menjalankan *community based tourism*, komunitas melakukan pergerakan yang sangat kuat untuk memajukan kebudayaan dan pariwisata. Pemerintah tidak bisa melakukan

pembangunan sendiri tanpa dukungan dari masyarakat. Masyarakat Kabupaten Buleleng tidak berhenti melakukan kegiatan kesenian dan pelestarian budaya karena tidak terlepas dari kegiatan keagamaan salah satu contoh kegiatan tersebut adalah parade budaya suguhan yang khas, menarik, dan unik yang menampilkan kreativitas masyarakat Buleleng.

Tradisi Sampi Gerumbungan, megoak-goakan, Ngusaba bukakak, Gebug Ende, Nyakan Diwang merupakan tradisi yang dilestarikan di Kabupaten Buleleng. Komponen di desa ikut bersama-sama merancang program-program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, dengan titik berat pada usaha ekonomi produktif melalui gerakan keswadayaan dan ke gotong royongan masyarakat sehingga dapat memberikan hasil yang maksimal, guna mewujudkan masyarakat Buleleng yang mandiri, sejahtera dan berdaya saing berlandaskan Tri Hita Karana menjadikan Kabupaten siap menjadi Kabupaten pintar (*Smart City*)

4. ANALISIS STRATEGI PEMBANGUNAN *SMART CITY*

4.1. Analisis Gap (Kesenjangan)

Analisis gap/kesenjangan dengan memuat identifikasi banyak faktor-faktor penghambat yang saat ini terjadi dalam kondisi ideal yang diharapkan oleh masyarakat. Tentu dalam hal ini, analisis kesenjangan yang terjadi di masyarakat ataupun di lingkungan pemerintahan terhadap layanan masyarakat dapat diidentifikasi berdasarkan yang dicakup dalam dimensi *Smart City*.

Analisis GAP dan strategi pembangunan *Smart City* di Kabupaten Buleleng melihat dari sisi kondisi saat ini dan tren masa depan yang akan dilakukan nantinya. Dari melihat kondisi dan tren masa depan dapat dipetakan menjadi program prioritas dalam pembangunan *Smart City* sehingga menjadikan sebuah solusi dari permasalahan yang sudah diidentifikasi. Mengenai tabel analisis gap dan strategi pembangunan *Smart City* disajikan sebagai berikut:

Tabel Analisis Kesenjangan (Gap) Kabupaten Buleleng merupakan pemetaan sebuah kondisi saat ini dan kondisi masa yang akan datang. Dari hal tersebut terdapat perbedaan yang menjadi dasar pengembangan untuk lebih meningkatkan prioritas-prioritas layanan daerah. Untuk lebih detail dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

4.1.1. Analisis Gap (Kesenjangan) *Smart Governance*

Analisis Gap (Kesenjangan) pada *Smart Governance* ini merupakan rangkuman kondisi sekarang dan rangkuman tren masa depan yang nanti akan mewujudkan cita-cita ataupun harapan untuk peningkatan layanan kepada masyarakat. Analisis Gap dapat mengetahui dimana potensi-potensi layanan yang dapat dikembangkan sehingga dapat merumuskan kebijakan-kebijakan yang berbasis solusi.

Tabel 4. 1 Analisis Kesenjangan (Gap) *Smart Governance*

Dimensi	Rangkuman Kondisi Saat Ini	Rangkuman Tren Masa Depan	Identifikasi Gap/Kesenjangan
<i>Smart Governance</i>	Pelayanan publik belum terpusat pada satu tempat sehingga belum memberikan kemudahan bagi masyarakat	Terwujudnya Mall Pelayanan Publik di Kabupaten Buleleng	Perlu adanya model pelayanan publik yang terintegrasi

Dimensi	Rangkuman Kondisi Saat Ini	Rangkuman Tren Masa Depan	Identifikasi Gap/Kesenjangan
	Banyaknya aplikasi yang digunakan oleh masing-masing perangkat daerah, namun aplikasi tersebut belum terintegrasi	Penerapan satu aplikasi yang berbasis satu data sehingga pelayanan publik semakin mudah, cepat, alur pelayanan jelas dan tidak berbelit-belit, serta produk layanan lebih mudah diakses	Perlu ada satu aplikasi yang saling terintegrasi
	Layanan administrasi kependudukan terbatas pada jam kerja kantor dan kuota pengajuan	Terselenggaranya layanan administrasi kependudukan secara online, bisa diakses 24 jam dan tidak dibatasi kuota pengajuan	Masyarakat belum sepenuhnya menguasai/memanfaatkan teknologi dalam mengakses layanan tersebut
	Belum maksimalnya pengetahuan masyarakat terkait produk hukum	Penyebarluasan produk hukum daerah melalui JDIH	Belum maksimalnya pengetahuan masyarakat untuk mengakses produk hukum secara transparan

Dimensi	Rangkuman Kondisi Saat Ini	Rangkuman Tren Masa Depan	Identifikasi Gap/Kesenjangan
	Proses pelayanan hukum belum efektif dan efisien	Digitalisasi pelayanan produk hukum daerah	Perlu adanya aplikasi penunjang terkait pelayanan produk hukum daerah

Sumber : Bimbingan Teknis 1 *Smart City* Kabupaten Buleleng 2023

Pada analisis gap (kesenjangan) *Smart Governance* difokuskan kepada peningkatan terkait dengan tata kelola mall pelayanan publik, aplikasi yang dapat terintegrasi kepada seluruh layanan, edukasi kepada masyarakat Buleleng dalam pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan pelayanan public, perlu ada optimalisasi pemahaman kepada masyarakat atas produk hukum yang sudah di buat oleh Kabupaten Buleleng dan harus adanya wadah ataupun sebuah aplikasi yang bisa menampung produk-produk hukum yang terintegrasi sehingga bisa di akses kepada seluruh lapisan masyarakat

4.1.2. Analisis Gap (Kesenjangan) *Smart Branding*

Analisis Gap (Kesenjangan) pada *Smart Branding* merupakan gambaran sektor pariwisata yang ada di Kabupaten Buleleng, untuk saat ini sudah ada kesenjangan dimana terlihat bahwa rangkuman kondisi saat ini dan nantinya akan diharapkan menjadi sebuah tren rangkuman masa depan. Perwujudan tersebut dapat dilakukan ketika menemukan gap (kesenjangan) sehingga terdapat prioritas-prioritas kelemahan yang nanti nya akan menjadi titik fokus utama pengembangan.

Tabel 4. 2 Analisis Gap (Kesenjangan) *Smart Branding*

Dimensi	Rangkuman Kondisi Saat Ini	Rangkuman Tren Masa Depan	Identifikasi Gap/Kesenjangan
Smart Branding	Pengembangan ekonomi kreatif melalui penumbuhan wirausaha muda berbasis TIK belum begitu berkembang	Menumbuhkan wirausaha muda berbasis <i>online</i> TIK	Pelaku wirausaha muda yang berbasis TIK belum maksimal
	Transaksi ekonomi berbasis digital belum begitu luas di masyarakat	Masyarakat dituntut untuk bisa melakukan transaksi non tunai / <i>cashless</i>	Sebagian besar masyarakat belum menggunakan transaksi <i>cashless</i>
	Belum ada Pemetaan potensi daerah (pertanian, pariwisata, perikanan, UMKM, Industri, produk olahan) berbasis digital	Minat investor masuk ke Buleleng semakin tinggi karena didukung ketersediaan data potensi daerah yang lengkap	Potensi Daerah belum terdigitalisasi dan mudah diakses (data manual dan parsial)

Sumber : Bimbingan Teknis 1 *Smart City* Kabupaten Buleleng 2023

Pada analisis gap (kesenjangan) *Smart Branding* difokuskan kepada peningkatan pengenalan sektor pariwisata yang belum berkembang. Pengenalan sektor pariwisata tidak hanya dilakukan dengan cara konvensional saja akan tetapi membutuhkan cara dengan pemanfaatan teknologi, saat ini

Kabupaten Buleleng banyak wirausaha muda yang belum memaksimalkan teknologi sebagai sarana pengenalan untuk bisa bersaing secara luas, gap ini akan menjadi perhatian dari pemerintah daerah untuk bisa mengoptimalkan pemanfaatan teknologi. Kemudian pada *Smart Branding* gerakan kampanye tidak menggunakan uang kertas dalam bertransaksi juga masih minim maka perlu adanya peningkatan pengenalan dan sosialisasi kepada masyarakat dampak dari transaksi tanpa uang kertas. Selanjutnya bahwa terdapat potensi pariwisata yang belum tersentuh digitalisasi sehingga proses pemasaran menjadi terhambat dan terkendala. Gap ini akan menjadi penanganan yang serius bagi dimensi *Smart Branding* dalam memperkenalkan potensi-potensi Buleleng.

4.1.3. Analisis Gap (Kesenjangan) *Smart Economy*

Analisis Gap (Kesenjangan) *Smart Economy* adalah sebuah gambaran dimana terdapat jarak kesenjangan yang terjadi di Kabupaten Buleleng, untuk saat ini rangkuman kondisi sekarang yang nanti nya akan diharapkan menjadi tren masa depan di Kabupten Buleleng dengan mengidentifikasi kesenjangannya. Melalui identifikasi tersebut maka akan terlihat dimana terjadi sebuah kesenjangan pada *Smart Economy* sehingga nanti nya akan dirumuskan formulasi-formulasi yang manjadi pengembangan *Smart Economy*.

Tabel 4. 3 Analisis Gap (Kesenjangan) *Smart Economy*

Dimensi	Rangkuman Kondisi Saat Ini	Rangkuman Tren Masa Depan	Identifikasi Gap/Kesenjangan
<i>Smart Economy</i>	Masih minimnya kemudahan berinvestasi di Kabupaten Buleleng	Kemudahan berinvestasi sangat penting untuk menunjang pembangunan <i>Smart Economy</i>	Meningkatkan kemudahan berinvestasi
	Pengembangan kuantitas, kualitas produk pertanian, perkebunan, kehutanan dan perikanan di Kabupaten Buleleng masih menjadi issue	Kuantitas, kualitas produk pertanian, perkebunan, kehutanan dan perikanan dapat mendukung pembangunan <i>Smart Economy</i>	Mengembangkan kuantitas dan kualitas produk pertanian, perkebunan, kehutanan dan perikanan
	Belum dilakukan pendataan sebaran industry pengeolahan, jumlah daya saing UMKM dan koperasi di Kabupaten Buleleng	Perlunya meningkatkan sebaran industry pengolahan meningkatkan jumlah dan daya saing UMKM Meningkatkan jumlah dan daya saing koperasi	Pendataan perlu dilakukan agar dapat menjadi pendukung bagi keputusan pembangunan <i>Smart Economy</i>

	Lemahnya perlindungan sosial dan pemberdayaan usaha ekonomi bagi PMKS	Peningkatan perlindungan sosial dan Pemberdayaan Usaha Ekonomi bagi PMKS sangat diperlukan	Lemahnya perlindungan sosial pemberdayaan usaha ekonomi bagi PMKS dapat menghambat pembangunan <i>Smart Economy</i>

Sumber : Bimbingan Teknis 1 *Smart City* Kabupaten Buleleng 2023

Pada analysis gap (kesenjangan) *Smart Economy* difokuskan kepada meningkatkan daya saing investasi di Buleleng untuk pendapatan daerah, dari investasi nantinya akan menghasilkan peningkatan PDB dan membuka lapangan pekerjaan. Tentu investasi yang diharapkan adalah investasi yang berdampak sehingga dapat diperkirakan mana investasi yang memberikan solusi. Selain itu, pemanfaatan lahan Buleleng yang memiliki potensi kekayaan alam baik dalam aspek pertanian, perkebunan, kehutanan dan perikanan perlu adanya peningkatan sebab saat ini potensi tersebut masih menjadi sebuah issue karena dampaknya yang belum optimal dirasakan oleh daerah dan lapisan masyarakat. Potensi-potensi yang dimiliki Buleleng berbagai macam ragamnya sebagai salah satunya yaitu pertumbuhan UMKM yang meningkatkan, untuk saat ini OPD terkait terus mendata berapa UMKM yang berada di Kabupaten Buleleng yang nanti akan dibuatkan sebuah wadah untuk menaungi UMKM agar bisa berkembang sehingga keberadaannya bisa berkelanjutan. Berangkat dari peningkatan UMKM maka perlu adanya perlindungan ekonomi dalam aspek sosial maka hal ini menjadi perhatian yang sangat penting agar bisa seimbang antara kebutuhan dan pengeluaran.

4.1.4. Analisis Gap (Kesenjangan) *Smart Living*

Analisis Gap (Kesenjangan) pada *Smart Living* merupakan sebuah kesenjangan permasalahan yang menghambat pengembangan *Smart Living*, untuk rangkuman kondisi sekarang merupakan acuan dari tren masa depan yang menjadi sebuah harapan. Namun, sebelum masuk ke dalam tren masa depan perlu adanya pengamatan identifikasi khusus kesenjangan. Identifikasi tersebut dilakukan untuk mengetahui dimana terdapat kesenjangan yang menghambat pengembangan ataupun implementasi *Smart Living* sehingga nanti nya akan dibuat formula-formula untuk bisa mengembangkan dimensi tersebut.

Tabel 4. 4 Analisis Gap (Kesenjangan) *Smart Living*

Dimensi	Rangkuman Kondisi Saat Ini	Rangkuman Tren Masa Depan	Identifikasi Gap/Kesenjangan
<i>Smart Living</i>	Pelayanan kesehatan belum optimal sesuai standar	Integrasi fasilitas kesehatan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan	Masih adanya pelayanan kesehatan kurang memadai mulai dari alur birokrasi dan sarana rumah sakit
	Jumlah dan Kompetensi tenaga kesehatan masih terbatas dan belum merata	Pemerataan tenaga kesehatan untuk menunjang kebutuhan fasilitas kesehatan	Sulitnya izin atau kompetensi yang dilakukan calon nakes dalam menerima tanggung jawab keluhan kesehatan masyarakat

	Pengembangan Prasarana drainase perkotaan (saluran drainase belum mencakup seluruh wilayah di Kabupaten dan masih bercampur dengan air limbah)	Membuat pengelolaan air yang tercemar menjadi <i>ecofriendly</i>	Tidak adanya pengolahan air limbah baik limbah rumah tangga ataupun industri
	kondisi jalan dan jembatan kewenangan Kabupaten diperlukan pemeliharaan berkala agar statusnya menjadi baik	Pemeliharaan sarana penunjang mobilitas masyarakat agar terawat dengan baik	Konstruksi yang kurang spesifikasi salah satu faktor menjaga kualitas bangunan

Sumber : Bimbingan Teknis 1 *Smart City* Kabupaten Buleleng 2023

Pada analisis gap (kesenjangan) pada *Smart Living* difokuskan kepada upaya peningkatan pelayanan Kesehatan, sebab sekarang masih ada pelayanan kesehatan yang belum memadai. Adapun faktornya adalah keterbatasan alat untuk pelayanan, keterbatasan rumah sakit, ketersediaan tenaga Kesehatan dan sumber dana yang terbatas. Dari kesenjangan tersebut perlu adanya respon dan aksi dari pemerintah sehingga pelayanan Kesehatan dapat terpenuhi secara maksimal. Selain itu, masih terdapat sulit nya dalam mendapatkan mandat untuk bisa melayani masyarakat. Sulitnya surat izin yang dikeluarkan dikarenakan kompetensi dan birokrasi yang perlu menjadi perbaikan. Pemangkasan birokrasi mengenai surat izin harus adanya reformasi sehingga calon tenaga Kesehatan dapat menerima mandate secara resmi dalam melayani masyarakat. Disisi lain, pada *Smart Living* juga memperhatikan pengelolaan limbah yang belum sempurna, pengelolaan yang masih minim dan tidak adanya pengetahuan dalam mengelolanya

menjadi salah satu faktor lambatnya pengelolaan limbah. Untuk saat ini Kabupaten Buleleng potensi limbah terbesar yang bersumber dari sektor pariwisata, industry dan limbah rumah tangga. Beranjak dari pembahasan tersebut bahwa *Smart Living* ini juga memperhatikan kualitas bangunan atau konstruksi sebuah bangunan infrastruktur yang dimiliki oleh Buleleng. Bangunan infrastruktur harus berasakan jangka panjang, sebab penggunaan nya adalah untuk keberlanjutan jangka panjang sehingga kualitas bangunan perlu ukuran yang sempurna dan efektif.

4.1.5. Analisis Gap (Kesenjangan) *Smart Society*

Analisis Gap (Kesenjangan) pada *Smart Society* merupakan sebuah bentuk gambaran dari kondisi saat ini yang nantinya akan diharapkan menjadi tren masa depan. Namun, sebelum masuk dalam tren masa depan terdapat identifikasi kesenjangan/gap untuk bisa mengetahui nya agar formula-formula yang dibuat menjadi tepat dan efektif.

Tabel 4. 5 Analisis Gap (Kesenjangan) *Smart Society*

Dimensi	Rangkuman Kondisi Saat Ini	Rangkuman Tren Masa Depan	Identifikasi Gap/Kesenjangan
<i>Smart Society</i>	Belum meratanya akses dan kualitas pendidikan	Digitalisasi Pendidikan dengan perangkat dan platform pembelajaran	Belum tersedianya perangkat pemanfaatan teknologi

	Belum meratanya pengetahuan masyarakat tentang penggunaan media sosial berbasis elektronik dalam berinteraksi	Penggunaan media sosial berbasis elektronik diharapkan lebih intens digunakan	Belum meratanya media sosial berbasis elektronik
	Pemahaman masyarakat tentang proses perlindungan dan jaminan sosial masih kurang	Dengan adanya inovasi aplikasi Puskesmas diharapkan masyarakat dapat memperoleh informasi data penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) serta alur pelayanan di bidang perlindungan dan jaminan sosial	Belum maksimalnya pemahaman masyarakat tentang proses perlindungan dan jaminan sosial masih kurang
	Dalam pelaksanaan keamanan dan kenyamanan masyarakat masih menggunakan pola lama yang tidak efektif seperti Penggunaan Pos Kamling dan Patroli Keliling	Penggunaan teknologi yang lebih bersaing untuk pengawasan dan peningkatan keamanan seperti penggunaan CCTV di lingkungan masyarakat	Belum maksimalnya penggunaan CCTV dalam meningkatkan keamanan dan kenyamanan

Sumber : Bimbingan Teknis 1 *Smart City* Kabupaten Buleleng 2023

Pada analisis gap (kesenjangan) pada *Smart Society* difokuskan kepada peningkatan kualitas pendidikan yang masih rendah hal ini bisa dilihat dari keterjangkauan akses internet yang belum tersalurkan pada setiap sekolah-sekolah disetiap daerah sehingga menjadi penghambat dalam proses pembelajaran. Perlu adanya pemerataan akses teknologi untuk kebutuhan pendidikan dikarenakan mengacu kepada perkembangan zaman yang semakin berkembang pesat. Selain itu, *Smart Society* juga memperhatikan perlu adanya jaminan sosial dan perlindungan bagi masyarakat. Minimnya perlindungan dan jaminan tersebut jadi kesenjangan pada *Smart Society* dalam mengembangkan dan mengimplementasi. Memaksimalkan kedua aspek tersebut perlu dibuat formulasi program atau kebijakan untuk bisa menjawab kendala yang sudah menjadi potensi kelemahan di *Smart Society*. Kemudian, tidak nya hanya berbicara masalah perlindungan dan jaminan sosial namun menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat juga perlu diperhatikan, maka disetiap sudut daerah Kabupaten Buleleng yang berpotensi konflik diperlukan pengadaan CCTV secara aktif, dari pengawasan virtual tersebut dapat termonitoring pergerakan masyarakat untuk bisa menjegah konflik di lingkungannya.

4.1.6. Analisis Gap (Kesenjangan) *Smart Environment*

Analisis Gap (Kesenjangan) pada *Smart Environment* merupakan sebuah bentuk gambaran dengan melihat kondisi sekarang dan nantinya akan diharapkan menjadi sebuah tren masa depan. Akan tetapi, sebelum masuk dalam harapan masa depan perlu adanya identifikasi kesenjangan pada *Smart Environment* dengan melihat kondisi-kondisi yang ada maka akan menghasilkan sebuah solusi yang berwujud kebijakan, program ataupun sebuah bentuk fisik yang bisa menjawab solusi permasalahan

Tabel 4. 6 Analisis Gap (Kesenjangan) *Smart Environment*

Dimensi	Rangkuman Kondisi Saat Ini	Rangkuman Tren Masa Depan	Identifikasi Gap/Kesenjangan
<i>Smart Environment</i>	Bencana menjadi issue penting dan memiliki dampak terhadap lingkungan	Peningkatan mitigasi bencana daerah dan penanganan bencana	Mitigasi bencana dan penanganan bencana menjadi masalah krusial dan standar penanganan setiap bencana di daerah, sehingga perlu segera dimiliki oleh Kabupaten Buleleng
	Tutupan vegetasi perkotaan dan lahan kritis dapat menjadi potensi gangguan lingkungan yang serius	Peningkatan tutupan vegetasi pada perkotaan dan lahan kritis	Tutupan vegetasi perkotaan dan lahan kritis dapat menjadi potensi gangguan lingkungan yang serius sehingga perlu peningkatan
	Sampah menjadi masalah yang sangat penting untuk di atasi dan dikelola oleh Kabupaten Buleleng	Peningkatan kualitas kinerja Persampahan	Pengolahan sampah dan peningkatan kinerja persampahan perlu segera ditindaklanjuti dengan baik, sampah sirkular ekonomi perlu segera di praktekan, untuk keberlangsungan

			lingkungan yang sehat untuk masyarakat Kabupaten Buleleng
--	--	--	---

Sumber : Bimbingan Teknis 1 *Smart City* Kabupaten Buleleng 2023

Pada analisi gap (Kesenjangan) *Smart Environment* difokuskan kepada edukasi kebencanaan kepada masyarakat tentang potensi-potensi bencana di Kabupaten Buleleng. Sebab Buleleng yang memiliki garis pantai yang cukup luas menjadi potensi bencana alam yang dapat mengancam keselamatan masyarakat, maka perlu adanya proses pembelajaran mitigasi bencana agar mengetahui penanganan ketika terjadi bencana alam. Selain itu, tata kelola ruang terbuka hijau yang menggerus vegetasi lahan hijau diperkotaan yang saat ini sangat minim sekali, gangguan serius yang sudah dirasakan pada masyarakat maka perlu adanya pembenahaan sehingga vegetasi dapat berfungsi dengan baik. Kemudian dalam proses pengelolaan sampah masih belum adanya sebuah inovasi untuk mengelolanya. Sebuah inovasi sangat perlukan untuk bisa menghasilkan energi dengan bahan baku dasar nya yaitu sampah yang tersedia di Kabupate Buleleng.

4.2. Analisis SWOT

Dalam mengembangkan kota yang berbasis *Smart City* tentu harus memerlukan metode dalam mengidentifikasi langkah taktis dan strategis untuk mencapai sebuah program. Dengan mengidentifikasi dan menentukan strategis itulah, analisis SWOT digunakan untuk mendapatkan peta jalan awal bergerak menuju *Smart City*. Jika dilihat analisis SWOT dibagi menjadi empat metode untuk mengevaluasi yaitu aspek kekuatan (*strengths*), kelemahan (*weaknesses*), peluang (*opportunities*), dan ancaman (*treats*) dalam satu program kerja atau proyek Informasi hasil analisis SWOT akan dimanfaatkan sebagai umpan balik dalam mempertajam rumusan misi, dasar perumusan tujuan yang rasional dan menjadi acuan dalam menyusun strategi serta rencana kegiatan yang dilakukan. Dalam kerangka Renstra setelah Visi dan Misi, kegiatan berikutnya yang dilakukan analisis lingkungan Internal dan Eksternal. Kemudian dilanjutkan dengan tahap perumusan tujuan, sasaran yang rasional, penyusunan strategi, program dan kegiatan yang tepat dilakukan.

4.2.1. Analisis SWOT *Smart Governance*

Pada analisis SWOT *Smart Governance* di Kabupaten Buleleng dapat dikatakan bahwa terlihat beberapa kelemahan dan kekuatan serta peluang dan ancaman. Pemetaan yang sudah dirumuskan menjadi difokuskan melalui pengembangan pengembangan kompetensi para pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN), kemudian peningkatan kecepatan informasi untuk masyarakat agar mendapatkan informasi yang optimal. Dari kedua tersebut melihat permasalahan yang sudah ada dengan kondisi masyarakat yang sebenarnya. Untuk lebih detail dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 4. 7 SWOT *Smart Governance*

Kekuatan	Kelemahan
<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase rentang usia pegawai berusia 25 -40 tahun terhadap jumlah pegawai cukup tinggi (40,5%) 2. Ketersediaan jaringan broadband access terhadap jumlah kantor pemerintahan 100% 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hanya memiliki 52 ASN dengan latar pendidikan bidang TI 2. Kemampuan keuangan daerah yang belum mencukupi 3. Aplikasi dari masing-masing perangkat daerah belum terintegrasi

3. Jaringan internet (wifi) sudah tersedia 326 titik tersebar di wilayah desa adat	
Peluang	Ancaman
1. Kesempatan pengembangan kompetensi pegawai 2. Tingginya animo masyarakat akan kebutuhan informasi	1. Meningkatnya harga perangkat teknologi dari waktu ke waktu 2. Sebagian masyarakat belum memahami penggunaan dan pemanfaatan aplikasi pelayanan publik terutama masyarakat di atas usia produktif

Sumber: Bimbingan Teknis Tahap 1 Kabupaten Buleleng 2023

Jika dilihat analisis SWOT diatas pada *Smart Governance* bahwa terdapat kelemahan yang masih perlu menjadi perhatian yaitu belum terintegrasinya secara optimal perangkat-perangkat daerah yang menghambat pelayanan. Maka dalam proses pengintegrasian tentunya membutuhkan pembiayaan yang tidak sedikit, untuk saat ini Kabupaten Buleleng masih memiliki kekurangan biayan untuk menunjang akses tersebut, padahal jika dilihat kebutuhan nya bahwa integrasi perangkat tersebut sangat penting karena untuk pelayanan sehingga pelayanan-pelayanan saat ini bersumber pada pelayanan online yang dapat memudahkan masyarakat sehingga optimal dan efisien.

4.2.2. Analisis SWOT *Smart Branding*

Pada analisis SWOT *Smart Branding* di Kabupaten Buleleng dapat dikatakan bahwa terdapat kekuatan,kelemahan dan peluang serta ancaman. Hal ini terdapat beberapa kondisi yang terjadi di Kabupaten Buleleng yang menjadi fokus untuk peningkatan *Smart Branding* yaitu peningkatan sektor pariwisata Buleleng untuk lebih dikenalkan kepada para wisatawan agar meningkatkan pendapatan daerah. Dengan memperkenalkan sektor pariwisata diharapkan mampu mengangkat kearifan lokal Buleleng melalui wisata dan budaya. Untuk lebih detail dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 4. 8 SWOT *Smart Branding*

Kekuatan	Kelemahan
1. Adanya komitmen pimpinan; 2. Adanya sarana dan prasarana yang mendukung; 3. Tersedianya sarana prasarana IT; 4. Bonus demografi yang mendukung; 5. Adanya regulasi terkait Inovasi Daerah;	1. Rendahnya koordinasi dan kolaborasi antar Perangkat Daerah; 2. <i>Smart City</i> belum dituangkan dalam RPD; 3. Aspek pendanaan masih terbatas; 4. Terbatasnya SDM yang berkompeten di bidangnya;

6. Adanya Struktur dan Tata Kerja Organisasi yang mendukung implementasi <i>Smart City</i> ; 7. Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia yang mendukung.	5. Kurangnya keperdulian dan rasa memiliki di masyarakat; 6. Belum tersedianya masterplan pengembangan TIK Kabupaten Buleleng; 7. Belum adanya regulasi yang mengatur keamanan sistem aplikasi; 8. Kurang maksimalnya promosi terkait Brand Buleleng sebagai Kota Pendidikan.
Peluang	Ancaman
1. Buleleng memiliki destinasi yang nyegara gunung; 2. Buleleng memiliki kawasan budidaya rumput laut yang berpotensi menciptakan lapangan kerja; 3. Buleleng memiliki destinasi atraksi wisata lumba-lumba di laut lepas; 4. Buleleng sebagai kota pendidikan karena terdapat taman pendidikan digital; 5. Buleleng sudah memiliki gedung Command Center; 6. Buleleng memiliki potensi ecraft yang besar; 7. Buleleng memiliki tradisi budaya dan kuliner yang unik	1. Adanya gangguan yang mengancam ideologi, politik, sosial, ekonomi, budaya, pertahanan keamanan dan agama; 2. Adanya gangguan peretas sistem; 3. Adanya daya saing branding dengan Kabupaten lain

Sumber : Bimbingan Teknis Tahap 1 Kabupaten Buleleng 2023

Jika dilihat dalam tabel SWOT pada *Smart Branding* bahwa masih minimnya antara stakeholder daerah dalam berkoordinasi untuk upaya peningkatan integrasi pariwisata, masih belum maksimalnya pemanfaatan kearifan lokal yang seharusnya menjadi fokus perhatian penting. Sebab Kabupaten Buleleng memiliki ciri khas yaitu karakter budaya yang sangat kental sehingga potensi nya bisa di angkat untuk menarik para wisatawan baik dalam negeri ataupun luar negeri. Kemudian dalam tabel tersebut ketersediaan anggaran masih sangat minim sekali pengalokasian nya sehingga menghambat upaya memperkenalkan Buleleng sebagai kota Budaya kepada masyarakat luas, kemudian selanjutnya masih minimnya kesadaran masyarakat yang belum memprioritaskan sektor pariwisata, masih minimnya perangkat lunak yang mewadahi sektor pariwisata sehingga *branding* nya masih sangat kurang

4.2.3. Analisis SWOT *Smart Economy*

Pada analisis SWOT *Smart Economy* di Kabupaten Buleleng dapat dikatakan bahwa terdapat pemetaan mulai dari kekuatan, kelemahan dan peluang serta ancaman. Dalam hal ini *Smart Economy* mengangkat sektor ekonomi UMKM dan pemanfaatan kearifan berbasis lokal untuk bisa meningkatkan kesejahteraan. Berangkat dari hal itu pemerintah daerah akan berupaya mendigitalisasi UMKM untuk bisa lebih dikenal banyak sektor tidak hanya dilingkup daerah Buleleng akan tetapi diluar Buleleng menjadi trobosan yang perlu dikembangkan. Untuk lebih detail dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 4. 9 SWOT *Smart Economy*

Kekuatan	Kelemahan
<ol style="list-style-type: none"> 1. Keberadaan UMKM lokal di Buleleng mendominasi dimasyarakat 2. Pasar tradisional masih menjadi pusat tujuan berbelanja masyarakat 3. Pemerintah mendukung pengembangan umkm lokal 4. Potensi wisata lokal yang unggul (wisata lumba-lumba & wisata menjangnan) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Akses internet masih belum maksimal dan merata 2. Banyak SDM masih belum terampil dalam penggunaan TIK 3. Tingkat pendapatan masyarakat masih belum merata (ekonomi menengah kebawah) 4. Edukasi penggunaan cashless masih rendah dan belum maksimal 5. Pendataan potensi daerah belum terintegrasi dengan baik (data manual dan parsial)
Peluang	Ancaman
<ol style="list-style-type: none"> 1. Perkembangan Era Industri 5.0 2. Pemanfaatan Perdagangan berbasis digital 3. Pemetaan Potensi Daerah berbasis digital 4. Jalur Perdagangan lintas provinsi 5. Potensi Pariwisata berbasis pemberdayaan masyarakat 6. Potensi pertanian (dalam arti luas) yang unggul 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Basis teknologi masih akan terus berkembang 2. Minat menggunakan transaksi tunai masih tinggi 3. Kurangnya lembaga riset yang terlibat dalam pemetaan potensi daerah berbasis digital 4. Perubahan Gaya Hidup masyarakat

Sumber : Bimbingan Teknis Tahap 1 Kabupaten Buleleng 2023

Jika dilihat dalam tabel SWOT pada *Smart Economy* bahwa masih minimnya peluang lapangan pekerjaan yang bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat, masih minimnya sumber daya manusia yang memiliki kompetensi sehingga tidak memiliki keterampilan untuk daya jualnya, sektor kemiskinan yang masih menjadi perhatian karena dari segi persentase masih belum adanya peningkatan yang signifikan, akses internet yang belum merata di pelosok daerah sehingga menyulitkan roda perekonomian

4.2.4. Analisis SWOT *Smart Living*

Pada analisis SWOT *Smart Living* di Kabupaten Buleleng dapat dikatakan bahwa terdapat pemetaan di daerah mulai dari kekuatan, kelemahan dan peluang serta ancaman. Dalam hal ini *Smart Living* yang menjadi fokus prioritas adalah meningkatkan kesadaran masyarakat terkait dengan pemahaman dalam menghadapi bencana, kemudian menghubungkan sektor masyarakat dengan sektor pemerintah secara intensif, peningkatan infrastruktur jalan untuk mengkonektivitasan laju masyarakat dalam melakukan aktivitas. Untuk lebih detail dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 4. 10 SWOT *Smart Living*

Kekuatan	Kelemahan
<ol style="list-style-type: none"> 1. Potensi pariwisata: Jalan yang baik memungkinkan akses yang lebih mudah ke destinasi wisata, meningkatkan sektor pariwisata dan pendapatan yang terkait. 2. Aksesibilitas: Layanan mobil KB keliling memberikan akses yang mudah bagi wanita yang membutuhkan layanan KB tanpa harus pergi ke pusat kesehatan atau klinik khusus. 3. Tim tanggap bencana yang terlatih: Adanya tim tanggap bencana yang terlatih dan berpengalaman dapat meningkatkan efektivitas penanganan bencana, termasuk dalam upaya evakuasi, pencarian dan penyelamatan, serta penyediaan bantuan darurat. 4. Dukungan pemerintah: Adanya kebijakan dan program dari pemerintah untuk memberikan bantuan rumah tidak layak huni menunjukkan adanya komitmen yang kuat dalam mengatasi masalah tersebut. 5. Unit Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor yang sudah terakreditasi A 6. Rumah Sakit Tipe B Pendidikan dengan akreditasi paripurna 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Biaya tinggi: Pembangunan infrastruktur jalan sering membutuhkan investasi yang besar, terutama jika ada kebutuhan untuk memperbaiki jalan yang sudah ada 2. Keterbatasan sumber daya: Layanan mobil KB keliling mungkin memiliki sumber daya terbatas dalam hal personel, peralatan, dan pendanaan yang dapat membatasi kemampuan mereka untuk mencapai target pasar yang lebih luas 3. Kurangnya kesadaran masyarakat: Beberapa masyarakat mungkin kurang memiliki pemahaman tentang kesehatan

dengan dukungan fasilitas IT yang memadai 7. Peningkatan PAD dari sector Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	
Peluang	Ancaman
<ol style="list-style-type: none"> 1. Pertumbuhan ekonomi: Pembangunan jalan baru dapat meningkatkan konektivitas dan dukungan dari pemerintah pusat 2. Jumlah PUS (Pasangan Usia Subur) yang tinggi di Kab. Buleleng 3. Kesadaran masyarakat: Melalui pendidikan dan kampanye kesadaran, masyarakat dapat lebih siap menghadapi bencana, termasuk dengan membangun kapasitas mereka sendiri untuk mengatasi ancaman bencana 4. Dukungan dari pemerintah pusat dan kemitraan dari pihak swasta dan lintas sector terkait 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kerusakan akibat bencana alam: Bencana alam seperti banjir, gempa bumi, atau tanah longsor dapat menyebabkan kerusakan pada infrastruktur jalan yang ada. 2. Perubahan iklim: Perubahan iklim dapat meningkatkan frekuensi dan intensitas bencana alam, seperti banjir, kekeringan, dan badai. Ancaman ini memerlukan upaya penanggulangan bencana yang lebih besar dan berkelanjutan 3. Tuntutan kualitas Rumah layak huni 4. Tingginya angka kecelakaan 5. Tuntutan dari masyarakat terkait pelayanan yang mudah dan cepat

Sumber : Bimbangan Teknis Tahap 1 Kabupaten Buleleng 2023

Jika dilihat dalam tabel SWOT pada *Smart Living* bahwa yang menjadi fokus sangat penting adalah infrastruktur jalan yang masih belum memenuhi pelosok-pelosok daerah, jalan yang masih belum merata pembangunan nya merupakan penghambat dari sektor ekonomi, aspek layanan dan kesehatan, jika akses infrastruktur jalan itu bagus maka segala mobilitas warga dapat terpenuhi. Kemudian ketersediaan mobil KB yang masih kurang sehingga belum optimalnya program KB yang disosialisasikan dari pemerintah daerah kepada masyarakat, masih minimnya masyarakat dengan pengetahuan hal itu menjadi pekerjaan rumah tangga daerah dalam menekan angka pertumbuhan yang tidak dapat di kontrol.

4.2.5. Analisis SWOT *Smart Society*

Pada analisis SWOT *Smart Society* di Kabupaten Buleleng dapat dilihat muncul prioritas-prioritas utama untuk bisa mengembangkan *Smart Society*. Pemetaan mulai dari kekuatan, kelemahan dan peluang dan ancaman menjadi bahan utama dalam pemecahan masalah. Kemudian yang menjadi fokus utama dalam *Smart Society* adalah terpasang nya jaringan internet di seluruh kawasan desa di Kabupaten Buleleng, menciptakan masyarakat yang

unggul, menciptakan Buleleng yang aman dan nyaman serta peningkatan pelayanan publik. Untuk lebih detail dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 4. 11 SWOT *Smart Society*

Kekuatan	Kelemahan
<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah tenaga pendidik yang banyak 2. Perangkat desa banyak yang sudah memahami penggunaan internet. 3. Jumlah tenaga trantibum linmas yang memadai 4. SDM pelaksana kegiatan yang memadai 5. Transformasi teknologi pembelajaran dalam pendidikan 6. Telah terpasangnya jaringan internet pada setiap desa. 7. Penggunaan CCTV sebagai alat kontrol menciptakan keamanan dan kenyamanan 8. Sumber daya manusia atau PSKS { Potensi sumber kesejahteraan sosial } yang membantu dalam penanganan PMKS sudah terlatih di bidang sosial. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masih banyaknya tenaga pendidik yang belum memahami teknologi 2. Belum optimalnya penggunaan internet oleh perangkat desa untuk pelayanan 3. Kurangnya alur komunikasi dalam penanganan keamanan yang bersifat urgent. 4. Belum semua SDM ahli dan memahami aplikasi pelaksanaan kegiatan 5. Belum meratanya ketersediaan fasilitas perangkat dan jaringan internet 6. Stabilitas jaringan internet belum merata 7. Belum semua titik di desa maupun dalam kota yang sudah terpasang spot CCTV. 8. Akses internet dan dukungan peralatan dalam menunjang dalam pendataan dan penyaluran bantuan masih kurang
Peluang	Ancaman
<ol style="list-style-type: none"> 1. . Brand Singaraja sebagai kota pendidikan, memberi dampak positif pada terpusatnya SDM yang unggul dalam berbagai profesi contoh: tenaga pengajar. 2. 2. Terpasangnya internet pada setiap desa dan kelurahan memudahkan masyarakat dan perangkat desa untuk memperluas jaringan pertemanan dan bisnis 3. 3. Dengan suasana yang aman dan kondusif dapat menciptakan kreatifitas masyarakat. 4. 4. Peningkatan pelayanan publik 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyalahgunaan TIK dapat meningkatkan pornografi dan penyalahgunaan lainnya. 2. 2. Peningkatan biaya pemeliharaan peralatan internet dan jaringan. 3. 3. meningkatnya harga teknologi dan luasnya wilayah yang mesti dipasang alat pengawas serta pemeliharaan yang harus kontinue akibat kerusakan 4. 4. Tuntutan peningkatan kualitas pelayanan dari masyarakat

Sumber : Bimbingan Teknis Tahap 1 Kabupaten Buleleng 2023

Jika dilihat dari tabel SWOT pada *Smart Society* bahwa upaya peningkatan tenaga pendidikan untuk meningkatkan kompetensi masih sangat kurang dalam memahami aspek teknologi, kemudian perlu adanya pemasangan akses CCTV di setiap pelosok dan daerah agar kemudahan pengawasan masyarakat dapat dijangkau secara virtual. Kemudian masih minimnya akses internet di seluruh desa untuk menunjang kecepatan informasi yang akan disampaikan. Selain itu, untuk menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat pemerintah perlu adanya

peningkatan komunikasi kepada aparat penegak hukum untuk menciptakan lingkungan dengan kondisi aman dan nyaman.

4.2.6. Analysis SWOT *Smart Environment*

Pada analisis SWOT *Smart Environment* di Kabupaten Buleleng dapat dilihat bahwa sudah dipetakan yang menjadi kekuatan, kelemahan dan peluang serta ancaman. Terdapat aspek yang menjadi fokus pada *Smart Environment* yaitu adanya dukungan dari pemerintah terkait kajian lingkungan hidup agar bisa mengidentifikasi pemasalahan lingkungan, bekerja sama dengan vendor/perguruan tinggi terkait riset potensi daerah dan memberikan kompetensi kepada pegawai dengan keahlian pengelolaan lingkungan. Untuk lebih detail dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 4. 12 SWOT *Smart Environment*

Kekuatan	Kelemahan
<ol style="list-style-type: none"> Memiliki ASN dengan latar pendidikan dan kompetensi dibidang lingkungan Mendapatkan dukungan anggaran APBD Pemkab Buleleng untuk pelaksanaan program kegiatan berbasis lingkungan Komitmen yang kuat dari pimpinan daerah untuk mewujudkan Buleleng bersih dan bebas sampah Tersedianya perangkat organisasi dan tata kerja yang efektif untuk mendukung pelaksanaan program kegiatan 	<ol style="list-style-type: none"> Terbatasnya jumlah ASN yang memiliki kompetensi khusus dibidang lingkungan Terbatasnya anggaran APBD untuk mendanai inovasi teknologi untuk pengelolaan sampah Belum semua komponen masyarakat menyadari pentingnya menciptakan lingkungan bersih dan sehat Terbatasnya sarana prasarana dan infrastruktur yang dibutuhkan untuk mewujudkan program kota bersih cerdas
Peluang	Ancaman
<ol style="list-style-type: none"> Ada perguruan tinggi yang memiliki kompetensi bidang kesehatan masyarakat dan lingkungan Ada dukungan dari vendor yang peduli terhadap kelestarian lingkungan Pemerintah daerah memberikan kesempatan bagi para ASN untuk meningkatkan 	<ol style="list-style-type: none"> Meningkatnya kebutuhan masyarakat akan layanan kebersihan dan lingkungan sehat Meningkatnya jumlah populasi penduduk berbanding lurus timbulan sampah Adanya perubahan perilaku masyarakat yang lebih konsumtif, sehingga jenis sampah sangat variatif

kompetensi di bidang pengelolaan lingkungan 4. Mudahnya mengakses internet dan media online	
--	--

Sumber : Bimbingan Teknis Tahap 1 Kabupaten Buleleng 2023

Jika dilihat dari tabel SWOT pada Smart Environment bahwa masih perlu adanya perhatian khusus untuk ASN untuk memiliki kompetensi dalam mengolah sampah sehingga nantinya ASN akan diberikan pengetahuan untuk mengolah sampah, kemudian masih minimnya alokasi anggaran untuk mengolah sampah sehingga inovasi dan penanganan sampah di Kabupaten Buleleng masih bersumber kesadaran masing-masing untuk mengolahnya, kemudian terkait dengan mewujudkan kota yang bersih, Kabupaten Buleleng masih belum mempunyai infrastruktur yang mencukupi sehingga lahan yang diberikan daerah masih belum dapat menampung sampah yang bersumber dari masyarakat dan sektor pariwisata, kemudian yang menjadi perhatian penting ke depannya adalah pola perilaku masyarakat yang sangat konsumtif, jika pola masyarakat yang konsumtif maka secara otomatis peningkatan jumlah sampah juga semakin meningkat

4.3. Analisis TOWS untuk setiap dimensi *Smart City*

Berdasarkan analisis SWOT Kabupaten Buleleng, maka dapat diartikan sebagai sejumlah tantangan, peluang, kelebihan dan kelemahan dalam beragam aspek. Maka untuk menuju *Smart City*, maka berdasarkan analisis yang telah diidentifikasi kemudian dapat dilihat lebih rinci yang mengacu kepada aspek keenaman konsep *Smart City* yaitu adalah *Smart Governance*, *Smart Branding*, *Smart Living*, *Smart Society*, *Smart Economy*, dan *Smart Environment*.

4.3.1. Analisis TOWS *Smart Governance*

Dalam hal ini bisa diartikan sebagai kemampuan pemerintah untuk membuat keputusan yang baik tentu melalui dukungan teknologi informasi dan tata kelola yang kolaboratif. Peran pemerintah daerah diperlukan untuk mengintegrasikan perencanaan, peraturan, dan regulasi pembangunan daerah. *Smart Governance* mampu mengubah pola-pola tradisional dalam birokrasi sehingga menghasilkan proses yang lebih cepat dan efisien. Maka dalam TOWS *Smart Governance* terkait dengan Pelayanan Publik, manajemen birokrasi yang efisien dan efisiensi kebijakan publik.

Tabel 4. 13 TOWS *Smart Governance*

Analisis TOWS		
	Kekuatan	Kelemahan
Faktor Internal	<ol style="list-style-type: none"> Persentase rentang usia pegawai berusia 25 -40 tahun terhadap jumlah pegawai cukup tinggi (40,5%) 	<ol style="list-style-type: none"> Hanya memiliki 52 ASN dengan latar pendidikan bidang TI Kemampuan keuangan daerah yang belum mencukupi

Faktor Eksternal	<ol style="list-style-type: none"> 2. Ketersediaan jaringan broadband access terhadap jumlah kantor pemerintahan 100% 3. Jaringan internet (wifi) sudah tersedia 326 titik tersebar di wilayah desa adat 	<ol style="list-style-type: none"> 3. Aplikasi dari masing-masing perangkat daerah belum terintegrasi
<p style="text-align: center;">Peluang</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kesempatan pengembangan kompetensi pegawai 2. Tingginya animo masyarakat akan kebutuhan informasi 	<p style="text-align: center;">Strategi Peluang dan Kekuatan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kinerja pegawai dengan pengembangan kompetensi bagi pegawai dengan rentang usia 25-40 tahun 2. Penyebarluasan informasi melalui situs resmi dengan memanfaatkan kemudahan akses internet di seluruh wilayah Kabupaten Buleleng 	<p style="text-align: center;">Strategi Kelemahan dan Peluang</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengintegrasikan seluruh aplikasi di perangkat daerah sehingga tidak memerlukan banyak pegawai dengan kemampuan IT 2. Meningkatkan koordinasi antar perangkat daerah agar tersedianya data yang valid dan akurat
<p style="text-align: center;">Ancaman</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya harga perangkat teknologi dari waktu ke waktu 2. Sebagian masyarakat belum memahami penggunaan dan pemanfaatan aplikasi pelayanan publik terutama masyarakat di atas usia produktif 	<p style="text-align: center;">Strategi Ancaman dan Kekuatan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sosialisasi lebih detail secara langsung ke masyarakat 2. Pembuatan video tutorial pelayanan publik dan disebarluaskan melalui internet 	<p style="text-align: center;">Strategi Kelemahan dan Ancaman</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan prioritas pengadaan teknologi secara berkala sesuai APBD 2. Memanfaatkan dana CSR untuk pengadaan teknologi

Sumber : Kertas Kerja Bimtek 1 *Smart City* 2023

Analisis TOWS pada *Smart Governance* sebuah upaya peningkatan penerapan teknologi digital, inovasi, dan proses yang lebih baik dalam pelayanan public untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, partisipasi warga dan akuntabilitas. Dalam hal ini *Smart Governance* di Kabupaten Buleleng yang masih perlu adanya peningkatan kualitas adapun yaitu mengintegrasikan teknologi baru untuk meningkatkan partisipasi warga

dalam proses pengambilan keputusan, kecakapan dan meningkatkan kompetensi kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) agar mahir dalam memanfaatkan teknologi maka perlu adanya pelatihan keamanan siber untuk pegawai pemerintah untuk mencegah serangan. Selain itu, pada *Smart Governance* dapat mengembangkan kemitraan dengan sektor swasta untuk memperkuat infrastruktur digital di daerah yang kurang berkembang. Maka melalui pendekatan TOWS pemerintah Kabupaten Buleleng dapat mengidentifikasi langkah-langkah strategis untuk memaksimalkan potensi-potensi dari *Smart Governance* sehingga dapat memitigasi risiko yang akan timbul nanti.

4.3.2. Analisis TOWS *Smart Branding*

Sasaran dari *Smart Branding* adalah peningkatan daya saing daerah dengan penataan wajah kota dan pemasaran potensi daerah baik dalam lingkup lokal, nasional maupun internasional pada pembangunan dan pemasaran ekosistem pariwisata, pembangunan *platform* dan pemasaran ekosistem bisnis daerah dan pembangunan dan pemasaran wajah kota. Dibawah ini merupakan analisis TOWS dari *Smart Branding*

Tabel 4. 14 TOWS *Smart Branding*

Analisis TOWS		
Faktor Internal	Kekuatan	Kelemahan
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya komitmen pimpinan; 2. Adanya sarana dan prasarana yang mendukung; 3. Tersedianya sarana prasarana IT; 4. Bonus demografi yang mendukung; 5. Adanya regulasi terkait Inovasi Daerah; 6. Adanya Struktur dan Tata Kerja Organisasi yang mendukung implementasi <i>Smart City</i>; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rendahnya koordinasi dan kolaborasi antar Perangkat Daerah; 2. <i>Smart City</i> belum dituangkan dalam RPD; 3. Aspek pendanaan masih terbatas; 4. Terbatasnya SDM yang berkompeten di bidangnya; 5. Kurangnya kepedulian dan rasa memiliki di masyarakat;

<p>Faktor Eksternal</p>	<ol style="list-style-type: none"> 7. Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia yang mendukung. 8. Buleleng memiliki destinasi yang nyegara gunung; 9. Buleleng memiliki kawasan budidaya rumput laut yang berpotensi menciptakan lapangan kerja; 10. Buleleng memiliki destinasi atraksi wisata lumba-lumba di laut lepas; 11. Buleleng sebagai kota pendidikan karena terdapat taman pendidikan digital; 12. Buleleng sudah memiliki gedung Command Center; 13. Buleleng memiliki potensi ecraft yang besar; 14. Buleleng memiliki tradisi budaya dan kuliner yang unik. 	<ol style="list-style-type: none"> 6. Belum tersedianya masterplan pengembangan TIK Kabupaten Buleleng; 7. Belum adanya regulasi yang mengatur keamanan sistem aplikasi; 8. Kurang maksimalnya promosi terkait Brand Buleleng sebagai Kota Pendidikan.
<p style="text-align: center;">Peluang</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat Perguruan Tinggi yang terakreditasi; 2. Terdapat lahan rumput laut seluas 5 Hektar di Kecamatan Gerokgak; 3. Terdapat destinasi wisata yang memadai; 4. Terdapat Asosiasi Keahlian dan Komunitas di elemen masyarakat Buleleng; 5. Terdapat ekosistem kolaborasi dari pelaku usaha di Buleleng; 6. Terdapat wisatawan nusantara dan mancanegara yang berkunjung ke Kabupaten Buleleng 	<p style="text-align: center;">Strategi Peluang dan Kekuatan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kolaborasi antara Pemerintah Daerah dengan institusi pendidikan; 2. Meningkatkan dukungan program promosi dan pendanaan dari Pemerintah Pusat untuk mendatangkan investor dari negara asing; 3. Melakukan pertunjukan seni, budaya dan ecraft di destinasi wisata; 4. Memanfaatkan sarana incubator kreatif untuk meningkatkan kualitas ecraft; 5. Meningkatkan kemudahan kolaborasi terbuka antar asosiasi keahlian dan 	<p style="text-align: center;">Strategi Kelemahan dan Peluang</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengoptimalkan potensi akademisi untuk melakukan integrasi terkait pendidikan; 2. Mengolah rumput laut menjadi produk yang bernilai ekonomi; 3. Memaksimalkan adanya kolaborasi kegiatan antar komunitas di elemen masyarakat; 4. Mengoptimalkan semua media promosi yang sudah dimiliki.

	komunitas di masyarakat dengan memanfaatkan sarana prasarana yang tersedia.	
Ancaman	Strategi Ancaman dan Kekuatan	Strategi Kelemahan dan Ancaman
<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya gangguan yang mengancam ideologi, politik, sosial, ekonomi, budaya, pertahanan keamanan dan agama; 2. Adanya gangguan peretas sistem; 3. Adanya daya saing branding dengan Kabupaten lain 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memperkuat hubungan kerjasama antar pimpinan, lembaga dan instansi untuk memperkecil ancaman; 2. Membentuk tim admin yang kuat; 3. Diseminasi informasi; 4. Kolaborasi Perangkat Daerah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kemampuan masyarakat dan kapasitas kelembagaan untuk menangkal ancaman-ancaman; 2. Meningkatkan kreatifitas dan kolaborasi; 3. Koordinasi dengan pemerintah pusat dan provinsi.

Sumber : Kertas Kerja Bimtek 1 *Smart City* 2023

Analisis TOWS pada *Smart Branding* merupakan sebuah gambaran dimana terdapat sektor-sektor pariwisata, pertanian, perkebunan, dan perikanan yang perlu diperkenalkan secara intens. Pengenalan kepada dunia luar tentu perlu ada kolaborasi dengan pihak ketiga dengan menyediakan wadah platform digital. Pemanfaatan teknologi digital dinilai mampu mendongkrak branding potensi-potensi yang ada di Buleleng. Selain itu, koordinasi dari berbagai stakeholder juga perlu di pertimbangkan sebagai bahan masukan untuk bisa meningkatkan daya tarik pariwisata, pertanian, perkebunan dan perikanan. Saat ini masih menjadi sebuah kendala pemanfaatan teknologi yang tidak maksimal dikarenakan sumber daya manusia yang tidak memiliki kecakapan potensi dalam pemanfaatan menjadi penghambat dalam mengembangkan *Smart Branding*. Disisi lain partisipasi masyarakat juga perlu dilibatkan, sebab masyarakat merupakan tombak kedua dalam pengelolaan potensi-potensi yang ada di Buleleng sehingga dapat terjadi kualitas dengan baik. Potensi dengan ciri khas yang dimiliki oleh Buleleng menjadi point tambahan untuk bisa mengelaborasi sumber daya yang dapat dimanfaatkan, sehingga dampak nya bisa dirasakan bagi masyarakat dan pemerintah daerah sebagai sumber pemasukan daerah. Kemudian, Buleleng yang disebut kota pendidikan merupakan point tambahan dalam bekerja sama dengan perguruan tinggi untuk bisa meneliti

mengembangkan *Smart Branding*.

4.3.3. Analisis TOWS *Smart Economy*

Analisis TOWS *Smart Economy* dapat dilihat berdasarkan faktor internal dan eksternal. Dari kedua faktor tersebut terdapat beberapa aspek yang perlu diperhatikan terutama pada bagian strategi dan peluang. Dalam hal ini *Smart Economy* memfokuskan pada peningkatan kapasitas UMKM dalam segi pendapatan dan pengenalan kepada dunia luar. Kemudian untuk meningkatkan pendapatan daerah memperkenalkan Buleleng sebagai kota wisata untuk mendatangkan para wisatawan untuk berlibur di Buleleng. Untuk lebih detail dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 4. 15 TOWS *Smart Economy*

Analisis TOWS		
<div><div>Faktor Internal</div><div>Faktor Eksternal</div></div>	<div>Kekuatan</div> <div><div>1. Keberadaan UMKM lokal di Buleleng mendominasi dimasyarakat</div><div>2. Pasar tradisional masih menjadi pusat tujuan berbelanja masyarakat</div><div>3. Pemerintah mendukung pengembangan umkm lokal</div><div>4. Potensi wisata lokal yang unggul (wisata lumba-lumba & wisata menjangnan)</div></div>	<div>Kelemahan</div> <div><div>1. Akses internet masih belum maksimal dan merata</div><div>2. Banyak SDM masih belum terampil dalam penggunaan TIK</div><div>3. Tingkat pendapatan masyarakat masih belum merata (ekonomi menengah kebawah)</div><div>4. Edukasi penggunaan cashless masih rendah dan belum maksimal.</div><div>5. Pendataan potensi daerah belum terintegrasi dengan baik (data manual dan parsial)</div></div>
	<div>Peluang</div>	<div>Strategi Peluang dan Kekuatan</div>

<ol style="list-style-type: none"> 1. Perkembangan Era Industri 5.0 2. Pemanfaatan Perdagangan berbasis digital 3. Pemetaan Potensi Daerah berbasis digital 4. Jalur Perdagangan lintas provinsi 5. Potensi Pariwisata berbasis pemberdayaan masyarakat 6. Potensi pertanian (dalam arti luas) yang unggul 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan UMKM Lokal yang terdigitalisasi dengan tujuan optimilisasi promosi dan penjualan produk. 2. Rebranding pasar tradisional yang memanfaatkan teknologi secara digital baik dalam transaksi ataupun manajemen pelayanan dengan tujuan meningkatkan minat belanja masyarakat. 3. Peningkatan promosi umkm lokal melalui keterlibatannya pada kegiatan pemerintah seperti gelar pangan lokal dan kegiatan lainnya yang dapat menjadi daya tarik wisata. 4. Meningkatkan jumlah wisatawan lokal maupun mancanegara dengan memanfaatkan dan melibatkan masyarakat yang sudah di berdayakan oleh pemerintah melalui pemanfaatan promosi digital 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memaksimalkan akses internet dalam mendukung perkembangan indsutri 5.0 2. Peningkatan SDM melalui pemberdayaan masyarakat. 3. Membuka lapangan pekerjaan yang dapat menyerap masyarakat di berbagai sektor dalam meningkatkan tingkat pendapatan masyarakat tersebut. 4. Melaksanakan sosialisasi dan pendampingan secara kontinyu terkait penggunaan transaksi cashless dimasyarakat. 5. Memaksimalkan integrasi pendataan potensi daerah secara digital guna menarik investor/konsumen dalam mendukung potensi wisata maupun pertanian.
<p style="text-align: center;">Ancaman</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Basis teknologi masih akan terus berkembang 2. Minat menggunakan transaksi tunai masih tinggi 3. Kurangnya lembaga riset yang terlibat dalam pemetaan potensi daerah berbasis digital 4. Perubahan Gaya Hidup masyarakat 	<p style="text-align: center;">Strategi Ancaman dan Kekuatan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tingkat persaingan antar UMKM lokal menjadi tinggi 2. Peningkatan pelayanan pasar tradisional dengan memanfaatkan teknologi secara digital sehingga mengurangi transaksi tunai 3. Penegakan regulasi terkait pengembangan umkm lokal 4. Peningkatan pelayanan wisata seperti reservasi secara digital 	<p style="text-align: center;">Strategi Kelemahan dan Ancaman</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan akses internet bagi masyarakat melalui pemerataan jaringan internet dan penggunaan teknologi terbaru 2. Penguatan strategi pendidikan berbasis teknologi dan budaya lokal 3. Mangadakan program sosialisasi dan pendampingan terkait penggunaan transaksi cashless di berbagai event daerah

		4. Meningkatkan keterlibatan lembaga riset baik akademisi dan swasta dalam pemetaan potensi daerah secara digital
--	--	---

Sumber : Kertas Kerja Bimtek 1 *Smart City* 2023

Analisis TOWS pada *Smart Economy* memiliki sebuah gambaran terdapat aspek-aspek dalam *Smart Economy* yang perlu ditingkat dengan melihat kondisi Buleleng yang merupakan kota dengan berbagai macam karakter menjadi salah satu peluang untuk bisa dimanfaatkan . potensi lokal yang dimiliki oleh Buleleng menjadi faktor pendorong bagi masyarakat untuk mencitpkan sebuah pemasukan dalam mensejahterakan ekonomi. Sektor UMKM yang mendominasi Buleleng setidaknya dapat menjadi sumber kekuatan dalam sektor ekonomi daerah. Perlu adanya perlindungan bagi UMKM dan kejaminan kesejahteraan untuk bisa mendanai produk UMKM tersebut. Selain itu, teknologi yang masih belum bisa sepenuhnya diterapkan di UMKM Kabupaten Buleleng juga harus dioptimalkan dengan memberikan akses internet dan edukasi serta menyediakan platform digital untuk wadah UMKM. Kemudian beranjak dari pembahasan tersebut bahwa *Smart Economy* yang akan dikembangkan di Kabupaten Buleleng juga harus memperhatikan unsur budaya, sebab budaya yang mengajarkan bagaimana untuk berkeadilan dan mensejahterakan. Samrt Econony Kabupaten Buleleng juga harus bisa menciptakan lapangan pekerjaan untuk bisa memenuhi kebutuhan primer bagi masyarakat. Perlu adanya investasi untuk bisa membuka lapangan pekerjaan, sebagaimana investasi merupakan solusi yang paling baik dalam meningkatkan ekonomi sebuah daerah. Investasi yang berbasis kesejahteraan bisa dirawat dengan baik sehingga investasi tersebut bisa berkelanjutan.

4.3.4. Analisis TOWS *Smart Living*

Analisis TOWS pada *Smart Living* dibagi menjadi dua faktor yaitu internal dan eksternal. Kedua faktor tersebut berdasarkan kondisi yang ada di Buleleng sehingga dapat dilihat apa yang menjadi fokus perhatian untuk pengembangan. Dalam hal ini pengembangan *Smart Living* difokuskan kepada pengetahuan masyarakat terhadap tanggap bencana, aksesibilitas layanan KB, meningkatkan potensi pariwisata, sarana dan prasarana

dibidang kesehatan untuk meningkatkan pelayanan masyarakat, harmonisasi tata ruang. Untuk lebih detail dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 4. 16 TOWS *Smart Living*

Analisis TOWS		
	Kekuatan	Kelemahan
Faktor Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Potensi pariwisata: Jalan yang baik memungkinkan akses yang lebih mudah ke destinasi wisata, meningkatkan sektor pariwisata dan pendapatan yang terkait. 2. Aksesibilitas: Layanan mobil KB keliling memberikan akses yang mudah bagi wanita yang membutuhkan layanan KB tanpa harus pergi ke pusat kesehatan atau klinik khusus. 3. Tim tanggap bencana yang terlatih: Adanya tim tanggap bencana yang terlatih dan berpengalaman dapat meningkatkan efektivitas penanganan bencana, termasuk dalam upaya evakuasi, pencarian dan penyelamatan, serta penyediaan bantuan darurat. 4. Dukungan pemerintah: Adanya kebijakan dan program dari pemerintah untuk memberikan bantuan rumah tidak layak huni menunjukkan adanya komitmen yang kuat dalam mengatasi masalah tersebut. 5. Unit Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor yang sudah terakreditasi A 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Biaya tinggi: Pembangunan infrastruktur jalan sering membutuhkan investasi yang besar, terutama jika ada kebutuhan untuk memperbaiki jalan yang sudah ada 2. Keterbatasan sumber daya: Layanan mobil KB keliling mungkin memiliki sumber daya terbatas dalam hal personel, peralatan, dan pendanaan yang dapat membatasi kemampuan mereka untuk mencapai target pasar yang lebih luas 3. Kurangnya kesadaran masyarakat: Beberapa masyarakat mungkin kurang memiliki pemahaman tentang ancaman bencana dan bagaimana menghadapinya. Kurangnya kesadaran ini dapat menghambat upaya penanggulangan bencana 4. Bantuan rumah tidak layak huni mungkin menghadapi keterbatasan dalam hal dana, tenaga kerja, dan material, yang dapat membatasi kemampuan untuk membantu semua rumah yang membutuhkan 5. Fasilitas perlengkapan jalan dan keselamatan jalan yang kurang memadai
Faktor Eksternal		

	6. Rumah Sakit Tipe B Pendidikan dengan akreditasi paripurna dengan dukungan fasilitas IT yang memadai 7. Peningkatan PAD dari sektor Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	6. Kebijakan yang kurang mendukung terkait pengembangan kapasitas dan kapabilitas system dan IT support
Peluang 1. Pertumbuhan ekonomi: Pembangunan jalan baru dapat meningkatkan konektivitas dan dukungan dari pemerintah pusat 2. Jumlah PUS (Pasangan Usia Subur) yang tinggi di Kab. Buleleng 3. Kesadaran masyarakat: Melalui pendidikan dan kampanye kesadaran, masyarakat dapat lebih siap menghadapi bencana, termasuk dengan membangun kapasitas mereka sendiri untuk mengatasi ancaman bencana 4. Dukungan dari pemerintah pusat dan kemitraan dari pihak swasta dan lintas sector terkait	Strategi Peluang dan Kekuatan 1. Meningkatkan kunjungan wisatawan ke Buleleng dengan memanfaatkan kondisi jalan yang baik 2. Menjalin kerjasama dengan faskes dan jejaringnya 3. Revitalisasi sarana dan prasarana di bidang perhubungan 4. Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas SDM	Strategi Kelemahan dan Peluang 1. Mengajukan usulan bantuan dana pusat, provinsi maupun CSR dari pihak swasta 2. Penetapan kebijakan dari pemerintah
Ancaman 1. Kerusakan akibat bencana alam: Bencana alam seperti banjir, gempa bumi, atau tanah longsor dapat menyebabkan kerusakan pada infrastruktur jalan yang ada. 2. Perubahan iklim: Perubahan iklim dapat meningkatkan frekuensi dan intensitas	Strategi Ancaman dan Kekuatan 1. Melakukan komunikasi informasi dan edukasi ke masyarakat serta kerjasama dengan lintas sector untuk meningkatkan pemahaman serta kesadaran masyarakat terkait pengembangan potensi diri maupun wilayah	Strategi Kelemahan dan Ancaman 1. Mitigasi bencana 2. Sosialisasi kebijakan pemerintah 3. Meningkatkan fasilitas perlengkapan jalan

<p>bencana alam, seperti banjir, kekeringan, dan badai. Ancaman ini memerlukan upaya penanggulangan bencana yang lebih besar dan berkelanjutan</p> <p>3. Tuntutan kualitas Rumah layak huni</p> <p>4. Tingginya angka kecelakaan</p> <p>5. Tuntutan dari masyarakat terkait pelayanan yang mudah dan cepat</p>	<p>2. Meningkatkan kualitas pengujian kendaraan bermotor untuk mengurangi kecelakaan lalu lintas</p>	
--	--	--

Sumber : Kertas Kerja Bimtek 1 *Smart City* 2023

Analisis TOWS pada *Smart Living* merupakan sebuah pendekatan yang dapat mengetahui mana potensi-potensi permasalahan yang akan melahirkan solusi untuk menjawab permasalahan tersebut. Saat ini pada *Smart Living* Kabupaten Buleleng upaya peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, kesiapan dalam meningkatkan pelayanan kesehatan juga harus seimbang dengan sumber daya yang ada adapun diantaranya yaitu anggaran yang digunakan, sumber daya manusia seperti tenaga kesehatan dan alat-alat kesehatan. Kesehatan menjadi faktor penting dalam Smart ini sebab Kabupaten Buleleng yang rencananya akan membuat rumah sakit yang berbasis internasional maka harus adanya reformasi layanan kesehatan. Selain itu, edukasi tentang pemahaman bencana mulai dari cara penanganannya, cara menghadapinya dan juga cara bertahan hidup ketika terjadi bencana merupakan pendekatan yang sangat diperlukan dalam kondisi keadaan darurat.

4.3.5. Analisis TOWS *Smart Society*

Analisis TOWS pada *Smart Society* dibagi menjadi dua faktor yaitu internal dan eksternal yang mana kedua faktor tersebut terdapat kekuatan dan kelemahan serta strategi yang akan dihadapi. Dalam *Smart Society* difokuskan kepada menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan edukasi kepada masyarakat untuk menciptakan ruang kondisi yang harmonis, membangun ekosistem belajar yang berkualitas dilingkungan masyarakat, membangun sinergitas antara desa dan dinas sebagai peningkatan pelayanan dasar. Untuk lebih detail dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 4. 17 TOWS *Smart Society*

Analisis TOWS		
	Kekuatan	Kelemahan
Faktor Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah tenaga pendidik yang banyak 2. Perangkat desa banyak yang sudah memahami penggunaan internet. 3. Jumlah tenaga trantibum linmas yang memadai 4. SDM pelaksana kegiatan yang memadai 5. Transformasi teknologi pembelajaran dalam pendidikan 6. Telah terpasangnya jaringan internet pada setiap desa. 7. Penggunaan CCTV sebagai alat kontrol menciptakan keamanan dan kenyamanan 8. Sumber daya manusia atau PSKS (Potensi sumber kesejahteraan sosial) yang membantu dalam penanganan PMKS sudah terlatih di bidang sosial. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masih banyaknya tenaga pendidik yang belum memahami teknologi 2. Belum optimalnya penggunaan internet oleh perangkat desa untuk pelayanan 3. Kurangnya alur komunikasi dalam penanganan keamanan yang bersifat urgent. 4. Belum semua SDM ahli dan memahami aplikasi pelaksanaan kegiatan 5. Belum meratanya ketersediaan fasilitas perangkat dan jaringan internet 6. Stabilitas jaringan internet belum merata 7. Belum semua titik di desa maupun dalam kota yang sudah terpasang spot CCTV. 8. Akses internet dan dukungan peralatan dalam menunjang dalam pendataan dan penyaluran bantuan masih kurang
Faktor Eksternal		

<p style="text-align: center;">Peluang</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Brand Singaraja sebagai kota pendidikan, memberi dampak positif pada terpusatnya SDM yang unggul dalam berbagai profesi contoh: tenaga pengajar. 2. Terpasangnya internet pada setiap desa dan kelurahan memudahkan masyarakat dan perangkat desa untuk memperluas jaringan pertemanan dan bisnis 3. Dengan suasana yang aman dan kondusif dapat menciptakan kreatifitas masyarakat. 4. Peningkatan pelayanan publik 	<p style="text-align: center;">Strategi Peluang dan Kekuatan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Membangun kerjasama/kolaborasi dengan stakeholder terkait dalam upaya membangun pendidikan di Buleleng (kerjasama dengan dosen, pemerhati pendidikan, dll) 2. Membangun sinergitas antara desa dengan dinas terkait 3. Menambah titik spot CCTV dan aplikasi pengaduan gangguan ketentraman dan ketertiban umum. 4. Sosialisasi dan pengembangan terhadap aplikasi pelayanan publik. 	<p style="text-align: center;">Strategi Kelemahan dan Peluang</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Wadah kerjasama dan pembiayaan komunitas perlu dipertimbangkan. 2. Memberikan pemahaman kepada perangkat desa dan bekerjasama dengan dinas terkait. 3. Melakukan survey lokasi pemasangan titik spot CCTV dan kamera pengawas 4. Bekerjasama dengan pihak ketiga
<p style="text-align: center;">Ancaman</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyalahgunaan TIK dapat meningkatkan pornografi dan penyalahgunaan lainnya. 2. Peningkatan biaya pemeliharaan peralatan internet dan jaringan. 3. Meningkatnya harga teknologi dan luasnya wilayah yang mesti dipasang alat pengawas serta pemeliharaan yang harus kontinue akibat kerusakan 4. Tuntutan peningkatan kualitas pelayanan dari masyarakat 	<p style="text-align: center;">Strategi Ancaman dan Kekuatan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan edukasi kepada siswa dan masyarakat serta penguatan pendidikan karakter 2. Meningkatkan dan memprioritaskan anggaran pemeliharaan peralatan internet dan jaringan. 3. Menambah dan mengusulkan serta memprioritaskan pengadaan dan pemeliharaan alat pengawas 4. Pendayagunaan SDM untuk mengembangkan pelayan publik 	<p style="text-align: center;">Strategi Kelemahan dan Ancaman</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan perangkat dan teknologi pembelajaran serta membuat wadah pelatihan penggunaan teknologi yang positif dan bijaksana 2. Mengadakan sosialisasi dan monitoring kepada perangkat desa tentang penggunaan internet. 3. Melaksanakan monitoring titik rawan ancaman keamanan 4. Mengadakan survei terkait pelayanan kepada masyarakat

Sumber : Kertas Kerja Bimtek 1 *Smart City* 2023

Analisis TOWS pada *Smart Society* merupakan sebuah pendekatan untuk mengetahui kelemahan dari faktor internal dan eksternal, setelah itu dapat mengetahui potensi-potensi apa yang perlu dikembangkan pada *Smart Society*. Pada *Smart Society* dapat diketahui bahwa terdapat kekurangan-kekurangan yang difokuskan kepada masih banyak tenaga pendidik yang belum bisa menggunakan teknologi, CCTV yang sangat minim untuk pengawasan virtual agar terciptanya lingkungan yang aman dan nyaman, belum meratanya akses jaringan internet ke pelosok-pelosok daerah terutama pada daerah yang sulit dijangkau. Pemanfaatan teknologi menjadi poros utama dalam menerapkan *Smart City* sebab modal awalnya adalah perkembangan teknologi. *Smart Society* mengidentifikasi pokok-pokok yang harus diperbaiki untuk menghasilkan. Sebuah solusi yang dapat berkolaborasi antara stakeholder di daerah menjadi kekuatan untuk membangun *Smart Society* yang lebih cepat dan efektif. Proses perbaikan yang dimulai dari hulu atau dari desa merupakan sebuah tantangan tersendiri sebab saat ini masih banyak masyarakat desa dan aparat desa belum bisa beradaptasi dengan perkembangan zaman sehingga perlu adanya peningkatan kualitas dari sumber daya manusia agar memiliki pengetahuan tertentu.

4.3.6. Analisis TOWS *Smart Environment*

Analisis TOWS pada *Smart Environment* lebih ditekankan kepada perlindungan lingkungan, tata kelola sampah dan energi. Dalam hal ini terdapat beberapa yang menjadi fokus yaitu diantaranya adalah mengoptimalkan peran Aparatur Sipil Negara untuk memiliki kompetensi dalam pengelolaan lingkungan, menjaga kelestarian alam, meningkatkan kualitas layanan kebersihan, pemanfaatan sumber daya untuk keberlangsungan lingkungan. Selain itu untuk kajian yang lebih detail pemerintah daerah akan bekerja sama dengan perguruan tinggi untuk mengetahui potensi-potensi alam yang ada di Buleleng. Untuk lebih detail dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 4. 18 TOWS *Smart Environment*

Analisis TOWS		
<div style="text-align: center;"> Faktor Internal </div> <div style="text-align: center;"> Faktor Eksternal </div>	<div style="text-align: center;"> Kekuatan </div> <ol style="list-style-type: none"> Memiliki ASN dengan latar pendidikan dan kompetensi dibidang lingkungan Mendapatkan dukungan anggaran APBD Pemkab Buleleng untuk pelaksanaan program kegiatan berbasis lingkungan Komitmen yang kuat dari pimpinan daerah untuk mewujudkan Buleleng bersih dan bebas sampah Tersedianya perangkat organisasi dan tata kerja yang efektif untuk mendukung pelaksanaan program kegiatan 	<div style="text-align: center;"> Kelemahan </div> <ol style="list-style-type: none"> Terbatasnya jumlah ASN yang memiliki kompetensi khusus dibidang lingkungan Terbatasnya anggaran APBD untuk mendanai inovasi teknologi untuk pengelolaan sampah Belum semua komponen masyarakat menyadari pentingnya menciptakan lingkungan bersih dan sehat Terbatasnya sarana prasarana dan infrastruktur yang dibutuhkan untuk mewujudkan program kota bersih cerdas
	<div style="text-align: center;"> Peluang </div> <ol style="list-style-type: none"> Ada perguruan tinggi yang memiliki kompetensi bidang kesehatan masyarakat dan lingkungan Ada dukungan dari vendor yang peduli terhadap kelestarian lingkungan Pemerintah daerah memberikan kesempatan bagi para ASN untuk meningkatkan kompetensi di bidang pengelolaan lingkungan Mudahnya mengakses internet dan media online 	<div style="text-align: center;"> Strategi Peluang dan Kekuatan </div> <ol style="list-style-type: none"> Menyusun MoU dengan perguruan tinggi untuk melakukan penelitian terkait pengelolaan lingkungan di Kabupaten Buleleng Membangun relasi yang baik dengan vendor untuk dapat berpartisipasi dalam pelestarian lingkungan di Kabupaten Buleleng Menyediakan anggaran bimtek untuk peningkatan kompetensi di bidang pengelolaan lingkungan <div style="text-align: center;"> Strategi Kelemahan dan Peluang </div> <ol style="list-style-type: none"> Memberikan kesempatan yang lebih luas bagi ASN yang memiliki kompetensi khusus Mencari sumber-sumber pendanaan lain di luar APBD Memberikan sosialisasi bagi pemangku kepentingan untuk menyadari akan pentingnya bersinergi dalam membangun lingkungan Memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya lingkungan sehat

Ancaman	Strategi Ancaman dan Kekuatan	Strategi Kelemahan dan Ancaman
<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya kebutuhan masyarakat akan layanan kebersihan dan lingkungan sehat 2. Meningkatnya jumlah populasi penduduk berbanding lurus timbulan sampah 3. Adanya perubahan perilaku masyarakat yang lebih konsumtif, sehingga jenis sampah sangat variatif 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengoptimalkan peran ASN dan non ASN dalam meningkatkan layanan publik 2. Meningkatkan kualitas layanan kebersihan 3. Memperbanyak kegiatan kreatif berbasis lingkungan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bekerjasama dengan pemerintah daerah lain yang telah memiliki inovasi terkait lingkungan dan pengelolaan sampah 2. Bekerjasama dengan komunitas sadar lingkungan untuk bersama-sama memberikan edukasi lingkungan bersih kepada masyarakat 3. Memberikan edukasi ke masyarakat tentang pelestarian lingkungan

Sumber : Kertas Kerja Bimtek 1 *Smart City* 2023

Pada analisis TOWS *Smart Environment* merupakan sebuah pendekatan untuk bisa mendeteksi potensi-potensi kelemahan dan kelebihan dari faktor internal serta eksternal yang nanti nya akan menghasilkan sebuah solusi kebijakan ataupun program untuk menjadi permasalahan yang ada. *Smart Environment* saat ini sudah menganalisis mana aspek mana yang harus menjadi perhatian perbaikan adapun yaitu masih minimnya pengetahuan Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk pengelolaan sampah, minimnya inovasi sampah untuk menjadi energi terbarukan, edukasi kepada masyarakat untuk memberikan pengetahuan tentang limbah rumah tangga dan sampah. Pemerintah Kabupaten Buleleng harus bisa mengolah sampah dan limbah dengan baik karena ini merupakan perwujudan dari penerapan konsep *Smart City*. Perlu adanya kolaborasi kepada pihak ketiga untuk bisa melihat secara utuh dan detail dengan melakukan sebuah riset. Untuk mendukung apa yang sudah dirumuskan maka perlunya anggaran yang cukup untuk bisa mengakomodasi rumusan tersebut. Anggaran tidak harus bersumber dari 1 potensi pendanaan saja akan tetapi perlu adanya sumber potensi dana lain untuk bisa menunjang program dan rumusan yang sudah dibuat.

5. ANALISIS VISI PEMBANGUNAN *SMART CITY*

5.1. Visi dan Misi *Smart City*

Pada bagian ini visi misi *Smart City* yang dibuat oleh Kabupaten Buleleng menyesuaikan dengan visi misi daerah dan dokumen RPD Kabupaten Buleleng Tahun 2023-2026. Visi misi yang sudah dibuat merupakan sebuah cita-cita daerah untuk bisa mengembangkan potensi daerah melalui program *Smart City*. Terdapat pengembangan-pengembangan prioritas yang sudah dirumuskan untuk meningkatkan pelayanan dan daya saing daerah untuk kemajuan Buleleng.

5.1.1. Visi *Smart City* Kabupaten Buleleng

Visi Kabupaten Buleleng yaitu “Buleleng Kerta Raharja Mengantarkan Bali Dwipa Jaya Berlandaskan Tri Hita Karana”. Buleleng Kerta Raharja berarti Buleleng aman dan sejahtera. Mengantarkan Bali Dwipa Jaya mengandung makna Buleleng berada pada garda terdepan menuju Bali Dwipa Jaya, Buleleng merupakan representasi sebagian dari budaya Bali. Berlandaskan Tri Hita Karana berarti pembangunan Buleleng berlandaskan filsafat hidup masyarakat Bali. Jika dikaitkan dengan konsep *Smart City* visi dari Kabupaten Buleleng cerminan enam dimensi *Smart City*, dimana keenam konsep tersebut memberikan kesejahteraan, kemudahan, pemecahan masalah masyarakat serta mengayomi dan melayani masyarakat. Keenam konsep *Smart City* harus melekat pada Kabupaten Buleleng yang berlandaskan visi yang sudah dibuat. Maka dalam ini keberlanjutan serta keberlangsungan kehidupan yang aman dan nyaman harus diterapkan di Kabupaten Buleleng. Sebuah daerah sudah menentukan visi maka harus dipasangkan oleh misi.

Dalam membentuk suatu konsep *Smart City* diperlukan visi dan misi pembangunan *Smart City*. Berdasar pada hal tersebut Kabupaten Buleleng telah menyusun visi dan misi untuk mendukung pembangunan Master Plan *Smart City* Kabupaten Buleleng. Adapun visi Pembangunan *Smart City* Kabupaten Buleleng adalah sebagai berikut:

“Buleleng Cerdas Menuju Kerta Raharja Berlandaskan Tri Hita Karana”

visi tersebut mempunyai arti sebagai meningkatkan pelayanan yang berlandaskan konsep *Smart City* yang aman dan nyaman sejahtera untuk kepentingan masyarakat Buleleng. Serta hal ini selaras dengan Tri Hita Karana merupakan konsep atau ajaran dalam agama Hindu yang

selalu menitikberatkan bagaimana antara sesama bisa hidup berdampingan, saling bertegur sapa satu dengan yang lain, tidak ada riak-riak kebencian, penuh toleransi dan penuh rasa damai. Tri Hita Karana bisa diartikan secara leksikal yang berarti tiga penyebab kesejahteraan. Istilah ini terambil dari kata tri yang artinya tiga, hita yang artinya keseimbangan atau sejahtera, dan karana yang artinya penyebab. Ketiga hal tersebut adalah Parahyangan, Pawongan, dan Palemahan.

Dalam visi *Smart City* Kabupaten Buleleng mempunyai arti sebagai berikut:

1. **Buleleng Cerdas** : Mempunyai arti yaitu memiliki masyarakat yang unggul dalam pengetahuan, menerapkan teknologi secara cergas dalam pelayanan masyarakat serta memiliki kemampuan dalam beradaptasi sesuai dengan perkembangan zaman.
2. **Menuju Kerta Raharja** : Mempunyai tatanan kehidupan yang sejahtera lahir dan batin secara seimbang, serasi adil dan merata
3. **Berlandaskan Tri Hita Karana** : Berlandaskan hubungan yang harmonis antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan lingkungan alam dan isinya, dan manusia dengan manusia.

5.1.2. Misi *Smart City* Kabupaten Buleleng

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. :

Tabel 5. 1 Misi *Smart City* Kabupaten Buleleng

No	Pernyataan Misi	Pernyataan Misi <i>Smart City</i>	Dimensi <i>Smart City</i>
Misi 1	Mewujudkan masyarakat Buleleng yang unggul, kompetitif, dan bertaqwa kepada Tuhan, dengan jalan membangun sumberdaya manusia yang berkualitas, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, serta memiliki daya saing, melalui penyelenggaraan pendidikan dan pelayanan kesehatan yang berkualitas untuk semua warga masyarakat.	Mewujudkan Masyarakat Buleleng berkualitas, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi informasi, yang didukung dengan lingkungan aman dan nyaman	<i>Smart Society</i>
Misi 2	Mewujudkan masyarakat yang mampu memenuhi kebutuhan hidup, dengan jalan melaksanakan pembangunan bidang ekonomi untuk meningkatkan pendapatan dan pemerataan pendapatan	Mewujudkan masyarakat Buleleng yang memiliki keunggulan ekonomi dengan memanfaatkan teknologi informasi	<i>Smart Economy</i>

	masyarakat, mengurangi pengangguran dan kemiskinan.	berlandaskan kearifan lokal	
Misi 3	Mewujudkan keamanan daerah dan masyarakat, dengan menyelenggarakan pemerintahan yang baik, memperkuat sistem keamanan, meningkatkan peran masyarakat sipil, mendorong pengarusutamaan gender, menegakkan budaya hukum dan politik, dan memantapkan pelaksanaan otonomi daerah.	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel berbasis teknologi	<i>Smart Governance</i>
Misi 4	Mewujudkan kebudayaan yang responsif terhadap perkembangan zaman dan lingkungan global, melalui pelestarian, pewarisan dan pengembangan nilai-nilai budaya yang dijiwai oleh agama Hindu, pemantapan kelembagaan, dan aktivitas budaya.	Mewujudkan digitalisasi pariwisata budaya yang berbasis pelestarian dan pengembangan nilai budaya lokal.	<i>Smart Branding</i>
Misi 5	Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, dengan jalan melaksanakan pembangunan yang seimbang antar lapisan masyarakat, antar sektor, dan antar wilayah, mempertahankan dan meningkatkan kemampuan lingkungan untuk menopang pembangunan, sehingga pembangunan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat saat ini dengan tidak mengurangi hak generasi berikutnya akan sumberdaya alam.	Mewujudkan tata kelola pembangunan menuju pelestarian lingkungan berbasis teknologi	<i>Smart Environment</i>
		Mewujudkan kualitas dan kuantitas hidup masyarakat melalui infrastruktur dan pelayanan publik berbasis teknologi informasi	<i>Smart Living</i>

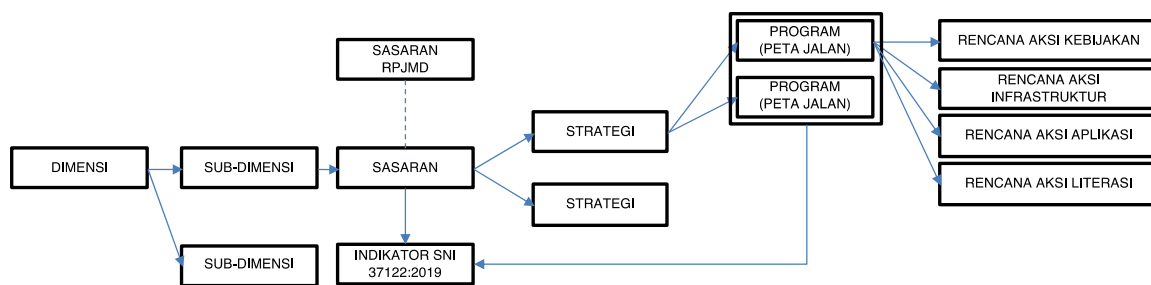
Sumber: Bimbingan Teknis 1 *Smart City* 2023

5.2.Sasaran *Smart City* Daerah

Visi misi *Smart City* Kabupaten Buleleng telah dirumuskan, maka kemudian visi misi tersebut diuraikan menjadi sebuah ukuran capaian indikator dalam pelaksanaan *Smart City*. Program dan kebijakan yang sudah dibuat oleh pemangku kepentingan harus selaras dengan visi misi yang sudah dibuat kemudian dari pandangan tersebut yang dapat menjadi pedoman arah implementasi *Smart City*

Kemudian visi misi yang merupakan terjemahan dari cita-cita daerah memiliki keterkaitan dengan dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Buleleng 2023-2026 yang kemudian memiliki keterhubungan kepada dimensi *Smart City* yang mana jika diuraikan menjadi 6 sub-dimensi *Smart City* yang memiliki fokus tersendiri

Sasaran *Smart City* daerah kemudian dicapai melalui serangkaian strategi dan program *Smart City*, baik program pada peta jalan maupun ada rencana aksi *Smart City* daerah, yang akan dikembangkan pada Dokumen 2 yaitu Master Plan *Smart City* Daerah.



Gambar 1 Kerangka Keterkaitan antara Sasaran *Smart City* dengan RPD

Sumber : Buku Panduan *Smart City* Kominfo

Sebuah sasaran *Smart City* daerah yang baik harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. *Specific*, yaitu definisi indikator kinerja *Smart City* harus jelas dan tidak bermakna ganda sehingga mudah untuk dimengerti dan digunakan.
2. *Measurable*, yaitu indikator yang digunakan dapat diukur dengan skala penilaian tertentu yang disepakati, dapat berupa pengukuran secara kuantitas, kualitas atau harga.
3. *Appropriate*, yaitu indikator yang dipilih harus sesuai dengan upaya peningkatan pelayanan/kinerja.

4. *Relevant*, yaitu indikator terkait secara logis dengan visi *Smart City* yang diinginkan serta tugas dan fungsi masing-masing institusi yang bertanggung jawab.
5. *Continously improved*, yaitu terdapat peningkatan kinerja seiring dengan terlaksananya program-program *Smart City*.
6. *Cost-effective*, manfaat target capaian kinerja *Smart City* yang diinginkan sebanding atau dapat dicapai dengan biaya yang harus dialokasikan.

Dalam tabel Sasaran *Smart City* ini diuraikan menjadi 6 sub-dimensi *Smart City* yang mana mempunyai fokus masing-masing sesuai dengan kebutuhan daerah. Kabupaten Buleleng telah menguraikan sasaran ini menjadi fokus perhatian pengembangan daerah dengan berdasarkan kondisi saat ini serta sumber daya yang dimiliki daerah. Dalam menjalankan sasaran nya terdapat landasan pemikiran untuk menjadi pedoman dalam implementasi *Smart City* yang diuraikan menjadi sub-dimensi *Smart City*. Untuk lebih detail dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut

Tabel 5. 2 Sasaran *Smart City* Kabupaten Buleleng

DIMENSI	SUB-DIMENSI	SASARAN	DASAR PEMIKIRAN
SMART GOVERNANCE	LAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kulaitas layanan publik dan melakukan integrasi NIK dengan semua jenis layanan	UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Presiden No. 95 tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
	BIROKRASI	Meningkatnya efisiensi manajemen birokrasi	UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023 dan Permenpan No. 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Permenpan No. 25 Tahun 2020 tentang Road Map RB Tahun 2020-2024
	PERANCANGAN KEBIJAKAN	Meningkatnya keterlibatan publik dalam manajemen kebijakan publik	UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
SMART BRANDING	PARIWISATA	Peningkatan daya saing destinasi pariwisata kualitas pemasaran pariwisata, SDM pariwisata, kualitas ekonomi kreatif dan peningkatan PDRB sektor pariwisata	Peraturan Pemerintah No.50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010-2025
	DAYA SAING BISNIS	Meningkatnya kualitas dan kuantitas investasi ke Kabupaten Buleleng	Peraturan Menteri Investasi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kemitraan Di Bidang Penanaman Modal Antara Usaha Besar Dengan Usaha, Kecil, Dan Menengah Di Daerah

DIMENSI	SUB-DIMENSI	SASARAN	DASAR PEMIKIRAN
	WAJAH (TAMPILAN) KOTA	Mengembangkan DTW dan Kawasan Pariwisata dan peningkatan pengembangan, dan pelestarian benda situs cagar budaya dan lembaga adat	Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan
SMART ECONOMY	EKOSISTEM INDUSTRI	Meningkatkan sebaran industry pengolahan meningkatkan jumlah dan daya saing UMKM Meningkatkan jumlah dan daya saing koperasi	Peraturan Menteri Investasi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kemitraan Di Bidang Penanaman Modal Antara Usaha Besar Dengan Usaha, Kecil, Dan Menengah Di Daerah
	KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	Peningkatan Kuantitas, kualitas produk pertanian, perkebunan, kehutanan dan perikanan	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan
	EKOSISTEM TRANSAKSI KEUANGAN	Kemudahan berinvestasi dan membangun platform investasi bagi pembangunan di Kabupaten Buleleng	Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi Daerah
SMART LIVING	HARMONISASI TATA RUANG	Terwujudnya pola ruang yang sesuai dengan peruntukan ruang	Peraturan Pemerintah No.34 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Kawasan Perkotaan
	KESEHATAN	Meningkatnya cakupan kepesertaan PUS ber KB dan Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat Peraturan BKKBN Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pemenuhan Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Bagi Pasangan Usia Subur Dalam Pelayanan Keluarga Berencana
	TRANSPORTASI	Terwujudnya Keselamatan Transportasi	Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 26 Tahun 2015 tentang Standart Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

DIMENSI	SUB-DIMENSI	SASARAN	DASAR PEMIKIRAN
SMART SOCIETY	INTERAKSI MASYARAKAT	Peningkatan pelayanan publik, kualitas pelayanan internet dan pengembangan aplikasi	UU No 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Permenkominfo RI No 8 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Jasa Internet Telepon Untuk Keperluan Publik
	EKOSISTEM BELAJAR/ PENDIDIKAN	Meningkatkan kualitas belajar dan pendidikan di Kabupaten Buleleng	Permendagri 59 tahun 2021 tentang standart pelayanan minimal
	KEAMANAN MASYARAKAT	Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Masyarakat	Perda No. 6 tahun 2009 tentang ketentraman dan ketertiban umum dan Perda No. 2 th 2021 jo.Perda no. 1 tentang perijinan
SMART ENVIRON-MENT	PROTEKSI LINGKUNGAN	Membuat kebijakan dan penyusunan dokumen KLHS serta penyusunan dokumen RPPLH	Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
	PENGELOLAAN SAMPAH DAN LIMBAH	Membentuk Bank Sampah Unit untuk mengurangi timbulan sampah yang masuk ke TPA serta melakukan pengolah sampah organik dan anorganik	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Reduce, Reuse dan Recycle Melalui Bank Sampah
	TATA KELOLA ENERGI	Melakukan inovasi tempat pengolahan sampah menjadi energi listrik dan pengolahan sampah menjadi briket	Peraturan Menteri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Abu Dasar dan Abu Terbang Hasil Pengolahan Sampah Secara Termal

Sumber : Bimbingan Teknis Tahap 1 *Smart City* Kabupaten Buleleng 2023

Sasaran *Smart City* pada masing-masing dimensi merupakan turunan dari visi misi *Smart City* Kabupaten Buleleng yang sudah dirumuskan, sasaran *Smart City* tersebut mengacu kepada prioritas pembangunan pengembangan dari masing-masing dimensi yang sudah berdasarkan kebutuhan daerah. Diawali dengan *Smart Governance* yang difokuskan untuk mengoptimalkan layanan publik, birokrasi dan perancangan kebijakan. *Smart Branding* yang difokuskan kepada pariwisata, daya saing bisnis dan wajah(tampilan kota). *Smart Economy* difokuskan upaya peningkatan ekosistem industri, kesejahteraan masyarakat dan ekosistem transaksi keuangan. *Smart Living* yang difokuskan kepada upaya peningkatan harmonisasi tata ruang, kesehatan dan transportasi. *Smart Society* yang difokuskan kepada upaya interaksi masyarakat, ekosistem belajar/pendidikan dan keamanan masyarakat. *Smart Environment* yang difokuskan proteksi lingkungan, pengelolaan sampah dan limbah dan tata kelola energi. Fokus sasaran sub-dimensi tersebut sudah berdasarkan kondisi budaya Buleleng, dari sub-dimensi tersebut dirumuskan sasaran yang menyesuaikan permasalahan yang ada di Buleleng. Berangkat dari apa yang sudah ditentukan bahwa sasaran-sasaran tersebut harapan nya dapat memberi pengaruh positif terhadap penerapan konsep *Smart City* di Kabupaten Buleleng.

6. PENUTUP

Buku Satu adalah analisis Strategis *Smart City* Kabupaten Buleleng yang menjadi pedoman pengembangan Master Plan *Smart City* Kabupaten Buleleng. Dalam Buku Satu ini dilakukan analisis Visi Pembangunan Daerah berdasarkan RPD, daya saing daerah, dan analisis kondisi eksternal yang berkaitan dengan politik, ekonomi, sosial, teknologi, lingkungan hidup, dan peraturan perundang-undangan. Tahap selanjutnya adalah Analisis Kesiapan Daerah, yang meliputi evaluasi sifat, struktur, infrastruktur, suprastruktur (kebijakan dan kelembagaan), dan budaya. Analisis kesiapan daerah menjadi dasar untuk analisis gap, analisis SWOT, dan analisis TOWS untuk setiap dimensi *Smart City*. Di akhir buku, disajikan hasil analisis Visi Pembangunan *Smart City* dan Sasaran Pembangunan *Smart City*.

Buku Analisis Strategis *Smart City* Kabupaten Buleleng disusun dengan data yang tersedia dalam dokumen-dokumen dan dikumpulkan dalam Bimtek serta Focus Group Discussion, serta memperhatikan peraturan perundangan yang masih berlaku hingga buku ini disusun.

Daftar Pustaka

1. Laporan RPJMD Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2022
2. Laporan RPD Kabupaten Buleleng Tahun 2023 -2026
3. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana **Provinsi Bali** Tahun 2018-2023 - <https://www.baliprov.go.id/web/wp-content/uploads/2022/09/PERDA-RPJMD-PERUBAHAN-SEMESTA-BERENCANA-PROVINSI-BALI-2018-2023.pdf>
4. Implentasi Ajaran Tri Hita Karana Dalam Kehidupan diakses dari: <https://kemenag.go.id/hindu/implentasi-ajaran-tri-hita-karana-dalam-kehidupan-4s9s1u>
5. Bimbingan Teknis I Kabupaten Buleleng 25 Juli Tahun 2023

BUKU II

MASTERPLAN *SMART CITY* KABUPATEN BULELENG TAHUN 2024-2033



BUKU 2

MASTERPLAN SMART CITY KABUPATEN BULELENG

PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG 2023

"Buleleng Cerdas Menuju Kerta Raharja Berlandaskan
Tri Hita Karana"



SAMBUTAN KEPALA DAERAH KABUPATEN BULELENG

Om Swastyastu,
Assalamulaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Salam Sejahtera Bagi Kita Semua,
Salom,
Namo Budaya,
Salam Kebajikan

Salam Hormat,

Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia yang telah memberikan kesempatan kepada Kabupaten Buleleng untuk menjadi bagian dari proses *Smart City* pada tahun ini. Pembangunan berbasis *Smart City* pada Pemerintahan Daerah Kabupaten Buleleng merupakan sebuah strategi yang komprehensif, inklusif, efektif, dan efisien. Terobosan baru dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi informasi yang inovatif dan kreatif harus dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang semakin berkembang dan kompleks. Konsep pembangunan *Smart City* sendiri merupakan pembangunan yang berkelanjutan dengan pemanfaatan berbagai sumberdaya yang ada, adanya efisiensi dalam pengelolaan pemerintah, dan transparansi serta kemudahan pelayanan publik sehingga masyarakat lebih mudah, nyaman, dan sejahtera menuju kota yang smart sesuai dengan keunggulan, potensi, dan tantangan yang dimiliki di Kabupaten Buleleng.

Mewujudkan konsep *Smart City* ini membutuhkan waktu yang tidaklah singkat, untuk itu dibutuhkan keseriusan dan usaha yang gigih oleh setiap elemen, baik pemerintahan dan masyarakat. Dengan terpilihnya Pemerintah Kabupaten Buleleng sebagai Kabupaten yang mendapat Pendampingan Masterplan Kota Cerdas Tahun 2023, penerapan konsep *Smart City* diharapkan dapat meningkatkan pelayanan masyarakat menjadi lebih baik, lebih transparan, akuntabel dan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas di berbagai kegiatan dan layanan sehingga seirama dengan Visi *Smart City* Kabupaten Buleleng yaitu “Buleleng Cerdas Menuju Kerta Raharja Berlandaskan Tri Hita Karana”.

Penjabat Bupati Buleleng

Ir. Ketut Lihadnyana, M.MA

SAMBUTAN SEKRETARIS DEWAN *SMART CITY*

Om Swastyastu,
Assalamulaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Salam Sejahtera Bagi Kita Semua,
Salom,
Namo Budaya,
Salam Kebajikan

Salam Hormat,

Sebuah daerah/Kabupaten dapat dikatakan *Smart City* jika di dalamnya lengkap dengan infrastruktur dasar, memiliki sistem pelayanan yang terintegrasi, dan pengelolaan pemerintahan yang efektif dan efisien. Pengelolaan pemerintahan di Kabupaten Buleleng secara bertahap sudah melangkah menuju ke arah tersebut dengan adanya infrastruktur dan aplikasi yang memudahkan dalam pelayanan dan administrasi. Namun *Smart City* tidak hanya selalu soal penggunaan teknologi atau pembangunan fisik semata, yang lebih penting adalah bagaimana dapat membangun pola pikir, sikap dan karakter masyarakat yang lebih baik.

Dengan adanya program Masterplan *Smart City* ini diharapkan dapat mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan Kota. Masyarakat dapat berkontribusi dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan publik, memperkuat keterlibatan dan meningkatkan rasa memiliki terhadap Kabupaten/daerah tempat bernaung. Dan sebagai tujuan akhirnya dapat meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dan kesejahteraan warga.

Sekretaris Dewan *Smart City* Kabupaten Buleleng

DAFTAR ISI

<i>SAMBUTAN KEPALA DAERAH KABUPATEN BULELENG</i>	<i>ii</i>
<i>DAFTAR ISI</i>	<i>iv</i>
<i>DAFTAR GAMBAR</i>	<i>vii</i>
1. PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Tujuan	2
1.3. Landasan Hukum	3
1.4. Kerangka Pikir	5
2. ARAH PEMBANGUNAN SMART CITY	7
2.1. Visi <i>Smart City</i> Kabupaten Buleleng	7
2.2. Pemetaan Misi, Tujuan dan Sasaran <i>Smart City</i> Kabupaten Buleleng	8
2.3. Sasaran <i>Smart City</i> Daerah	13
2.3.1. Sasaran <i>Smart Governance</i>	16
2.3.2. Sasaran <i>Smart Branding</i>	18
2.3.3. Sasaran <i>Smart Economy</i>	19
2.3.4. Sasaran <i>Smart Living</i>	21
2.3.5. Sasaran <i>Smart Society</i>	23
2.3.6. Sasaran <i>Smart Environment</i>	24
2.4. Indikator Utama <i>Smart City</i> Daerah	26
2.4.1. Indikator Utama <i>Smart Governance</i>	26
2.4.2. Indikator Utama <i>Smart Branding</i>	28
2.4.3. Indikator Utama <i>Smart Economy</i>	29
2.4.6. Indikator Utama <i>Smart Environment</i>	34
3. STRATEGI PEMBANGUNAN SMART CITY.....	36
3.1. Strategi pembangunan <i>Smart Governance</i>	36
3.2. Strategi pembangunan <i>Smart Branding</i>	37
3.3. Strategi pembangunan <i>Smart Economy</i>	38
3.4. Strategi pembangunan <i>Smart Living</i>	39
3.5. Strategi pembangunan <i>Smart Society</i>	40
3.6. Strategi pembangunan <i>Smart Environment</i>	41
4. RENCANA AKSI SMART CITY DAERAH	43
4.1. Rencana Aksi <i>Smart Governance</i>	44
4.2. Rencana Aksi <i>Smart Branding</i>	52
4.3. Rencana Aksi <i>Smart Economy</i>	56

4.4.	Rencana Aksi <i>Smart Living</i>	60
4.5.	Rencana Aksi <i>Smart Society</i>	66
4.6.	Rencana Aksi <i>Smart Environment</i>	71
5.	<i>PETA JALAN PEMBANGUNAN SMART CITY DAERAH</i>	78
5.1.	Peta Jalan Pembangunan <i>Smart Governance</i>	79
5.2.	Peta Jalan Pembangunan <i>Smart Branding</i>	88
5.3.	Peta Jalan Pembangunan <i>Smart Economy</i>	93
5.4.	Peta Jalan Pembangunan <i>Smart Living</i>	98
5.5.	Peta Jalan Pembangunan <i>Smart Society</i>	105
5.6.	Peta Jalan Pembangunan <i>Smart Environment</i>	114
6.	<i>PENUTUP</i>	125
7.	<i>REFERENSI</i>	126

DAFTAR TABEL

Tabel 2. Pemetaan Misi, Tujuan dan Sasaran terhadap Dimensi <i>Smart City</i>	8
Tabel 3. Kodefikasi	14
Tabel 4. Sasaran <i>Smart Governance</i>	16
Tabel 5. Sasaran <i>Smart Branding</i>	18
Tabel 6. Sasaran <i>Smart Economy</i>	19
Tabel 7. Sasaran <i>Smart Living</i>	21
Tabel 8. Sasaran <i>Smart Society</i>	23
Tabel 9. Sasaran <i>Smart Environment</i>	24
Tabel 10. Indikator Utama <i>Smart Governance</i>	27
Tabel 11. Indikator Utama <i>Smart Branding</i>	28
Tabel 12. Indikator Utama <i>Smart Economy</i>	29
Tabel 13. Indikator Utama <i>Smart Living</i>	31
Tabel 14. Indikator Utama <i>Smart Society</i>	33
Tabel 15. Indikator Utama <i>Smart Environment</i>	34
Tabel 16. Strategi <i>Smart Governance</i>	36
Tabel 17. Strategi <i>Smart Branding</i>	37
Tabel 18. Strategi <i>Smart Economy</i>	38
Tabel 19. Strategi <i>Smart Living</i>	39
Tabel 20. Strategi <i>Smart Society</i>	41
Tabel 21. Strategi <i>Smart Environment</i>	42
Tabel 22 Rencana Aksi <i>Smart Governance</i>	45
Tabel 23 Rencana Aksi <i>Smart Branding</i>	53
Tabel 24 Rencana Aksi <i>Smart Economy</i>	57
Tabel 25 Rencana Aksi <i>Smart Living</i>	61
Tabel 26 Rencana Aksi <i>Smart Society</i>	67
Tabel 27 Rencana Aksi <i>Smart Environment</i>	72
Tabel 28 Peta Jalan Pembangunan <i>Smart Governance</i> Jangka Pendek Menengah	80
Tabel 29 Peta Jalan Pembangunan <i>Smart Governance</i> Jangka Panjang	84
Tabel 30 Peta Jalan Pembangunan <i>Smart Branding</i> Jangka Pendek Menengah	89
Tabel 31 Peta Jalan Pembangunan <i>Smart Branding</i> Jangka Panjang	91
Tabel 32 Peta Jalan Pembangunan <i>Smart Economy</i> Jangka Pendek Menengah	94
Tabel 33 Peta Jalan Pembangunan <i>Smart Economy</i> Jangka Panjang	96
Tabel 34 Peta Jalan Pembangunan <i>Smart Living</i> Jangka Pendek Menengah	99
Tabel 35 Peta Jalan Pembangunan <i>Smart Living</i> Jangka Panjang	102
Tabel 36 Peta Jalan Pembangunan <i>Smart Society</i> Jangka Pendek Menengah	106
Tabel 37 Peta jalan Pembangunan <i>Smart Society</i> Jangka Panjang	110
Tabel 38 Peta Jalan Pembangunan <i>Smart Environment</i> Jangka Pendek Menengah	116
Tabel 39 Peta Jalan Pembangunan <i>Smart Environment</i> Jangka Panjang	120

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Keterhubungan Kerangka Pikir.....	5
Gambar 2. Kerangka Keterkaitan Sasaran Smart City dengan RPD	13

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perkembangan kota di berbagai negara mengalami peningkatan setiap tahunnya, kemajuan yang menjadi daya tarik bagi masyarakat dan meningkatkan urbanisasi. Adapun permasalahan yang sering muncul yaitu pemukiman kumuh, kemacetan lalu lintas, serta peningkatan permasalahan ekonomi, sosial, dan lingkungan di wilayah perkotaan. Konsep *Smart City* dapat menjadi salah satu pendekatan yang *fashionable* dalam pembangunan kota untuk mengatasi berbagai permasalahan. Kesenjangan pembangunan antar wilayah yang menjadi permasalahan bisa diatasi dengan konsep *Smart City*. Kota cerdas (*Smart City*) merupakan inovasi yang dilakukan ekosistem kota dalam mengatasi berbagai persoalan dan meningkatkan kualitas hidup manusia dan komunitas setempat. Konsep *Smart City* tujuannya untuk merencanakan dan membangun distrik kota yang cerdas, dimana peran teknologi terintegrasi dalam sebuah pembangunan infrastruktur yang digunakan untuk mengendalikan dan mengatur fungsi-fungsi dengan inovatif (Annisah, 2018). Maka dengan menerapkan konsep kota cerdas yang mana semua layanan dalam bentuk administrasi, infrastruktur, sampai dengan pembangunan pada model berkelanjutan yang ramah lingkungan dapat dijadikan sebuah solusi terbaik dalam pengendalian berbagai macam permasalahan di kota/kabupaten.

Penerapan *Smart City* mampu membangun *image* baru kota tersebut sebagai kota yang berbasiskan *ICT*. *Image* tersebut dapat dibangun melalui pengembangan industri-industri berbasis *ICT* sehingga dapat menjadi daya tarik bagi para pengusaha atau investor untuk menanamkan modalnya di industri tersebut dan membuka lapangan kerja bagi masyarakat tersebut. *Smart City* menunjukkan daerah yang menggabungkan *broadband* infrastruktur komunikasi yang fleksibel dengan komputasi yang berorientasi pada layanan. Infrastruktur ini berusaha untuk memastikan pelayanan yang lebih baik bagi pemerintah, masyarakat, konsumen, industri dan bisnis di kawasan tertentu. *Smart City* merupakan konsep terpadu dari pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi untuk semua sektor yang lebih luas dari sekedar *e-Gov*. untuk mencapai tujuan tersebut sebuah kota yang harus memiliki rencana dan menetapkan tujuan kebijakan publik untuk memberdayakan warganya agar memiliki akses ke jaringan informasi global dengan menggunakan fasilitas publik serta bermitra dengan pihak lain (Putra, 2019).

Konsep *Smart City* muncul karena adanya pergeseran dramatis dari jumlah populasi yang ada di daerah perkotaan yang mendorong warga, perencanaan kota, pelaku bisnis, dan pemerintah untuk melihat sebuah visi baru, kota pintar. Sebab sejati nya dengan adanya *Smart City* sebagai tuntunan membangun identitas kota yang layak huni, aman, nyaman, hijau, berketahanan iklim dan bencana, berbasis pada karakter fisik, keunggulan ekonomi, budaya lokal dan berdaya saing, berbasis teknologi dan IT (Insani, 2017) . Pembangunan kota pintar membutuhkan waktu dan tidak instan. Diperlukan perencanaan dan komitmen yang matang dan menyeluruh. Pada tahap tertentu, pembangunan *Smart City* harus melibatkan semua pihak di tingkat lokal dan pusat, baik pemerintah maupun perusahaan swasta. Selain untuk mencapai sinkronisasi (Kominfo, 2021). Berangkat dari penjelasan tersebut Kabupaten Buleleng membuat sebuah *Masterplan* pembangunan *Smart City* untuk menciptakan inovasi dan program dalam menyelesaikan permasalahan yang ada di Kabupaten Buleleng.

Maka dari itu persoalan masalah di Kabupaten Buleleng mulai dari akses kesehatan, ekonomi, sistem pelayanan masyarakat serta keterjangkauan akses informasi menjadi fokus penting yang mana menjadi bahan dasar utama untuk menentukan solusinya melalui rujukan dokumen RPD Kabupaten Buleleng 2023-2026 serta pembuatan buku *Masterplan Smart City* sebagai bahan pedoman dan rujukan untuk melangkah dalam penerapan konsep *Smart City*.

1.2. Tujuan

Tujuan implementasi *Smart City* adalah untuk dapat membentuk dan menerapkan suatu kota yang aman, nyaman, terkendali dan mempermudah akses bagi warganya serta memperkuat daya saing kota dalam hal perekonomian, sosial dan teknologi. Sehingga dapat dijelaskan bahwa tujuan dari strategi penerapan *Smart City* untuk menunjang kota di dalam dimensi sosial (keamanan), ekonomi (daya saing), teknologi dan lingkungan (kenyamanan) (Wanto, 2018). Adapun tujuan dalam penyusunan *Masterplan Smart City* dalam buku 2 ini mencakup sebagai berikut:

- a. Arah Pembangunan *Smart City* Daerah dengan mencakup yaitu Visi, Misi dan Sasaran *Smart City*, Indikator Utama *Smart City*
- b. Strategi Pembangunan *Smart City* dengan mencakup enam dimensi yaitu *Smart Governance*, *Smart Branding*, *Smart Economy*, *Smart Living*, *Smart Society*, *Smart Environment*

- c. Rencana Aksi *Smart City* dengan mencakup yaitu rencana aksi *Smart Governance*, rencana aksi *Smart Branding*, rencana aksi *Smart Economy*, rencana aksi *Smart Living*, rencana aksi *Smart Society*, rencana aksi *Smart Environment*.
- d. Peta Jalan Pembangunan *Smart City* Daerah dengan mencakup yaitu Peta jalan *Smart Governance*, peta jalan *Smart Branding*, peta jalan *Smart Economy*, peta jalan *Smart Living*, peta jalan *Smart Society*, peta jalan *Smart Economy*

1.3. Landasan Hukum

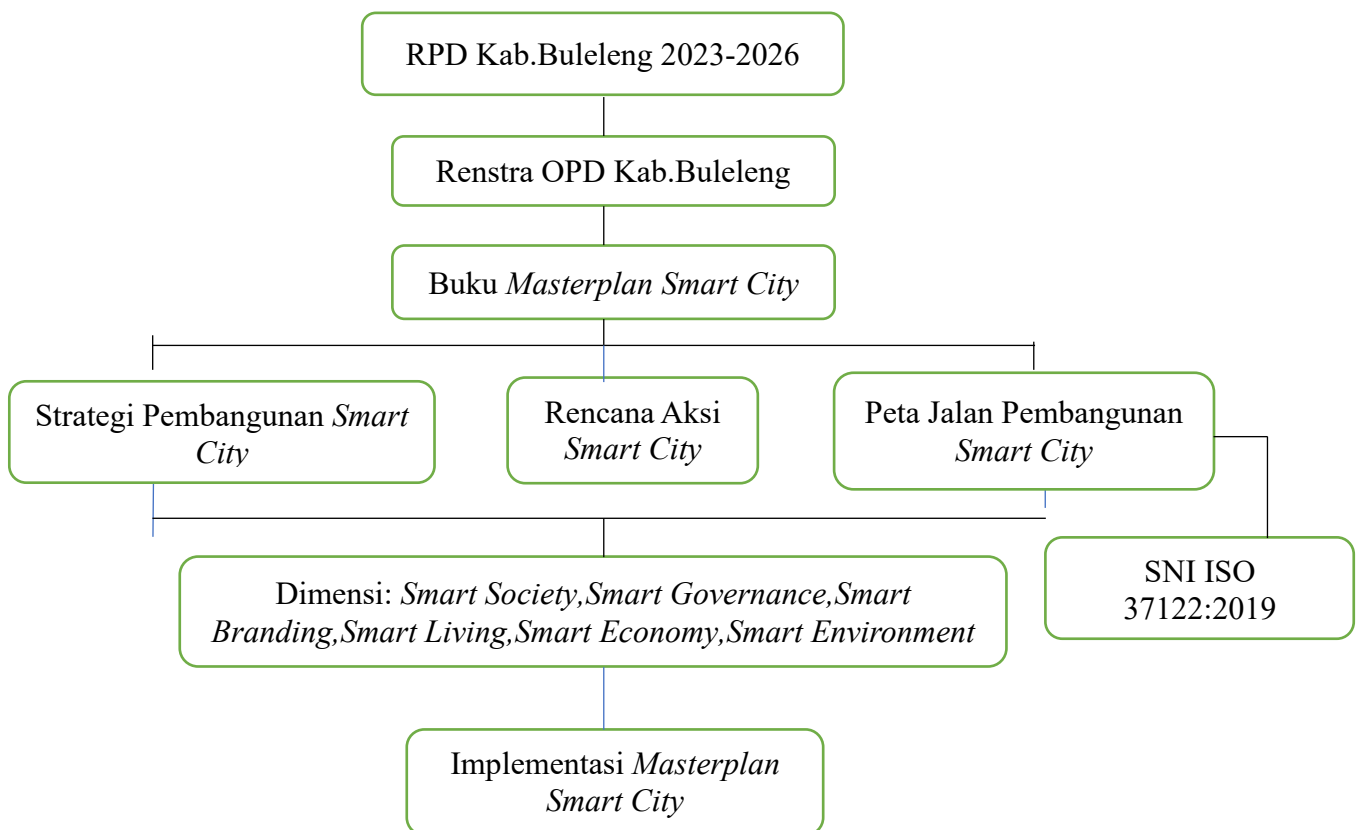
Adapun landasan hukum dalam menjelaskan konsep *Smart City* sebagai upaya mendukung kemajuan daerah sebagai berikut:

- 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
- 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- 4. Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
- 5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
- 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 2019 Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
- 8. Peraturan Pemerintah No.34 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Kawasan Perkotaan
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2022 Tentang Perkotaan

12. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
13. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia
14. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024
15. Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak
16. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak
17. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak
18. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak
19. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Panduan Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak
20. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 13 Tahun 2016 tentang Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Komunikasi dan Informatika;
21. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika;
22. Nota Kesepakatan Antara Direktorat Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Dengan Pemerintah Kabupaten Buleleng Tentang Implementasi Gereka Menuju Kota Cerdas (*Smart City*) Kabupaten Buleleng Tahun 2023 Nomor B-23/DJAI/HK.04.02/02/2023 dan Nomor 100.3.7.1/02/NK/PEM/2023
23. Keputusan Bupati Buleleng Nomor 100.3.3.2/263/HK/2023 Tentang Dewan *Smart City* Kabupaten Buleleng
24. Surat Keputusan Bupati Buleleng Nomor 100.3.3.2/264/HK/2023 Tentang Tim Pelaksanaan *Smart City* Kabupaten Buleleng

1.4. Kerangka Pikir

Kerangka pikir ini menggambarkan bahwasanya keterkaitan antara Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Buleleng 2023-2026 dengan program *Smart City*. Perencanaan program *Smart City* harus berbasis memberikan solusi dan peluang kepada daerah, sehingga terdapat program-program prioritas yang akan dikembangkan dan dilaksanakan. Alur berpikir ini nanti dapat mengetahui dimana kedudukan sebuah perencanaan dalam mengimplementasi program *Smart City*.



Gambar 1. Keterhubungan Kerangka Pikir

Dalam kerangka pikir diatas dapat dijelaskan bahwa dalam mengimplementasi sebuah program inovasi *Smart City* yang mengacu kepada keenam dimensi *Smart City* harus saling terhubung. Dalam hal tersebut pelaksanaan *masterplan Smart City* membutuhkan sebuah gambaran khusus yang bisa menjawab solusi permasalahan di Kabupaten Buleleng, sehingga program ataupun inovasi yang dibuat dapat memberikan dampak yang baik pelayanan, birokrasi dan pemanfaatan sumber daya yang ada di Kabupaten Buleleng. Kerangka pikir ini digunakan untuk memberikan struktur pada proses rumusan dan memastikan bahwa semua

aspek dari suatu masalah atau isu telah dipertimbangkan dengan kata lain dapat mengorganisir pemikiran yang sudah dituangkan dalam dokumen sesuai kajian yang dilakukan secara utuh.

Kerangka berpikir ini dibuat berdasarkan turunan dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Buleleng tahun 2023-2026 yang dihubungkan melalui Rencana Strategis pada setiap Organisasi Daerah (OPD) Buleleng yang kemudian dituangkan dalam masterplan *Smart City* dalam bentuk buku melalui bimbingan teknis. Kemudian dari penyesuaian diatas diturunkan menjadi sebuah Strategi Pembangunan *Smart City*, Rencana Aksi, dan Peta Jalan yang dimiliki oleh setiap dimensi *Smart City* yaitu *Smart Governance*, *Smart Branding*, *Smart Living*, *Smart Economy*, *Smart Society*, *Smart Environment* kemudian dihubungkan oleh SNI ISO 37122:2019. Output dari alur rangkaian keseluruhan kerangka berpikir tersebut adalah implementasi masterplan *Smart City* yang mana program dan inovasi yang sudah dirumuskan harus dilaksanakan secara maksimal sehingga dampak yang diberikan kepada masyarakat dapat dirasakan secara efektif dan efisien.

2. ARAH PEMBANGUNAN *SMART CITY*

Arah pembangunan *Smart City* sebagai bentuk cita-cita daerah untuk kemajuan dalam segi pelayanan dan pemecahan masalah baik dilintas birokrasi maupun di masyarakat. Sebagai pelaksanaannya akan disesuaikan dengan visi dan misi *Smart City* sebagai acuan dasar untuk melangkah dalam penerapan program sebagaimana sesuai dengan keenam dimensi *Smart City*. Beranjak dari dimensi itu maka akan ditentukan pembangunan-pembangunan yang menjadi prioritas utama sehingga bisa diciptakan sebuah inovasi yang nantinya akan dirasakan kepada masyarakat, khususnya masyarakat Kabupaten Buleleng.

2.1. Visi *Smart City* Kabupaten Buleleng

Dalam hal ini Kabupaten Buleleng membuat visi dan misi *Smart City* sebagaimana yang sudah disepakati melalui pelaksanaan Bimbingan Teknis 2. Adapun visi *Smart City* Kabupaten Buleleng yaitu **“Buleleng Cerdas Menuju Kerta Raharja Berlandaskan Tri Hita Karana”** visi tersebut jika dikaitkan dengan keenam konsep *Smart City*, yang mana konsep *Smart City* tersebut memberikan sebuah solusi permasalahan dalam Kabupaten Buleleng untuk kesejahteraan masyarakat dalam pelayanan, keamanan, ketertiban dan kenyamanan masyarakat yang berlandaskan dengan visi *Smart City* Kabupaten Buleleng. Visi *Smart City* Kabupaten Buleleng tersebut mengedepankan kemajuan kota yang mandiri, cerdas dan tanggap dalam menghadapi arus global yang semakin berkembang. Tentu tantangan tersebut merupakan sebuah fokus perhatian Kabupaten Buleleng dalam meningkatkan kualitas pelayanan dengan mengedepankan keenam dimensi konsep *Smart City*.







Dalam visi *Smart City* Kabupaten Buleleng mempunyai arti sebagai berikut:








1. **Buleleng Cerdas:** Mempunyai arti yaitu memiliki masyarakat yang unggul dalam pengetahuan, menerapkan teknologi secara cerdas dalam pelayanan masyarakat serta memiliki kemampuan dalam beradaptasi sesuai dengan perkembangan zaman.
2. **Menuju Kerta Raharja:** Mempunyai tatanan kehidupan yang sejahtera lahir dan batin secara seimbang, serasi adil dan merata.
3. **Berlandaskan Tri Hita Karana:** Berlandaskan hubungan yang harmonis antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan lingkungan alam dan isinya, dan manusia dengan manusia.

2.2. Pemetaan Misi, Tujuan dan Sasaran *Smart City* Kabupaten Buleleng


Dalam hal ini jika sebuah daerah sudah menentukan visi maka dibutuhkan misi untuk menjalankan visi tersebut, hal ini dituangkan dalam tabel pemetaan misi, tujuan dan sasaran terhadap dimensi *Smart City*. Untuk lebih detail dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut sebagai berikut:

Tabel 1. Pemetaan Misi, Tujuan dan Sasaran terhadap Dimensi *Smart City*

No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Dimensi <i>Smart City</i>					
						<i>Smart Governance</i>	<i>Smart Branding</i>	<i>Smart Economy</i>	<i>Smart Living</i>	<i>Smart Society</i>	<i>Smart Environment</i>
1	Mewujudkan masyarakat Buleleng yang unggul, kompetitif, dan bertaqwa kepada Tuhan, dengan jalan membangun sumberdaya manusia yang berkualitas, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, serta memiliki daya saing, melalui penyelenggaraan pendidikan dan pelayanan kesehatan yang berkualitas untuk semua warga masyarakat.	Terwujudnya SDM unggul dan kompetitif	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Umur harapan hidup						
				Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	Rata-rata lama sekolah						
					Rata-rata harapan lama sekolah						
					Angka Partisipasi Sekolah (APS)						
				Meningkatnya kesetaraan dan keadilan gender (KKG)	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)						
				Meningkatnya kompetensi tenaga kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)						

No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Dimensi Smart City					
						Smart Governance	Smart Branding	Smart Economy	Smart Living	Smart Society	Smart Environment
2	Mewujudkan masyarakat yang mampu memenuhi kebutuhan hidup, dengan jalan melaksanakan pembangunan bidang ekonomi untuk meningkatkan pendapatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, mengurangi pengangguran dan kemiskinan.	Terwujudnya perekonomian daerah yang berdaya saing	PDRB dan PDRB Perkapita	Meningkatnya produktivitas perekonomian daerah	Pertumbuhan ekonomi daerah						
				Meningkatnya pemberdayaan kawasan perdesaan	Indek Perkembangan Kawasan Perdesaan						
				Stabilitas harga - harga bahan pokok penting	Laju Inflasi						
		Meningkatnya penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial	Persentase penduduk miskin	Menurunnya penduduk miskin	Persentase penduduk miskin						
			Persentase PMKS tertangani	Meningkatnya penanganan PMKS	Persentase penanganan PMKS						
3	Mewujudkan keamanan daerah dan masyarakat, dengan menyelenggarakan pemerintahan yang baik, memperkuat sistem keamanan, meningkatkan peran	Terwujudnya stabilitas keamanan dan kenyamanan masyarakat	Persentase Penanganan, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat (Trantibum linmas)	Meningkatnya rasa aman dan nyaman masyarakat	Persentase Penanganan bencana						
					Persentase Penanganan pelanggaran ketertarikan dan ketertiban umum (Trantibum)						

No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Dimensi Smart City					
						Smart Governance	Smart Branding	Smart Economy	Smart Living	Smart Society	Smart Environment
	masyarakat sipil, mendorong pengarusutamaan gender, menegakkan budaya hukum dan politik, dan memantapkan pelaksanaan otonomi daerah.	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien	Indeks reformasi birokrasi	Optimal implementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik (<i>Smart Governance</i>)	Terwujudnya reformasi birokrasi daerah yang berkualitas						
					Nilai sistem pemerintahan berbasis (SPBE)						
				Meningkatnya kualitas layanan publik	Persentase perangkat daerah dengan nilai indeks kepuasan masyarakat (IKM) baik						
				Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan	Nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP) daerah						
				Meningkatnya akuntabilitas keuangan	Indeks pengelolaan keuangan daerah						
				Meningkatnya kualitas manajemen ASN	Indeks merit sistem						
				Meningkatnya kualitas pengawasan	Meningkatnya kualitas pengawasan internal yang akuntabel						
4	Mewujudkan kebudayaan yang responsif terhadap perkembangan zaman	Terwujudnya adat dan budaya lokal yang lestari	Persentase pelestarian adat budaya	Meningkatnya pelestarian adat dan budaya	Persentase Cagar budaya yang lestari						
					Persentase budaya tak benda yang lestari						

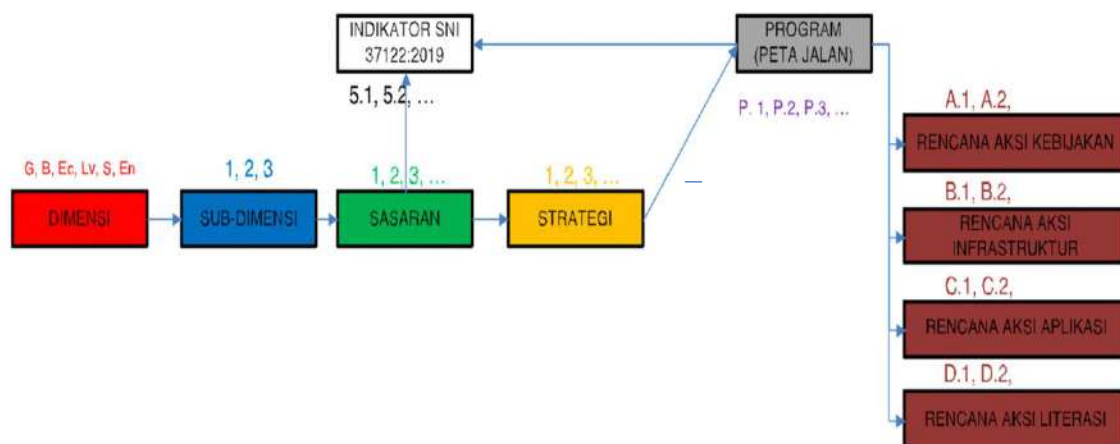
No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Dimensi Smart City					
						Smart Governance	Smart Branding	Smart Economy	Smart Living	Smart Society	Smart Environment
	dan lingkungan global, melalui pelestarian, pewarisan dan pengembangan nilai-nilai budaya yang dijiwai oleh agama Hindu, pemantapan kelembagaan, dan aktivitas budaya.				Persentase desa adat yang lestari						
5	Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, dengan jalan melaksanakan pembangunan yang seimbang antar lapisan masyarakat, antar sektor, dan antar wilayah, mempertahankan dan meningkatkan kemampuan lingkungan untuk menopang pembangunan, sehingga pembangunan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat saat ini dengan tidak mengurangi hak generasi berikutnya akan sumberdaya alam.	Meningkatnya kualitas infrastruktur	Indeks infrastruktur wilayah	Meningkatnya kualitas infrastruktur publik	Persentase kondisi jalan dan jembatan mantap						
					Persentase keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas perhubungan						
					Persentase infrastruktur pengairan yang mantap						
					Persentase capaian pelayanan air minum						
					Persentase pelayanan air limbah						
					Persentase panjang saluran drainase dalam kondisi baik						
					Persentase pengembangan sistem persampahan						

No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Dimensi Smart City					
						Smart Governance	Smart Branding	Smart Economy	Smart Living	Smart Society	Smart Environment
		Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH)	Meningkatnya kualitas air	Indeks kualitas air						
				Meningkatnya kualitas udara	Indeks kualitas udara						
				Meningkatnya tutupan lahan	Indeks tutupan lahan						
				Terwujudnya kesesuaian peruntukan ruang	Persentase ketaatan pemanfaatan ruang						

Sumber : Bimbingan Teknis Tahap 1 Kabupaten Buleleng 2023, RPD Buleleng 2023-2026

2.3. Sasaran *Smart City* Daerah

Beranjak dari penguraian visi misi *Smart City* Kabupaten Buleleng, dalam hal ini kemudian akan diterjemahkan visi misi *Smart City* ke dalam ukuran dimensi *Smart City* untuk menentukan sasaran *Smart City*. Kemudian sasaran tersebut merupakan sebuah indikator keberhasilan dalam menentukan keberhasilan program yang menjadi alat ukur yang kemudian menjadi bahan evaluasi implementasi *Smart City*. Keberhasilan program *Smart City* yang mengacu kepada dimensi-dimensi *Smart City* mempunyai keterkaitan, yang mana keterkaitan tersebut merupakan aspek yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan *Smart City* sehingga sasaran dan tujuan nya dapat ditinjau secara mandalam. Maka dari itu keterkaitan tersebut akan digambarkan pada kerangka sebagai berikut;



Gambar 2. Kerangka Keterkaitan Sasaran *Smart City* dengan RPD

Sumber : Materi *Masterplan Smart City* Gerakan Menuju Kota Cerdas Bimtek 2 Kabupaten Buleleng

Kerangka diatas merupakan keterkaitan antara dimensi, sub -dimensi, sasaran yang terhubung dengan indikator SNI untuk bisa memetakan kemudian dari sasaran yang sudah rumuskan penentuan strategi untuk menjalankannya. Setelah menentukan strategi maka menentukan peta jalan dalam jangka waktu lima tahun ke depan dan peta jalan tersebut harus mentargetkan capaian per-tahun nya yang disesuaikan oleh anggaran daerah. Setelah itu, rencana aksi yang merupakan rangkaian dari implementasi program yang sudah dibuat harus berbasis rencana aksi infrastruktur, rencana aksi aplikasi dan rencana aksi literasi. Ketiga hal tersebut hal dirumuskan oleh masing-masing daerah untuk arah dan penentuan menuju *Smart City*.

Sasaran *Smart City* merupakan rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya sebuah tujuan, berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari capaian

hasil (*outcome*) program perangkat daerah. Sasaran *Smart City* diatas merupakan kondisi keadaan yang sebenarnya sebuah daerah dalam meningkatkan sebuah capaian yang sudah dirumuskan secara bersama. Terdapat beberapa sasaran prioritas dari masing-masing dimensi diatas yang dikerucutkan menjadi subsub-dimensi sehingga dari hal itu dapat diketahui apa yang menjadi fokus utama yang mempunyai dasar pemikiran .

Tabel sasaran *Smart City* menjelaskan bagaimana proses rumusan yang disesuaikan melalui misi *Smart City* yang disesuaikan dari keenam dimensi-dimensi *Smart City* yang kemudian diturunkan menjadi sub-dimensi. Sasaran *Smart City* ini merupakan acuan dalam peningkatan layanan kualitas kesehatan, administrasi. Pendidikan, ekonomi dan sosial. Dalam hal ini, sasaran program dalam aspek sasaran *Smart City* sudah berdasarkan kondisi di Kabupaten Buleleng yang mana sasaran tersebut menjadi sebuah solusi pemecahan masalah dan pemanfaatan sumber daya untuk menunjang kebutuhan masyarakat dan pemerintah daerah.

Sebelum masuk dalam Sasaran, Indikator Utama, Startegi Pembangunan berikut adalah kodefikasi yang tercantum dalam tabel dari masing-masing komponen. Kodefikasi tersebut sudah dikelompokkan dan disesuaikan dari masing-masing komponen *Smart City* yang kemudian dituangkan dalam tabel. Untuk lebih detail dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2. Kodefikasi

Dimensi	Sub-Dimensi	Kodefikasi Sub-Dimensi	Kodefikasi Sasaran	Kodefikasi Strategi
<i>Smart Governance</i>	Layanan Publik	G1	G1.1	G1.1.1
	Birokrasi	G2	G2.1	G2.1.1
	Perancangan Kebijakan	G3	G3.1	G3.1.1
<i>Smart Branding</i>	Pariwisata	B1	B1.1	B1.1.1
	Daya Saing Bisnis	B2	B2.1	B2.1.1 B2.1.2
	Wajah (Tampilan) Kota	B3	B3.1	B3.1.1
<i>Smart Economy</i>	Ekosistem Industri	Ec1	Ec1.1	Ec1.1.1
	Kesejahteraan Masyarakat	Ec2	Ec2.1	Ec2.1.1
	Ekosistem Transaksi Keuangan	Ec3	Ec3.1	Ec3.1.1
<i>Smart Living</i>	Harmonisasi Tata Ruang	Lv1	Lv1.1	Lv1.1.1
	Kesehatan	Lv2	Lv2.1	Lv2.1.1 Lv2.1.2
	Transportasi	Lv3	Lv3.1	Lv3.1.1
<i>Smart Society</i>	Interaksi Masyarakat	S1	S1.1	S1.1.1 S1.1.2

	Ekosistem Belajar/ Pendidikan	S2	S2.1	S2.1.1
	Keamanan Masyarakat	S3	S3.1	S3.1.1
Smart Environment	Proteksi Lingkungan	En1	En1.1	En1.1.1 En1.1.2
	Pengelolaan Sampah Dan Limbah	En2	En2.1	En2.1.1
	Tata Kelola Energi	En3	En3.1	En3.1.1

2.3.1. Sasaran *Smart Governance*

Pada sasaran *Smart Governance* difokuskan kepada peningkatan layanan publik dalam mengintegrasikan Nomor Induk Kependudukan (NIK), peningkatan kapasitas kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN), keterlibatan masyarakat dalam penentuan kebijakan dan peraturan daerah.

Tabel 3. Sasaran *Smart Governance*

DIMENSI	MISI	SUB-DIMENSI	SASARAN	DASAR PEMIKIRAN
SMART GOVERNANCE	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel berbasis teknologi	G1 Layanan Publik	G1.1 Meningkatnya kualitas layanan publik dan melakukan integrasi NIK dengan semua jenis layanan	UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Presiden No. 95 tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, untuk itu pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan pelayanan publik perlu digencarkan dalam menunjang kebutuhan masyarakat
		G2 Birokrasi	G2.1 Meningkatnya efisiensi manajemen birokrasi	UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023 dan Permenpan No. 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Permenpan No. 25 Tahun 2020 tentang Road Map RB Tahun 2020-2024, sebab perlu adanya peningkatan kapasitas dan

DIMENSI	MISI	SUB-DIMENSI	SASARAN	DASAR PEMIKIRAN
				efisiensi bagi birokrat di Buleleng
		G3 Perancangan Kebijakan	G3.1 Meningkatnya keterlibatan publik dalam manajemen kebijakan publik	UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, sebab saat ini transparansi mengenai keterbukaan informasi yang dilakukan oleh pemerintah sangat diperlukan untuk meningkatkan kepercayaan publik

Sumber : Bimbingan Teknis Tahap 2 Kabupaten Buleleng

Sasaran *Smart Governance* dalam menciptakan kualitas layanan publik yang bisa memberikan dampak yang efektif bagi masyarakat adalah dengan cara mengintegrasikan semua layanan kepada Nomor Induk Kependudukan (NIK) berbasis online. Hal itu didasari penyelenggaraan pelayanan publik masih dihadapkan pada kondisi yang belum sesuai dengan kebutuhan dan perubahan diberbagai bidang kehidupan masyarakat. Hal tersebut bisa disebabkan oleh ketidaksiapan untuk menanggapi terjadinya transformasi nilai yang berdimensi luas serta dampak dari berbagai masalah pembangunan yang kompleks. Selain itu, kesiapan sumber daya manusia yang mengelola juga merupakan masalah yang sangat serius maka dari itu peningkatan kapasitas dan kompetensi para birokrat sangatlah penting untuk menghadapi dinamika perkembangan zaman yang semakin modern. Secara tidak langsung, perancangan kebijakan yang bisa memberikan dampak peraturan dan perundang-undangan bisa menimbulkan keterlibatan masyarakat dalam berpartisipasi serta ikut merumuskan demi kepentingan masyarakat dan daerah Kabupaten Buleleng.

2.3.2. Sasaran *Smart Branding*

Pada sasaran *Smart Branding* difokuskan kepada peningkatan pengenalan sektor pariwisata dan meningkatkan PDRB, meningkatkan jumlah investasi di sektor pariwisata dan mengembangkan karakteristik Buleleng melalui budaya.

Tabel 4. Sasaran *Smart Branding*

DIMENSI	MISI	SUB-DIMENSI	SASARAN	DASAR PEMIKIRAN
SMART BRANDING	Mewujudkan digitalisasi pariwisata budaya yang berbasis pelestarian pewarisan dan pengembangan nilai budaya kecil.	B1 Pariwisata	B1.1 Meningkatkan daya saing destinasi pariwisata kualitas pemasaran pariwisata, SDM pariwisata, kualitas ekonomi kreatif dan peningkatan PDRB sektor pariwisata	Peraturan Pemerintah No.50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010-2025, maka dari itu perlunya membangun dan memasarkan ekosistem pariwisata
		B2 Daya Saing Bisnis	B2.1 Meningkatnya kualitas dan kuantitas investasi ke Kabupaten Buleleng	Peraturan Menteri Investasi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kemitraan Di Bidang Penanaman Modal Antara Usaha Besar Dengan Usaha, Kecil, Dan Menengah Di Daerah, maka dari itu perlu membangun <i>platform</i> dan memasarkan ekosistem bisnis daerah
		B3 Wajah (Tampilan) Kota	B3.1 Mengembangkan DTW dan Kawasan Pariwisata dan peningkatan pengembangan, dan pelestarian benda situs cagar budaya dan lembaga adat	Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan, untuk itu perlu adanya penataan kembali wajah Buleleng dan menonjolkan situs

DIMENSI	MISI	SUB-DIMENSI	SASARAN	DASAR PEMIKIRAN
				cagar budaya dan lembaga adatnya

Sumber : Bimbingan Teknis Tahap 2 Kabupaten Buleleng

Sasaran *Smart Branding* dalam memperkenalkan potensi-potensi bidang pariwisata, bisnis dan penataan kota. Bergerak dari ketiga sub-dimensi tersebut sasaran yang dirumuskan merupakan sebuah langkah dalam meningkatkan Buleleng yang lebih dikenal kepada dunia luar. Wisatawan dan investor merupakan objek pada *Smart Branding* yang sangat penting maka peningkatan daya destinasi pada bidang pariwisata yang berkualitas serta pengelolaan sektor pariwisata dan sumber daya manusia menjadi fokus utama, kemudian meningkatkan kualitas dan kuantitas investor untuk dapat berinvestasi adalah tujuan utama dalam memperbaiki untuk pengelolaan sektor pariwisata. Terpenuhiya segala kebutuhan pengelolaan sektor pariwisata membutuhkan anggaran yang tidak sedikit, maka penting investor untuk mengakomodasi segala kebutuhan pengelolaan pariwisata Buleleng. Selain itu, dampak dari kedua sub-dimensi tersebut akan memberikan dampak yang baik bagi wajah kota yang lebih menarik untuk wisatawan sehingga Buleleng mempunyai karakter untuk bisa memperkenalkan wisata melalui potensi yang dimiliki.

2.3.3. Sasaran *Smart Economy*

Pada sasaran *Smart Economy* difokuskan kepada meningkatkan jumlah industri, pemberdayaan UMKM, membuka lapangan pekerjaan dan memudahkan investasi dalam membangun *platform* untuk pembangunan Kabupaten Buleleng.

Tabel 5. Sasaran *Smart Economy*

DIMENSI	MISI	SUB-DIMENSI	SASARAN	DASAR PEMIKIRAN
SMART ECONOMY	Mewujudkan masyarakat Buleleng yang memiliki keunggulan ekonomi dengan memanfaatkan teknologi informasi berlandaskan kearifan lokal	Ec1 Ekosistem Industri	Ec1.1 Meningkatkan sebaran industri pengolahan meningkatkan jumlah dan daya saing UMKM Meningkatkan jumlah dan daya saing koperasi	Peraturan Menteri Investasi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kemitraan Di Bidang Penanaman Modal Antara Usaha Besar Dengan Usaha, Kecil, Dan Menengah Di Daerah, sebab harus adanya kemudahan investasi sangat penting untuk

				menunjang pembangunan <i>Smart Economy</i>
		Ec2 Kesejahteraan Masyarakat	Ec2.1 Meningkatkan Kuantitas, kualitas produk pertanian, perkebunan, kehutanan dan perikanan	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, karena perlu meningkatkan kuantitas, kualitas produk pertanian, perkebunan, kehutanan dan perikanan dapat mendukung pembangunan
		Ec 3 Ekosistem Transaksi Keuangan	Ec3.1 Meningkatkan Kemudahan berinvestasi dan membangun <i>platform</i> investasi bagi pembangunan di Kabupaten Buleleng	Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi Daerah, sebab perlu adanya pendataan sebagai upaya mendukung bagi pembangunan <i>Smart Economy</i>

Sumber : Bimbingan Teknis Tahap 2 Kabupaten Buleleng

Sasaran *Smart Economy* yang diharapkan dari tujuan yang sudah diformulasikan secara terstruktur, spesifik, mudah dicapai, dan rasional untuk dilaksanakan dalam jangka beberapa tahun kedepan. Dengan ini, *Smart Economy* meningkatkan sebaran industri dan peningkatan daya saing UMKM serta daya saing koperasi. Maka pemerintah Kabupaten Buleleng akan melakukan pembinaan, pelatihan kepada UMKM untuk meningkatkan daya saing dalam menjual produknya. Selain itu, pendidikan dan pelatihan perkoperasian bagi pengurus koperasi serta UMKM untuk pengetahuan tentang perkoperasian. Kemudian dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pemerintah akan membuka lapangan pekerjaan dari bagai sektor hal itu nantinya akan meningkatkan penempatan tenaga kerja yang sesuai kompetensi, meningkatnya kualitas dan produktivitas tenaga kerja, meningkatnya hubungan industrial yang harmonis dan meningkatnya kawasan transmigrasi yang layak huni. Dari yang sudah digambarkan hal tersebut tidak terlepas dari peran investasi yang mudah akan memberikan dampak positif bagi masyarakat dan daerah.

2.3..4. Sasaran *Smart Living*

Pada sasaran *Smart Living* difokuskan kepada penataan kembali tata ruang yang digunakan sesuai dengan fungsi nya, peningkatan pelayanan kesehatan dasar agar terpenuhi kepada seluruh lapisan masyarakat, mengurangi angka kecelakaan dan keselamatan transportasi di Kabupaten Buleleng.

Tabel 6. Sasaran *Smart Living*

DIMENSI	MISI	SUB-DIMENSI	SASARAN	DASAR PEMIKIRAN
SMART LIVING	Mewujudkan kualitas dan kuantitas hidup masyarakat melalui infrastruktur dan pelayanan publik berbasis teknologi informasi	Lv1 Harmonisasi Tata Ruang	Lv1.1 Mewujudkan pola ruang yang sesuai dengan peruntukan ruang	Peraturan Pemerintah No.34 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Kawasan Perkotaan, karena masih banyaknya pembangunan yang tidak sesuai dengan peruntukkan ruang
		Lv2 Kesehatan	Lv2.1 Meningkatnya cakupan kepesertaan PUS ber KB dan meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat Peraturan BKKBN Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pemenuhan Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Bagi Pasangan Usia Subur Dalam Pelayanan Keluarga Berencana, karena untuk menciptakan pertumbuhan penduduk yang seimbang, Kesehatan merupakan suatu hak dasar masyarakat untuk memperoleh

DIMENSI	MISI	SUB-DIMENSI	SASARAN	DASAR PEMIKIRAN
				pelayanan dasar masyarakat
		Lv3 Transportasi	Lv3.1 Mewujudkan Keselamatan Transportasi	Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 26 Tahun 2015 tentang Standart Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, masih rendahnya capaian PAD dari Uji kendaraan bermotor sehingga dengan tertibnya uji kendaraan dapat mengantisipasi terjadinya kecelakaan lalu lintas

Sumber : Bimbingan Teknis Tahap 2 Kabupaten Buleleng

Sasaran *Smart Living* di Kabupaten Buleleng penataan tata ruang yang belum teratur membuat lahan ataupun ruang digunakan tidak sesuai dengan fungsinya, maka saat ini lahan dan ruang akan ditata kembali sesuai dengan fungsi akan memberikan dampak positif bagi kegiatan masyarakat. Kemudian yang berkaitan dengan akses kesehatan Kabupaten Buleleng berupaya menyelenggarakan fasilitas kesehatan yang optimal sesuai dengan kebutuhan masyarakat di Kabupaten Buleleng. Hal tersebut diupayakan dengan penyediaan sarana dan prasarana kesehatan, penyediaan obat dan perbekalan kesehatan serta penyediaan jaminan kesehatan bagi masyarakat kurang mampu. Selain itu, banyak nya saat ini jumlah pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Buleleng yang mengakibatkan kecelakaan hal tersebut dikarenakan minimnya penertiban serta edukasi yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berwenang sehingga terjadinya pelanggaran. Maka untuk rencana ke depan pemerintah akan memprioritaskan keselamatan transportasi untuk menciptakan kondisi jalan yang kondusif.

2.3.5. Sasaran *Smart Society*

Pada sasaran *Smart Society* difokuskan kepada akses internet yang memadai untuk peningkatan kualitas layanan publik, membangun ekosistem belajar yang mengedepan kualitas pembelajaran, menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat agar terciptanya lingkungan yang harmonis. Sasaran dibuat untuk mengoptimalkan potensi yang dimiliki dengan mengimplementasikan inovasi yang harus dibuat, inovatif, responsive, kreatif untuk mampu menjawab perubahan lingkungan dan tantangan untuk mewujudkan perencanaan pembangunan pada *Smart Society* yang berkualitas. Peningkatan kompetensi dan kapasitas SDM, pemantapan struktur perencanaan di tingkat dasar, dan komunikasi dan koordinasi antar pemangku kepentingan memungkinkan peningkatan kualitas.

Tabel 7. Sasaran *Smart Society*

DIMENSI	MISI	SUB-DIMENSI	SASARAN	DASAR PEMIKIRAN
SMART SOCIETY	Mewujudkan masyarakat Buleleng yang memiliki keunggulan ekonomi dengan memanfaatkan teknologi informasi berlandaskan kearifan lokal	S1 Interaksi Masyarakat	S1.1 Meningkatkan pelayanan publik, kualitas pelayanan internet dan pengembangan aplikasi	UU No 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Permenkominfo RI No 8 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Jasa Internet Telepon Untuk Keperluan Publik, sebab masih banyak nya daerah yang masih belum terjangkau sinyal
		S2 Ekosistem Belajar/ Pendidikan	S2.1 Meningkatkan kualitas belajar dan pendidikan di Kabupaten Buleleng	Permendagri 59 tahun 2021 tentang standart pelayanan minimal, sebab perlu adanya edukasi sejak dini untuk menciptakan generasi yang cerdas
		S3 Keamanan Masyarakat	S3.1 Meningkatkan Keamanan dan Kenyamanan Masyarakat	Perda No. 6 tahun 2009 tentang ketentraman dan ketertiban umum dan Perda No. 2 th 2021 jo. Perda no. 1 tentang perijinan, sebab masih terdapat potensi kejahatan

				pada Kecamatan	setiap
--	--	--	--	-------------------	--------

Sumber : Bimbingan Teknis Tahap 2 Kabupaten Buleleng

Sasaran *Smart Society* yang sudah dirumuskan dalam sasaran akan berdampak pada perubahan situasi lingkungan setempat, jika dilihat bahwa peningkatan layanan publik dalam akses internet meningkat akan mendukung interaksi masyarakat, semakin intensifnya pelayanan sosial yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun lembaga non pemerintah dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kemudian dalam meningkatkan ekosistem belajar bahwa pemerintah Kabupaten Buleleng ingin adanya peningkatan kualitas pembelajaran yang berpusat pada murid, diawali dengan dari kualitas guru dan kepala sekolah. Kebijakan merdeka belajar membuat inovasi program sekolah penggerak, program organisasi penggerak, dan program guru penggerak. Selain itu dalam *Smart Society* faktor keamanan masyarakat sangatlah penting sebab terjaganya keamanan dan stabilitas masyarakat, akan mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat.

2.3.6. Sasaran *Smart Environment*

Pada sasaran *Smart Environment* difokuskan kepada pembuatan kebijakan terkait dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang mana akan digunakan untuk perlindungan lahan konservasi ataupun ruang hijau, membuat wadah untuk pengelolaan limbah untuk menjadi energi, melakukan pengelolaan sampah untuk pemanfaatan energi terbarukan.

Tabel 8. Sasaran *Smart Environment*

DIMENSI	MISI	SUB-DIMENSI	SASARAN	DASAR PEMIKIRAN
SMART ENVIRONMENT	Mewujudkan tata kelola pembangunan menuju pelestarian lingkungan berbasis teknologi	En1 Proteksi Lingkungan	En1.1 Membuat kebijakan dan penyusunan dokumen KLHS serta penyusunan dokumen RPPLH	Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, sebab perlunya memastikan bahwa rencana pembangunan berkelanjutan telah terintegrasi dengan aspek lingkungan, dan juga perlu adanya dokumen tertulis yang membuat potensi,

DIMENSI	MISI	SUB-DIMENSI	SASARAN	DASAR PEMIKIRAN
				masalah lingkungan hidup serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu
		En2 Pengelolaan Sampah Dan Limbah	En2.1 Membentuk Bank Sampah Unit untuk mengurangi timbulan sampah yang masuk ke TPA serta melakukan pengolahan sampah organik dan anorganik	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Reduce, Reuse dan Recycle Melalui Bank Sampah, sebab masalah sampah dan limbah masalah bersama yang perlu diselesaikan dengan melibatkan berbagai pihak
		En3 Tata Kelola Energi	En3.1 Melakukan inovasi tempat pengolahan sampah menjadi energi listrik dan pengolahan sampah menjadi briket	Peraturan Menteri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Abu Dasar dan Abu Terbang Hasil Pengolahan Sampah Secara Termal, karena sampah dan limbah berpotensi menghasilkan energi baru

Sumber : Bimbingan Teknis Tahap 2 Kabupaten Buleleng

Sasaran *Smart Environment* yang sudah dirumuskan merupakan dampak dari kondisi lingkungan di Kabupaten Buleleng. Proteksi lingkungan yang membutuhkan dokumen kajian lingkungan hidup strategis merupakan satu instrument untuk memastikan bahwa prinsip sebuah pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan integrasi dalam pembangunan suatu wilayah adapun kegunaannya adalah memberikan sarana pendukung pengambilan keputusan pelaksanaan program pemanfaatan ruang dan juga mampu memberikan rekomendasi pertimbangan lingkungan pada tingkatan pengambilan keputusan yang bersifat strategis. Kemudian dampak dari lingkungan yang tidak dikelola dengan baik menghasilkan limbah-limbah yang tidak terpakai. Perlu adanya pengelolaan limbah menjadi sebuah inovasi sehingga bisa dimanfaatkan kembali yang mana hal

tersebut berhubungan dengan tata kelola energi dari pemanfaatan sampah yang tidak terpakai menjadi energi terbarukan.

2.4. Indikator Utama *Smart City* Daerah

Indikator Utama *Smart City* merupakan sebuah ukuran dalam membangun sebuah konsep *Smart City* berdasarkan keenam dimensi *Smart City* sehingga dapat mengetahui arah pembangunan dalam jangka pendek, menengah dan jangka Panjang sebagaimana harus sesuai dengan misi yang sudah dirumuskan dalam Bimbingan Teknis 1. Indikator Utama *Smart City* memberikan alur tahapan dalam penerapan program yang mana berdasarkan sub-dimensi *Smart City* kemudian ditentukan sasaran nya yang merupakan turunan dari sub-dimensi tersebut setelah itu melalui tahap 1 dan 2. Dalam hal ini, tahap tersebut disesuaikan dengan SNI 37122 dan indikator yang sudah ditentukan tetap mengacu kepada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Buleleng 2023-2026. Untuk lebih detail dapat dilihat tabel sebagai berikut:

2.4.1. Indikator Utama *Smart Governance*

Indikator Utama *Smart Governance* lahir dari permasalahan yang muncul dengan perkembangan kebutuhan masyarakat, ada nya permasalahan tersebut membuat pemerintah daerah terus berupaya memperbaiki dan mengevaluasi pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Maka dari itu, dengan mengacu kepada sasaran yang sudah dibuat sebagaimana sudah sesuai dengan RPD Kabupaten Buleleng serta dihubungkan dengan indikator SNI maka permasalahan tersebut akan timbul solusi yang tepat terhadap permasalahannya. Secara umum, jumlah orang yang memiliki dokumen administrasi kependudukan telah meningkat. Ini sebagian besar disebabkan oleh peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya memiliki semua dokumen kependudukan yang digunakan dalam pelayanan publik. Selain itu, pemerintah Kabupaten Buleleng telah melakukan banyak upaya untuk memberikan layanan langsung kepada masyarakat, seperti layanan administrasi kependudukan keliling dengan jemput bola langsung ke penduduk serta inovasi baru dalam layanan administrasi kependudukan.

Tabel 9. Indikator Utama *Smart Governance*

SUB-DIMENSI	SASARAN	INDIKATOR UTAMA SMART GOVERNANCE	
		TAHAP I RPD (2023-2026)	TAHAP II SNI (37122)
G1 Layanan Publik	G1.1 Meningkatnya kualitas layanan publik dan melakukan integrasi NIK dengan semua jenis layanan	1. Persentase perangkat daerah dengan nilai indeks kepuasan masyarakat (IKM) baik 2. Nilai sistem pemerintah berbasis elektronik (SPBE)	10.2. persentase layanan kota yang dapat diakses dan yang dapat diminta secara daring 5.1. persentase kontrak layanan yang menyediakan akan layanan kota yang memuat kebijakan data terbuka
G2 Birokrasi	G2.1 Meningkatnya efisiensi manajemen birokrasi	1. Indeks kepuasan ASN 2. Nilai keterbukaan informasi publik 3. Nilai sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE)	21.2 persentase izin bangunan yang diajukan melalui sistem pengiriman elektronik
G3 Perancangan Kebijakan Publik	G3.1 Meningkatnya keterlibatan publik dalam manajemen kebijakan publik	Jumlah kunjungan daring tahunan ke website JDIH dan media elektronik lainnya	10.1. jumlah kunjungan daring tahunan ke portal data terbuka kota per 100.000 penduduk

Sumber : Bimbingan Teknis Tahap 2 Kabupaten Buleleng 2023

Indikator utama pada *Smart Governance* terdapat sasaran yang sudah ditentukan, jika dilihat dari sasaran tersebut berkesinambungan antara RPD dan SNI 37122. Dalam hal ini muncul sasaran tersebut karena adanya permasalahan yang ada pada layanan birokrasi belum optimalnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan pencatatan sipil, masih belum optimalnya pengelolaan informasi dan pemanfaatan data kependudukan. Kemudian penataan ulang manajemen birokrasi yang masih perlu peningkatan agar kualitas layanan menjadi lebih baik maka pemerintah daerah berupaya memberikan pemahaman dan kompetensi kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) agar dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat lebih efektif dan efisien. Selain itu, efisiensi kebijakan publik yang masih belum optimal partisipasi publik terhadap perumusan kebijakan juga menjadi perhatian penting saat ini pemerintah daerah mengharapkan keterlibatan masyarakat memberikan sebuah gagasan dan

masukannya melalui media sosial untuk memberikan perhatian terhadap kebijakan yang akan dibuat, nantinya kebijakan tersebut akan diinformasikan melalui platform JDIH sehingga dapat diakses oleh masyarakat.

2.4.2. Indikator Utama *Smart Branding*

Indikator utama pada *Smart Branding* muncul dari potensi dan karakteristik yang dimiliki oleh Kabupaten Buleleng sehingga dengan modal tersebut diharapkan mampu menarik wisatawan berkunjung ke Buleleng untuk berwisata serta menjadikan produk pariwisata yang sangat penting untuk pengembangan dan peningkatan struktur perekonomian daerah. Potensi ini juga memungkinkan pertumbuhan bisnis pariwisata seperti akomodasi, makan, minuman, biro perjalanan, hiburan, dan rekreasi, serta bisnis lain yang terkait dengan pariwisata, yang pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pemerataan.

Tabel 10. Indikator Utama *Smart Branding*

SUB-DIMENSI	SASARAN	INDIKATOR UTAMA SMART BRANDING	
		TAHAP I RPD (2023-2026)	TAHAP II SNI (37122)
B1 Pariwisata	B1.1 Meningkatkan daya saing destinasi pariwisata kualitas pemasaran pariwisata, SDM pariwisata, kualitas ekonomi kreatif dan peningkatan PDRB sektor pariwisata	1. Pertumbuhan ekonomi 2. indeks perkembangan Kawasan perdesaan	14.1 persentase layanan rekreasi publik yang dapat dipesan secara daring
B2 Daya Saing Bisnis	B2.1 Meningkatnya kualitas dan kuantitas investasi ke Kabupaten Buleleng	Jumlah kunjungan <i>platform</i> pariwisata Buleleng	14.1 persentase layanan rekreasi publik yang dapat dipesan secara daring
B3 Wajah (Tampilan) Kota	B3.1 Mengembangkan DTW dan Kawasan Pariwisata dan peningkatan pengembangan, dan pelestarian benda situs cagar budaya dan lembaga adat	Jumlah riset dan inovasi daerah terkait pendidikan	14.1 persentase layanan rekreasi publik yang dapat dipesan secara daring

Sumber : Bimbingan Teknis Tahap 2 Kabupaten Buleleng 2023

Jika dilihat dari sasaran yang sudah dirumuskan dalam *Smart Branding* kemudian dihubungkan oleh indikator dalam RPD kemudian pada tahap berikutnya yang berkaitan dengan indikator SNI bahwa penguatan pengenalan sektor pariwisata di Kabupaten Buleleng menjadi target utama,

sebagian besar bahwa dengan mengenalkan potensi-potensi wisata yang dimiliki oleh Buleleng dapat meningkatkan ekonomi dan juga mengangkat karakteristik budaya Buleleng kepada wisatawan. Modal pariwisata yang dimiliki oleh Buleleng dimanfaatkan sebagai pembangunan pariwisata yang berkelanjutan sehingga dari pengembangan tersebut mampu mendatangkan investor. Selain itu, daerah juga akan bekerja sama dengan para perguruan tinggi untuk bisa mendeteksi potensi-potensi wisata yang dimiliki oleh Buleleng agar dapat dikelola dengan baik untuk bisa meningkatkan pendapatan daerah.

2.4.3. Indikator Utama *Smart Economy*

Indikator utama pada *Smart Economy* muncul dari pemetaan masalah di daerah sesuai dengan kondisi yang ada. Terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan yaitu perihal industri berdaya saing pada UMKM yang perlu peningkatan, kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan dan membuka lapangan pekerjaan kemudian perihal transaksi keuangan yang mana menargetkan untuk meminimalisir peredaran uang kertas dalam bertransaksi.

Tabel 11. Indikator Utama *Smart Economy*

SUB-DIMENSI	SASARAN	INDIKATOR UTAMA <i>SMART ECONOMY</i>	
		TAHAP I RPD (2023-2026)	TAHAP II SNI (37122)
Ec1 Ekosistem Industri	Ec1.1 Meningkatkan sebaran industry pengolahan meningkatkan jumlah dan daya saing UMKM Meningkatkan jumlah dan daya saing koperasi	Jumlah UMKM yang mendapat pendampingan dan pelatihan	20.3 persentase luas tanah kota yang dicakup oleh sistem pemetaan pemasok makanan daring
Ec2 Kesejahteraan Masyarakat	Ec2.1 Meningkatkan Kuantitas, kualitas produk pertanian, perkebunan, kehutanan dan perikanan	Jumlah peningkatan kesejahteraan masyarakat	5.3. persentase tenaga kerja yang bekerja di sektor teknologi informasi dan komunikasi (TIK)
Ec 3 Ekosistem Transaksi Keuangan	Ec3.1 Meningkatkan Kemudahan berinvestasi dan membangun platform investasi bagi	Jumlah Peningkatan layanan pembayaran <i>cashless transaction</i>	9.2. persentase pembayaran ke kota yang dibayar secara elektronik

	pembangunan di Kabupaten Buleleng		berdasarkan faktor elektronik
--	--------------------------------------	--	----------------------------------

Sumber : Bimbingan Teknis Tahap 2 Kabupaten Buleleng 2023

Jika dilihat dalam sasaran yang sudah dirumuskan dalam *Smart Economy* kemudian dihubungkan oleh indikator dalam RPD kemudian pada tahap berikutnya yang berkaitan dengan indikator SNI bahwa UMKM masih menunjukkan tingkat produktivitas yang rendah, yang berarti bahwa skala yang dikelola, terutama skala mikro kecil, tidak layak secara ekonomi. Oleh karena itu, usaha mikro, kecil, dan menengah harus didorong untuk berkembang melalui berbagai program yang membantu mereka berkembang, seperti meningkatkan kemampuan pengelola melalui bimbingan, pelatihan, dan pendampingan dalam mengelola bisnis mereka, serta membangun badan hukum koperasi untuk memperkuat posisi mereka dan mendorong kerja sama antar koperasi. Selain itu, rendahnya produktivitas didukung oleh kurangnya penguasaan manajemen, kurangnya penguasaan teknologi dan pemasaran, serta kurangnya kemampuan kewirausahaan UMKM. Kemudian dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat, pemerintah daerah akan membuka lapangan pekerjaan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan kebutuhan daerah sehingga keterserapan tenaga kerja diprioritaskan untuk masyarakat Buleleng. Dalam meminimalisir peredaran uang kertas dimasyarakat, pemerintah daerah menerapkan *cashless transaction* dengan menggunakan *platform* yang sudah ada .

2.4.4. Indikator Utama *Smart Living*

Kelemahan yang tidak diatasi, kekuatan yang belum dioptimalkan, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi adalah semua sumber potensi masalah pembangunan daerah. Selain itu, setiap masalah diidentifikasi untuk menentukan faktor-faktor yang menentukan keberhasilan di masa mendatang, yang dilakukan untuk mendapatkan gambaran awal tentang bagaimana masalah infrastruktur dapat dipecahkan dan diselesaikan dengan baik. Faktor kritis, hasil kinerja, dan faktor lainnya adalah faktor penentu keberhasilan karena sangat penting untuk menyelesaikan masalah pembangunan atau mewujudkan keberhasilan penyelenggaraan urusan pemerintahan. Ruang publik dapat dikatakan berhasil jika susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hirarkis memiliki hubungan fungsional. Rencana struktur ruang wilayah Kabupaten yang meliputi pusat-pusat kegiatan, sistem jaringan prasarana utama dan sistem jaringan prasarana lainnya. Salah satu kawasan budidaya yang dikembangkan adalah kawasan peruntukan permukiman dan

kawasan peruntukan fasilitas penunjang permukiman. Kawasan permukiman merupakan kawasan yang diperuntukkan bagi kegiatan permukiman atau didominasi oleh lingkungan hunian, meliputi kawasan permukiman perkotaan, dan kawasan permukiman pedesaan. Jika dilihat bahwa peruntukan fasilitas penunjang permukiman merupakan bagian dari kawasan permukiman baik permukiman perkotaan maupun permukiman pedesaan.

Tabel 12. Indikator Utama *Smart Living*

SUB-DIMENSI	SASARAN	INDIKATOR UTAMA SMART LIVING	
		TAHAP I RPD (2023-2026)	TAHAP II SNI (37122)
Lv1 Harmonisasi Tata Ruang	Lv1.1 Mewujudkan pola ruang yang sesuai dengan peruntukan ruang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Cakupan pelayanan KK,KTP,Akta Kelahiran, Akta Perkawinan, Akta Kematian dan Akta Perceraian 2. Persentase rumah korban bencana alam 3. Persentase penanganan kawasan kumuh 4. Persentase penanganan RTLH diluar kawasan kumuh yang ditangani 	12.1. Persentase rumah tangga dengan pengukur energi pintar
Lv2 Kesehatan	Lv2.1 Meningkatnya cakupan kepesertaan PUS ber KB dan Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Cakupan peserta KB aktif (%) 2. Menurunnya unmetneed (%) 3. Rasio akseptor KB (%) 4. Persentase masyarakat yang membutuhkan pelayanan Kesehatan secara online dilayani dengan baik 5. Persentase rekam medis yang terkelola secara elektronik 	11.1 persentase populasi kota yang masuk dalam file Kesehatan terpadu daring yang dapat diakses oleh penyedia layanan kesehatan 11.2. jumlah janji temu medis tahunan yang dilakukan melalui jarak jauh per 100.000 penduduk 11.3 persentase populasi kota yang memiliki akses ke sistem peringatan publik langsung (<i>real</i>

SUB-DIMENSI	SASARAN	INDIKATOR UTAMA SMART LIVING	
		TAHAP I RPD (2023-2026)	TAHAP II SNI (37122)
			time) untuk saran kualitas udara
Lv3 Transportasi	Lv3.1 Mewujudkan Keselamatan Transportasi	Jumlah ketersediaan dan perhubungan Persentase prasarana fasilitas	19.12 persentase rute angkutan umum dengan konektivitas internet yang disediakan kota dan/atau dikelola untuk komuter 19.9 persentase lampu lalu lintas yang cerdas

Sumber : Bimbingan Teknis Tahap 2 Kabupaten Buleleng 2023

Jika dilihat dalam sasaran yang sudah dirumuskan dalam *Smart Living* kemudian dihubungkan oleh indikator dalam RPD kemudian pada tahap berikutnya yang berkaitan dengan indikator SNI bahwa harmonisasi tata ruang sebagaimana pemanfaatan tata ruang sesuai dengan fungsi masih perlu adanya perhatian khusus sebab kawasan permukiman dan RTH yang belum optimal menjadikan tata ruang tidak berfungsi sebagaimana mestinya sehingga harus ada penataan ulang agar efektif sesuai dengan fungsi lahan nya. Kemudian dalam segi kesehatan terdapat rendahnya akses layanan masyarakat yang tidak merata sesuai dengan kebutuhan nya serta layanan integrasi berbasis teknologi masih belum efektif. Adapun yang berkaitan dengan jumlah persentase ketersediaan prasarana dan fasilitas perhubungan salah satu faktor penyebabnya adalah terbatasnya dana untuk pembangunan sarana dan prasarana transportasi secara menyeluruh, adapun faktor yang mempengaruhi karena penanggulangan masalah transportasi belum menjadi *top prority* bagi pemerintah daerah.

2.4.5. Indikator Utama *Smart Society*

Untuk mewujudkan perencanaan pembangunan bidang sosial yang berkualitas, Kabupaten Buleleng diharapkan untuk melakukan lebih banyak inovasi yang inovatif, responsif, dan kreatif untuk menjawab perubahan lingkungan dan tantangan. Peningkatan kompetensi dan kapasitas SDM, pemantapan struktur perencanaan di tingkat dasar, dan komunikasi dan koordinasi antar pemangku kepentingan memungkinkan peningkatan kualitas.

Tabel 13. Indikator Utama *Smart Society*

SUB-DIMENSI	SASARAN	INDIKATOR UTAMA SMART SOCIETY	
		TAHAP I RPD (2023-2026)	TAHAP II SNI (37122)
S1 Interaksi Masyarakat	S1.1 Meningkatkan pelayanan publik, kualitas pelayanan internet dan pengembangan aplikasi	1. APS 2. Angka literasi 3. Angka numerasi 4. Persentase keamanan data dan informasi sesuai standart	1.6.2. jumlah computer, laptop, tablet atau perangkat pembelajaran digital lainnya tersedia per 1.000 siswa 2.6.3. jumlah tingkat Pendidikan tinggi sains, teknologi, Teknik dan matematika (STEM) per 100.000 penduduk 13.4. persentase anggaran kota yang dialokasikan untuk penyediaan program yang ditujukan untuk menjembatani kesenjangan digital
S2 Ekosistem Belajar/Pendidikan	S2.1 Meningkatkan kualitas belajar dan pendidikan di Kabupaten Buleleng	Jumlah pengelolaan perpustakaan sekolah dan desa sesuai SNP	1.17.4. persentase populasi kota yang merupakan pengguna perpustakaan umum yang aktif
S3 Keamanan Masyarakat	S3.1 Meningkatkan Keamanan dan Kenyamanan Masyarakat	Tingkat penyelesaian pelanggaran ketertiban, ketentraman, keindahan	1.15.1. persentase area kota yang dicakup oleh kamera pengintai digital

Sumber : Bimbingan Teknis Tahap 2 Kabupaten Buleleng 2023

Jika dilihat dalam sasaran yang sudah dirumuskan dalam *Smart Society* setelah itu dihubungkan oleh indikator dalam RPD kemudian pada tahap berikutnya yang berkaitan dengan indikator SNI bahwa belum terintegrasikannya aplikasi yang ada di Pemkab Buleleng, hanya beberapa yang terintegrasi satu sama lain dari jumlah data yang tersedia saat ini, sehingga menyebabkan inefisiensi data karena data yang sama digunakan oleh beberapa sistem informasi harus dimasukkan ke masing-masing sistem informasi. Ini tentu saja dapat menyebabkan ketidakurutan data dan pemborosan waktu serta biaya untuk memasukkan data yang sama ke sistem informasi yang berbeda. Kemudian yang berkaitan dengan pembelajaran di Kabupaten Buleleng perlu adanya penguatan kemampuan literasi dan numerasi dengan strategi memperbanyak perpustakaan dan pameran pendidikan yang melibatkan para peserta pelajar sehingga dapat berpartisipasi. Selain itu, berkaitan dengan ketentraman dan

ketertiban bahwa perlu adanya insensitas pengawasan khusus kepada lingkungan pada setiap wilayah masyarakat agar menciptakan kondisi lingkungan yang aman dan nyaman.

2.4.6. Indikator Utama *Smart Environment*

Perhatian lingkungan hidup yang menjadi fokus utama sebagaimana dirumuskan untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah atau kebijakan, rencana atau program yang sudah dibuat. Kajian tentang lingkungan hidup didorong mampu membuat pedoman dalam memanfaatkan sumber daya yang dapat tepat guna sehingga keberlangsungan pengembangan pembangunan daerah dapat terukur dan terarah.

Tabel 14. Indikator Utama *Smart Environment*

SUB-DIMENSI	SASARAN	INDIKATOR UTAMA SMART ENVIRONMENT	
		TAHAP I RPD (2023-2026)	TAHAP II SNI (37122)
En1 Proteksi Lingkungan	En1.1 Membuat kebijakan dan penyusunan dokumen KLHS serta penyusunan dokumen RPPLH	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah dokumen RPPLH (Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup) yang tersusun 2. Jumlah dokumen KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis) yang tersusun 	8.2. jumlah stasiun pemantauan kualitas udara jarak jauh secara langsung (real-time) per kilometer persegi (km ²)
En2 Pengelolaan Sampah dan Limbah	En2.1 Membentuk Bank Sampah Unit untuk mengurangi timbulan sampah yang masuk ke TPA serta melakukan pengolahan sampah organik dan anorganik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase dokumen fasilitas pemenuhan komitmen izin penyimpanan sementara limbah B3 (Bahan Berbahaya Beracun) 2. Persentase penanganan sampah 3. Pesentase pengurangan sampah 	<p>1.16.2. persentase populasi kota yang memiliki pengumpulan sampah dari pintu ke pintu dengan pemantauan individu terhadap jumlah sampah rumah tangga</p> <p>2.16.4 persentase dari jumlah total sampah plastik yang didaur ulang di kota</p>

SUB-DIMENSI	SASARAN	INDIKATOR UTAMA SMART ENVIRONMENT	
		TAHAP I RPD (2023-2026)	TAHAP II SNI (37122)
En3 Tata Kelola Energi	En3.1 Melakukan inovasi tempat pengolahan sampah menjadi energi listrik dan pengolahan sampah menjadi briket	1. Persentase pengelolaan sampah menjadi energi terbarukan 2. Pesentase pengurangan sampah dengan pembuatan inovasi	7.3. energi listrik dan panas (GJ) dihasilkan pada atau pengolahan limbah cair per kapita per tahun

Sumber : Bimbingan Teknis Tahap 2 Kabupaten Buleleng 2023

Jika dilihat dalam sasaran yang sudah dirumuskan dalam *Smart Environment* setelah itu dihubungkan oleh indikator dalam RPD kemudian pada tahap berikutnya yang berkaitan dengan indikator SNI bahwa proteksi lingkungan dengan melihat kembali sebuah kebijakan yang memihak kepada lingkungan perlu diperhatikan, monitoring dan evaluasi kebijakan lingkungan menjadi salah satu cara untuk bisa memantau pergerakan pemanfaatan lingkungan dengan baik. Selain itu, dalam permasalahan lain nya mengenai lingkungan adalah masalah sampah, dimana sampah dapat diatasi dengan baik jika terkait dengan izin pembuangan sampah dan pengelolaan sampah dapat disalurkan dengan pengetahuan pengelolaan sampah menjadi energi terbarukan merupakan urusan rumah tangga pemerintah daerah dalam mengolah sampah sehingga sampah tersebut tidak memberikan dampak yang negatif bagi lingkungan.

3. STRATEGI PEMBANGUNAN *SMART CITY*

Strategi pembangunan *Smart City* merupakan sebuah metode pelaksanaan dalam penerapan keenam konsep *Smart City*, dalam hal ini sebuah strategi dinilai sangat penting dalam menentukan pencarian solusi dan pemetaan masalah. Dengan hal itu mampu menyerap dan menganalisa informasi dengan baik dan cepat sebagai hasil pembelajaran, strategi yang mengedepankan kebutuhan dengan menyesuaikan sumber daya di sebuah daerah dengan ini mengunggulkan pemecahan masalah dengan menggunakan teknologi yang berkembang saat ini. Sebagai landasannya, keenam konsep *Smart City* akan mendeteksi potensi-potensi yang akan ditindaklanjuti untuk kemajuan sebuah daerah.

Strategi pembangunan kota cerdas adalah pendekatan terencana dan terintegrasi untuk meningkatkan dan mengembangkan kualitas hidup penduduk perkotaan dengan menggunakan digitalisasi, inovasi, dan teknologi canggih. Kemudian tujuan dari strategi ini adalah membuat kota lebih efisien, berkelanjutan, inklusif, dan responsif terhadap kebutuhan warganya. Aspek dalam pembangunan kota cerdas harus memenuhi aspek infrastruktur digital, *IoT (Internet of Things)*, pengelolaan energi, mobilitas, pelayanan publik, partisipasi warga, keamanan dan keselamatan dan keberlanjutan lingkungan

3.1. Strategi pembangunan *Smart Governance*

Strategi pembangunan pada *Smart Governance* difokuskan kepada upaya peningkatan layanan masyarakat melalui teknologi informasi dan komunikasi untuk memudahkan dalam mengakses fasilitas layanan publik. Dalam hal ini strategi tersebut mencari sebuah solusi atas permasalahan yang ada pada lingkungan *governance*. Selain itu, penerapan pelayanan publik harus di dukung dengan reformasi birokrasi yang mana hal tersebut bisa merubah pola kerja untuk peningkatan layanan kepada masyarakat. Untuk lebih lengkap dapat dilihat pada tabel uraian sebagai berikut:

Tabel 15. Strategi *Smart Governance*

Sub-Dimensi	Sasaran	Strategi
G1 Layanan Publik	G1.1 Meningkatnya kualitas layanan publik dan melakukan integrasi NIK dengan semua jenis layanan	G1.1.1 Meningkatkan implementasi layanan publik
G2 Birokrasi	G2.1 Meningkatnya efisiensi manajemen birokrasi	G2.1.1 Meningkatkan implementasi reformasi birokrasi
G3 Perancangan Kebijakan	G3.1 Meningkatnya keterlibatan publik dalam manajemen kebijakan publik	G3.1.1 Digitalisasi penyebaran produk hukum daerah melalui JDIH dan media elektronik

Sumber : Bimbingan Teknis Tahap 2 Kabupaten Buleleng 2023

Jika dilihat dalam tabel diatas bahwa terdapat strategi dalam meningkatkan sasaran tersebut muncul karena belum optimal nya pelayanan publik yang rasakan oleh masyarakat dan belum terintegrasinya beberapa layanan publik dengan layanan lainnya. Hal ini menjadi perhatian penting dengan melakukan penguatan layanan administrasi kependudukan berbasis teknologi/online, kemudian melakukan sosialisasi kepada masyarakat secara langsung, melalui media sosial, baliho *platform* pemerintah daerah. Kemudian dalam peningkatan kapasitas para birokrat, pemerintah daerah akan melakukan peningkatan kompetensi kepada para birokrat untuk mendukung pelayanan publik yang efektif dan efisien sebagai penunjang layanan kepada masyarakat. Setelah kompetensi para birokrat meningkatkan kemudian mampu mengajak publik untuk bisa meningkatkan partisipasi dalam penentuan kebijakan sebab regulasi yang kurang dapat mengakomodir pelayanan prima kepada masyarakat, sehingga kurang dapat memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat. Di sisi lain masih kurangnya implementasi regulasi administrasi kependudukan kepada masyarakat.

3.2. Strategi pembangunan *Smart Branding*

Strategi pembangunan pada *Smart Branding* difokuskan kepada upaya kolaborasi dengan melakukan sebuah kerjasama dengan mempromosikan potensi-potensi yang dimiliki oleh Buleleng dengan mengedepankan ciri khas daerah untuk menarik wisatawan domestik dan mancanegara. Dalam hal ini media mempromosikan Buleleng dalam aspek kearifan lokal yang dikedepankan dengan memanfaatkan sumber daya yang berbudaya. Selain itu, melakukan sebuah pemeran untuk bisa meningkatkan wisatawan dengan memamerkan *ecraft* sebagai potensi kerajinan daerah. Untuk lebih lengkap dapat dilihat pada tabel uraian sebagai berikut:

Tabel 16. Strategi *Smart Branding*

Sub-Dimensi	Sasaran	Strategi
B1 Pariwisata	B1.1 Peningkatan daya saing destinasi pariwisata kualitas pemasaran pariwisata, SDM pariwisata, kualitas ekonomi kreatif dan peningkatan PDRB sektor pariwisata	B1.1.1 Melakukan pertunjukan seni, budaya dan <i>ecraft</i> di destinasi wisata
B2 Daya Saing Bisnis	B2.1 Meningkatnya kualitas dan kuantitas investasi ke Kabupaten Buleleng	<p>B2.1.1 Penguatan dan pengelolaan destinasi pariwisata berbasis teknologi informasi</p> <p>B2.1.2 Memanfaatkan sarana inkubator kreatif untuk meningkatkan kualitas <i>ecraft</i></p>

B3 Wajah (Tampilan) Kota	B3.1 Mengembangkan DTW dan Kawasan Pariwisata dan peningkatan pengembangan, dan pelestarian benda situs cagar budaya dan lembaga adat	B3.1.1 Meningkatkan kolaborasi antara Pemerintah Daerah dengan institusi pendidikan
--------------------------	---	---

Sumber : Bimbingan Teknis Tahap 2 Kabupaten Buleleng 2023

Jika dilihat dalam tabel diatas bahwa terdapat strategi dalam meningkatkan sasaran tersebut muncul karena sektor potensial ekonomi kreatif di Kabupaten Buleleng belum terpetakan secara optimal, belum berkembangnya sektor ekonomi kreatif yang lebih inovatif dan berdaya saing. Kemudian dalam menjangkau investor ke Kabupaten Buleleng pengenalan sektor pariwisata perlu ditingkatkan selain itu harus adanya sinergi antar sektor ekonomi kreatif maupun antar pelaku usaha ekonomi kreatif. Salanjutnya dalam penataan wajah kota sebagaimana staretgi yang dibuat yaitu kolaborasi dengan institusi pendidikan sehingga dapat mengembangkan DTW dan pariwisata sebab belum ada inventarisasi yang mampu merangkum DTW yang ada di Kabupaten Buleleng dengan data yang detail dan lengkap mengenai kondisi yang di masing-masing DTW.

3.3. Strategi pembangunan *Smart Economy*

Strategi pembangunan pada *Smart Economy* difokuskan kepada peningkatan pendapatan UMKM lokal dengan mengedepankan potensi lokal, promosi UMKM melalui digitalisasi, pemanfaatan teknologi sebagai media penjualan di *platform* media sosial serta mengajak masyarakat bertransaksi menggunakan *cashless*. Selain itu, pemerintah daerah juga berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat untuk bisa meningkatkan ekonomi dengan memberikan fasilitas lapangan pekerjaan. Untuk lebih lengkap dapat dilihat pada tabel uraian sebagai berikut:

Tabel 17. Strategi *Smart Economy*

Sub-Dimensi	Sasaran	Strategi
Ec1 Ekosistem Industri	Ec1.1 Meningkatkan sebaran industri pengolahan meningkatkan jumlah dan daya saing UMKM meningkatkan jumlah dan daya saing koperasi	Ec1.1.1 Peningkatan produk UMKM lokal yang terdigitalisasi dengan tujuan optimalisasi prosmosi dan penjualan produk
Ec2 Kesejahteraan Masyarakat	Ec2.1 Peningkatan kuantitas, kualitas produk pertanian, perkebunan, kehutanan dan perikanan	Ec2.1.1 Peningkatan lapangan kerja
Ec3 Ekosistem Transaksi Keuangan	Ec3.1 Kemudahan berinvestasi dan membangun <i>platform</i> investasi bagi	Ec3.1.1 Peningkatan pemasaran produk berbasis <i>cashless transaction</i>

	pembangunan di Kabupaten Buleleng	
--	-----------------------------------	--

Sumber : Bimbingan Teknis Tahap 2 Kabupaten Buleleng 2023

Jika dilihat dalam tabel diatas bahwa terdapat strategi dalam meningkatkan sasaran tersebut muncul karena terbatasnya akses pemasaran produk UMKM ke konsumen karena produktivitas UMKM masih dikategorikan rendah sehingga menyebabkan skala yang dikelola terutama skala kecil, selain itu akses permodalan yang terbatas dan juga UMKM belum mampu mengoptimalkan potensi ekonominya serta belum memiliki kemampuan untuk bekerjasama dengan seluruh pelaku ekonomi. Kemudian peningkatan ekonomi tidak hanya pada sektor UMKM saja akan tetapi ketersediaan lapangan pekerjaan yang melihat terdapat potensi yang bisa dimanfaatkan untuk membuka lapangan pekerjaan, upaya peningkatan produksi lahan pertanian, perkebunan dan perikanan menjadi fokus penting sebab saat ini masih belum optimalnya pengembangan kawasan pertanian sehingga terdapat alih fungsi lahan pertanian menjadi non-pertanian. Selain itu, kurangnya data dan informasi pertanian, perkebunan dan perikanan yang aktual dan terintegrasi sesuai dengan kebutuhan para pihak berkepentingan. Serta dalam meningkatkan transaksi keuangan daerah yang mana masyarakat dihimbau untuk bertransaksi non-tunai yaitu menggunakan *platform* digital.

3.4. Strategi pembangunan *Smart Living*

Strategi pembangunan pada *Smart Living* difokuskan kepada peningkatan kualitas pelayanan dalam hal administrasi yang mana untuk kelengkapan dokumen dan peningkatan kualitas layanan kesehatan yang mana masih perlu adanya penataan yang lebih komprehensif. Selain itu, pelayanan dasar yang memberikan kemudahan masyarakat dalam mengurus hal administrasi menjadi fokus pemerintah daerah. Kemudian dalam upaya mendukung mobilitas warga, kebutuhan transportasi daerah sebagai penunjang dalam urusan masyarakat dalam melakukan kegiatan. Untuk lebih lengkap dapat dilihat pada tabel uraian sebagai berikut:

Tabel 18. Strategi *Smart Living*

Sub-Dimensi	Sasaran	Strategi
Lv1 Harmonisasi Tata Ruang	Lv1.1 Terwujudnya pola ruang yang sesuai dengan peruntukan ruang	Lv1.1.1 Peningkatan konsistensi penataan ruang
Lv2 Kesehatan	Lv2.1 Meningkatnya cakupan kepesertaan PUS ber KB dan Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Lv2.1.1 Mewujudkan pelayanan kesehatan yang berkualitas Lv2.1.2 Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan dasar

Lv3 Transportasi	Lv3.1 Terwujudnya Keselamatan Transportasi	Lv3.1.1 Menambahkan armada transportasi untuk mobilitas kebutuhan masyarakat
------------------	--	--

Sumber : Bimbingan Teknis Tahap 2 Kabupaten Buleleng 2023

Jika dilihat dalam tabel di atas bahwa terdapat strategi dalam meningkatkan sasaran tersebut muncul karena masih terdapat permasalahan pengalihan ruang yang tidak semestinya sebagaimana fungsinya, tentu pemerintah daerah akan mengoptimalkan pemanfaatan ruang agar tepat guna sehingga bisa difungsikan dengan baik. Kemudian pada bidang kesehatan pemerintah daerah akan meningkatkan pengembangan rumah sakit umum Singajara dan rumah sakit umum yang ada, ditingkatkan kualitas pelayanan yang rencana nya akan membangun rumah sakit skala pelayanan internasional setelah melalui kajian untuk mengantisipasi pelayanan pada kawasan-kawasan dan kawasan rencana pengembangan wilayah serta pada tingkat Puskesmas dengan skala pelayanan sebagaimana wilayah Kecamatan atau beberapa Desa, tetap dipertahankan dan ditingkatkan kualitas pelayanannya. Dalam menunjang terwujudnya kenyamanan transportasi daerah, pemerintah Kabupaten Buleleng akan menambah armada transportasi publik. Hal ini karena, pencemaran lingkungan (polusi udara) yang diakibatkan oleh kendaraan bermotor yang mana didominasi oleh kendaraan pribadi, selain itu kemacetan lalu lintas di Kabupaten Buleleng sehingga mengakibatkan kemacetan pada pusat kota pada jam-jam tertentu karena kecenderungan pergerakan kendaraan dari daerah pinggiran dan perbatasan kota menuju arah perkantoran dan lain sebagainya.

3.5. Strategi pembangunan *Smart Society*

Strategi pembangunan pada *Smart Society* difokuskan kepada memberikan akses pendidikan kepada masyarakat dengan mengajak masyarakat untuk memiliki latar belakang pendidikan yang cukup serta memberikan pemahaman diseminasi informasi kepada masyarakat agar tidak terpengaruh oleh berita hoaks. Tidak hanya itu, dalam meningkatkan kualitas pembelajaran yang dimulai dari usia dini, pemerintah mengajak masyarakat untuk memberikan edukasi dongeng kepada anak agar terdidik secara verbal dan perilaku sehingga menciptakan generasi yang cerdas dan sopan. Selain itu, dalam menjaga ketertiban dan keamanan pemerintah dapat mengawasi situasi dan kondisi lingkungan. Untuk lebih lengkap dapat dilihat pada tabel uraian sebagai berikut:

Tabel 19. Strategi *Smart Society*

Sub-Dimensi	Sasaran	Strategi
S1 Interaksi Masyarakat	S1.1 Peningkatan pelayanan publik, kualitas pelayanan internet dan pengembangan aplikasi	S1.1.1 Mengajak masyarakat Buleleng untuk bersekolah S1.1.2 Menyediakan sarana informasi klarifikasi isu hoaks
S2 Ekosistem Belajar/Pendidikan	S2.1 Meningkatkan kualitas belajar dan pendidikan di Kabupaten Buleleng	S2.1.1 Memberikan edukasi dongeng kepada anak, sesuai himbauan pemerintah daerah
S3 Keamanan Masyarakat	S3.1 Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Masyarakat	S3.1.1 Tersedianya pemantauan visual

Sumber : Bimbingan Teknis Tahap 2 Kabupaten Buleleng 2023

Jika dilihat dalam tabel di atas bahwa terdapat strategi dalam meningkatkan sasaran tersebut muncul karena masih terbatasnya sumber daya manusia yang memiliki kemampuan teknis dalam bidang urusan sosial dan mendiseminasi informasi yang masuk pada media sosial, wadah dan ruang informasi terbuka yang disediakan oleh pemerintah harus masuk ke dalam ruang lingkup masyarakat sehingga tidak ada *miss* informasi. Kemudian untuk bisa meningkatkan kualitas pembelajaran dan pendidikan Buleleng perlu adanya pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu. Adapun pemerataan akses terhadap pendidikan terutama pada jenjang pendidikan dasar yang perlu didorong, termasuk penanaman pengaruh nilai agama, sopan santun, rasa toleransi, dan disiplin yang menjadi pengaruh besar memiliki karakter yang kuat yang dimulai sejak dini. Selain itu, untuk meningkatkan intensitas keamanan dan kenyamanan masyarakat dengan tersedianya pemantauan secara digital hal ini dikarenakan masih kurangnya pengawasan terhadap pelaku kejahatan di jalan sehingga menimbulkan korban.

3.6. Strategi pembangunan *Smart Environment*

Pembangunan strategi pada *Smart Environment* difokuskan untuk meningkatkan kadar kualitas air dan udara kemudian bisa menjaga habitat pada sebuah lahan di perkotaan sebagaimana dengan keterbatasan ruang. Selain itu, memberikan pemahaman pengelolaan sampah yang disesuaikan dari jenis-jenis sampah yang ada kemudian sampah tersebut dapat diolah menjadi sebuah energi yang bisa dimanfaatkan. Untuk lebih lengkap dapat dilihat pada tabel uraian sebagai berikut:

Tabel 20. Strategi *Smart Environment*

Sub-Dimensi	Sasaran	Strategi
En1 Proteksi Lingkungan	En1.1 Membuat kebijakan dan penyusunan dokumen KLHS serta penyusunan dokumen RPPLH	En1.1.1 Meningkatkan kualitas air dan udara En1.1.2 Peningkatan tutupan vegetasi pada lahan perkotaan dan lahan kritis
En2 Pengelolaan Sampah dan Limbah	En2.1 Membentuk Bank Sampah Unit untuk mengurangi timbunan sampah yang masuk ke TPA serta melakukan pengolahan sampah organik dan anorganik	En2.1.1 Meningkatkan pengelolaan sampah sesuai ketentuan
En3 Tata Kelola Energi	En3.1 Melakukan inovasi tempat pengolahan sampah menjadi energi listrik dan pengolahan sampah menjadi briket	En3.1.1 Merubah sampah menjadi energi terbarukan

Sumber : Bimbingan Teknis Tahap 2 Kabupaten Buleleng 2023

Jika dilihat dalam tabel di atas bahwa terdapat strategi dalam meningkatkan sasaran tersebut muncul karena masih terdapat fokus yaitu menetapkan kualitas kawasan lindung dan juga melestarikan ekosistem kawasan hutan dan danau sebagai pengendali sistem hidrologis dan pemasok air di wilayah Buleleng dan juga pengelolaan air limbah dengan sistem setempat dilakukan secara individual dengan penyediaan bak pengelolaan air limbah atau tangki septik. Kemudian dalam pengelolaan sampah, pemerintah daerah Buleleng dapat dilakukan dengan kerjasama antara pemerintah daerah atau melalui kemitraan dengan badan usaha pengelolaan sampah menuju pelayanan profesional. Selain itu, fokus pemerintah daerah Buleleng yang masih menjadi kendala mengubah sampah menjadi energi yang bisa digunakan dan terbarukan, sebab saat ini perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup masih dalam tataran teoritis dan belum sepenuhnya dapat diimplementasikan. Salah satu permasalahannya adalah masih rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat. Untuk itu dibutuhkan upaya meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat melalui komunikasi dan edukasi secara terus-menerus.

4. RENCANA AKSI *SMART CITY* DAERAH

Rencana aksi *Smart City* daerah merupakan sebuah gambaran pelaksanaan dalam penerapan konsep *Smart City* yang mengacu kepada keenam dimensi *Smart City*. Dalam rencana aksi setiap daerah akan dituntut membuat sebuah inovasi untuk bisa memberikan pelayanan masyarakat serta pemecahan masalah dalam rangka pembangunan daerah yang mandiri dan cerdas. Selain itu, pada rencana aksi juga disebutkan pengembangan potensi kebijakan serta kelembagaan dengan mengacu kepada landasan hukum yang sudah dibuat sehingga nantinya akan menjadi jalan menuju perencanaan, infrastruktur pendukung dan perangkat lunak serta penguatan literasi yang mana ketiga unsur tersebut harus sejalan beriringan pada setiap tahunnya.

Untuk daerah tertentu bahwa rencana aksi merupakan kumpulan rencana dan tindakan yang dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan, karakteristik, dan prioritas daerah dalam menerapkan konsep *Smart City*. Maka dalam hal ini daerah dapat menyesuaikan kebutuhan spesifik, ketersediaan sumber daya, karakteristik demografis, budaya dan nilai lokal. Disisi lain daerah juga harus mempertimbangkan ketersediaan data karena untuk mengukur seberapa potensinya sumber daya yang dimiliki oleh daerah.

Rencana aksi *Smart City* untuk wilayah tertentu adalah sebuah peta jalan yang dibuat berdasarkan karakteristik dan kebutuhan wilayah tersebut untuk mencapai visi daerah yang menjadikan sebagai kota cerdas. Maka untuk menentukan sebuah keberhasilan implementasi, rencana aksi akan mencakup teknologi, strategi pelaksanaan, sumber pendanaan, keterlibatan *stakeholder* dan juga metrik untuk bahan evaluasi atas program yang sudah rumuskan dalam pengembangan konsep *Smart City*. Adapun rencana aksi Kabupaten Buleleng dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut :

4.1. Rencana Aksi *Smart Governance*

Rencana aksi *Smart Governance* dibuat untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih efisien, transparan, akuntabel dan partisipatif. Rencana aksi ini menggabungkan pemanfaatan teknologi dalam menciptakan pelayanan publik dengan langkah-langkah strategis yang dirancang untuk menerapkan gagasan dalam sebuah daerah, khusus nya pada Kabupaten Buleleng. Rencana aksi *Smart Governance* mengubah layanan menjadi terdigitalisasi untuk meningkatkan aksesibilitas efektivitas layanan yang berbasis administrasi. Selain itu, keterbukaan data yang sesuai dengan porsi sebagai pengembangan keterbukaan informasi yang dijalankan oleh Kabupaten Buleleng. Penting nya partisipasi masyarakat sebagai penyeimbang pemerintahan diharapkan mampu memberikan kontribusi yang maksimal untuk mengawal jalannya roda pemerintah Kabupaten Buleleng.

Rencana aksi pada *Smart Governance* difokuskan menjadi tiga sub-dimensi yaitu layanan publik, birokrasi dan perancangan kebijakan. Pada ketiga sub-dimensi tersebut ditekankan kepada inovasi-inovasi yang dibuat untuk meningkatkan pelayanan. Adapun inovasi yang dibuat berdasarkan strategi yang sudah direncanakan sesuai dengan kebutuhan daerah dan kondisi daerah. Untuk lebih detail dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 21 Rencana Aksi *Smart Governance*

Sub-Dimensi	Strategi	Program/Kegiatan	Inovasi	Rencana Aksi/Tahun							
				Pengembangan Kebijakan & Kelembagaan	Tahun	Infrastruktur Pendukung	Tahun	Perangkat Lunak Pendukung	Tahun	Penguatan Literasi	Tahun
G1 Layanan Publik	G1.1.1 Meningkatkan Implementasi layanan publik	Program: Penyelarasn Administrasi Kegiatan: Penataan pengelolaan informasi administrasi kependudukan	Pengembangan sistem pelayanan kependudukan berbasis teknologi informasi (AKU ONLINE) Untuk meningkatkan kepuasan masyarakat secara signifikan.	A1. Merujuk pada UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik A2. Merujuk pada Permendagri No. 2 Tahun 2023 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring	2024-2028	B1. Pengembangan fiber optik yang terkoneksi di 40 OPD, 19 Kelurahan. B2. Pengembangan sistem informasi/aplikasi di Pemkab B3. Jaringan internet	2024-2028	C1. Aplikasi AKU ONLINE (Link: http://akuonline.bulelengkab.go.id/) Serta dapat diunduh melalui <i>playstore</i> : Aku Online Dukcapil Buleleng	2024-2028	D1. Mengadakan Sosialisasi dan bimbingan teknis dari Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil ke Operator terkait aplikasi D2. Mengadakan dan melakukan penyebaran informasi panduan aplikasi AKU ONLINE melalui media instagram (https://www.instagram.com/disdukcapil_buleleng/) Tiktok (https://www.tiktok.com/search?q=disdukcapil.bll) Facebook (https://web.facebook.com/disdukcapil.buleleng) Youtube (https://www.youtube.com/@disduk)	2024-2033

									capilbuleleng6342)		
		Program: Pengintegrasian Pelayanan Kegiatan: Penyediaan pelayanan publik atas barang/jasa atau pelayanan administrasi secara terpadu dan terintegrasi	Pengembangan Mal Pelayanan Publik, untuk memudahkan masyarakat dalam mengurus pelayanan administrasi tidak hanya di kantor pemerintah saja	A1. Merujuk pada UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik A2. Merujuk pada Peraturan Presiden No. 89 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik A3. Merujuk pada Peraturan MenpanRB No. 92 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik A4. Penyusunan peraturan Bupati Buleleng tentang Mal	2024-2028	B1. Kantor Depan B2. Kantor Belakang B3. Ruang Pendukung B4. Alat pendukung B5. Sarana dan prasarana tambahan yang diperlukan dalam memberikan pelayanan publik B6. Jaringan internet	2024-2028	C1. Aplikasi layanan dari masing-masing organisasi penyelenggara C2. Arsip Digital	2024-2028	D1. Mengadakan sosialisasi terkait Mal Pelayanan Publik dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ke Masyarakat D2. Mengadakan dan melakukan Informasi penyelenggaraan Mal Pelayanan publik melalui media elektronik dan cetak	2024-2033

				pelayanan Publik							
G2 Birokrasi	G2.1.1 Meningkatkan Implementasi reformasi birokrasi	Program: Kepegawaian Daerah Kegiatan: Pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian ASN	Pengembangan sistem informasi ASN (SIMPEG) sebuah sistem untuk memberikan informasi terakit dengan hak dan kewajiban ASN	A1. Merujuk pada Perbup no 74 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Dokumen dan Data Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah A2. Merujuk pada UU No. 5 tentang Aparatur Sipil Negara	2024-2033	B1. Server data B2. Jaringan internet	2024-2028	C1. Aplikasi Layanan (https://simpeg.bulelengkab.go.id/)	2024-2028	D1. Mengadakan Sosialisasi kepada operator e-surat pada masing-masing perangkat daerah	2024-2033
		Program: Pengelolaan surat masuk dan keluar berbasis elektronik serta tanda tangan elektronik Kegiatan: Mengadakan pelatihan kepada operator e-surat/ penggunaan e-	Peningkatan efisiensi surat menyurat (e-surat) Sistem surat yang berbasis elektronik agar memudahkan masyarakat	A1. Merujuk pada Perbup Buleleng no 32 tahun 2020 tentang penggunaan sertifikat elektronik A2. Merujuk pada Perbup no 45 tahun 2021 tentang pelaksanaan aplikasi	2024-2033	B1. Server data B2. Pengelolaan infrastruktur TIK di OPD	2024-2028	C1. Aplikasi Layanan Surat Elektronik (https://esurat.bulelengkab.go.id/)	2024-2028	D1. Mengadakan Sosialisasi kepada operator e-surat pada masing-masing perangkat daerah	2024-2028

		surat dimasing-masing OPD, BUMD, Desa/Kelurahan terkait penggunaan aplikasi e-surat Buleleng Mengelola pemanfaatan sertifikat elektronik untuk tanda tangan digital pada aplikasi e-surat		surat elektronik A3. Merujuk pada Perpres No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik							
		Program: Pemenuhan data sektoral Pemkab Buleleng Kegiatan: Melakukan pengumpulan dokumen, koordinasi dan sinkronisasi pengumpulan, pengelolaan, analisis dan diseminasi data statistik sektoral	Pengintegrasian aplikasi di Pemkab Buleleng (data center) Sebuah sistem integrasi agar memudahkan dalam pencarian data yang terpusat	A1. Merujuk pada Permenpan RB Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi B1. Merujuk pada Peraturan Bupati Buleleng no. 49 Tahun 2022	2024-2033	B1. Server data B2. Pengelolaan infrastruktur TIK di OPD B3. Penambahan fiber optik di setiap perangkat daerah B4. Hardware	2024-2028	C1. Aplikasi Layanan Satu Data (http://satudata.bulelengkab.go.id/)	2024-2028	D1. Mengadakan peningkatan koordinasi dan komunikasi antar OPD tentang pengembangan E-Government	2024-2033

				tentang Satu Data Daerah							
G3 Perencanaan Kebijakan	G3.1.1 Digitalisasi penyebaran produk hukum daerah melalui JDIH dan media elektronik	Program: Peningkatan kualitas penyelenggaraan JDIH Kegiatan: Meningkatkan sarana, prasarana, dan SDM terkait JDIH	Digitalisasi penyebaran produk hukum daerah melalui JDIH dan media elektronik lainnya	A1. Merujuk pada UU No. 12 Tahun 2011 jo. UU No. 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan A2. Merujuk pada Permendagri No. 80 Tahun 2015 jo. Permendagri No. 120 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah A3. Merujuk pada Permenkumham No. 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan	2024-2033	B1. Server data B2. Pengelolaan infrastruktur TIK di perangkat daerah B3. Penambahan fiber optik di setiap perangkat daerah	2024-2028	C1. Aplikasi layanan (https://jdih.bulelengkab.go.id/) C2. Pengembangan fitur untuk rancangan produk hukum daerah pada JDIH	2024-2028	D1. Mengadakan Sosialisasi fitur dan produk hukum pada JDIH D2. Mengadakan Pelatihan sumber daya manusia	2024-2033

				Informasi Hukum A4. Merujuk pada Peraturan Bupati Buleleng No. 31 Tahun 2023 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum A5. Penyusunan SK Sekda tentang Tim Pengelola Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum A6. Penyusunan SOP Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum							
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Sumber: Bimbingan Teknis Tahap 2 Kabupaten Buleleng 2023

Pada rencana aksi *Smart Governance* membuat sebuah inovasi yaitu Aku Online yang merupakan sebuah platform sistem pelayanan kependudukan berbasis online, selain itu Kabupaten Buleleng juga sudah menerapkan sebuah Mal Pelayanan Publik untuk memudahkan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan administrasi nya tidak hanya melalui Dinas terkait. *Smart Governance* Kabupaten Buleleng juga menyediakan konsultasi online yang merupakan sebuah inovasi yang dikembangkan dalam menanggapi kebutuhan masyarakat dalam mendapatkan layanan administrasi. Disisi lain untuk memantau kinerja Aparatur Sipil Negara, Kabupaten Buleleng menyediakan sebuah aplikasi yaitu SIMPEG untuk memuat data dan dokumen kepegawain Kabupaten Buleleng. Selain itu, untuk memudahkan kinerja pegawai Kabupaten Buleleng platform e-surat sangat dibutuhkan untuk mengetahui surat masuk dan keluar yang lebih teratur dalam administrasi. Kabupaten Buleleng juga memberikan sebuah database yang berisi *data center* yang mana didalamnya merupakan sebuah cakupan data-data penting yang dimiliki oleh daerah. Kemudian dalam perancangan kebijakan, Kabupaten Buleleng, mengaktifkan kembali secara massif platform JDIH yang mana hal tersebut bisa di akses kepada publik sehingga masyarakat dapat mengetahui perkembangan peraturan kebijakan yang dibuat oleh Kepala Daerah dan peraturan nasioanal.

4.2. Rencana Aksi *Smart Branding*

Rencana aksi *Smart Branding* merupakan sebuah strategi atau *roadmap* yang sudah dirancang untuk membangun, memposisikan, dan memelihara keberlangsungan sektor pariwisata dan kearifan lokal untuk keberlangsungan daerah dengan cara yang cerdas, inovatif, dan adaptif di era digital saat ini. Rencana aksi yang dilakukan *Smart Branding* merupakan pendekatan yang menggunakan basis data, analisis dengan potensi sumber daya daerah adapun potensi-potensi tersebut meliputi budaya dan pariwisata sehingga dapat mengetahui mana rencana aksi yang menjadi prioritas pada *Smart Branding* sehingga nanti bisa memberikan dampak yang efektif untuk kemajuan pariwisata daerah. Sebagai landasan nya pada *Smart Branding* selalu memanfaatkan sumber daya yang dimiliki daerah sehingga pengemasan untuk memperkenalkan membutuhkan strategi yang efektif.

Rencana aksi pada *Smart Branding* difokuskan menjadi dua sub-dimensi, adapun cakupan sub-dimensi nya meliputi ekosistem pariwisata, penataan wajah kota. Kedua sub-dimensi tersebut lebih ditekankan kepada penguatan tata kelola yang berbasis budaya yang memanfaatkan kearifan lokal guna mendukung sumber daya pariwisata. Kemudian dalam penataan kota pemerintah Buleleng akan bekerja sama dengan institusi Pendidikan untuk bisa berkolaborasi dalam mengemaskan budaya Buleleng agar mengetahui kreasi dan inovasi daerah. Untuk lebih detail dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 22 Rencana Aksi *Smart Branding*

Sumber : Bimbingan Teknis Tahap 2 Kabupaten Buleleng 2023

Sub-Dimensi	Strategi	Program/Kegiatan	Inovasi	Rencana Aksi/Tahun							
				Pengembangan Kebijakan & Kelembagaan	Tahun	Infrastruktur Pendukung	Tahun	Perangkat Lunak Pendukung	Tahun	Penguatan Literasi	Tahun
B1 Pariwisata	B1.1.1 Melakukan pertunjukan seni, budaya dan ecraft di destinasi wisata	Program: Program Pengembangan Kebudayaan Kegiatan: Pengelolaan kebudayaan yang mana masyarakat merupakan pelakunya dalam daerah Kabupaten/Kota	PAS (Pentas Apresiasi Seni) sebuah kegiatan pertunjukan budaya yang dilakukan di hari-hari penting	A1. Merujuk pada UU No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan	2024-2033	B1.Tempat pagelaran; B2.Sanggar/Kelompok seni/komunitas; B3.Ruang Terbuka Hijau (RTH). B4.Armada kendaraan B5.Sound system B6.Sarana gambelan B7.Pakaian penari dan penabuh	2024-2033	C1. Sosial Media Perangkat; Daerah (IG, FB) C2. Channel Youtube.	2024-2033	D1. Mengadakan pembinaan seni	2024-2033
B2 Daya Saing Daerah	B2.1.1 Penguatan dan Pengelolaan destinasi pariwisata berbasis teknologi informasi;	Program: Pemasaran Pariwisata Kegiatan: Melakukan pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri, daya tarik, destinasi dan kawasan strategis pariwisata Kabupaten/Kota	(Visiting Buleleng) sebuah aplikasi yang berisi informasi mengenai informasi pariwisata dll	A1. Merujuk pada UU No. 10 Tahun 2019 tentang Kepariwisata A2. Penyusunan dokumen Pengembangan Promosi Digital.	2024-2033	B1.Server B2.Jaringan internet B3.Laptop/PC B4.Kelompok Sadar Wisata (Darwis) B5.Industri Pariwisata	2025-2033	C1. Aplikasi smartphone	2025-2033	D1. Meningkatkan kompetensi SDM dan admin D2. Mengadakan Sosialisasi aplikasi promosi	2025-2033

	B2.1.2 Memanfaatkan sarana incubator kreatif untuk meningkatkan kualitas ecraft	Program: Penelitian dan Pengembangan Kegiatan: Diseminasi jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersifat inovatif	KRESIDA EXPO (Kreasi Inovasi Daerah Expo) sebuah kegiatan bazar yang memperjual belikan produk-produk kearifan lokal	A1. Merujuk pada UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah A2. Merujuk pada Peraturan Pemerintah No.38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah A3. Merujuk pada Perbup Inovasi Daerah No.23 tahun 2023	2024-2033	B1. Tempat pameran	2024-2033	C1. Sosial media perangkat daerah (IG,FB) C2. Channel youtube	2024-2033	D1. Mengadakan Sosialisasi D2. Meningkatkan kompetensi SDM dan admin	2024-2033
B3 Wajah (Tampilan) Kota	B3.1.1 Meningkatkan kolaborasi antara Pemerintah Daerah dengan institusi pendidikan	Program: Penelitian dan Pengembangan Potensi Kegiatan: Melakukan optimalisasi terhadap potensi kebudayaan untuk dijadikan sebagai sebuah inovasi daerah yang nantinya akan berdampak bagi tampilan Kabupaten Buleleng	KRESIDA (Kreasi Inovasi Daerah) sebuah kegiatan yang dilakukan dalam menciptakan inovasi dibidang pariwisata	A1. Merujuk pada UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah A2. Merujuk pada Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah A3. Merujuk pada Perbup Inovasi daerah No.23 tahun 2023	2024-2033	B1. Server B2. Jaringan internet B3. Laptop/PC B4. Kelompok inovator	2024-2033	C1. website	2024-2033	D1. Mengadakan Sosialisasi D2. Meningkatkan kompetensi SDM dan admin	2024-2033

Pada rencana aksi *Smart Branding* melakukan sebuah terobosan inovasi Pentas Apresiasi Seni (PAS) yang merupakan sebuah tempat untuk menampung bakat-bakat generasi penerus kebudayaan dengan menyediakan sanggar seni dan membuat kelompok seni untuk bisa mengekspresikan potensi yang dimiliki dari perspektif seni. Selain itu, *Smart Branding* juga membuat inovasi Visiting Buleleng dengan tujuan untuk bisa menarik para investor dan wisatawan dengan harapan dapat datang ke Buleleng untuk bisa menikmati karakteristik budaya dan sektor pariwisata. Investor dan wisatawan merupakan jantung pariwisata sebagai pengembangan sektor pariwisata untuk keberlangsungan pemanfaatan sumber dayanya. Kemudian untuk menampung para UMKM yang mempunyai kreatifitas serta potensi-potensi yang bisa dikomersialisasikan dalam hal ini Kabupaten Buleleng menyediakan wadah yaitu KRESIDA EXPO (Kreasi Inovasi Daerah Expo) sebagai tempat memperkenalkan produk-produk yang dimiliki oleh para UMKM sehingga nantinya menjadi bisnis yang berkelanjutan dengan harapan meningkatkan daya jualnya.

4.3. Rencana Aksi *Smart Economy*

Rencana aksi *Smart Economy* merupakan sebuah serangkaian strategi dan langkah yang diambil oleh pemerintah untuk meningkatkan roda perekonomian daerah dan masyarakat. Langkah tersebut diambil oleh pemerintah, sektor swasta dan berbagai pemangku kepentingan lainnya untuk memfasilitasi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, inovatif, dan inklusif dengan memanfaatkan teknologi digital, analisis data dan sumber daya daerah. Dalam hal ini rencana aksi *Smart Economy* suatu panduan terstruktur untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang memanfaatkan teknologi yang baru dalam mempromosikan inovasi, dan memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi tersebut dapat berkelanjutan dan inklusif bagi seluruh masyarakat.

Rencana aksi pada *Smart Economy* difokuskan menjadi tiga sub-dimensi yaitu penataan ekosistem industri, peningkatan kesejahteraan masyarakat dan membangun ekosistem keuangan. Dalam hal ini *Smart Economy* lebih menekankan peningkatan kapasitas UMKM baik dari segi pendapatan dan pengenalan terhadap dunia industri. Selain itu, dalam mensejahterakan masyarakat pemerintah Kabupaten Buleleng membuka lapangan pekerjaan agar bisa dimanfaatkan oleh masyarakat Buleleng untuk meningkatkan kondisi perekonomian. Perputaran uang kertas yang masih massif menjadi fokus utama untuk bisa meminimalisir peredaran uang kertas di lingkungan masyarakat dengan menggunakan *Cashless Transaction*. Untuk lebih detail dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 23 Rencana Aksi *Smart Economy*

Sumber : Bimbingan Teknis Tahap 2 Kabupaten Buleleng 2023

Sub-Dimensi	Strategi	Program/Kegiatan	Inovasi	Rencana Aksi/Tahun							
				Pengembangan Kebijakan & Kelembagaan	Tahun	Infrastruktur Pendukung	Tahun	Perangkat Lunak Pendukung	Tahun	Penguatan Literasi	Tahun
Ec1 Ekosistem Industri	Ec1.1.1 Peningkatan Produk UMKM Lokal yang terdigitalisasi dengan tujuan optimiliasi promosi dan penjualan produk	Program: Pengembangan UMKM Kegiatan: Pengembangan UMKM dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil, kemudian pada sub kegiatan produksi dan pengolahan, pemasaran, SDM serta desain dan teknologi	Pengembangan Pusat Layanan terpadu (PLUT) UMKM, sebuah pengembangan kapasitas bagi pelaku UMKM untuk bisa meningkatkan pendapatan	A1. Merujuk pada Perbup No. 28 tahun 2023	2024	B1. Gedung Pusat Layanan Usaha terpadu (PLUT) UMKM	2024 - 2025	C1. Smartphone C2. PC/Laptop C3. Printer C4. Wifi C5. Aplikasi PLUT(dalam proses) C6. Kerjasama dengan Shopee, Lazada, Tokopedia,Blibli.com, Mal Bali.id	2024 - 2025	D1. Mengadakan Pelatihan dan pendampingan kepada UMKM	2024 - 2033
						B2. Alat masak B3. Alat desain kemasan B4. Desain konveksi/ endek B5. Mesin pintal benang				D2. Mengadakan Pelatihan kewirahusaan D3. Mengadakan Pelatihan perkoprasian D4. Mengadakan Pelatihan barista kopi D5. Mengadakan Pelatihan olahan pangan berbahan sorgum D6. Mengadakan Pelatihan fotografi D7. Mengadakan Pelatihan berbasis digital D8. Mengadakan Pelatihan fruit chip D9. Mengadakan Pelatihan motif desain endek D10. Mengadakan Pelatihan pada tahun 2023 untuk pengusaha muda UMKM sebanyak 100 orang	
Ec2 Kesejahteraan	Ec2.1.1 Peningkatan Lapangan Kerja	Program: Penempatan Tenaga Kerja	Peningkatan Kewirausahaan (SIAP)	A1. Merujuk pada Peraturan Menteri	2024	B1. BLK (Balai Latihan Kerja)	2024 - 2025	C1. Smartphone C2. PC/Laptop C3. Printer C4. Sound Sistem	2024 - 2025	D1. Mengadakan Sosialisasi melalui medsos Disnaker Kabupaten Buleleng	2024 - 2033

Masyarakat		Kegiatan: Pengelola informasi pasar kerja	KERJA) sebuah inovasi untuk memberikan perbekalan dalam menghadapi dunia kerja	Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2017		B2. Mesin jahit B3. Alat perbengkelan		C5. Aplikasi SIAP KERJA KEMENAKER		antara lain melalui website: https://disnaker.bulelengkab.go.id , facebook Disnaker Buleleng, Instagram Disnaker Buleleng, Youtube Disnaker Buleleng D2. Mengadakan Sosialisasi melalui lembaga BLK (Balai Latihan Kerja) D3. Mengadakan Pelatihan	
Ec3 Ekosistem Transaksi Keuangan	Ec3.1.1 Peningkatan Pemasaran Produk berbasis Cashless Transaction	Program: Pengelolaan Keuangan Daerah Kegiatan: Koordinasi dan pengelolaan perbendaharaan daerah	Gebyar Penggunaan QrIS, untuk menekan penggunaan uang kertas di kalangan masyarakat	A1. Merujuk pada Surat Edaran Menteri Agraria Nomor 910/1867/Sj/ Dan Instruksi Bupati Nomor 900/010.2/Bkd/2019 Tentang Implementasi Transaksi Non Tunai	2024	B1. Inovasi layanan perbankan	2024 - 2025	C1. Smartphone C2. PC/Laptop C3. Printer	2024 - 2025	D1. Mengadakan Sosialisasi melalui medsos Disnaker Kabupaten Buleleng antara lain melalui website: https://disnaker.bulelengkab.go.id , facebook Disnaker Buleleng, Instagram Disnaker Buleleng, Youtube Disnaker Buleleng D2. Mengadakan Sosialisasi ke OPD dan masyarakat D3. Mengadakan kampanye penggunaan transaksi QRIS diberbagai event daerah seperti penyelenggaraan Buleleng Development Festival (BDF), Car Free Day, Gelar Pangan Murah, Pasar Tani, Buleleng	2024 - 2033

										Festival, Festival dsb.	Lovina	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------------	--------	--

Pada rencana aksi *Smart Economy* merumuskan sebuah program, dimana program tersebut sudah berjalan adapun program inovasi yang dibuat yaitu PLUT UMKM pengembangan pusat layanan terpadu, program inovasi ini menyediakan kesempatan untuk meningkatkan kompetensi bagi para pelaku UMKM dalam memaksimalkan produk-produk yang dibuatnya, sehingga produknya akan dibesarkan melalui strategi pelatihan yang sudah diikutinya dengan memberikan tips dan trick dalam menghadapi arus global perdagangan. Selain itu, untuk meminimalisir pengangguran di Kabupaten Buleleng, dalam hal ini pemerintah menyediakan wadah peningkatan kewirausahaan untuk bisa meningkatkan kompetensi skill sehingga mempunyai bekal dalam bersaing dan menghadapi dunia kerja. Program SIAP KERJA digagas pemerintah daerah Kabupaten Buleleng karena melihat angka pengangguran di Kabupaten Buleleng yang cukup signifikan, kemudian dari hasil analisis tersebut memberikan sebuah terobosan agar bisa tertanggulangi untuk menurunkan angka pengangguran daerah. Selain itu, pemerintah Kabupaten Buleleng juga mengharapkan kepada masyarakat Kabupaten Buleleng dalam bertransaksi tidak menggunakan uang kertas atau *cashless transaction*. Program-program tersebut merupakan sebuah gambaran kebutuhan *Smart Economy* dalam menghadapi perkembangan ekonomi daerah sehingga nantinya bisa menghadapi dengan baik.

4.4. Rencana Aksi *Smart Living*

Rencana aksi *Smart Living* merujuk pada serangkaian strategi dan inisiatif yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup warga diperkotaan atau komunitas tertentu melalui pemanfaatan teknologi dan inovasi. Adapun rencana aksi pada *Smart Living* ingin menciptakan lingkungan hidup yang berkelanjutan, nyaman, efisien, dan aman untuk masyarakat. Rencana aksi yang sudah ditentukan dalam *Smart Living* merupakan kebutuhan berdasarkan kajian-kajian strategis daerah untuk mendukung pengembangan *Smart City* Kabupaten Buleleng. Rencana aksi *Smart Living* yang digagaskan untuk bisa mengoptimalkan program kepada masyarakat maka nantinya akan berkelanjutan dengan program yang sudah dijalankan.

Rencana aksi pada *Smart Living* difokuskan menjadi tiga sub-dimensi yaitu harmonisasi lingkungan, pelayanan kesehatan dan sarana transportasi. Sub-dimensi mempunyai inovasi yang mana menyesuaikan kebutuhan dan permasalahan yang ada. Kemudian akan diaplikasikan yang melibatkan berbagai unsur untuk mendukung *Smart Living*. Untuk lebih detail dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 24 Rencana Aksi *Smart Living*

Sumber : Bimbingan Teknis Tahap 2 Kabupaten Buleleng 2023

Sub-Dimensi	Strategi	Program/Kegiatan	Inovasi	Rencana Aksi/Tahun							
				Pengembangan Kebijakan & Kelembagaan	Tahun	Infrastruktur Pendukung	Tahun	Perangkat Lunak Pendukung	Tahun	Penguatan Literasi	Tahun
Lv1 Harmonisasi Tata Ruang	Lv1.1.1 Peningkatan konsistensi penataan ruang	Program: 1. Program kawasan permukiman 2. Program pengembangan perumahan 3. Program peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) 4. Program perumahan dan kawasan permukiman kumuh Kegiatan: 1. Peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) Ha 2. Penataan dan peningkatan	Siper mata (sistem informasi perumahan kawasan pemukiman dan pertanahan) sebuah sistem untuk pengajuan perbaikan RTLH, pemetaan kawasan permukiman kumuh, PSU, dan Tanah Ulayat	A1. Merujuk pada SK Bupati No. 100.3.3.2/304/HK/2023	2024-2033	B1. SDM B2. Sarpras IT B3. Gedung	2024-2033	C1. Aplikasi	2024-2033	D1. Menginformasikan pengajuan penanganan D2. Menginformasikan pemetaan, penanganannya dan sarana utilitas D3. Menginformasikan pemetaan kawasan permukiman kumuh, D4. Menginformasikan pemetaan tanah ulayat D5. Mengadakan Paperles dalam pengajuan rumah tidak layak huni	2024-2033

		kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 Ha									
		3. Pembangunan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program Kabupaten/Kota									
		4. Pendataan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program Kabupaten/Kota									
		5. Penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan									
		6. Urusan penyelenggaraan PSU perumahan									
		7. Pencegahan perumahan dan kawasan									

		permukiman kumuh pada daerah Kabupaten /Kota									
Lv2 Kesehatan	Lv2.1.1 Mewujudkan pelayanan kesehatan yang berkualitas	Program: Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Kegiatan: mengintegrasikan sistem rekam medis pada seluruh rumah sakit Buleleng	Rekam medis terintegrasi (ERM), sebuah sistem data rumah sakit yang tergabung dengan riwayat penyakit pasien sebelumnya	A1. Merujuk pada Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan A2. Merujuk pada Permenkes No. 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis A3. Penyusunan regulasi (SK Bupati) Keamanan Data Pasien A4. Penyusunan SK Bupati Tata Kelola Rekam Medis Elektronik di Kab. Buleleng	2026	B1. Penyediaan server B2. Penyediaan perangkat komputer pada tiap level fasilitas pelayanan kesehatan	2026-2033	C1. Sistem informasi kesehatan terintegrasi	2026-2033	D1. Mengadakan pembinaan dan penyediaan klinik <i>troubleshooting</i> aplikasi sistem informasi kesehatan dan ERM bagi pengguna data rekam medis	2026-2033
	Lv2.2.1 Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan dasar	Program: Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Kesehatan Masyarakat Kegiatan: Penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP tujuan tingkat daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan Kesehatan online (Yan Kesi Buleleng) Merupakan sebuah layanan online yang bisa diakses selama 24 jam oleh masyarakat	A1. Penyusunan regulasi (SK Bupati) tentang penyelenggaraan pelayanan kesehatan secara daring	2026	B1. Penyediaan server B2. Penyediaan perangkat keras computer B3. Penyediaan alat kesehatan yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan	2026-2033	C1. Aplikasi penggilan video	2026-2033	D1. Mengadakan pembinaan dan sosialisasi pelayanan kesehatan daring ke masyarakat lewat media sosial	2026-2033

		Program: Penyediaan alat transportasi kesehatan	Mobil pelayanan KB (MULYA KB) mobil layanan pasien untuk kerumah sakit	A1. Merujuk pada Peraturan Kepala BKKBN No. 10 Tahun 2018 A2. Merujuk pada SK Bupati No. 100.3.3.2/304/HK/2023 A3. Merujuk pada Penyusunan SK Kepala Dinas Tim Pelayanan KB	2024	pelayanan kesehatan B1. SDM B2. Mobil Bus Pelayanan KB B3. Biaya Operasional	2024	C1. Aplikasi pelayanan AKSEPT OR KB	2024-2033	D1. Mengadakan Sosialisasi MULYA KB lewat media sosial (FB: DP2KBP3A) D2. Mengadakan dan melakukan Koordinasi jadwal bekerjasama dengan bidan desa	2024-2033
Lv3 Transpotasi	Lv3.1.1 Menambahk an armada transportasi untuk mobilitas kebutuhan masyarakat	Program: Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kegiatan: Penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang bagi anak-anak sekolah	Bus Jasa Antar Jemput Sekolah Buleleng Gratis (J AS Bule Gratis) sebuah layanan antar jemput bagi anak sekolah	A1. Merujuk pada SK Bupati tentang Waktu Operasional dan Rute Bus Sekolah Angkutan Perkotaan 2023(SK Bupati No. 100.3.3.2/50/HK/2023)	2024	B1. Mobil bus sekolah dan biaya operasional, SDM	2024-2033	C1. Penyusunan Aplikasi rute bus	2024-2033	D1. Mengadakan Sosialisasi Bus Sekolah lewat Facebook dan instagram Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng	2024-2033

Pada rencana aksi *Smart Living* sebagaimana sudah dirumuskan bahwa untuk menjawab permasalahan pada *Smart Living* yaitu dengan menciptakan sebuah inovasi, adapun inovasi tersebut membuat aplikasi berbasis website SIPERMATA (Sistem Informasi Perumahan dan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan) inovasi ini akan mengetahui tata ruang yang ada di Kabupaten Buleleng sehingga dalam menertibkan ruang terbuka atau sudah ruang sudah digunakan dapat dioptimalkan secara efektif. Inovasi tersebut berkaca pada situasi yang berkembang di Kabupaten Buleleng yang mana banyak sekali tata ruang yang digunakan tidak sesuai dengan pemanfaatannya sehingga perlu adanya pemetaan untuk mengetahui tata kelola ruang yang efektif. Selain itu, dalam pelayanan kesehatan pemerintah Kabupaten Buleleng akan mengoptimalkan rekam medis yang terintegrasi agar dapat diakses kepada pengguna layanan kesehatan, integrasi tersebut mendorong keterbukaan informasi kesehatan sehingga pengguna dapat mengetahui rekam medis yang sudah dilakukan. Kemudian dalam mendukung program pemerintah pusat, Kabupaten Buleleng membuat inovasi yaitu MUYA KB (Mobil Pelayanan) KB yang mana sasaran nya adalah usia produktif kehamilan pada keluarga yang memiliki banyak keturunan. Program inovasi tersebut untuk menekan angka pertumbuhan manusia yang melonjak tajam sehingga nantinya akan terkelola dengan baik tanpa mengurangi esensi kebutuhan keluarga. Disisi lain rencana aksi pada *Smart Living* sebagaimana memberikan kenyamanan kepada orang tua yang memiliki anak bersekolah, dalam hal ini Kabupaten Buleleng mengoptimalkan Jasa Layanan Jemput Gratis Buleleng (JAS BULE) yang mana program ini juga menurunkan angka kemacetan di Buleleng pada jam-jam tertentu.

4.5. Rencana Aksi *Smart Society*

Rencana aksi *Smart Society* merupakan sebuah serangkaian membangkitkan kesadaran masyarakat dalam memanfaatkan teknologi untuk kepentingan bersama dalam hal ini berbasis inovasi untuk meningkatkan kualitas hidup, partisipasi masyarakat, dan pembuatan keputusan yang berbasis menciptakan keunggulan di lingkungan masyarakat. Rencana aksi dalam konteks merupakan sebuah gambaran kondisi yang sebenarnya di Kabupaten Buleleng dengan melahirkan rumusan-rumusan sebagai formulasi pemecahan masalah.

Rencana Aksi pada *Smart Society* difokuskan menjadi tiga sub-dimensi yaitu membangun masyarakat cerdas, membangun ekosistem edukasi dan menjamin keselamatan masyarakat. Dari ketiga sub-dimensi tersebut mencetuskan inovasi untuk menjawab permasalahan sesuai dengan kondisi daerah. Pemetaan inovasi tersebut berdasarkan kebutuhan pengembangan untuk meningkatkan kenyamanan dan keamanan masyarakat serta edukasi yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Buleleng agar tepat sasaran. Untuk lebih detail dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 25 Rencana Aksi *Smart Society*

Sub-Dimensi	Strategi	Program/Kegiatan	Inovasi	Rencana Aksi/Tahun							
				Pengembangan Kebijakan & Kelembagaan	Tahun	Infrastruktur Pendukung	Tahun	Perangkat Lunak Pendukung	Tahun	Penguatan Literasi	Tahun
S1 Interaksi Masyarakat	S1.1.1 Mengajak masyarakat untuk bersekolah	Program: Pengelolaan Pendidikan Kegiatan: Melakukan pengelolaan secara efektif untuk pendidikan PAUD,SD,SMP dan non formal/kesetaraan)	(Sekolah Smart) merupakan program peningkatan literasi siswa dan juga penguasaan buta angka dan huruf pada masyarakat	A1. Merujuk pada UU 20 Tahun 2003 Tentang Sisdiknas	2024 - 2033	B1. Membangun sekolah baru B2. Memperbaiki kualitas sekolah B3. Menyediakan perangkat belajar	2024 - 2033	C1. Krisna DAK C2. https://www.kemdikbud.go.id C3. https://sipd.kemendagri.go.id	2024 - 2033	D1. Mengadakan Sosialisasi kepada masyarakat melalui media sosial oleh Disdikpora D2. Menerapkan Implementasi kebijakan “Merdeka Belajar”	2024 - 2033
		Program: Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Pendidikan Kegiatan: Memberikan bantuan kepada anak-anak yang tidak bersekolah	(Posko DO) merupakan sebuah program untuk menjaring anak-anak yang putus sekolah	A1. Merujuk pada UU 20 Tahun 2003 Tentang Sisdiknas A2. Merujuk pada SK Bupati Buleleng No. 100.3.3.2/191/HK/2023 tentang Nama-nama Sistem Tidak Mampu pada	2024 - 2033	B1. Alat transportasi angkut siswa (bus sekolah)	2024 - 2033	C1. Sistem PIP C2. Google form	2024 - 2033	D1. Mengadakan Sosialisasi kepada masyarakat melalui media sosial oleh Disdikpora	2024 - 2033

		lagi untuk bisa melanjutkan pendidikan		Sekolah Menengah Pertama Penerima Perlengkapan Sekolah Tahun Anggaran 2023						(facebook , Instagram , Youtube dan website) Oleh Disdikpora	
	S1.2.1 Menyediakan sarana informasi klarifikasi isu hoaks	Program: Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota Kegiatan: Diseminasi informasi sebelum disebarkan kepada masyarakat	Informasi melalui konten “Buleleng Cegat Hoaks” Merupakan antisipasi pemerintah dalam memberantas hoaks	A1. Merujuk pada Peraturan Bupati 20 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	2024 - 2033	B1. Komputer B2. Smartphone B3. Jaringan internet	2024 - 2033	C1. App media sosial C2. App website	2024 - 2033	D1. Mengadakan Sosialisasi ke media sosial oleh Kominfo anti D2. Website D3. Mengadakan Sosialisasi melalui media elektronik (radio)	2024 - 2033
S2 Ekosistem Belajar/ Pendidikan	S2.1.1 Memberikan edukasi dongeng kepada anak, sesuai himbauan pemerintah daerah	Program: Edukasi anak usia dini Kegiatan: Melakukan edukasi dongeng kepada anak-anak sebelum tidur untuk menciptakan karakter	(Buleleng Mesatua) merupakan edukasi kepada anak-anak sebelum tidur	A1. Penyusunan SOP (Standart Operasional Prosedur)	2024 - 2028	B1. Smartphone	2024 - 2028	C1. E-dongeng	2024 - 2028	D1. Mengadakan Edukasi melalui penyiaran oleh DAPD	2024 - 2028
		Program: Pembinaan Perpustakaan/Keg	Perpustakaan Keliling “pusling”	A1. Merujuk pada UU No. 43 Tahun	2024 - 2033	B1. Smartphone	2024 - 2033	C1. Aplikasi web https://sites.google.com/view/e-	2024 - 2033	D1. Mengadakan Edukasi	2024 - 2033

		<p>iatan Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>Kegiatan: Memberikan peminjaman buku secara gratis kepada anak-anak</p>	<p>Merupakan sebuah program untuk meningkatkan minat baca kepada anak-anak</p>	<p>2007 tentang Perpustakaan</p> <p>A2. Penyusunan SK Kadis tentang Layanan Keliling dan Perpustakaan Elektronik</p> <p>A3. Penyusunan SOP tentang Layanan Keliling dan Perpustakaan Elektronik</p>				librarydapdbuleleng/ho-me		<p>melalui penyiaran oleh DAPD</p>	
		<p>Program: Pembinaan Perpustakaan/Kegiatan Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>Kegiatan: Meningkatkan literasi kepada masyarakat</p>	<p>E-Library, merupakan sebuah program untuk memudahkan pembaca agar bisa diakses melalui <i>smart phone</i></p>	<p>A1. Merujuk pada UU No. 43 Tahun 2007 tentang perpustakaan</p> <p>A2. Penyusunan SK Kepala Dinas tentang Layanan Keliling dan Perpustakaan Elektronik</p> <p>A3. Penyusunan SOP tentang Layanan dan Perpustakaan Elektronik</p>	<p>2024 - 2028</p>	<p>B1. komputer</p> <p>B2. Smartphone</p> <p>B3. Jaringan internet</p>	<p>2024 - 2028</p>	<p>C1. Aplikasi web https://sites.google.com/view/e-librarydapdbuleleng/ho-me</p>	<p>2024 - 2028</p>	<p>D1. Mengadakan Edukasi melalui penyiaran oleh DAPD</p> <p>D2. Mengadakan Sosialisasi melalui media elektronik (radio)</p>	<p>2024 - 2028</p>
S3 Keamanan Masyarakat	S3.1.1 Tersedianya pemantauan visual	<p>Program: Persentase Pengamanan Obyek Dari Gangguan Keamanan Informasi Yang Berlangsung Dengan Baik</p> <p>Kegiatan: Memantau secara berkala melalui</p>	<p>Pemantauan (ip camera) di ruang public/terbuka hijau, merupakan sebuah inobasi untuk memantau pergerakan masyarakat</p>	<p>A1. Merujuk pada Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi</p>	<p>2024 - 2033</p>	<p>B1. Kamera</p> <p>B2. Listrik</p> <p>B3. Jaringan internet</p> <p>B4. Tiang</p> <p>B5. Kamera CCTV</p>	<p>2024 - 2033</p>	<p>C1. Share view aplikasi</p> <p>C2. Aplikasi pemantauan</p>	<p>2024 - 2033</p>	<p>D1. Mengadakan Sosialisasi kepada Perangkat Daerah terkait (share view) untuk deteksi dini</p>	<p>2024 - 2033</p>

		CCTV disetiap daerah rawan kejahatan	di daerah-daerah rawan								
--	--	--------------------------------------	------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

Sumber : Bimbingan Teknis Tahap 2 Kabupaten Buleleng 2023

Pada rencana aksi *Smart Society* merupakan sebuah kebutuhan Kabupaten Buleleng dalam menanggulangi masalah sosial, dalam hal ini inovasi yang dibuat sudah melalui kajian khusus yang dirumuskan oleh masing-masing perangkat daerah dengan melihat kondisi permasalahan yang ada. Inovasi yang dibuat dalam *Smart Society* yaitu berupa Sekolah *Smart* yang mana inovasi tersebut menyediakan sarana dan prasarana pendidikan yang bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Buleleng, inovasi Sekolah *Smart* mengacu kepada tujuan negara yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Selain itu, inovasi yang berkaitan dengan dunia pendidikan adalah POSKO DO yang mana inovasi tersebut merangkul anak-anak Buleleng untuk wajib belajar selama 9 tahun sampai jenjang SMP. Kemudian untuk membangkitkan minat literasi dan meningkatkan kualitas pengetahuan, pemerintah Kabupaten Buleleng menciptakan *inovasi E-Library* untuk bisa mengajak para masyarakat agar membaca secara digital dengan platform yang sudah disediakan oleh pemerintah. Program PUSLING juga salah satu terobosan daerah untuk bisa meningkatkan minat baca masyarakat dan anak-anak Buleleng agar mendapatkan pengetahuan secara *up to date*. Beranjak dari program tersebut disisi lain pemerintah Kabupaten Buleleng juga memantau secara langsung kegiatan masyarakat yang berpotensi kerusakan dan kekacauan dititik titik tertentu, maka dari itu perlu adanya pengadaan alat CCTV untuk bisa memantau pergerakan masyarakat agar bisa terminimalisir aksi kejahatan.

4.6. Rencana Aksi *Smart Environment*

Rencana aksi *Smart Environment* merupakan sebuah dokumen atau strategi dalam menguraikan langkah-langkah yang akan diambil untuk menciptakan atau meningkatkan lingkungan yang humanis dan berkelanjutan dalam sebuah kota atau wilayah. Dalam hal ini dapat dilihat dalam perspektif pengelolaan sumber daya alam, pengelolaan limbah dan sampah serta konservasi dan restorasi. Rencana aksi *Smart Environment* pada dasarnya menguraikan strategi dan tindakan yang diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang lebih bersih, hijau, dan berkelanjutan dengan bantuan teknologi dan inovasi.

Rencana Aksi pada *Smart Environment* difokuskan menjadi tiga sub-dimensi yaitu perlindungan lingkungan hidup, pengelolaan sampah dan limbah serta tata kelola energi. Setiap sub-dimensi menghadirkan inovasi-inovasi untuk menjawab sesuai dengan kondisi daerah. Inovasi tersebut diharapkan mampu membawa perubahan dengan pengembangan di Kabupaten Buleleng. Untuk lebih detail dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 26 Rencana Aksi *Smart Environment*

Sumber : Bimbingan Teknis Tahap 2 Kabupaten Buleleng 2023

Sub-Dimensi	Strategi	Program/Kegiatan	Inovasi	Rencana Aksi/Tahun							
				Pengembangan Kebijakan & Kelembagaan	Tahun	Infrastruktur Pendukung	Tahun	Perangkat Lunak Pendukung	Tahun	Penguatan Literasi	Tahun
En1 Proteksi Lingkungan	En1.1.1 Meningkatkan kualitas air dan udara En1.2.1 Peningkatan tutupan vegetasi pada lahan perkotaan dan lahan kritis	Program: Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kegiatan: Fasilitasi pemenuhan ketentuan dan kewajiban izin lingkungan dan/atau izin PPLH	Sadar Dokling (Sadar Dokumen Lingkungan) Merupakan sebuah dokumen yang berisi edukasi pemeliharaan lingkungan	A1. Merujuk pada Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng Nomor 1210.1/KPTS.B/DLH-IX/2021 tentang Penunjukan Pengelola Inovasi Tata Cara Penapisan Untuk Menentukan Dokumen Lingkungan Hidup (Sadar Dokling)	2024	B1. Laptop/PC B2. Jaringan	2024	C1. Google form dan internet C2. Aplikasi Sadar Dokling	2024 - 2033	D1. Mengadakan Sosialisasi kepada masyarakat (Facebook DLH dan website (www.dlh.bulelengkab.go.id); D2. Mengadakan tatap muka saat Tim Pembinaan turun tangan ke lapangan	2024 - 2033
		Program: Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan	Singaku (Sistem Informasi Pembinaan dan Pengawas	A1. Merujuk pada Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten	2024	B1. Laptop/PC B2. Jaringan	2024	C1. Aplikasi web: https://singaku.buleleng.go.id/ C2. Pengembangan aplikasi Singaku	2024 - 2025	D1. Mengadakan Sosialisasi kepada pelaku usaha (Facebook DLH dan wesbite	2024 - 2033

		<p>dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)</p> <p>Kegiatan: Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota</p>	an Pelaku Usaha Kabupaten Buleleng)	Buleleng Nomor 80/KPTS.A/DL H/2022 tentang Pembentukan Tim Kerja Pelaksana Aksi Perubahan Sistem Informasi Pembinaan dan Pengawasan Pelaku Usaha (Singaku)						<p>www.dlh.bulelengkab.go.id)</p> <p>D2. Mengadakan pelatihan kepada pelaku usaha</p>	
		<p>Program: Pencegahan, Penanggulangan an, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran</p> <p>Kegiatan: Pemberdayaan masyarakat pencegahan kebakaran</p>	Relawan Pemadam Kebakara n (REDKA R) Sebuah inovasi yang cepat tanggap dalam kebakara n	A1. Merujuk pada SK Bupati Nomor 100.3.3.2/304/H K/2023 tentang inovasi daerah	2024	B1. Apar B2. Mobil pemada m kecil	2024 - 2027	C1. WA Grup C2. Aplikasi kedaruratan kebakaran	2024 - 2026	<p>D1. Mengadakan Pelatihan kepada relawan kebakaran</p> <p>D2. Mengadakan sosialisasi kemasyarakatan (Facebook dan website damkar www.damkar.bulelengkab.go.id)</p>	2024 - 2033

En2 Pengelolaan sampah dan limbah	En2.1.1 Meningkatkan pengelolaan sampah sesuai ketentuan	Program: Pengelolaan Persampahan Kegiatan: Penanganan sampah dengan melakukan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST/SPA	Unit sapu bersih (USB) Sebuah inovasi yang menerjun kan personil pembersih jalan	A1. Merujuk pada Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng Nomor 1337.3/KPTS.A/ DLH-XI/2021 tentang inovasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng	2024	B1. Line telepon B2. Gerobak motor B3. Mobil sampah B4. Komputer B5. Jaringan internet	2024 - 2026	C1. WA C2. Aplikasi kedaruratan sampah	2024 - 2028	D1. Mengadakan Sosialisasi kepada masyarakat (Facebook DLh dan website www.dlh.bulelengkab.go.id) D2. Mengadakan Pelatihan operator aplikasi	2024 - 2033
		Program: Pengelolaan Persampahan Kegiatan: Pengurangan sampah dengan melakukan pembatasan, pendauran ulang dan pemanfaatan kembali	Buleleng kelola sampah organic (Bule Kepo) Sebuah inovasi pengelolaan sampah organik	A1. Merujuk pada Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng Nomor 1337.3/KPTS.A/ DLH-XI/2021 tentang inovasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng	2024	B1. Tempat pengolahan sampah organic B2. Alat pengolahan sampah organic B3. Komputer B4. Jaringan internet	2024 - 2026	C1. Media sosial C2. Media online pelatihan pengolahan sampah organik	2024 - 2026	D1. Mengadakan pelatihan pengolahan sampah organik kepada masyarakat	2024 - 2033
		Program: Pengelolaan Persampahan	Buleleng kelola sampah anorganik	A1. Merujuk pada Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup	2024	B1. Tempat pengolahan sampah	2024 - 2026	C1. Media sosial C2. Media online pelatihan pengolahan sampah organik	2024 - 2026	D1. Mengadakan Pelatihan pengolahan sampah anorganik	2024 - 2033

		Kegiatan: Pengurangan sampah dengan melakukan pembatasan, pendauran ulang dan pemanfaatan kembali Peningkatan peran masyarakat dalam mengelola persampahan	(Bulan Melah) Sebuah inovasi pengelolaan sampah anorganik	Kabupaten Buleleng Nomor 1337.3/KPTS.A/DLH-XI/2021 tentang inovasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng		B2. Alat pengolahan sampah anorganik B3. Computer B4. Jaringan internet					
		Program : Poskoddes Desa Tembok Kegiatan: Melakukan pembinaan kepada petani dalam pengelolaan sampah	JKD : Jaminan Kesehatan Desa (asuransi lingkup desa dengan petani dengan premi sampah yang terintegrasi dengan program bank sampah)	A1. Merujuk pada Peraturan perbekel No. 9 Tahun 2021 tentang jaminan Kesehatan desa	2024	B1. Laptop/PC B2. Internet B3. Tempat bank sampah	2026 - 2026	C1. Aplikasi pengolahan data C2. Aplikasi JKD	2024 - 2027	D1. Mengadakan sosialisasi kepada masyarakat pelatihan kepada operator	2024 - 2028
En3 Tata Kelola Energi	En3.1.1 Merubah sampah menjadi	Program: Pengelolaan Sampah	WTE (<i>Waste to Energy</i>)	A1. Penyusunan SK Bupati pengolahan sampah menjadi	2027	B1. Tempat pengolahan	2028 - 2033	C1. Sistem penyaluran energi terbarukan C2. Aplikasi pendukung	2029 - 2033	D1. Mengadakan Pealtihan SDM pengelolaan sampah	2029 - 2033

	energi terbarukan	Menjadi Energi Kegiatan: Memanfaatkan sampah untuk dikelola sebagai energi terbarukan	Sebuah inovasi trobosan pengelola an sampah dalam membuat energi terbaruka n	energi terbarukan		sampa h B2. Peralat an pengel olaan sampa h menjad i energi B3. Jaringa n penyal uran energi				D2. Mengadakan Sosialisasi kepada masyarakat (facebook DLH dan website www.dlh.bulelengkab. go.id)	
--	----------------------	--	--	----------------------	--	--	--	--	--	--	--

Pada rencana aksi *Smart Environment* merupakan sebuah inovasi dalam permasalahan persoalan lingkungan di Kabupaten Buleleng, dalam hal ini inovasi yang dibuat dalam *Smart Environment* yaitu Sadar Dokling yang mana merupakan sebuah dokumen perencanaan untuk pengelolaan permasalahan lingkungan dengan mengedepankan potensi keberlangsungan, kemudian inovasi yang digagas oleh Kabupaten Buleleng dengan membuat suatu sistem informasi yang terpadu dalam pengelolaan permasalahan sampah dan limbah dengan ini dapat menjadi pemantauan secara digital sehingga dapat termonitor dengan baik. Selanjutnya dalam penanganan potensi kebakaran pemerintah Kabupaten Buleleng juga membuat sebuah inovasi yaitu REDKAR yaitu relawan pemadam kebakaran yang nantinya akan membantu perangkat daerah dalam mengatasi kebakaran di Buleleng. Dalam menjaga lingkungan yang bersih dan nyaman pemerintah Kabupaten Buleleng menciptakan inovasi USB (unit sapu bersih) yang nantinya akan bekerja untuk menjaga wajah tata kota yang bersih karena secara tidak langsung akan mengedukasi masyarakat akan pentingnya menjaga kebersihan. Selain itu, dalam pengelolaan sampah pemerintah Kabupaten Buleleng juga menciptakan sebuah inovasi yaitu Bule Kepo dan Bulan Melah yang mana cara kerjanya adalah dalam pengelolaan sampah yang organik dan anorganik. Gagasan inovasi tersebut melihat bahwa potensi sampah di Kabupaten Buleleng yang semakin meningkat, maka dari itu perlu adanya inovasi untuk mengatasi permasalahan tersebut. Dari inovasi tersebut, yang nantinya akan berkelanjutan untuk menciptakan sebuah inovasi berbasis energi dari sampah yaitu WTE (*Waste to Energy*).

5. PETA JALAN PEMBANGUNAN *SMART CITY* DAERAH

Peta jalan pembangunan *Smart City* daerah merupakan sebuah dokumen strategis yang mencakup serangkaian rencana, inisiatif, dan kegiatan yang bertujuan untuk mengintegrasikan teknologi informasi dan solusi inovatif ke dalam berbagai aspek kehidupan kota dengan tujuan meningkatkan kualitas hidup, efisiensi operasional kota, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Peta jalan pembangunan *Smart City* biasanya dikembangkan dengan kolaborasi antara pemerintah daerah, sektor swasta, akademisi, komunitas dan pihak-pihak lain yang berkepentingan. Dokumen ini membantu memastikan bahwa semua pihak memiliki pemahaman yang sama mengenai arah dan tujuan pembangunan, serta memfasilitasi koordinasi dan kolaborasi yang efektif dalam pelaksanaannya.

Dalam proses pembuatannya, peta jalan pembangunan *Smart City* ini harus mempertimbangkan karakteristik khusus, kebutuhan, dan tantangan yang dihadapi oleh daerah atau kota tersebut, sehingga solusi yang diusulkan benar-benar relevan dan memberikan dampak positif masyarakat setempat. Sebab peta jalan pembangunan *Smart City* menggambarkan langkah-langkah strategis yang diperlukan untuk mentransformasi suatu daerah menjadi kota cerdas. Setiap daerah atau kota mungkin memiliki kebutuhan dan prioritas yang berbeda namun secara umum pembangunan *Smart City* ini tetap berlandaskan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki setiap daerah.

5.1. Peta Jalan Pembangunan *Smart Governance*

Peta jalan pembangunan *Smart Governance* mengacu kepada rencana strategis yang mendefinisikan visi, sasaran, langkah-langkah, dan inisiatif yang diperlukan untuk mentransformasikan tata kelola pemerintahan menjadi lebih efisien, transparan dan partisipatif melalui penggunaan teknologi dan inovasi. Peta jalan ini memandu pemerintah dalam proses pengambilan keputusan, alokasi sumber daya dan implementasi kebijakan untuk mencapai tujuan *Smart Governance*. Dalam hal ini lahirnya peta jalan *Smart Governance* merupakan sebuah panduan strategis yang dirancang untuk mengintegrasikan teknologi digital, inovasi dan praktik terbaik dalam tata kelola pemerintahan guna meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat, efisiensi operasional, transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi aktif warga dalam proses pengambilan keputusan dalam sebuah kebijakan guna kepentingan bersama.

Peta jalan ini menjadi alat penting bagi pemerintah dalam menavigasi perubahan yang dibawa oleh era digital dan memastikan bahwa tata kelola pemerintahan tetap relevan, responsif, dan efisien dalam melayani kebutuhan masyarakat. Pemerintah Kabupaten Buleleng yang mengedepankan kepentingan masyarakat terus berupaya mentransformasi layanan agar terciptanya pelayanan yang cepat, cergas dan tepat. Untuk lebih detail peta jalan pembangunan daerah pada *Smart Governance* dalam jangka pendek, menengah dan jangka panjang dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 27 Peta Jalan Pembangunan *Smart Governance* Jangka Pendek Menengah

Peta Jalan Pembangunan <i>Smart Governance</i> Jangka Pendek Menengah																	
Sub-Dimensi	Strategi	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Sumbe r Dana	Leading Sector
						2024		2025		2026		2027		2028			
						Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran		
G1 Layanan Publik	G1.1.1 Meningkatny a implementasi layanan publik	G1.1.1.P.1 Pengembang an sistem pelayanan kependuduka n berbasis teknologi informasi (AKU ONLINE)	Terciptanya pelayanan kependuduk an berbasis teknologi berbasis informasi dalam bentuk aplikasi yang efektif dan efisien	10.2. persentase layanan kota yang dapat diakses dan yang dapat diminta secara daring	(APLIKASI AKU ONLINE) untuk meningkatka n kepuasan masyarakat secara signifikan	75%	60	80%	100	85%	60	90%	60	100 %	60	APBD	Dinas Dukcapi l
		G1.1.1.P.2 Pengembang an Mal pelayanan public	Tersedianya Mal pelayan publik	5.1. persentase kontrak layanan yang menyediak an akan layanan kota yang memuat kebijakan data terbuka	(Pengembang an Mal Pelayan Publik) untuk memudahkan masyarakat dalam mengurus pelayanan administrasi tidak hanya dikantor pemerintahan saja	75%	800 0	80%	800	85%	900	90%	100 0	100 %	100 0	APBD	DPMP T S

Peta Jalan Pembangunan <i>Smart Governance</i> Jangka Pendek Menengah																	
Sub-Dimensi	Strategi	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Sumbe r Dana	Leading Sector
						2024		2025		2026		2027		2028			
						Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran		
G2 Birokrasi	G2.1.1 Meningkatnya implementasi reformasi birokrasi	G2.1.1.P.1 Program kepegawaian daerah	Indeks kepuasan ASN	10.2 Persentase layanan kota yang dapat diakses dan yang dapat diminta secara daring	Pengembangan sistem informasi ASN (SIMPEG) sebuah sistem untuk memberikan informasi terkait dengan hak dan kewajiban ASN	100 %	36	100 %	36	100 %	36	100 %	36	100 %	36	APBD, TJSLP	BPKSD M
		G2.1.1.P.2 Program pengelolaan informasi dan komunikasi publik	Nilai keterbukaan informasi publik	18.3. Persentase area kota yang dicakup oleh konektivitas Internet yang disediakan oleh kota	Peningkatan efisiensi surat menyurat (e-surat) Sistem surat yang berbasis elektronik agar memudahkan masyarakat	94, 66%	210 0	95, 41%	210 0	96, 16%	225 0	96, 91%	235 0	96, 91%	245 0	APBD	Kominfo santi
		G2.1.1.P.3 Program pengelolaan aplikasi dan informatika	Nilai sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE)	10.2. persentase layanan kota yang dapat diakses dan yang dapat	Pengintegrasian aplikasi di Pemkab Buleleng (data center) Sebuah sistem	3,1 %	540 2	3,2 %	565 0	3,3 %	575 0	3,4 %	600 0	3,5 %	625 0	APBD	Kominfo santi

Peta Jalan Pembangunan <i>Smart Governance</i> Jangka Pendek Menengah																	
Sub-Dimensi	Strategi	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Sumbe r Dana	Leading Sector
						2024		2025		2026		2027		2028			
						Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran		
				diminta secara daring	integrasi agar memudahkan dalam pencarian data yang terpusat												
G3 Perancang an Kebijakan	G3.1.1 Digitalisasi penyebarluas an produk hukum daerah melalui JDIH dan media elektronik	G3.1.1.P.1 Pengembang an fitur untuk rancangan produk hukum daerah pada JDIH G3.1.1.P.2 Pelatihan sumber daya manusia G3.1.1.P.3 SK Sekda tentang Tim pengelola sistem JDIH G3.1.1.P.4 Perbup tentang JDIH	Jumlah kunjungan daring ke website JDIH dan media elektronik lainnya	10.1. jumlah kunjungan daring tahunan ke portal data terbuka kota per 100.000 penduduk	Digitalisasi penyebarluas an produk hukum daerah melalui JDIH dan media elektronik lainnya	100 %	328	100 %	338	100 %	309	100 %	408	100 %	408	APBD	Bagian Hukum Setda Bulelen g

Peta Jalan Pembangunan <i>Smart Governance</i> Jangka Pendek Menengah																	
Sub-Dimensi	Strategi	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Sumbe r Dana	Leading Sector
						2024		2025		2026		2027		2028			
						Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran		
		G3.1.1.P.5 SOP Pengelolaan JDIH															

Sumber : Bimbingan Teknis Tahap 2 Kabupaten Buleleng 2023

Tabel 28 Peta Jalan Pembangunan *Smart Governance* Jangka Panjang

Peta Jalan Pembangunan <i>Smart Governance</i> Jangka Panjang																	
Sub-Dimensi	Strategi	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Sumbe r Dana	Leading Sector
						2029		2030		2031		2032		2033			
						Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran		
G1 Layanan Publik	G1.1.1 Meningkatny a implementasi layanan publik	G1.1.1.P.1 Pengembang an sistem pelayanan kependuduka n berbasis teknologi informasi (AKU ONLINE)	Terciptanya pelayanan kependuduk an berbasis teknologi berbasis informasi dalam bentuk aplikasi yang efektif dan efisien	10.2. persentase layanan kota yang dapat diakses dan yang dapat diminta secara daring	(APLIKASI AKU ONLINE) Untuk meningkatka n kepuasan masyarakat secara siginifikan	75%	66,6	80%	66,6	85%	66,6	90%	66,6	100 %	66,6	APBD	Dinas Dukcapi l
		G1.1.1.P.2 Pengembang an Mal pelayanan public	Tersedianya Mal pelayan publik	5.1. persentase kontrak layanan yang menyediak an akan layanan kota yang memuat kebijakan data terbuka	(Pengembang an Mal Pelayan Publik) untuk memudahkan masyarakat dalam mengurus pelayanan administrasi tidak hanya di kantor pemerintahan saja	100 %	100 0	100 %	100 0	100 %	100 0	100 %	100 0	100 %	100 0	APBD/ BKK Provin si	DPMPT S P

Peta Jalan Pembangunan <i>Smart Governance</i> Jangka Panjang																	
Sub-Dimensi	Strategi	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Sumbe r Dana	Leading Sector
						2029		2030		2031		2032		2033			
						Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran		
G2 Birokrasi	G2.1.1 Meningkatny a implementasi reformasi birokrasi	G2.1.1.P.1 Program kepegawaian daerah	Indeks kepuasan ASN	10.2. persentase layanan kota yang dapat diakses dan yang dapat diminta secara daring	Pengembanga n sistem informasi ASN (SIMPEG) sebuah sistem untuk memberikan informasi terakit dengan hak dan kewajiban ASN	100 %	36	100 %	36	100 %	36	100 %	36	100 %	36	APBD, TJSLP	BPKSD M
		G2.1.1.P.2 Program pengelolaan informasi dan komunikasi publik	Nilai keterbukaan informasi publik	18.3. persentase area kota yang dicakup oleh konektivita s internet yang disediakan oleh kota	Peningkatan efisiensi surat menyurat (e- surat) Sistem surat yang berbasis elektronik agar memudahkan masyarakat	96, 91%	245 0	96, 96%	250 0	97, 01%	255 0	97, 06%	260 0	97, 11%	265 0	APBD	Kominf o santi
		G2.1.1.P.3 Program pengelolaan aplikasi dan informatika	Nilai sistem pemerintaha n berbasis elektronik (SPBE)	10.2. persentase layanan kota yang dapat diakses dan yang dapat diminta	Pengintegrasi an aplikasi di Pemkab Buleleng (data center) Sebuah sistem integrasi agar	3,5 %	625 0	3,6 %	650 0	3,7 %	680 0	3,8 %	710 0	3,9 %	750 0	APBD	Kominf o santi

Peta Jalan Pembangunan <i>Smart Governance</i> Jangka Panjang																	
Sub-Dimensi	Strategi	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Sumbe r Dana	Leading Sector
						2029		2030		2031		2032		2033			
						Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran		
				secara daring	memudahkan dalam pencarian data yang terpusat												
G3 Perancang an Kebijakan	G3.1.1 Digitalisasi penyebarluas an produk hukum daerah melalui JDIH dan media elektronik	G3.1.1.P.1 pengembang an fitur untuk rancangan produk hukum daerah pada JDIH G3.1.1.P.2 pelatihan sumber daya manusia G3.1.1.P.3 SK Sekda tentang Tim pengelola sistem JDIH G3.1.1.P.4 Perbup tentang JDIH G3.1.1.P.5	Jumlah kunjungan daring ke website JDIH dan media elektronik lainnya	10.1. jumlah kunjungan daring ke portal data terbuka kota per 100.000 penduduk	Digitalisasi penyebarluas an produk hukum daerah melalui JDIH dan media elektronik lainnya	100 %	358	100 %	360	100 %	309	100 %	408	100 %	408	APBD	Bagian Hukum Setda Bulelen g

Peta Jalan Pembangunan <i>Smart Governance</i> Jangka Panjang																	
Sub-Dimensi	Strategi	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Sumbe r Dana	Leading Sector
						2029		2030		2031		2032		2033			
						Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran		
		SOP pengelolaan JDIH															

Sumber : Bimbingan Teknis Tahap 2 Kabupaten Buleleng 2023

Peta jalan pembangunan *Smart Governance* ini dibuat sebagai landasan implementasi dalam penerapan *Smart City*. Dalam peta jalan tersebut berisi sebuah inovasi yang dihubungkan oleh indikator SNI dan indikator kinerja kemudian dalam penerapan setiap tahun nya mempunyai target dan anggaran kinerja dalam mengembangkan inovasi tersebut. Selain itu, sumber dana juga harus disesuaikan dengan kebutuhan program inovasi dan selaku penanggung jawab program juga harus sesuai dengan kebutuhan program. Peta jalan ini mencakup jangka pendek menengah dan jangka panjang, hal ini dibuat untuk bisa melihat bahwa inovasi tersebut berpengaruh atau tidak serta harapannya dapat berkelanjutan dengan program yang sudah dibuat. Peta jalan pada *Smart Governance* melahirkan strategi yang diintergrasikan oleh program/kegiatan. Dalam hal ini strategi yang dibuat dalam peta jalan *Smart Governance* adalah pada sub-dimensi layanan publik yakni meningkatnya implementasi layanan publik, pada sub-dimensi Manajemen Birokrasi yang Efisien yakni Meningkatnya implementasi reformasi birokrasi, pada sub-dimensi efisiensi kebijakan publik yakni meningkatkan keterlibatan publik dalam manajemen kebijakan publik. Target kinerja dan anggaran pada setiap tahun nya meningkat hal ini dikarenakan langkah awal hingga implementasi membutuhkan tahap pencapaian pada setiap tahun nya. Maka setiap OPD (Organisasi Perangkat daerah) harus mempunyai target prioritas capaian pada tiap tahun, target prioritas tersebut dibuat pada tiap tahun nya agar dapat mengetahui apa yang harus dikerjakan sehingga program nya dapat berjalan secara efektif.

5.2. Peta Jalan Pembangunan *Smart Branding*

Peta jalan pembangunan *Smart Branding* merupakan sebuah gambaran langkah ke depan dalam pelaksanaan inovasi *Smart Branding* yang mana inovasi tersebut dirumuskan berdasarkan kebutuhan situasi daerah. Pendekatan *Smart Branding* pada sektor pariwisata dan kearifan lokal memberikan sebuah kerangka acuan dalam kinerja yang akan dilaksanakan. Peta jalan *Smart Branding* ini melihat dari visi misi *Smart City* daerah untuk bisa memperkenalkan potensi—potensi sumber daya alam dan pariwisata. Pengenalan potensi harus dibuat *roadmap* yang baik dan efektif agar tepat sasaran sehingga nantinya akan menimbulkan dampak yang positif bagi perekonomian di sektor pariwisata dan kearifan lokal. Pemanfaatan teknologi untuk memperkenalkan potensi Buleleng menjadi salah satu alat untuk bisa meluas secara aktif sehingga harapan nya ada ketertarikan para wisatawan dari mancanegara dan turis lokal maupun investor yang tertarik datang ke Buleleng. Potensi Buleleng yang sangat banyak harus menjadi prioritas pemangku kebijakan agar mempunyai arah dan tujuan untuk membangun Buleleng sebagai kota budaya yang penuh karakteristik.

Tabel 29 Peta Jalan Pembangunan *Smart Branding* Jangka Pendek Menengah

Peta Jalan Pembangunan <i>Smart Branding</i> Jangka Pendek Menengah																	
Sub-Dimensi	Strategi	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Sumber Dana	Leading Sector
						2024		2025		2026		2028		2029			
						Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran		
B1 Pariwisata	B1.1.1 Melakukan pertunjukkan seni, budaya dan ecraft di destinasi wisata	B1.1.1.P.1 PAS (Pekan Apresiasi Seni)	Jumlah kelompok seni yang dipentaskan	14.1.Persentase layanan rekreasi public yang dapat dipesan secara daring	PAS (Pekan Apresiasi Seni) sebuah kegiatan pertunjukkan budaya yang dilakukan di hari-hari penting	100 %	1200	100 %	1200	100 %	1200	100 %	1200	100 %	1200	APBD, Non APBD	Dinas Pariwisata dan Dinas Kebudayaan
B2 Daya Saing Bisnis	B2.1.1 Penguatan dan pengelolaan destinasi pariwisata berbasis teknologi informasi	B2.1.1.P.1 Visiting Buleleng	Jumlah kunjungan platform pariwisata Buleleng	14.1.Persentase layanan rekreasi public yang dapat dipesan secara daring	(Visiting Buleleng) sebuah aplikasi yang berisi informasi mengenai informasi pariwisata dll	100 %	200	100 %	300	100 %	400	100 %	500	100 %	600	APBD	Dinas Pariwisata
	B2.1.2 Memanfaatkan sarana	B2.1.1.P.2 KRESID	Jumlah ecraft yang di	14.1.Persentase layanan rekreasi	KRESIDA EXPO (Kreasi	100 %	100	100 %	100	100 %	100	100 %	100	100 %	100	APBD	Badan Penelitian, Pengembang

Peta Jalan Pembangunan <i>Smart Branding</i> Jangka Pendek Menengah																	
Sub-Dimensi	Strategi	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Sumber Dana	Leading Sector
						2024		2025		2026		2028		2029			
						Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran		
	incubator kreatif untuk meningkatkan kualitas ecraft	A EXPO (Kreasi Inovasi Daerah Expo)	fasilitasi HKI	public yang dapat dipesan secara daring	Inovasi Daerah Expo) sebuah kegiatan bazar yang memperjual belikan produk-produk kearifan lokal												an dan Inovasi Daerah
B3 Wajah (Tampilan) Kota	B3.1.1 Meningkatkan kolaborasi antara pemerintah daerah dengan institusi pendidikan	B3.1.1.P.1 KRESIDA (Kreasi Inovasi Daerah)	Jumlah riset dan inovasi daerah terkait pendidikan	Persentase layanan rekreasi public yang dapat dipesan secara daring	KRESIDA (Kreasi Inovasi Daerah) sebuah kegiatan yang dilakukan dalam menciptakan inovasi dibidang pariwisata	100 %	100	100 %	100	100 %	100	100 %	100	100 %	100	APBD	Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah

Sumber : Bimbingan Teknis Tahap 2 Kabupaten Buleleng 2023

Tabel 30 Peta Jalan Pembangunan *Smart Branding* Jangka Panjang

Peta Jalan Pembangunan <i>Smart Branding</i> Jangka Panjang																	
Sub-Dimensi	Strategi	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Sumb er Dana	Leading Sector
						2029		2030		2031		2032		2033			
						Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran		
B1 Pariwisat a	B1.1.1 Melakukan pertunjukka n seni, budaya dan ecraft di destinasi wisata	B1.1.1.P.1 PAS (Pekan Apresiasi Seni)	Jumlah kelompok seni yang dipentask an	14.1.Persent ase layanan rekreasi public yang dapat dipesan secara daring	PAS (Pekan Apresiasi Seni) sebuah kegiatan pertunjukk an budaya yang dilakukan di hari-hari penting	100 %	130 0	100 %	130 0	100 %	130 0	100 %	130 0	100 %	130 0	APBD, Non APBD	Dinas Pariwisata dan Dinas Kebudayaan
B2 Daya Saing Bisnis	B2.1.1 Penguatan dan pengelolaan destinasi pariwisata berbasis teknologi informasi kualitas ecraft	B2.1.1.P.1Visiti ng Buleleng	Jumlah kunjunga n platform pariwisata Buleleng	14.1.Persent ase layanan rekreasi public yang dapat dipesan secara daring	(Visiting Buleleng) sebuah aplikasi yang berisi informasi memgenai informasi pariwisata dll	100 %	700	100 %	700	100 %	700	100 %	700	100 %	700	APBD	Dinas Pariwisata
	B2.1.2 memanfaatk an sarana	B2.1.1.P.2 KRESIDA EXPO (Kreasi	Jumlah ecraft yang di	14.1.Persent ase layanan rekreasi	KRESIDA EXPO (Kreasi	100 %	100	100 %	100	100 %	100	100 %	100	100 %	100	APBD	Badan Penelitian, Pengembang

Peta Jalan Pembangunan <i>Smart Branding</i> Jangka Panjang																	
Sub-Dimensi	Strategi	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Sumb er Dana	Leading Sector
						2029		2030		2031		2032		2033			
						Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran		
	incubartor creativ untuk meningkatk an kualitas ecraft	Inovasi Darah Expo)	fasilitasi HKI	public yang dapat dipesan secara daring	Inovasi Darah Expo) sebuah kegiatan bazar yang memperjua l belikan produk- produk kearifan lokal												an dan Inovasi Daerah
B3 Wajah (Tampil an) Kota	B3.1.1 Meningkatk an kolaborasi antara pemerintah daerah dengan institusi pendidikan	B3.1.1.P.1 KRESIDA (Kreasi Inovasi Daerah)	Jumlah riset dan inovasi daerah terkait pendidika n	14.1.Persent ase layanan rekreasi public yang dapat dipesan secara daring	KRESIDA (Kreasi Inovasi Daerah) sebaui kegiatan yang dilakukan dalam menciptak an inovasi dibidang pariwisata	100 %	100	100 %	100	100 %	100	100 %	100	100 %	100	APBD	Badan Penelitian, Pengembang an dan Inovasi Daerah

Sumber : Bimbingan Teknis Tahap 2 Kabupaten Buleleng 2023

Peta jalan pembangunan *Smart Branding* ini dibuat untuk landasan implementasi dalam *Smart Branding* di Kabupaten Buleleng, penguatan pada sektor pariwisata dan kearifan lokal menjadi fokus utama dalam mengembangkan dan mengoptimalkan yang ada di Kabupaten Buleleng. Peta jalan ini lahir dari inovasi yang dihubungkan oleh Indikator SNI dan Indikator kinerja daerah yang menyesuaikan kondisi lingkungan saat ini. Pada peta jalan pembangunan *Smart Branding* melahirkan strategi yang mana merupakan dari sub-dimensi *Smart Branding* adapun diantaranya pada sub-dimensi pariwisata yang difokuskan kepada melakukan pertunjukkan seni, budaya ecraft di destinasi wisata, sub-dimensi kemudahan pelaksanaan bisnis yang difokuskan kepada penguatan dan pengelolaan destinasi pariwisata berbasis teknologi informasi dan memanfaatkan sarana inkubator kreatif untuk meningkatkan ecraft, kemudian yang terakhir sub-dimensi wajah kota yang difokuskan kepada meningkatkan kolaborasi antara pemerintah daerah dengan institusi pendidikan. Peta jalan yang dibuat pada *Smart Branding* dilakukan mulai dari jangka pendek menengah dan jangka panjang. Pada setiap tahun nya terdapat prioritas-prioritas yang ingin dicapai dimana hal tersebut ditanggung jawabkan kepada leading sektor yaitu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Buleleng. Penguatan dan pemanfaatan teknologi pada *Smart Branding* dalam memanfaatkan teknologi harus dioptimalkan secara efektif sebab nyawa dari pariwisata adalah para wisatawan yang melihat dari media sosial ataupun media *platform* lainnya sehingga ada ketertarikan untuk mengunjungi Kabupaten Buleleng.

5.3. Peta Jalan Pembangunan *Smart Economy*

Peta jalan pembangunan *Smart Economy* merupakan sebuah gambaran yang menjelaskan bagaimana pelaksanaan *Smart Economy* dalam penerapan *Smart City* di Kabupaten Buleleng berdasarkan peningkatan ekonomi daerah. Peta jalan ini mengacu kepada rencana strategis yang berlandaskan visi dan sasaran pada konsep *Smart City*. Peta jalan pembangunan *Smart Economy* bertujuan untuk memberikan arahan ataupun panduan kepada *stakeholder* dalam merespon perubahan teknologi dan global dengan cara memaksimalkan peluang dan memitigasi tantangan dengan cara yang adaptif sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, inklusif dan berorientasi masa depan. Pada *Smart Economy* memberikan alur pelaksanaan karena terdapat fokus utama yang akan dicapainya. Peningkatan produktivitas dan penciptaan lapangan kerja baru menjadi topik yang sangat serius untuk dikembangkan sebab potensi tersebut merupakan jantung sektor ekonomi yang dapat meningkatkan pendapatan daerah dan berdampak langsung kepada masyarakat. Peta jalan ini akan memberikan rumusan dalam pelaksanaan sesuai dengan program yang sudah dirumuskan. Untuk lebih detail dapat dilihat dalam tabel *Smart Economy* sebagai berikut:

Tabel 31 Peta Jalan Pembangunan *Smart Economy* Jangka Pendek Menengah

Peta Jalan Pembangunan <i>Smart Economy</i> Pendek Menengah																	
Sub-Dimensi	Strategi	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Sumbe r Dana	Leading Sector
						2024		2025		2026		2027		2028			
						Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran		
Ec1 Ekosistem Industri	Ec1.1.1 Peningkata n Produk UMKM Lokal yang terdigitalisa si dengan tujuan optimalisas i dan penjualan produk	Ec1.1.1.P.1 Peningkatan UMKM yang berdaya saing	Jumlah UMKM yang mendapat pendamping an dan pelatihan	20.3. persentase luas tanah kota yang dicakup oleh sistem pemetaan pemasok makanan daring	Pengembang an Pusat Layanan terpadu (PLUT) UMKM sebuah pengembang an kapasitas bagi pelaku UMKM untuk bisa meningkatkan pendapatan	100 %	10 0	150 %	11 0	200 %	12 0	250 %	13 0	130 %	30 0	APBD/ APBN	DISDAG PRINKOPUK M
Ec2 Kesejahtera an Masyarakat	Ec2.1.1 Peningkata n lapangan kerja	Ec2.1.1.P.1 Peningkatan kewirausaha an	Terwujudny a peningkatan kesejahteraa n masyarakat	5.3. persentase tenaga kerja yang bekerja di sektor teknologi informasi dan komunika si (TIK)	Peningkatan kewirausahaa n (SIAP KERJA) sebuah inovasi untuk memberikan perbekalan dalam menghadapi dunia kerja	14 pake t Pela- tihan	50 0	15 pake t	55 0	17 pake t	56 0	18 pake t	60 0	20 pake t	65 0	APBD/ APBN	DISNAKER

Peta Jalan Pembangunan <i>Smart Economy</i> Pendek Menengah																	
Sub-Dimensi	Strategi	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Sumbe r Dana	Leading Sector
						2024		2025		2026		2027		2028			
						Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran		
Ec3 Ekosistem Transaksi Keuangan	Ec3.1.1 Peningkata n pemsaran produk berbasis <i>cashless Transaction</i>	Ec3.1.1.P.1 Peningkatan penggunaan transaksi Non tunai di semua sektor	Peningkatan jumlah layanan pembayaran <i>cashless transaction</i>	9.2. persentase pembayar an ke kota yang dibayar secara elektronik berdasarka n faktur elektronik	(Gebyar Penggunaan QRIS) untuk menekan penggunaan uang kertas di kalangan masyarakat	10 ribu	15 0	15 irbu	20 0	20 ribu	20 0	25 ribu	20 0	30 ribu	20 0	APBD	BPKAD/ BANK BPD

Sumber : Bimbingan Teknis Tahap 2 Kabupaten Buleleng 2023

Tabel 32Peta Jalan Pembangunan *Smart Economy* Jangka Panjang

Peta Jalan Pembangunan <i>Smart Economy</i> Jangka Panjang																	
Sub-Dimensi	Strategi	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Sumbe r Dana	Leading Sector
						2029		2030		2031		2032		2033			
						Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran		
Ec1 Ekosistem Industri	Ec1.1.1 Peningkata n Produk UMKM Lokal yang terdigitalisa si dengan tujuan optimalisas i dan penjualan produk	Ec1.1.1.P.1 Peningkatan UMKM yang berdaya saing	Jumlah UMKM yang mendapat pendamping an dan pelatihan	20.3. persentase luas tanah kota yang dicakup oleh sistem pemetaan pemasok makanan daring	Pengembang an Pusat Layanan terpadu (PLUT) UMKM sebuah pengembang an kapasitas bagi pelaku UMKM untuk bisa meningkatkan	100 %	10 0	150 %	11 0	200 %	12 0	250 %	13 0	130 %	30 0	APBD/ APBN	DISDAG PRINKOPUK M
Ec2 Kesejahtera an Masyarakat	Ec2.1.1 Peningkata n lapangan kerja	Ec2.1.1.P.1 Peningkatan kewirausaha an	Terwujudny a peningkatan kesejahteraa n masyarakat	5.3. persentase tenaga kerja yang bekerja di sektor teknologi informasi dan komunika si (TIK)	Peningkatan kewirausahaa n (SIAP KERJA) sebuah inovasi untuk memberikan perbekalan dalam menghadapi dunia kerja	14 pake t Pela- tihan	50 0	15 pake t	55 0	17 pake t	56 0	18 pake t	60 0	20 pake t	65 0	APBD/ APBN	DISNAKER

Peta Jalan Pembangunan <i>Smart Economy</i> Jangka Panjang																	
Sub-Dimensi	Strategi	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Sumbe r Dana	Leading Sector
						2029		2030		2031		2032		2033			
						Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran		
Ec3 Ekosistem Transaksi Keuangan	Ec3.1.1 Peningkata n pemasaran produk berbasis <i>cashless Transaction</i>	Ec3.1.1.P.1 Peningkatan penggunaan transaksi Non tunai di semua sektor	Peningkatan jumlah layanan pembayaran <i>cashless transaction</i>	9.2. persentase pembayar an ke kota yang dibayar secara elektronik berdasarka n faktur elektronik	Gebyar Penggunaan QRIS, untuk menekan penggunaan uang kertas di kalangan masyarakat	10 ribu	15 0	15 irbu	20 0	20 ribu	20 0	25 ribu	20 0	30 ribu	20 0	APBD	BPKAD/ BANK BPD

Sumber : Bimbingan Teknis Tahap 2 Kabupaten Buleleng 2023

Peta jalan pembangunan *Smart Economy* ini dibuat untuk gambaran implementasi dalam penerapan *Smart City* yaitu *Smart Economy* di Kabupaten Buleleng, penguatan dan memberikan pengetahuan tentang UMKM dan menciptakan lapangan pekerjaan menjadi fokus utama dalam *Smart Economy*, peta jalan ini dibuat dalam jangka waktu pendek menengah dan jangka panjang dalam hal itu tiap tahun terdapat capaian kinerja dan anggaran yang sudah dibuat melihat dari potensi dan perkembangan ekonomi. Pada peta jalan ini dibuat strategi dalam menggapai inovasi tersebut adapun strategi tersebut merupakan turunan dari sub-dimensi *Smart Economy*, adapun diantaranya sub-dimensi industri berdaya saing yang difokuskan kepada peningkatan UMKM lokal yang terdigitalisasi dengan tujuan optimalisasi dan penjualan produk, sub-dimensi kesejahteraan masyarakat yang difokuskan kepada peningkatan lapangan pekerjaan, sub-dimensi transaksi keuangan yang difokuskan kepada peningkatan pemasaran produk berbasis *cashless transaction*. Strategi tersebut dibuat melihat dari kondisi yang sebenarnya di Kabupaten Buleleng maka dibuatlah strategi yang bisa berdampak baik dan efektif bagi masyarakat dan daerah.

5.4. Peta Jalan Pembangunan *Smart Living*

Peta jalan pembangunan *Smart Living* menandakan peningkatan kualitas hidup melalui integrasi teknologi dan inovasi dalam bidang kehidupan sehari-hari seperti perumahan, transportasi, kesehatan. Peta jalan pembangunan *Smart Living* adalah kumpulan rencana strategis yang mencakup berbagai tindakan, inisiatif, dan aksi yang dimaksudkan untuk mengubah cara hidup masyarakat ke arah yang lebih cerdas dengan memanfaatkan teknologi, inovasi, dan solusi berkelanjutan. Adapun tujuannya adalah untuk memberikan arahan kepada pemangku kebijakan untuk bisa memanfaatkan teknologi dan inovasi dalam menciptakan lingkungan yang baik. Peta jalan pada *Smart Living* mengacu visi misi *Smart City* Kabupaten Buleleng sehingga inovasi yang dibuat sesuai dengan jalan dari visi misi tersebut.

Peta jalan ini dibuat berdasarkan kondisi yang berada di Kabupaten Buleleng. Maka untuk lebih detailnya pada peta jalan *Smart Branding* dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 33 Peta Jalan Pembangunan *Smart Living* Jangka Pendek Menengah

Peta Jalan Pembangunan <i>Smart Living</i> Jangka Pendek Menengah																	
Sub-Dimensi	Strategi	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Sumbe r Dana	Leading Sector
						2024		2025		2026		2027		2028			
						Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran		
Lv1 Harmonisa si Tata Ruang	Lv1.1.1 Peningkatan konsistensi penataan ruang	Lv1.1.1.P.1 Program pengembang an perumahan, program Kawasan permukiman dan program perumahan dan Kawasan permukiman kumuh	1. persentase rumah korban bencana alam 2. persentase penanganan Kawasan kumuh 3. persentase penanganan RTLH diluar Kawasan kumuh	21.4. persentase populasi kota yang hidup dalam kepadatan populasi sedang hingga tinggi	Sipermata (sistem informasi perumahan kawasan pemukima n dan pertanahan) sebuah sistem untuk memantau pemukima n dan pertanahan	100 %	240 0	100 %	240 0	100 %	250 0	100 %	250 0	100 %	250 0	APBD	Disper- kimta
Lv2 Kesehatan	Lv2.1.1 Mewujudkan pelayanan kesehatan yang berkualitas	Lv2.1.1.P.1 Pembinaan keluarga berencana (KB)	Persentase peserta KB aktif (PA) metode kontrasepsi jangka	11.1 persentase populasi yang masuk dalam file Kesehatan	Mobil unit pelayanan KB (MULYA KB) mobil layanan pasien	90%	500	95%	510	91%	520	91%	530	92%	540	APBD	Dinas P2KBP3 A

Peta Jalan Pembangunan <i>Smart Living</i> Jangka Pendek Menengah																	
Sub-Dimensi	Strategi	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Sumbe r Dana	Leading Sector
						2024		2025		2026		2027		2028			
						Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran		
	Lv2.1.2 Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan dasar		Panjang (MJKP)	terpadu daring yang dapat diakses oleh penyedia layan kesehatan	untuk kerumah sakit												
		Lv2.1.1.P.2 Pelayanan Kesehatan online (Yan Kesi Buleleng)	Persentase masyarakat yang membentuk pelayanan Kesehatan secara online dilayani dengan baik	11.2. jumlah janji temu medis tahunan yang dilakukan melalui jarak jauh per 100.000 penduduk	Pelayanan Kesehatan online (Yan Kesi Buleleng) Merupakan sebuah layanan online yang bisa diakses selama 24 jam oleh masyarakat	100 %	250	100 %	280	100 %	290	100 %	300	100 %	310	APBD	Dinkes
		Lv2.1.1.P.3 Rekam medis terintegrasi	Persentase rekam medis yang dikelola secara elektronik	11.1. persentase populasi kota yang masuk dalam file Kesehatan terpadu	Rekam medis terintegrasi (ERIM) sebuah sistem data rumah sakit yang	100 %	250	100 %	270	100 %	300	100 %	310	100 %	320	APBD	Dinkes

Peta Jalan Pembangunan <i>Smart Living</i> Jangka Pendek Menengah																	
Sub-Dimensi	Strategi	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Sumbe r Dana	Leading Sector
						2024		2025		2026		2027		2028			
						Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran		
				daring yang dapat diakses oleh penyedia layanan kesehatan	tergabung dengan riwayat penyakit pasien sebelumnya												
Lv3 Transportasi	Lv3.1.1 Menambahkan armada transportasi untuk mobilitas kebutuhan masyarakat	Lv3.1.1.P.1 Terlaksananya peningkatan sarana, prasarana dan fasilitas perhubungan	Persentase ketersediaan prasarana dan fasilitas perhubungan	19.12. persentase rute angkutan umum dengan konektivitas internet yang disediakan kota dan/atau dikelola untuk komuter	Bus Jasa Antar Jemput Sekolah Buleleng Gratis (JAS Buleleng Gratis) sebuah layanan antar jemput bagi anak sekolah	100 %	40	100 %	50	100 %	100	100 %	110	100 %	110	APBD CSR	Dishub

Sumber : Bimbingan Teknis Tahap 2 Kabupaten Buleleng 2023

Tabel 34 Peta Jalan Pembangunan *Smart Living* Jangka Panjang

Peta Jalan Pembangunan <i>Smart Living</i> Jangka Panjang																	
Sub-Dimensi	Strategi	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Sumbe r Dana	Leading Sector
						2029		2030		2031		2032		2033			
						Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran		
Lv1 Harmonisa si Tata Ruang	Lv1.1.1 Peningkatan konsistensi penataan ruang	Lv1.1.1.P.1 Program pengembang an perumahan, program Kawasan permukiman dan program perumahan dan Kawasan permukiman kumuh	1. persentase rumah korban bencana alam 2. persentase penanganan Kawasan kumuh 3. persentase penanganan RTLH diluar Kawasan kumuh	21.4. persentase populasi kota yang hidup dalam kepadatan populasi sedang hingga tinggi	Sipermata (sistem informasi perumahan kawasan pemukima n dan pertanahan) sebuah sistem untuk memantau pemukima n dan pertanahan	100 %	240 0	100 %	240 0	100 %	250 0	100 %	250 0	100 %	250 0	APBD	Disper- kimta
Lv2 Kesehatan	Lv2.1.1 Mewujudkan pelayanan Kesehatan yang berkualitas	Lv2.1.1.P.1 Pembinaan keluarga berencana (KB)	Persentase peserta KB aktif (PA) metode kontrasepsi jangka	11.1 persentase populasi yang masuk dalam file Kesehatan	Mobil unit pelayanan KB (MULYA KB) mobil layanan pasien	100 %	950	100 %	960	100 %	970	100 %	980	100 %	990	APBD	Dinas P2KBP3 A

Peta Jalan Pembangunan <i>Smart Living</i> Jangka Panjang																	
Sub-Dimensi	Strategi	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Sumbe r Dana	Leading Sector
						2029		2030		2031		2032		2033			
						Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran		
	Lv2.1.2 Peningkatan aksisibilitas masyarakat terhadap pelayanan dasar		Panjang (MJKP)	terpadu daring yang dapat diakses oleh penyedia layan kesehatan	untuk kerumah sakit												
		Lv2.1.1.P.2 Pelayanan Kesehatan online (Yan Kesi Buleleng)	Persentase masyarakat yang membentuk pelayanan Kesehatan secara online dilayani dengan baik	11.2. jumlah janji temu medis tahunan yang dilakukan melalui jarak jauh per 100.000 penduduk	Pelayanan Kesehatan online (Yan Kesi Buleleng) Merupaka n sebuah layanan online yang bisa diakses selama 24 jam oleh masyaraka t	100 %	530	100 %	530	100 %	530	100 %	530	100 %	530	APBD	Dinkes
		Lv2.1.1.P.3 Rekam medis terintegrasi	Persentase rekam medis yang terkelola secara elektronik	11.1. persentase populasi kota yang masuk dalam file Kesehatan terpadu	Rekam medis terintegrasi (ERIM) sebuah sistem data rumah sakit yang	100 %	150	100 %	150	100 %	150	100 %	150	100 %	150	APBD	Dinkes

Peta Jalan Pembangunan <i>Smart Living</i> Jangka Panjang																	
Sub-Dimensi	Strategi	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Sumbe r Dana	Leading Sector
						2029		2030		2031		2032		2033			
						Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran		
				daring yang dapat diakses oleh penyedia layanan kesehatan	tergabung dengan riwayat penyakit pasien sebelumnya												
Lv3 Transportasi	Lv3.1.1 Menambahkan armada transportasi untuk mobilitas kebutuhan masyarakat	Lv3.1.1.P.1 Terlaksananya peningkatan sarana, prasarana dan fasilitas perhubungan	Persentase ketersediaan prasarana dan fasilitas perhubungan	19.12. persentase rute angkutan umum dengan konektivitas internet yang disediakan kota dan/atau dikelola untuk komuter	Bus Jasa Antar Jemput Sekolah Buleleng Gratis (JAS Buleleng Gratis) sebuah layanan antar jemput bagi anak sekolah	100 %	210	100 %	220	100 %	230	100 %	240	100 %	250	APBD CSR	Dishub

Sumber : Bimbingan Teknis Tahap 2 Kabupaten Buleleng 2023

Pada peta jalan pembangunan *Smart Living* dirangkai untuk bisa memaksimalkan program inovasi yang sudah dibuat berdasarkan kebutuhan kemajuan dan pengembangan *Smart Living*. Peta jalan ini bisa menggambarkan bagaimana ritme setiap tahunnya mulai dari jangka pendek menengah dan jangka panjang yang mempunyai target kinerja tertentu dalam pencapaiannya. Strategi, program dan indikator kinerja kemudian dihubungkan oleh indikator SNI yang sesuai sehingga mempunyai landasan dalam menentukan arah kebijakan inovasi. Peta jalan pembangunan *Smart Living* difokuskan kepada pada sub-dimen harmonisasi tata ruang yakni peningkatan konsistensi penataan ruang, pada sub-dimensi sarana/prasaran kesehatan yakni meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, dan pada sub-dimensi sarana/prasaran transportasi yakni peningkatan sarana, prasarana dan fasilitas perhubungan. Ketiga strategi tersebut sudah melalui kajian khusus di pemerintah Kabupaten Buleleng yang menyesuaikan kebutuhan daerah. Pada harmonisasi tata ruang dengan inovasi SIPERMATA yang digunakan sebagai pengembangan program

perumahan pada kawasan permukiman kumuh. Inovasi tersebut dapat memetakan dimana letak pemukiman kumuh untuk bisa di revitalisasi untuk keindahan kota. Selanjutnya pada sarana/prasarana kesehatan dengan inovasi MULYA KB, Yan Kesi Buleleng, dan ERIM merupakan terobosan dibidang kesehatan agar bisa lebih mudah dalam mendapatkan fasilitas layanan kesehatan masyarakat. Kemudian yang terakhir pada sarana /prasaran perhubungan yakni Jas Bule (jasa antar jemput Buleleng gratis) yang mana inovasi tersebut untuk memudahkan anak-anak sekolah jika ingin berangkat kesekolah, selain itu juga dapat mengurangi sedikit kemacetan pada jam-jam tertentu karena adanya transportasi layanan gratis yang diberikan oleh pemerintah Kabupaten Buleleng.

5.5. Peta Jalan Pembangunan *Smart Society*

Peta jalan pembangunan *Smart Society* merupakan rencana terstruktur yang menjelaskan langkah-langkah, kebijakan, dan inisiatif yang perlu diambil untuk menciptakan masyarakat yang berkarakter cerdas. Kemudian peta jalan pembangunan *Smart Society* memberikan solusi inovatif lainnya untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, mendorong pembangunan berkelanjutan, dan menciptakan interaksi yang lebih efisien antara pemerintah, masyarakat dan berbagai *stakeholder* lainnya. Pada peta jalan ini dapat mengidentifikasi sumber daya yang diperlukan, potensi hambatan, dan strategi untuk mengatasi tantangan tersebut hal ini bertujuan untuk memastikan pembangunan *Smart Society* yang berkesinambungan dan berdampak positif bagi seluruh anggota masyarakat. Peta jalan pembangunan *Smart Society* ini dirumuskan berdasarkan kebutuhan pemerintah Kabupaten Buleleng. Maka untuk lebih detail dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 35 Peta Jalan Pembangunan *Smart Society* Jangka Pendek Menengah

Peta Jalan Pembangunan <i>Smart Society</i> Jangka Pendek Menengah																	
Sub-Dimensi	Strategi	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Sumber Dana	Leading Sector
						2024		2025		2026		2027		2028			
						Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran		
S1 Interaksi Masyara kat	S1.1.1 Mengajak masyaraka t untuk bersekolah	S1.1.1.P.1 Program pengelolaan pendidikan	1.APS 2.Angka literasi 3.Angka numerasi	1.6.2. jumlah computer, laptop, tablet atau perangkat pembelajar an digital lainnya yang tersedia per 1.000 siswa	(Sekolah Smart) merupakan pengentasa n buta angka dan huruf kepada anak-anak	100%	200 0	100%	220 0	100%	242 0	100%	266 2	100%	290 0	Bantua n Keuang an Khusus (BKK)	Disdik
				2.6.3. jumlah tingkat Pendidikan tinggi sains, teknologi, Teknik dan matematik a (STEM) per	(Posko DO) merupakan sebuah pogram untuk menjaring anak-anak yang putus sekolah	55,5 %	200 0	56,5%	220 0	57,5 %	242 0	58,5 %	266 2	59,5 %	290 0	Bantua n Keuang an Khusus (BKK)	Disdik

Peta Jalan Pembangunan <i>Smart Society</i> Jangka Pendek Menengah																	
Sub-Dimensi	Strategi	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Sumbe r Dana	Leading Sector
						2024		2025		2026		2027		2028			
						Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran		
				100.000 penduduk													
	S1.2.1 Menyedia kan sarana informasi klarifikasi isu hoaks	S1.1.1.P.2 Penyelenggar aan Persandian untuk pengamanan informasi	Persentase keamanan data dan informasi sesuai standart	13.4 persentase anggaran kota yang dialokasika n untuk penyediaan program yang ditujukan untuk menjembat ani kesenjanga n digital	Informasi melalui konten “Buleleng Cegat Hoaks” Merupakan antisipasi pemerintah dalam memberant as hoaks	12 lapora n	120	12 Lapor an	125	12 lapora n	126	12 lapora n	127	12 Lapor an	128	APBD	Kominf- santi
S2 Ekosiste m Belajar/ Pendidik an	S2.1.1 Memberik an edukasi dongeng kepada anak, sesuai himbauan pemerinta h daerah	S2.1.1.P.1 Pembinaan perpustakaan	Meningka t nya pengelola an perpustak aan	1.17.4. persentase populasi kota yang merupakan pengguna perpustaka an umum yang aktif	(Buleleng Mesatua) merupakan edukasi kepada anak-anak sebelum tidur	100%	250	100%	260	100%	270	100%	280	100%	290	APBD	DAPD
				Perpustaka an Keliling “pusling” Merupakan sebuah program	48 layan an	250	48 layana n	260	48 layan an	270	48 layan an	280	48 layan an	290	APBD	DAPD	

Peta Jalan Pembangunan <i>Smart Society</i> Jangka Pendek Menengah																	
Sub-Dimensi	Strategi	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Sumbe r Dana	Leading Sector
						2024		2025		2026		2027		2028			
						Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran		
					untuk meningkat kan minat baca kepada anak-anak												
				17.3 jumlah buku perpustaka an umum dan judul e-book per 100.000 penduduk	E-Library, merupakan sebuah program untuk memudahk an pembaca agar bisa diakses melalui <i>smart phone</i>	500 Judul e- book	10	520 Judul e- book	12	540 Judul e- book	14	560 Judul e- book	16	580 Judul e- book	18	APBD	DAPD
S3 Keamana n Masyara kat	S3.1.1 Tersediany a pemantaua n visual	S3.1.1.P.1 Peningkatan ketentraman dan ketertiban umum	Tingkat penyelesai an pelanggar an ketertiban, ketentram an, keindahan	1.15.1. Persentase area kota yang dicakup oleh kamera pengintai digital	Pemantaua n (ip camera) di ruang public/terb uka hijau, merupakan sebuah inobasi untuk memantau pergerakan masyarakat	100%	55	100%	75	100%	100	100%	115	100%	125	APBD	Satpol PP & Kominfosa nti

Peta Jalan Pembangunan <i>Smart Society</i> Jangka Pendek Menengah																	
Sub-Dimensi	Strategi	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Sumber Dana	Leading Sector
						2024		2025		2026		2027		2028			
						Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran		
					di daerah- daerah rawan												

Sumber : Bimbingan Teknis Tahap 2 Kabupaten Buleleng 2023

Tabel 36 Peta jalan Pembangunan *Smart Society* Jangka Panjang

Peta Jalan Pembangunan <i>Smart Society</i> Jangka Panjang																	
Sub-Dimensi	Strategi	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Sumber Dana	Leading Sector
						2029		2030		2031		2032		2033			
						Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran		
S1 Interaksi Masyara kat	S1.1.1 Mengajak masyaraka t untuk bersekolah	S1.1.1.P.1 Program pengelolaan pendidikan	1.APS 2.Angka literasi 3.Angka numerasi	1.6.2. jumlah computer, laptop, tablet atau perangkat pembelajar an digital lainnya	Sekolah Smart) merupakan pengentasa n buta angka dan huruf kepada anak-anak	100%	345, 6	100%	37 7	100%	38 0	100%	38 2	100%	38 5	Bantuan Keuang an Khusus (BKK)	Disdik
				yang tersedia per 1.000 siswa	(Posko DO) merupakan sebuah porgram untuk menjaring anak-anak yang putus sekolah	55,5%	345, 6	56,5%	37 7	57,5%	38 0	58,5%	38 2	59,5%	38 5	Bantuan Keunga n Khusus (BKK)	Disdik
				2.6.3. jumlah tingkat Pendidikan tinggi sains, teknologi, Teknik dan matematika (STEM) per 100.000 penduduk													

Peta Jalan Pembangunan <i>Smart Society</i> Jangka Panjang																	
Sub-Dimensi	Strategi	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Sumber Dana	Leading Sector
						2029		2030		2031		2032		2033			
						Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran		
	S1.2.1 Menyediak an sarana informasi klarifikasi isu hoaks	S1.1.1.P.2 Penyelenggar aan Persandian untuk pengamanan informasi	Persentase keamanan data dan informasi sesuai standart	13.4 persentase anggaran kota yang dialokasika n untuk penyediaan program yang ditujukan untuk menjembat ani kesenjanga n digital	Informasi melalui konten “Buleleng Cegat Hoaks” Merupakan antisipasi pemerintah dalam memberant as hoaks	12 lapora n	108	12 Lapor an	12 5	12 lapora n	12 6	12 lapora n	12 7	12 Lapor an	12 8	APBD	Kominf- santi
S2 Ekosiste m Belajar/ Pendidik an	S2.1.1 Memberik an edukasi dongeng kepada anak, sesuai himbau an pemerintah daerah	S2.1.1.P.1 Pembinaan perpustakaan	Meningkat nya pengelolaa n perpustaka an	1.17.4. persentase populasi kota yang merupakan pengguna perpustaka an umum yang aktif	(Buleleng Mesatua) merupakan edukasi kepada anak-anak sebelum tidur	100%	290	100%	29 0	100%	29 0	100%	29 0	100%	29 0	APBD	DAPD
				Perpustaka an Keliling “pusling” Merupakan sebuah program untuk meningkatk	48 layan an	120	48 layana n	12 5	48 layan an	13 0	48 layan an	13 5	48 layan an	14 0	APBD	DAPD	

Peta Jalan Pembangunan <i>Smart Society</i> Jangka Panjang																	
Sub-Dimensi	Strategi	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Sumber Dana	Leading Sector
						2029		2030		2031		2032		2033			
						Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran		
					an minat baca kepada anak-anak												
				17.3 jumlah buku perpustaka an umum dan judul e- book per 100.000 penduduk	E-Library, merupakan sebuah program untuk memudahk an pembaca agar bisa diakses melalui <i>smart phone</i>	590 Judul e- book	20	600 Judul e-book	22	620 Judul e- book	24	640 Judul e- book	26	660 Judul e- book	28	APBD	DAPD
S3 Keamana n Masyara kat	S3.1.1 Tersediany a pemantau n visual	S3.1.1.P.1 Peningkatan ketentraman dan ketertiban umum	Tingkat penyelesai an pelanggara n ketertiban, ketentram an, keindahan	1.15.1. Persentase area kota yang dicakup oleh kamera pengintai digital	Pemantau n (ip camera) di ruang public/terb uka hijau, merupakan sebuah inobasi untuk memantau pergerakan masyarakat di daerah-	100%	125	100%	13 0	100%	13 5	100%	15 5	100%	17 5	APBD	Satpol PP & Kominfosa nti

Peta Jalan Pembangunan <i>Smart Society</i> Jangka Panjang																	
Sub-Dimensi	Strategi	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Sumber Dana	Leading Sector
						2029		2030		2031		2032		2033			
						Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran		
					daerah rawan												

Sumber: Bimbingan Teknis Tahap 2 Kabupaten Buleleng 2023

Pada peta jalan pembangunan *Smart Society* dibuat untuk bisa menjalankan program inovasi dalam menyelesaikan masalah sosial yang ada di Kabupaten Buleleng. Peta jalan ini bisa dikatakan sebagai ritme harapan masa depan dengan menentukan target kinerja pertahunnya yang tentunya mempunyai capaian-capaian tertentu pada setiap tahun dalam mensukseskan inovasi yang sudah dirumuskan. Dengan kata lain, peta jalan ini merupakan alur perjalanan inovasi dalam langkah ke depan sehingga bisa memberikan dampak yang positif bagi perkembangan sosial di Kabupaten Buleleng. Peta jalan pembangunan ini dibuat mulai dari jangka pendek menengah dan jangka panjang. Dibuatnya peta jalan sampai jangka panjang ini membuktikan bahwa konsistensi pemerintah daerah dalam menjalankan inovasi sehingga dapat berkelanjutan untuk masyarakat banyak. Adapun upaya yang difokuskan pada setiap sub-dimensi memiliki tujuannya masing-masing diantaranya adalah pada sub-dimensi interaksi masyarakat yang efisien yang difokuskan kepada mengajak masyarakat untuk bersekolah, pada sub-dimensi ekosistem belajar yang difokuskan kepada mendongengkan anak sebelum tidur, dan pada sub-dimensi sistem keamanan dan keselamatan masyarakat difokuskan kepada tersedianya pemantauan virtual. Strategi tersebut berhubungan dengan indikator kinerja yang kemudian yang menjadi landasan nya adalah indikator SNI yang sudah ditentukan. Pada strategi mengajak masyarakat untuk bersekolah inovasi yang dibuat adalah sekolah smart dan POSKO DO yang mana inovasi tersebut sudah berdasarkan kebutuhan situasi sosial di Kabupaten Buleleng. Kemudian strategi mendongengkan anak inovasi yang dibuat adalah mendongengkan anak sebelum tidur yang mana inovasi tersebut adalah pendidikan sejak usia dini yang diberikan kepada anak dari orang tuanya sehingga dapat tereduksi sejak dini. Selain itu strategi tersedianya pemantauan virtual inovasinya adalah memberikan kamera pemantau pada setiap lingkungan tertentu yang bisa menimbulkan konflik.

5.6. Peta Jalan Pembangunan *Smart Environment*

Peta jalan pembangunan *Smart Environment* merupakan sebuah rancangan khusus untuk bisa memfokuskan dalam permasalahan lingkungan baik dalam pencegahannya dan pengelolaannya. Dalam hal ini peta jalan yang dibuat oleh pemerintah Kabupaten Buleleng sudah melalui kajian khusus sehingga bisa membuat inovasi yang nanti akan digunakan sebagai pemecahan masalah. Pembangunan *Smart Environment* memerlukan pendekatan yang komprehensif untuk memahami, menilai, dan meningkatkan strategi yang telah dirancang. Dengan memiliki peta jalan pembangunan *Smart Environment* dapat memastikan bahwa langkah-langkah yang diambil sudah sesuai prosedur dan tepat untuk menciptakan lingkungan yang berkelanjutan dan berdampak positif bagi warganya. Pengelolaan sampah dan limbah, pengelolaan sumber daya yang tidak terpakai menjadi terbarukan, pengelolaan air pada *Smart Environment* merupakan fokus yang menjadi perhatian penting dalam pengelolaannya.

Peta jalan pembangunan *Smart Environment* yang sudah dibuat adalah sesuatu hal yang perlu diperhatikan demi keberlangsungan lingkungan yang berkelanjutan. Untuk lebih detail dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 37 Peta Jalan Pembangunan *Smart Environment* Jangka Pendek Menengah

Peta Jalan Pembangunan <i>Smart Environment</i> Jangka Pendek Menengah																	
Sub-Dimensi	Strategi	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Sumbe r Dana	Leading Sector
						2024		2025		2026		2027		2028			
						Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran		
En1 Proteksi Lingkunga n	En1.1.1 Meningkatka n kualitas air dan udara	En1.1.1.P.1 Program perencanaa n lingkungan hidup	Jumlah dokumen RPPLH (Rencana Perlindunga n dan Pengelolaan lingkungan hidup) yang tersusun	8.2 jumlah stasiun pemantauan kualitas udara jarak jauh secara langsung (real-time) per kilometer persegi (km2)	Sadar Dokling (Sadar Dokumen Lingkungan) Merupakan sebuah dokumen yang berisi edukasi pemeliharaa n lingkungan	3 Doku men	25 0	3 Doku men	30 0	3 Doku men	30 0	3 Doku men	30 0	3 Doku men	35 0	APBD	DLH
	En1.2.1 Peningkatan tutup vegetasi pada lahan perkotaan dan lahan kritis		Jumlah dokumen KLHS (kajian lingkungan hidup strategi) yang tersusun		Sistem informasi pembinaan dan pengawasan pelaku usaha Kabupaten Buleleng (Singkau)	3 Doku men	40 0	3 Doku men	40 0	3 Doku men	40 0	3 Doku men	40 0	3 Doku men	45 0	APBD	DLH

Peta Jalan Pembangunan <i>Smart Environment</i> Jangka Pendek Menengah																	
Sub-Dimensi	Strategi	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Sumbe r Dana	Leading Sector
						2024		2025		2026		2027		2028			
						Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran		
					Relawan Pemadam Kebakaran (REDKAR) Sebuah inovasi yang cepat tanggap dalam kebakaran	9 Klmp k	50	9 klmp k	30 0	9 klmp k	33 0	9 klmp k	35 0	9 klmp k	40 0	APBD	Dinas Pemada m
En2 Pengelolaa n sampah dan limbah	En2.1.1 Meningkatka n pengelolaan sampah sesuai ketentuan	En2.1.1.P.1 Program pengendalia n bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah bahan berbahaya serta beracun (limbah B3)	Jumlah dokumen fasilitasi pemenuhan komitmen izin penyimpana n sementara limbah B3 (Bahan Berbahaya Beracun) Persentase penanganan sampah	16.2. persentase populasi kota yang memiliki pengumpula n sampah dari 117rganic 117 pintu dengan pemantauan individu terhadap jumlah sampah rumah tangga	USB : Unit Sapu Bersih, Sebuah inovasi yang menerjunka n personil pembersih jalan	27 Doku men	75	30 Doku men	80	27 Doku men	80	30 Doku men	95	35 Doku men	10 0	APBD	DLH
					Buleleng kelola sampah organik (Bule Kepo) Sebuah inovasi pengelolaan sampah organik	23%	80	25%	85	27%	90	29%	95	31%	10 0	APBD	DLH

Peta Jalan Pembangunan <i>Smart Environment</i> Jangka Pendek Menengah																	
Sub-Dimensi	Strategi	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Sumbe r Dana	Leading Sector
						2024		2025		2026		2027		2028			
						Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran		
			Persentase pengurangan sampah	16.4. persentase dari jumlah total sampah plastic yang didaur ulang di kota	Buleleng kelola sampah anorganik (Bulan Melah) Sebuah inovasi pengelolaan sampah anorganik	20%	100	22%	110	24%	120	26%	130	28%	140	APBD	DLH
					JKD : jaminan Kesehatan desa (Asuransi lingkup desa dengan premi sampah yang berintegrasi program bank sampah)	73%	157	74%	160	75%	165	76%	180	77%	200	APBDes	Desa

Peta Jalan Pembangunan <i>Smart Environment</i> Jangka Pendek Menengah																	
Sub-Dimensi	Strategi	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Sumbe r Dana	Leading Sector
						2024		2025		2026		2027		2028			
						Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran		
En3 Tata Kelola Energi	En3.1.1 Merubah sampah menjadi energi terbarukan	En3.1.1.P.1 Program pengelolaan persampaha n	Persentase penanganan sampah	7.3. energi listrik dan panas (GJ) dihasilkan dari limbah padat atau pengolahan limbah cair perkapita pertahun	WTE (Waste to Energy) Sebuah inovasi trobosan pengelolaan sampah dalam membuat energi terbarukan	0	0	0	0	0	0	20%	20 0	21%	25 0	APBD CSR	DLH

Sumber : Bimbingan Teknis Tahap 2 Kabupaten Buleleng 2023

Tabel 38 Peta Jalan Pembangunan *Smart Environment* Jangka Panjang

Peta Jalan Pembangunan <i>Smart Environment</i> Jangka Panjang																	
Sub-Dimensi	Strategi	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Sumber Dana	Leading Sector
						2029		2030		2031		2032		2033			
						Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran		
En1 Proteksi Lingkungan	En1.1.1 Meningkatkan kualitas air dan udara	En1.1.1.P.1 Program perencanaan lingkungan hidup	Jumlah dokumen RPPLH (Rencana Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup) yang tersusun	8.2 jumlah stasiun pemantauan kualitas udara jarak jauh secara langsung (real-time) per kilometer persegi (km2)	Sadar Dokling (Sadar Dokumen Lingkungan) Merupakan sebuah dokumen yang berisi edukasi pemeliharaaan lingkungan	100%	160	100%	160	100%	170	100%	180	100%	200	APBD	DLH
	En1.2.1 Peningkatan tutup vegetasi pada lahan perkotaan dan lahan kritis		Jumlah dokumen KLHS (kajian lingkungan hidup strategi) yang tersusun		Sistem informasi pembinaan dan pengawasan pelaku usaha Kabupaten Buleleng (Singkau)	100%	175	100%	180	90%	190	95%	200	100%	220	APBD	DLH

Peta Jalan Pembangunan <i>Smart Environment</i> Jangka Panjang																	
Sub-Dimensi	Strategi	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Sumbe r Dana	Leading Sector
						2029		2030		2031		2032		2033			
						Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran		
					Relawan Pemadam Kebakaran (REDKAR) Sebuah inovasi yang cepat tanggap dalam kebakaran	9 Klmpk	100	9 klmpk	110	9 klmpk	120	9 klmpk	130	9 klmpk	140	APBD	Dinas Pemadam
En2 Pengelolaa n sampah dan limbah	En2.1.1 Meningkatka n pengelolaan sampah sesuai ketentuan	En2.1.1.P.1 Program pengendalia n bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B3)	Jumlah dokumen fasilitasi pemenuhan komitmen izin penyimpanan sementara limbah B3 (Bahan Berbahaya Beracun) Persentase penanganan sampah	16.2. persentase populasi kota yang memiliki pengumpula n sampah dari 121rganic 121 pintu dengan pemantauan individu terhadap jumlah sampah rumah tangga	USB : Unit Sapu Bersih Sebuah inovasi yang menerjunkana n personil pembersih jalan	100%	120	100%	130	100%	130	100%	140	100%	140	APBD	DLH
					Buleleng kelola sampah organik (Bule Kepo) Sebuah inovasi pengelolaan sampah organik	33%	600	35%	120	37%	140	40%	160	42%	130	APBD	DLH

Peta Jalan Pembangunan <i>Smart Environment</i> Jangka Panjang																		
Sub-Dimensi	Strategi	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Sumbe r Dana	Leading Sector	
						2029		2030		2031		2032		2033				
						Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran			
			Persentase pengurangan sampah	16.4. persentase dari jumlah total sampah plastic yang didaur ulang di kota	Buleleng kelola sampah anorganik (Bulan Melah) Sebuah inovasi pengelolaan sampah anorganik	20%	130	32%	600	34%	150	36%	180	38%	200	APBD	DLH	
					JKD : jaminan Kesehatan desa (Asuransi lingkup desa dengan premi sampah yang berintegrasi program bank sampah)	65%	250	70%	300	75%	350	80%	400	85%	450	APBDes	Desa	

Peta Jalan Pembangunan <i>Smart Environment</i> Jangka Panjang																	
Sub-Dimensi	Strategi	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Sumbe r Dana	Leading Sector
						2029		2030		2031		2032		2033			
						Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran		
En3 Tata Kelola Energi	En3.1.1 Merubah sampah menjadi energi terbarukan	En3.1.1.P.1 Program pengelolaan persampaha n	Persentase penanganan sampah	7.3. energi listrik dan panas (GJ) dihasilkan dari limbah padat atau pengolahan limbah cair perkapita pertahun	WTE (Waste to Energy) Sebuah inovasi trobosan pengelolaan sampah dalam membuat energi terbarukan	22%	30 0	23%	35 0	24%	37 0	25%	38 0	26%	40 0	APBD CSR	DLH

Sumber : Bimbingan Teknis Tahap 2 Kabupaten Buleleng 2023

Peta jalan pembangunan *Smart Environment* dibuat untuk bisa menjalankan inovasi program yang berbasis lingkungan dengan permasalahan yang di Kabupaten Buleleng. Pada *Smart Environment* permasalahan sampah dan limbah menjadi perhatian penting dalam hal ini, penduduk Buleleng dan jumlah pariwisata yang semakin meningkat tentu ada potensi peningkatan sampah dan limbah juga yang semakin banyak. Perlu adanya penanganan khusus dalam menanggulangnya. Tentu peta jalan ini akan memberikan alur pelaksanaan disetiap tahunnya baik dalam jangka pendek menengah dan jangka panjang. Setiap tahun nya di peta jalan menentukan target-target kinerja capaiannya hal itu dikarenakan bahwa tiap tahun nya terdapat prioritas-prioritas pengembangan yang sudah ditentukan. Strategi yang sudah dibuat berdasarkan permasalahan yang ada selanjutnya disambungkan oleh indikator kinerja yang kemudian dihubungkan oleh indikator SNI sebagai landasannya. Selain itu, pada *Smart Environment* terdapat sub-dimensi yang memilki strategi dalam pelaksanaan nya adapun diantaranya pada sub-dimensi proteksi lingkungan difokuskan kepada meningkatkan kualitas air dan udara, peningkatan tutup vegetasi pada lahan perkotaan dan lahan kritis, pada sub-dimensi pengelolaan sampah dan limbah difokuskan kepada meningkatkan pengelolaan sampah sesuai dengan ketentuan, pada sub-dimensi tata kelola energi difokuskan kepada merubah sampah menjadi energi terbarukan. Tentu startegi tersebut melahirkan inovasi untuk pemecahan masalahnya pada startegi meningkatkan kualitas air dan udara inovasi yang dibuat adalah sadar dokumen lingkungan (sadar dokling), Sistem informasi pembinaan dan pengawasan pelaku usaha Kabupaten Buleleng (singaku) dan Relawan Pemadam Kebakaran (REDKAR), pada strategi pengelolaan sampah dan limbah inovasi yang dibuat adalah Unit Sapu Bersih (USB), Buleleng Kelola Sampah Organik (Bule Kepo), Buleleng Kelola Sampah Anorganik (Bulan Melah) dan Jaminan Kesehatan Desa (JKD). Dan yang terakhir strategi mengelola sampah menjadi energi inovasi yang dibuat adalah Waste to Energy (WTE).

6. PENUTUP

Ditengah tantangan yang dihadapinya saat ini, Kabupaten Buleleng memiliki kesempatan untuk merubah menjadi sebuah kota cerdas, inklusif, dan berkelanjutan. Masterplan *Smart City* Kabupaten Buleleng lebih dari sekedar dokumen melainkan adalah komitmen dari garis besar untuk membangun masa depan Buleleng yang lebih cerah, dinamis dan inovatif. Untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, meningkatkan ekonomi lokal, dan melestarikan sumber daya dan warisan budaya, pembangunan *Smart City* adalah alat. Tentu visi besar ini akan dapat dicapai dengan kerjasama seluruh pemangku kepentingan pemerintah, sektor swasta, masyarakat, dan komunitas. Tentunya pemerintah Buleleng berterima kasih kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berada dilingkungan pemerintahan Kabupaten Buleleng yang telah menyusun masterplan ini. Kami berharap bahwa komitmen dan upaya kita bersama akan menjadikan Buleleng tidak hanya sebagai tempat yang indah dan kaya budaya akan tetapi juga sebagai contoh kota cerdas yang inklusif dan berkelanjutan di Indonesia khusus nya di Provinsi Bali.

7. REFERENSI

- Annisah, A. (2018). Usulan Perencanaan *Smart City : Smart Governance* Pemerintah Daerah Kabupaten Mukomuko*. *Masyarakat Telematika Dan Informasi : Jurnal Penelitian Teknologi Informasi Dan Komunikasi*, 8(1), 59. <https://doi.org/10.17933/mti.v8i1.103>
- Indonesia, D. J. A. I. K. dan K. R. (2021). *Buku Panduan Penyusunan Masterplan Smart City 2021 Gerakan Menuju Smart City*. Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. [file:///C:/Users/ASUS ROG/Downloads/Panduan Penyusunan Masterplan Smart City - Kominfo 2021 -Rev19Juni2022 \(1\).pdf](file:///C:/Users/ASUS%20ROG/Downloads/Panduan%20Penyusunan%20Masterplan%20Smart%20City%20-%20Kominfo%202021%20-%20Rev19Juni2022%20(1).pdf)
- Insani, P. A. (2017). Mewujudkan Kota Responsif Melalui *Smart City*. *Publisia: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 2(1), 25–31. <https://doi.org/10.26905/pjiap.v2i1.1423>
- Putra, A. S. (2019). *Smart City: konsep Kota pintar di DKI Jakarta*. *Tekinfor*, 20(2), 73–79. <https://journals.upi-yai.ac.id/index.php/TEKINFO/article/download/1168/953>
- Suradnyana, P. A. (2022). *Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng*. 1–371.
- Wanto, A. H. (2018). Strategi Pemerintah Kota Malang Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Konsep *Smart City*. *JPSI (Journal of Public Sector Innovations)*, 2(1), 39. <https://doi.org/10.26740/jpsi.v2n1.p39-43>

BUKU III
EXECUTIVE SUMMARY MASTERPLAN SMART CITY KABUPATEN BULELENG
TAHUN 2024-2033



BUKU 3
**EXECUTIVE SUMMARY
MASTERPLAN SMART CITY
KABUPATEN BULELENG**

PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG 2023

"Buleleng Cerdas Menuju Kerta Raharja Berlandaskan Tri Hita Karana"

www.bulelengkab.go.id



DAFTAR ISI

1.	LATAR BELAKANG	1
2.	VISI <i>SMART CITY</i> KABUPATEN BULELENG	3
2.1.	Misi <i>Smart City</i> Kabupaten Buleleng.....	4
3.	STRATEGI PEMBANGUNAN <i>SMART CITY</i>	6
3.1.	Strategi pembangunan <i>Smart Governance</i>	7
3.2.	Strategi pembangunan <i>Smart Branding</i>	8
3.3.	Strategi pembangunan <i>Smart Economy</i>	9
3.4.	Strategi pembangunan <i>Smart Living</i>	10
3.5.	Strategi pembangunan <i>Smart Society</i>	11
3.6.	Strategi pembangunan <i>Smart Environment</i>	12
4.	PETA JALAN PEMBANGUNAN <i>SMART CITY</i> DAERAH.....	14
4.1.	Peta Jalan Pembangunan <i>Smart Governance</i>	15
4.2.	Peta Jalan Pembangunan <i>Smart Branding</i>	24
4.3.	Peta Jalan Pembangunan <i>Smart Economy</i>	29
4.4.	Peta Jalan Pembangunan <i>Smart Living</i>	34
4.5.	Peta Jalan Pembangunan <i>Smart Society</i>	43
4.6.	Peta Jalan Pembangunan <i>Smart Environment</i>	52
5.	PENUTUP.....	62
6.	REFERENSI	63

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Misi <i>Smart City</i> Kabupaten Buleleng	4
Tabel 2 Kodefikasi	6
Tabel 3 Strategi <i>Smart Governance</i>	7
Tabel 4 Strategi <i>Smart Branding</i>	8
Tabel 5 Strategi <i>Smart Economy</i>	9
Tabel 6 Strategi <i>Smart Living</i>	10
Tabel 7 Strategi <i>Smart Society</i>	12
Tabel 8 Strategi <i>Smart Environment</i>	13
Tabel 9 Peta Jalan Pembangunan <i>Smart Governance</i> Jangka Pendek Menengah	16
Tabel 10 Peta Jalan Pembangunan <i>Smart Governance</i> Jangka Panjang	20
Tabel 11 Peta Jalan Pembangunan <i>Smart Branding</i> Jangka Pendek Menengah	25
Tabel 12 Peta Jalan Pembangunan <i>Smart Branding</i> Jangka Panjang	27
Tabel 13 Peta Jalan Pembangunan <i>Smart Economy</i> Jangka Pendek Menengah	30
Tabel 14 Peta Jalan Pembangunan <i>Smart Economy</i> Jangka Panjang	32
Tabel 15 Peta Jalan Pembangunan <i>Smart Living</i> Jangka Pendek Menengah	35
Tabel 16 Peta Jalan Pembangunan <i>Smart Living</i> Jangka Panjang	39
Tabel 17 Peta Jalan Pembangunan <i>Smart Society</i> Jangka Pendek Menengah	44
Tabel 18 Peta Jalan Pembangunan <i>Smart Society</i> Jangka Panjang	48
Tabel 19 Peta Jalan Pembangunan <i>Smart Environment</i> Jangka Pendek Menengah	53
Tabel 20 Peta Jalan Pembangunan <i>Smart Environment</i> Jangka Panjang	57

1. LATAR BELAKANG

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam era globalisasi dan revolusi industri 4.0 telah mengubah cara hidup masyarakat, baik itu dalam bekerja, berinteraksi satu sama lain. Kota-kota diseluruh dunia bersaing untuk beradaptasi dan memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan kualitas hidup warganya, meningkatkan efisiensi operasional kota dan menjadi lebih kompetitif secara ekonomi. Infrastruktur yang cerdas, layanan publik yang berfungsi dengan baik dan tata kelola kota yang inklusif menjadi sangat penting. Disisi lain, solusi kreatif diperlukan untuk masalah seperti perubahan iklim, pertumbuhan penduduk yang cepat dan kebutuhan akan pembangunan berkelanjutan. Dalam hal ini *Smart City* merupakan sebuah solusi dari berbagai macam masalah yang ada di kota. Dominasi terhadap pemanfaatan teknologi dalam konsep *Smart City* menimbulkan kritik sebab menciptakan perubahan hubungan antara manusia dan alam, sehingga dibutuhkan adanya analisis dan pendekatan baru untuk membentuk hubungan psikologis yang lebih kuat dengan alam, dan perilaku yang lebih berpihak kepada lingkungan (Putra, 2019).

Dari waktu ke waktu, konsep *Smart City* telah berkembang menunjukkan bahwa untuk menciptakan kota yang lebih baik, masyarakat harus dilibatkan dan terlibat. Konsep yang mengedepankan *Smart City* yang humanis yang akan datang memberikan masyarakat peluang besar mungkin untuk mengetahui masalah dan potensi mereka, sehingga mereka dapat berpartisipasi dalam proses penentuan kebijakan, penyelesaian masalah kota, solusi masalah kota yang lebih kompleks (Faidat & Khozin, 2018). Kabupaten Buleleng yang mempunyai karakteristik pendidikan dan budaya harus bisa beradaptasi dalam perkembangan teknologi, terlebih saat ini sistem pelayanan dalam pemerintah mengedepankan pemanfaatan teknologi. Masyarakat diminta cakap akan teknologi tidak hanya cakap dalam tersebut tetapi mampu memanfaatkan dengan baik sehingga menimbulkan dampak yang positif bagi masyarakat luas dan perkembangan daerah.

Kabupaten Buleleng yang memiliki karakteristik kebudayaan yang sangat mendominasi menghubungkan antara konsep *Smart City* dengan karakteristik tersebut. Keduanya memiliki sebuah tujuan dan cita-cita dan harapan yang sama sebagaimana menciptakan masyarakat yang unggul, mengedepankan aspek pelayanan publik dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan menerapkan teknologi. Konsep *Smart City* dan misi Kabupaten Buleleng yang tentunya memiliki tujuan yang sama sehingga dapat direncanakan dan diimplementasikan dengan baik dan efektif yang melihat dari kondisi dan analisis ruang lingkup lingkungan baik dari segi masyarakat dan pemerintah.

Konsep yang terus digaungkan dalam *Smart City* pada dasarnya berfokus pada mendorong perbaikan elemen manusia untuk menjadi lebih kreatif dan aktif dalam mengembangkan kehidupan

masyarakat yang lebih sejahtera sehat, nyaman, dan aman. Inovasi yang berasal dari proses kreatif dan identifikasi aktif dapat dikumpulkan dalam masterplan *Smart City*. Di dalam sebuah dokumen masterplan *Smart City* memastikan bahwa ide tidak akan berdiri sendiri, tetapi akan menjadi bagian dari rencana implementasi yang terintegrasi dan komprehensif. Tentunya dalam masterplan juga memungkinkan setiap ide untuk terakomodasi atau memperkaya ide lainnya (Kominfo, 2021).

Buku *executive summary* ini memberikan sebuah gambaran dan acuan secara komprehensif yang berhubungan dengan pengembangan atau implementasi konsep *Smart City*, sebab dalam buku ini merupakan gambaran secara khusus tentang apa yang diusulkan dari Kabupaten Buleleng terhadap sasaran, strategi dan peta jalan pada setiap program-program *Smart City* di setiap dimensi sehingga dalam pelaksanaan nya pemerintah Kabupaten Buleleng dapat mengetahui rancangan yang sudah diusulkan dapat diimplentasikan dengan baik.

2. VISI *SMART CITY* KABUPATEN BULELENG

Dalam hal ini Kabupaten Buleleng membuat visi *Smart City* sebagaimana yang sudah disepakati melalui pelaksanaan Bimbingan Teknis 2. Adapun visi *Smart City* Kabupaten Buleleng yaitu **“Buleleng Cerdas Menuju Kerta Raharja Berlandaskan Tri Hita Karana”** visi tersebut jika dikaitkan dengan keenam konsep *Smart City*, yang mana konsep *Smart City* tersebut memberikan sebuah solusi permasalahan dalam Kabupaten Buleleng untuk kesejahteraan masyarakat dalam pelayanan, keamanan, ketertiban dan kenyamanan masyarakat yang berlandaskan dengan visi *Smart City* Kabupaten Buleleng. Visi *Smart City* Kabupaten Buleleng tersebut mengedepankan kemajuan kota yang mandiri, cerdas dan tanggap dalam menghadapi arus global yang semakin berkembang. Tentu tantangan tersebut merupakan sebuah fokus perhatian Kabupaten Buleleng dalam meningkatkan kualitas pelayanan dengan mengedepankan keenam dimensi konsep *Smart City*.

Dalam visi *Smart City* Kabupaten Buleleng mempunyai arti sebagai berikut:

1. **Buleleng Cerdas:** Mempunyai arti yaitu memiliki masyarakat yang unggul dalam pengetahuan, menerapkan teknologi secara cerdas dalam pelayanan masyarakat serta memiliki kemampuan dalam beradaptasi sesuai dengan perkembangan zaman.
2. **Menuju Kerta Raharja:** Mempunyai tatanan kehidupan yang sejahtera lahir dan batin secara seimbang, serasi adil dan merata.
3. **Berlandaskan Tri Hita Karana:** Berlandaskan hubungan yang harmonis antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan lingkungan alam dan isinya, dan manusia dengan manusia.

2.1. Misi *Smart City* Kabupaten Buleleng

Dalam hal ini jika sebuah daerah sudah menentukan visi maka dibutuhkan misi untuk menjalankan visi tersebut, adapun misi *Smart City* Kabupaten Buleleng sebagaimana sudah selaras dengan misi sebagai berikut:

Tabel 1 Misi *Smart City* Kabupaten Buleleng

No	Pernyataan Misi RPD	Pernyataan Misi <i>Smart City</i>	Dimensi <i>Smart City</i>
Misi 1	Mewujudkan masyarakat Buleleng yang unggul, kompetitif, dan bertaqwa kepada Tuhan, dengan jalan membangun sumberdaya manusia yang berkualitas, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, serta memiliki daya saing, melalui penyelenggaraan pendidikan dan pelayanan kesehatan yang berkualitas untuk semua warga masyarakat.	Mewujudkan Masyarakat Buleleng berkualitas, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi informasi, yang didukung dengan lingkungan aman dan nyaman	Misi 1, <i>Smart Society</i>
Misi 2	Mewujudkan masyarakat yang mampu memenuhi kebutuhan hidup, dengan jalan melaksanakan pembangunan bidang ekonomi untuk meningkatkan pendapatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, mengurangi pengangguran dan kemiskinan.	Mewujudkan masyarakat Buleleng yang memiliki keunggulan ekonomi dengan memanfaatkan teknologi informasi berlandaskan kearifan lokal	Misi 2, <i>Smart Economy</i>
Misi 3	Mewujudkan keamanan daerah dan masyarakat, dengan menyelenggarakan pemerintahan yang baik, memperkuat sistem keamanan, meningkatkan peran masyarakat sipil, mendorong pengarusutamaan gender, menegakkan budaya hukum dan politik, dan memantapkan pelaksanaan otonomi daerah.	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel berbasis teknologi	Misi 3, <i>Smart Governance</i>
Misi 4	Mewujudkan kebudayaan yang responsif terhadap perkembangan zaman dan lingkungan global, melalui pelestarian, pewarisan dan pengembangan nilai-nilai budaya yang dijiwai oleh agama Hindu, pemantapan kelembagaan, dan aktivitas budaya.	Mewujudkan digitalisasi pariwisata budaya yang berbasis pelestarian, pewarisan dan pengembangan nilai budaya lokal.	Misi 4, <i>Smart Branding</i>
Misi 5	Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, dengan jalan melaksanakan pembangunan yang seimbang antar lapisan masyarakat, antar sektor, dan antar wilayah, mempertahankan dan meningkatkan kemampuan lingkungan untuk	Mewujudkan tata kelola pembangunan menuju pelestarian lingkungan berbasis teknologi	Misi 5, <i>Smart Environment</i>
		Mewujudkan kualitas dan kuantitas hidup	Misi 6, <i>Smart Living</i>

No	Pernyataan Misi RPD	Pernyataan Misi <i>Smart City</i>	Dimensi <i>Smart City</i>
	menopang pembangunan, sehingga pembangunan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat saat ini dengan tidak mengurangi hak generasi berikutnya akan sumberdaya alam.	masyarakat melalui infrastruktur dan pelayanan publik berbasis teknologi informasi	

Sumber : Bimbingan Teknis Tahap 1 Kabupaten Buleleng 2023, RPD Kabupaten Buleleng 2023-2026

Berdasarkan visi dan misi *Smart City* diatas bahwa terdapat 6 misi dimensi *Smart City* yang sudah dibuat dalam bimbingan teknis dan kemudian 6 dimensi tersebut dihubungkan atau diseleraskan dengan 5 misi Kabupaten Buleleng yang mengacu dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2023-2026. Disisi lain tentu dalam pelaksanaannya memerlukan dasar hukum dari pihak pemangku kepentingan. Adapun dasar hukum yang dikeluarkan oleh Kepala Daerah yaitu Penjabat Kabupaten Buleleng tahun 2023-2026 dasar hukum tersebut berisi tentang:

1. Keputusan Bupati Buleleng Nomor 100.3.3.2/263/HK/2023 Tentang Dewan *Smart City* Kabupaten Buleleng
2. Keputusan Bupati Buleleng Nomor 100.3.3.3/264/HK/2023 Tentang Tim Pelaksana *Smart City* Kabupaten Buleleng

3. STRATEGI PEMBANGUNAN *SMART CITY*

Untuk menerapkan keenam konsep *Smart City*, strategi pembangunan *Smart City* digunakan. Strategi ini dianggap sangat penting untuk pemetaan masalah dan pencarian solusi karena mampu menyerap dan mengevaluasi data dengan baik dan cepat sebagai hasil pembelajaran. Strategi ini menekankan kebutuhan dengan menyesuaikan sumber daya di sebuah daerah, yang mengunggulkan pemecahan masalah dengan menggunakan teknologi terkini. Sebagai landasannya, keenam konsep *Smart City* akan mengidentifikasi peluang yang dapat diperbaiki untuk kemajuan di seluruh wilayah. Sebelum masuk pada strategi pembangunan *Smart City* dan peta jalan pembangunan *Smart City* daerah, berikut pengelompokkan kodefikasi yang sudah disesuaikan berdasarkan kerangka keterkaitan sasaran *Smart City* daerah dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Buleleng:

Tabel 2 Kodefikasi

Dimensi	Sub-Dimensi	Kodefikasi Sub-Dimensi	Kodefikasi Sasaran	Kodefikasi Strategi	Kodefikasi Program/Kegiatan
<i>Smart Governance</i>	Layanan Publik	G1	G1.1	G1.1.1	G1.1.1.P.1 G1.1.1.P.2
	Manajemen Birokrasi Yang Efisien	G2	G2.1	G2.1.1	G2.1.1.P.2 G2.1.1.P.2 G2.1.1.P.3
	Perancangan Kebijakan	G3	G3.1	G3.1.1	G3.1.1.P.1 G3.1.1.P.2 G3.1.1.P.3 G3.1.1.P.4 G3.1.1.P.5
<i>Smart Branding</i>	Pariwisata	B1	B1.1	B1.1.1	B1.1.1.P.1
	Kemudahan Pelaksanaan Bisnis	B2	B2.1	B2.1.1 B2.1.2	B2.1.1.P.1 B2.1.1.P.2
	Wajah (Tampilan) Kota	B3	B3.1	B3.1.1	B3.1.1.P.1
<i>Smart Economy</i>	Industri Berdaya Saing	Ec1	Ec1.1	Ec1.1.1	Ec1.1.1.P.1
	Kesejahteraan Masyarakat	Ec2	Ec2.1	Ec2.1.1	Ec2.1.1.P.1
	Transaksi Keuangan	Ec3	Ec3.1	Ec3.1.1	Ec3.1.1.P.1
<i>Smart Living</i>	Harmonisasi Tata Ruang	Lv1	Lv1.1	Lv1.1.1	Lv1.1.1.P.1
	Kesehatan	Lv2	Lv2.1	Lv2.1.1 Lv2.1.2	Lv2.1.1.P.1 Lv2.1.1.P.2 Lv2.1.1.P.3

Dimensi	Sub-Dimensi	Kodefikasi Sub-Dimensi	Kodefikasi Sasaran	Kodefikasi Strategi	Kodefikasi Program/Kegiatan
	Sarana/Prasarana Transportasi	Lv3	Lv3.1	Lv3.11	Lv3.1.1.P.1
Smart Society	Interaksi Masyarakat	S1	S1.1	S1.1.1 S1.1.2	S1.1.1.P.1 S1.1.1.P.2
	Ekosistem Belajar/ Pendidikan	S2	S2.1	S2.1.1	S2.1.1.P.1
	Keamanan Masyarakat	S3	S3.1	S3.1.1	S3.1.1.P.1
Smart Environment	Proteksi Lingkungan	En1	En1.1	En1.1.1 En1.1.2	En1.1.1.P.1
	Pengelolaan Sampah Dan Limbah	En2	En2.1	En2.1.1	En2.1.1.P.1
	Tata Kelola Energi	En3	En3.1	En3.1.1	En3.1.1.P.1

Sumber : Buku Panduan Penyusunan Masterplan *Smart City* Kementerian Komunikasi & Informatika

3.1. Strategi pembangunan *Smart Governance*

Strategi pembangunan *Smart Governance* berfokus pada upaya untuk meningkatkan layanan masyarakat dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi yang memudahkan akses ke fasilitas layanan publik. Strategi ini berusaha untuk menyelesaikan masalah yang ada di lingkungan *governance*. Selain itu, pelayanan publik harus didukung oleh reformasi birokrasi, yang dapat mengubah cara kerja untuk memberikan layanan yang lebih baik kepada masyarakat. Untuk lebih lengkap dapat dilihat pada tabel uraian sebagai berikut:

Tabel 3 Strategi *Smart Governance*

Sub-Dimensi	Sasaran	Strategi
G1 Layanan Publik	G1.1 Meningkatnya kualitas layanan publik dan melakukan integrasi NIK dengan semua jenis layanan	G1.1.1 Meningkatkan implementasi layanan publik
G2 Birokrasi	G2.1 Meningkatnya efisiensi manajemen birokrasi	G2.1.1 Meningkatkan implementasi reformasi birokrasi
G3 Perancangan Kebijakan	G3.1 Meningkatnya keterlibatan publik dalam manajemen kebijakan publik	G3.1.1 Digitalisasi penyebaran produk hukum daerah melalui JDIH dan media elektronik

Sumber : Bimbingan Teknis Tahap 2 Kabupaten Buleleng 2023

Tidak optimalnya pelayanan publik yang dirasakan masyarakat dan ketidakintegrasian beberapa layanan publik dengan layanan lainnya adalah alasan mengapa terdapat strategi untuk meningkatkan sasaran tersebut, seperti yang ditunjukkan dalam tabel di atas. Dengan memperkuat layanan administrasi kependudukan yang berbasis teknologi dan online, hal ini menjadi perhatian penting. Selanjutnya, komunikasi langsung dengan masyarakat melalui media sosial dan platform pemerintah daerah. Pemerintah daerah kemudian akan meningkatkan kapasitas birokrat untuk mendukung pelayanan publik yang efektif dan efisien sebagai penunjang layanan kepada masyarakat. Setelah kapasitas birokrat ditingkatkan, pemerintah daerah akan dapat mengajak publik untuk meningkatkan partisipasi dalam penentuan kebijakan karena kurangnya regulasi dapat mengakomodir pelayanan prima kepada masyarakat, sehingga kurang dapat membantu. Di sisi lain, peraturan yang berkaitan dengan administrasi kependudukan masih belum diterapkan kepada masyarakat.

3.2. Strategi pembangunan *Smart Branding*

Strategi pembangunan *Smart Branding* berfokus pada upaya kolaborasi dengan mempromosikan potensi Buleleng dengan mengedepankan ciri khasnya untuk menarik wisatawan domestik dan asing. Media mempromosikan Buleleng melalui kearifan lokal dengan memanfaatkan sumber daya budayanya. Selain itu, lakukan pertunjukan untuk menarik pengunjung dengan menunjukkan kerajinan tangan sebagai potensi kerajinan daerah. Untuk lebih lengkap dapat dilihat pada tabel uraian sebagai berikut:

Tabel 4 Strategi *Smart Branding*

Sub-Dimensi	Sasaran	Strategi
B1 Pariwisata	B1.1 Meningkatkan daya saing destinasi pariwisata kualitas pemasaran pariwisata, SDM pariwisata, kualitas ekonomi kreatif dan peningkatan PDRB sektor pariwisata	B1.1.1 Melakukan pertunjukan seni, budaya dan <i>ecraft</i> di destinasi wisata
B2 Daya Saing Bisnis	B2.1 Meningkatnya kualitas dan kuantitas investasi ke Kabupaten Buleleng	<p>B2.1.1 Penguatan dan pengelolaan destinasi pariwisata berbasis teknologi informasi</p> <p>B2.1.2 Memanfaatkan sarana inkubator kreatif untuk meningkatkan kualitas <i>ecraft</i></p>

Sub-Dimensi	Sasaran	Strategi
B3 Wajah (Tampilan) Kota	B3.1 Mengembangkan DTW dan Kawasan Pariwisata dan peningkatan pengembangan, dan pelestarian benda situs cagar budaya dan lembaga adat	B3.1.1 Meningkatkan kolaborasi antara Pemerintah Daerah dengan institusi pendidikan

Sumber : Bimbingan Teknis Tahap 2 Kabupaten Buleleng 2023

Tabel di atas menunjukkan bahwa ada strategi untuk mencapai sasaran tersebut. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa sektor ekonomi kreatif yang potensial di Kabupaten Buleleng belum diidentifikasi secara efektif dan belum ada sektor yang lebih inovatif dan berdaya saing. Selanjutnya, untuk menarik investor ke Kabupaten Buleleng, pengenalan sektor pariwisata harus ditingkatkan, dan juga perlu ada sinergi antara sektor kreatif dan pelaku usaha ekonomi. Tidak ada inventaris yang cukup untuk menggambarkan DTW yang ada di Kabupaten Buleleng dengan data detail tentang kondisi masing-masing DTW, jadi perlu bekerja sama dengan institusi pendidikan untuk mengembangkan DTW dan pariwisata.

3.3. Strategi pembangunan *Smart Economy*

Strategi pembangunan pada *Smart Economy* difokuskan kepada peningkatan pendapatan UMKM lokal dengan mengedepankan potensi lokal, promosi UMKM melalui digitalisasi, pemanfaatan teknologi sebagai media penjualan di *platform* media sosial serta mengajak masyarakat bertransaksi menggunakan *cashless*. Selain itu, pemerintah daerah juga berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat untuk bisa meningkatkan ekonomi dengan memberikan fasilitas lapangan pekerjaan. Untuk lebih lengkap dapat dilihat pada tabel uraian sebagai berikut:

Tabel 5 Strategi *Smart Economy*

Sub-Dimensi	Sasaran	Strategi
Ec1 Ekosistem Industri	Ec1.1 Meningkatkan sebaran industri pengolahan meningkatkan jumlah dan daya saing UMKM meningkatkan jumlah dan daya saing koperasi	Ec1.1.1 Peningkatan produk UMKM lokal yang terdigitalisasi dengan tujuan optimalisasi prososiasi dan penjualan produk
Ec2 Kesejahteraan Masyarakat	Ec2.1 Meningkatkan kuantitas, kualitas produk pertanian, perkebunan, kehutanan dan perikanan	Ec2.1.1 Peningkatan lapangan kerja

Sub-Dimensi	Sasaran	Strategi
Ec3 Ekosistem Transaksi Keuangan	Ec3.1 Meningkatkan Kemudahan berinvestasi dan membangun <i>platform</i> investasi bagi pembangunan di Kabupaten Buleleng	Ec3.1.1 Peningkatan pemasaran produk berbasis <i>cashless transaction</i>

Sumber : Bimbingan Teknis Tahap 2 Kabupaten Buleleng 2023

Tabel di atas menunjukkan bahwa terdapat strategi untuk meningkatkan sasaran tersebut. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa produktivitas UMKM masih dikategorikan rendah, yang berarti bahwa skala yang dikelola terutama berskala kecil. Selain itu, UMKM tidak memiliki akses ke permodalan yang cukup, sehingga mereka tidak dapat mengoptimalkan potensi ekonomi mereka dan tidak dapat bekerja sama dengan seluruh sektor ekonomi. Dengan peningkatan ekonomi, tidak hanya sektor UMKM saja yang mengalami peningkatan, tetapi juga ketersediaan lapangan pekerjaan yang melihat potensi untuk membuka lapangan pekerjaan. Upaya untuk meningkatkan produksi lahan pertanian, perkebunan, dan perikanan juga menjadi perhatian penting. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa pengembangan kawasan pertanian masih belum optimal, sehingga fungsi lahan pertanian telah dialihkan ke sektor non-pertanian. Selain itu, kurangnya data dan informasi pertanian yang memadai. Selain itu, masyarakat diminta untuk bertransaksi secara nontunai, menggunakan platform digital, untuk meningkatkan transaksi keuangan lokal.

3.4. Strategi pembangunan *Smart Living*

Strategi pembangunan *Smart Living* berfokus pada peningkatan kualitas pelayanan administrasi, di mana kelengkapan dokumen diperlukan, dan peningkatan kualitas layanan kesehatan, di mana penataan yang lebih menyeluruh diperlukan. Selain itu, pemerintah daerah berkonsentrasi pada pelayanan dasar yang memudahkan masyarakat untuk menangani masalah administrasi. Selanjutnya, transportasi daerah diperlukan untuk mendukung mobilitas warga. Untuk lebih lengkap dapat dilihat pada tabel uraian sebagai berikut:

Tabel 6 Strategi *Smart Living*

Sub-Dimensi	Sasaran	Strategi
Lv1 Harmonisasi Tata Ruang	Lv1.1 Merwujudkan pola ruang yang sesuai dengan peruntukan ruang	Lv1.1.1 Peningkatan konsistensi penataan ruang
Lv2 Kesehatan	Lv2.1 Meningkatnya cakupan kepesertaan PUS	Lv2.1.1 Mewujudkan pelayanan kesehatan yang berkualitas

Sub-Dimensi	Sasaran	Strategi
	ber KB dan Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Lv2.1.2 Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan dasar
Lv3 Transportasi	Lv3.1 Mewujudkan Keselamatan Transportasi	Lv3.1.1 Menambahkan armada transportasi untuk mobilitas kebutuhan masyarakat

Sumber : Bimbingan Teknis Tahap 2 Kabupaten Buleleng 2023

Pemerintah daerah pasti akan mengoptimalkan pemanfaatan ruang agar tepat guna dan berfungsi dengan baik, karena masih ada masalah pengalihan ruang yang tidak semestinya untuk fungsinya, seperti yang ditunjukkan dalam tabel di atas. Pada bidang kesehatan, pemerintah daerah bermaksud untuk meningkatkan pengembangan rumah sakit umum Singajara dan rumah sakit umum yang ada serta meningkatkan kualitas pelayanan. Rencananya adalah untuk membangun rumah sakit skala pelayanan internasional setelah melakukan penelitian untuk mengantisipasi pelayanan pada kawasan dan kawasan rencana pengembangan wilayah, serta pada tingkat puskesmas dengan skala pelayanan yang sebanding dengan wilayah Kecamatan atau beberapa Desa. Pemerintah Kabupaten Buleleng akan menambah kendaraan transportasi publik untuk meningkatkan kemudahan transportasi di daerah. Ini disebabkan oleh kendaraan pribadi dan kemacetan lalu lintas di Kabupaten Buleleng, yang menyebabkan kemacetan di pusat kota pada waktu tertentu karena kendaraan dari pinggiran dan perbatasan kota menuju perkantoran dan tempat lain.

3.5. Strategi pembangunan *Smart Society*

Strategi pembangunan *Smart Society* berfokus pada memberikan akses pendidikan kepada masyarakat. Ini dicapai dengan mendorong masyarakat untuk memiliki latar belakang pendidikan yang cukup dan memahami cara menyebarkan informasi sehingga mereka tidak terpengaruh oleh berita hoaks. Pemerintah juga mendorong masyarakat untuk mengajar anak-anak dengan dongeng untuk mendapatkan pengetahuan verbal dan perilaku, meningkatkan kualitas pembelajaran yang dimulai dari usia dini. Ini akan menghasilkan generasi yang cerdas dan sopan. Selain itu, dalam upaya menjaga ketertiban dan keamanan, pemerintah memiliki kemampuan untuk memantau kondisi lingkungan dan keadaan. Untuk lebih lengkap dapat dilihat pada tabel uraian sebagai berikut:

Tabel 7 Strategi *Smart Society*

Sub-Dimensi	Sasaran	Strategi
S1 Interaksi Masyarakat	S1.1 Meningkatkan pelayanan publik, kualitas pelayanan internet dan pengembangan aplikasi	S1.1.1 Mengajak masyarakat Buleleng untuk bersekolah S1.1.2 Menyediakan sarana informasi klarifikasi isu hoaks
S2 Ekosistem Belajar	S2.1 Meningkatkan kualitas belajar dan pendidikan di Kabupaten Buleleng	S2.1.1 Memberikan edukasi dongeng kepada anak, sesuai himbauan pemerintah daerah
S3 Keamanan Masyarakat	S3.1 Meningkatkan Keamanan dan Kenyamanan Masyarakat	S3.1.1 Tersedianya pemantauan visual

Sumber : Bimbingan Teknis Tahap 2 Kabupaten Buleleng 2023

Tabel di atas menunjukkan bahwa terdapat upaya untuk mencapai sasaran tersebut karena sumber daya manusia yang memiliki keahlian teknis dalam bidang urusan sosial dan mendiseminasi informasi yang masuk melalui media sosial, wadah, dan ruang informasi terbuka pemerintah harus menjadi bagian dari masyarakat untuk memastikan bahwa informasi tidak hilang. Selanjutnya, untuk meningkatkan kualitas pendidikan Buleleng, semua orang harus memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan berkualitas tinggi. Ini terutama perlu dilakukan pada jenjang pendidikan dasar. Nilai agama, sopan santun, toleransi, dan disiplin sangat penting dan memiliki dasar yang kuat yang dimulai sejak dini. Selain itu, pemantauan digital akan meningkatkan keamanan dan kenyamanan masyarakat karena masih kurangnya pengawasan terhadap pelaku kejahatan di jalan, yang mengakibatkan korban.

3.6. Strategi pembangunan *Smart Environment*

Pembangunan strategi pada *Smart Environment* difokuskan untuk meningkatkan kadar kualitas air dan udara kemudian bisa menjaga habitat pada sebuah lahan di perkotaan sebagaimana dengan keterbatasan ruang. Selain itu, memberikan pemahaman pengelolaan sampah yang disesuaikan dari jenis-jenis sampah yang ada kemudian sampah tersebut dapat diolah menjadi sebuah energi yang bisa dimanfaatkan. Untuk lebih lengkap dapat dilihat pada tabel uraian sebagai berikut:

Tabel 8 Strategi *Smart Environment*

Sub-Dimensi	Sasaran	Strategi
En1 Proteksi Lingkungan	En1.1 Membuat kebijakan dan penyusunan dokumen KLHS serta penyusunan dokumen RPPLH	En1.1.1 Meningkatkan kualitas air dan udara En1.1.2 Peningkatan tutupan vegetasi pada lahan perkotaan dan lahan kritis
En2 Pengelolaan Sampah dan Limbah	En2.1 Membentuk Bank Sampah Unit untuk mengurangi timbulan sampah yang masuk ke TPA serta melakukan pengolahan sampah organik dan anorganik	En2.1.1 Meningkatkan pengelolaan sampah sesuai ketentuan
En3 Tata Kelola Energi	En3.1 Melakukan inovasi tempat pengolahan sampah menjadi energi listrik dan pengolahan sampah menjadi briket	En3.1.1 Merubah sampah menjadi energi terbarukan

Sumber : Bimbingan Teknis Tahap 2 Kabupaten Buleleng 2023

Tabel di atas menunjukkan bahwa ada beberapa strategi yang digunakan untuk meningkatkan sasaran tersebut. Strategi-strategi tersebut termasuk meningkatkan kualitas kawasan lindung, menjaga ekosistem hutan dan danau, mengawasi sistem hidrologis dan pemasok air di Buleleng, dan mengelola air limbah dengan sistem setempat secara mandiri dengan menyediakan bak atau tangki septik. Selanjutnya, pemerintah daerah Buleleng dapat menangani sampah melalui kerjasama antara pemerintah daerah atau kemitraan dengan perusahaan pengelolaan sampah profesional. Selain itu, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup masih merupakan konsep teoretis dan belum sepenuhnya diterapkan. Akibatnya, fokus pemerintah daerah Buleleng saat ini adalah mengubah sampah menjadi energi yang dapat digunakan dan terbarukan. Kesadaran dan partisipasi masyarakat yang rendah masih merupakan salah satu masalahnya. Untuk mencapai hal ini, diperlukan upaya untuk meningkatkan kesadaran dan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi dan edukasi yang terus-menerus.

4. PETA JALAN PEMBANGUNAN *SMART CITY* DAERAH

Sebuah dokumen strategis yang disebut Peta jalan pembangunan *Smart City* daerah mencakup berbagai rencana, inisiatif, dan kegiatan yang bertujuan untuk mengintegrasikan teknologi informasi dan solusi inovatif ke dalam berbagai aspek kehidupan kota dengan tujuan meningkatkan kualitas hidup, meningkatkan efisiensi operasional kota, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Untuk mengembangkan *Smart City*, pemerintah daerah, sektor swasta, akademisi, komunitas, dan pihak lain yang berkepentingan harus bekerja sama. Dokumen ini memastikan bahwa semua pihak memiliki pemahaman yang sama tentang arah dan tujuan pembangunan serta memudahkan kerja sama dan koordinasi yang efektif selama pelaksanaannya.

Peta jalan pembangunan *Smart City* menggambarkan langkah-langkah strategis yang diperlukan untuk menjadikan suatu daerah atau kota menjadi kota cerdas. Untuk memastikan bahwa solusi yang ditawarkan benar-benar relevan dan berdampak positif bagi masyarakat setempat, peta jalan ini harus mempertimbangkan karakteristik unik, kebutuhan, dan tantangan yang dihadapi oleh daerah atau kota tersebut. Mungkin ada kebutuhan dan prioritas yang berbeda untuk setiap daerah atau kota, tetapi pembangunan *Smart City* umumnya bergantung pada sumber daya dan kemampuan yang dimiliki setiap daerah. Berikut merupakan rumusan tabel peta jalan pembangunan daerah pada setiap dimensi *Smart City*.

4.1. Peta Jalan Pembangunan *Smart Governance*

Peta jalan pembangunan *Smart Governance* adalah rencana strategis yang mendefinisikan visi, sasaran, langkah-langkah, dan inisiatif yang diperlukan untuk mengubah tata kelola pemerintahan menjadi lebih efisien, transparan, dan partisipatif melalui penggunaan teknologi dan inovasi. Peta jalan ini membantu pemerintah mencapai tujuan tata kelola pintar, yang berarti lahirnya lebih banyak partisipasi dalam proses pengambilan keputusan, alokasi sumber daya, dan implementasi kebijakan.

Peta jalan ini menjadi alat penting bagi pemerintah dalam menavigasi perubahan yang dibawa oleh era digital dan memastikan bahwa tata kelola pemerintahan tetap relevan, responsif, dan efisien dalam melayani kebutuhan masyarakat. Pemerintah Kabupaten Buleleng yang mengedepankan kepentingan masyarakat terus berupaya mentransformasi layanan agar terciptanya pelayanan yang cepat, cergas dan tepat. Untuk lebih detail peta jalan pembangunan daerah pada *Smart Governance* dalam jangka pendek, menengah dan jangka panjang dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 9 Peta Jalan Pembangunan *Smart Governance* Jangka Pendek Menengah

Peta Jalan Pembangunan <i>Smart Governance</i> Jangka Pendek Menengah																	
Sub-Dimensi	Strategi	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Sumbe r Dana	Leading Sector
						2024		2025		2026		2027		2028			
						Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran		
G1 Layanan Publik	G1.1.1 Meningkatny a implementasi layanan publik	G1.1.1.P.1 Pengembang an sistem pelayanan kependuduka n berbasis teknologi informasi (AKU ONLINE)	Terciptanya pelayanan kependuduk an berbasis teknologi berbasis informasi dalam bentuk aplikasi yang efektif dan efisien	10.2. persentase layanan kota yang dapat diakses dan yang dapat diminta secara daring	Pengembang an sistem pelayanan kependuduka n berbasis teknologi informasi (AKU ONLINE) untuk meningkatka n kepuasan masyarakat secara signifikan	75%	60	80%	100	85%	60	90%	60	100 %	60	APBD	Dinas Dukcapi l
		G1.1.1.P.2 Pengembang an Mal pelayanan public	Tersedianya Mal pelayan publik	5.1. persentase kontrak layanan yang menyediak an akan layanan kota yang memuat kebijakan	Pengembang an Mal Pelayanan Publik, untuk memudahkan masyarakat dalam mengurus pelayanan administrasi tidak hanya di	75%	800 0	80%	800	85%	900	90%	100 0	100 %	100 0	APBD	DPMPT S

Peta Jalan Pembangunan <i>Smart Governance</i> Jangka Pendek Menengah																	
Sub-Dimensi	Strategi	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Sumbe r Dana	Leading Sector
						2024		2025		2026		2027		2028			
						Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran		
				data terbuka	kantor pemerintahan saja												
G2 Birokrasi	G2.1.1 Meningkatkan implementasi reformasi birokrasi	G2.1.1.P.1 Program kepegawaian daerah	Indeks kepuasan ASN	10.2 Persentase layanan kota yang dapat diakses dan yang dapat diminta secara daring	Pengembangan sistem informasi ASN (SIMPEG) sebuah sistem untuk memberikan informasi terakit dengan hak dan kewajiban ASN	100 %	36	100 %	36	100 %	36	100 %	36	100 %	36	APBD, TJSLP	BPKSD M
		G2.1.1.P.2 Program pengelolaan informasi dan komunikasi publik	Nilai keterbukaan informasi publik	18.3. Persentase area kota yang dicakup oleh konektivitas Internet yang disediakan oleh kota	Peningkatan efisiensi surat menyurat (e-surat) surat yang berbasis elektronik agar memudahkan masyarakat	94, 66%	210 0	95, 41%	210 0	96, 16%	225 0	96, 91%	235 0	96, 91%	245 0	APBD	Kominfo santi

Peta Jalan Pembangunan <i>Smart Governance</i> Jangka Pendek Menengah																	
Sub-Dimensi	Strategi	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Sumbe r Dana	Leading Sector
						2024		2025		2026		2027		2028			
						Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran		
		G2.1.1.P.3 Program pengelolaan aplikasi dan informatika	Nilai sistem pemerintah berbasis elektronik (SPBE)	10.2. persentase layanan kota yang dapat diakses dan yang dapat diminta secara daring	Pengintegrasi an aplikasi di Pemkab Buleleng (data center) Sebuah sistem integrasi agar memudahkan dalam pencarian data yang terpusat	3,1 %	540 2	3,2 %	565 0	3,3 %	575 0	3,4 %	600 0	3,5 %	625 0	APBD	Kominf o santi
G3 Perancang an Kebijakan	G3.1.1 Digitalisasi penyebarluas an produk hukum daerah melalui JDIH dan media elektronik	G3.1.1.P.1 Pengembang an fitur untuk rancangan produk hukum daerah pada JDIH G3.1.1.P.2 pelatihan sumber daya manusia G3.1.1.P.3	Jumlah kunjungan daring tahunan ke website JDIH dan media elektronik lainnya	10.1. jumlah kunjungan daring tahunan ke portal data terbuka kota per 100.000 penduduk	Digitalisasi penyebarluas an produk hukum daerah melalui JDIH dan media elektronik lainnya	100 %	328	100 %	338	100 %	309	100 %	408	100 %	408	APBD	Bagian Hukum Setda Bulelen g

Peta Jalan Pembangunan <i>Smart Governance</i> Jangka Pendek Menengah																	
Sub-Dimensi	Strategi	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Sumbe r Dana	Leading Sector
						2024		2025		2026		2027		2028			
						Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran		
		SK Sekda tentang Tim pengelola sistem JDIH G3.1.1.P.4 Perbup tentang JDIH G3.1.1.P.5 SOP pengelolaan JDIH															

Sumber : Bimbingan Teknis Tahap 2 Kabupaten Buleleng 2023

Tabel 10 Peta Jalan Pembangunan *Smart Governance* Jangka Panjang

Peta Jalan Pembangunan <i>Smart Governance</i> Jangka Panjang																	
Sub-Dimensi	Strategi	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Sumbe r Dana	Leading Sector
						2029		2030		2031		2032		2033			
						Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran		
G1 Layanan Publik	G1.1.1 Meningkatnya implementasi layanan publik	G1.1.1.P.1 Pengembang an sistem pelayanan kependuduka n berbasis teknologi informasi (AKU ONLINE)	Terciptanya pelayanan kependuduk an berbasis teknologi berbasis informasi dalam bentuk aplikasi yang efektif dan efisien	10.2. persentase layanan kota yang dapat diakses dan yang dapat diminta secara daring	Pengembang an sistem pelayanan kependuduka n berbasis teknologi informasi (AKU ONLINE) untuk meningkatka n kepuasan masyarakat secara signifikan	75%	66,6	80%	66,6	85%	66,6	90%	66,6	100 %	66,6	APBD	Dinas Dukcapi l
		G1.1.1.P.2 Pengembang an Mal pelayanan public	Tersedianya Mal pelayan publik	5.1. persentase kontrak layanan yang menyediak an akan layanan kota yang memuat kebijakan	Pengembang an Mal Pelayanan Publik, untuk memudahkan masyarakat dalam mengurus pelayanan administrasi tidak hanya di	100 %	100 0	100 %	100 0	100 %	100 0	100 %	100 0	100 %	100 0	APBD/ BKK Provin si	DPMPT S P

Peta Jalan Pembangunan <i>Smart Governance</i> Jangka Panjang																	
Sub-Dimensi	Strategi	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Sumbe r Dana	Leading Sector
						2029		2030		2031		2032		2033			
						Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran		
				data terbuka	kantor pemerintahan saja												
G2 Birokrasi	G2.1.1 Meningkatkan implementasi reformasi birokrasi	G2.1.1.P.1 Program kepegawaian daerah	Indeks kepuasan ASN	10.2. persentase layanan kota yang dapat diakses dan yang dapat diminta secara daring	Pengembangan sistem informasi ASN (SIMPEG) sebuah sistem untuk memberikan informasi terakit dengan hak dan kewajiban ASN	100 %	36	100 %	36	100 %	36	100 %	36	100 %	36	APBD, TJSLP	BPKSD M
		G2.1.1.P.2 Program pengelolaan informasi dan komunikasi publik	Nilai keterbukaan informasi publik	18.3. persentase area kota yang dicakup oleh konektivitas internet yang disediakan oleh kota	Peningkatan efisiensi surat menyurat (e-surat) Sistem surat yang berbasis elektronik agar memudahkan masyarakat	96, 91%	245 0	96, 96%	250 0	97, 01%	255 0	97, 06%	260 0	97, 11%	265 0	APBD	Kominfo santi

Peta Jalan Pembangunan <i>Smart Governance</i> Jangka Panjang																	
Sub-Dimensi	Strategi	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Sumbe r Dana	Leading Sector
						2029		2030		2031		2032		2033			
						Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran		
		G2.1.1.P.3 Program pengelolaan aplikasi dan informatika	Nilai sistem pemerintah n berbasis elektronik (SPBE)	10.2. persentase layanan kota yang dapat diakses dan yang dapat diminta secara daring	Pengintegrasi an aplikasi di Pemkab Buleleng (data center) Sebuah sistem integrasi agar memudahkan dalam pencarian data yang terpusat	3,5 %	625 0	3,6 %	650 0	3,7 %	680 0	3,8 %	710 0	3,9 %	750 0	APBD	Kominf o santi
G3 Perancang an Kebijakan	G3.1.1 Digitalisasi penyebarluas an produk hukum daerah melalui JDIH dan media elektronik	G3.1.1.P.1 pengembang an fitur untuk rancangan produk hukum daerah pada JDIH G3.1.1.P.2 pelatihan sumber daya manusia	Jumlah kunjungan daring tahunan ke website JDIH dan media elektronik lainnya	10.1. jumlah kunjungan daring tahunan ke portal data terbuka kota per 100.000 penduduk	Digitalisasi penyebarluas an produk hukum daerah melalui JDIH dan media elektronik lainnya	100 %	358	100 %	360	100 %	309	100 %	408	100 %	408	APBD	Bagian Hukum Setda Bulelen g

Peta Jalan Pembangunan <i>Smart Governance</i> Jangka Panjang																	
Sub-Dimensi	Strategi	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Sumber Dana	Leading Sector
						2029		2030		2031		2032		2033			
						Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran		
		G3.1.1.P.3 SK Sekda tentang Tim pengelola sistem JDIH															
		G3.1.1.P.4 Perbup tentang JDIH															
		G3.1.1.P.5 SOP pengelolaan JDIH															

Sumber : Bimbingan Teknis Tahap 2 Kabupaten Buleleng 2023

Peta jalan pembangunan *Smart Governance* dibuat sebagai landasan implementasi untuk penerapan *Smart City*. Peta jalan ini menggabungkan inovasi dengan indikator SNI dan kinerja, dan setiap tahun menetapkan target dan anggaran kinerja untuk mengembangkan inovasi. Selain itu, sumber dana harus disesuaikan dengan kebutuhan program inovasi, dan orang yang bertanggung jawab atas program juga harus memenuhi kebutuhan tersebut. Peta jalan ini mencakup jangka pendek, menengah, dan jangka panjang. Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah inovasi berpengaruh dan apakah harapannya dapat bertahan dengan program yang sudah ada. Strategi *Smart Governance* terdiri dari program dan kegiatan. Dalam hal ini, peta jalan *Smart Governance* berfokus pada subdimensi layanan publik, yang berarti peningkatan pelaksanaan layanan publik; subdimensi efisiensi manajemen birokrasi, yang berarti peningkatan pelaksanaan reformasi birokrasi; dan subdimensi efisiensi kebijakan publik, yang berarti peningkatan keterlibatan masyarakat dalam manajemen kebijakan publik. Target kinerja dan anggaran meningkat setiap tahun karena dari tahap awal hingga implementasi diperlukan tahap pencapaian. Jadi, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus memiliki target prioritas capaian tahunan. Target ini dibuat setiap tahun untuk memberi tahu mereka apa yang harus dilakukan agar program dapat beroperasi dengan baik.

4.2. Peta Jalan Pembangunan *Smart Branding*

Peta jalan pembangunan *Smart Branding* menunjukkan langkah ke depan untuk menerapkan inovasi *Smart Branding* yang dibuat berdasarkan kebutuhan daerah. Sebuah kerangka acuan kinerja yang akan dilaksanakan diberikan oleh pendekatan *Smart Branding* pada sektor pariwisata dan kearifan lokal. Peta jalan *Smart Branding* ini mengambil visi misi *Smart City* wilayah tersebut untuk menampilkan potensinya, termasuk sumber daya alam dan atraksi pariwisata. Untuk mengidentifikasi potensi dengan tepat sasaran dan memiliki dampak positif pada ekonomi pariwisata dan kearifan lokal, roadmap yang baik dan efektif harus dibuat. Pemangku kebijakan harus memprioritaskan penggunaan teknologi untuk menunjukkan potensi Buleleng sehingga menarik wisatawan, turis lokal, dan investor.

Maka dari itu, peta jalan *Smart Branding* dapat memberikan ruang kepada pemangku kebijakan agar mengetahui potensi-potensi yang dapat diidentifikasi dan perlu pengembangan lebih lanjut. Untuk lebih detail peta jalan pembangunan *Smart Branding* daerah dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 11 Peta Jalan Pembangunan *Smart Branding* Jangka Pendek Menengah

Peta Jalan Pembangunan <i>Smart Branding</i> Jangka Pendek Menengah																	
Sub-Dimensi	Strategi	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Sumber Dana	Leading Sector
						2024		2025		2026		2028		2029			
						Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran		
B1 Pariwisata	B1.1.1 Melakukan pertunjukan seni, budaya dan ecraft di destinasi wisata	B1.1.1.P.1 PAS (Pekan Apresiasi Seni)	Jumlah kelompok seni yang dipentaskan	14.1.Persentase layanan rekreasi public yang dapat dipesan secara daring	PAS (Pekan Apresiasi Seni) sebuah kegiatan pertunjukkan budaya yang dilakukan di hari-hari penting	100 %	1200	100 %	1200	100 %	1200	100 %	1200	100 %	1200	APBD, Non APBD	Dinas Pariwisata dan Dinas Kebudayaan
B2 Daya Saing Bisnis	B2.1.1 Penguatan dan pengelolaan destinasi pariwisata berbasis teknologi informasi	B2.1.1.P.1 Visiting Buleleng	Jumlah kunjungan platform pariwisata Buleleng	14.1.Persentase layanan rekreasi public yang dapat dipesan secara daring	(Visiting Buleleng) sebuah aplikasi yang berisi informasi mengenai informasi pariwisata dll	100 %	200	100 %	300	100 %	400	100 %	500	100 %	600	APBD	Dinas Pariwisata
	B2.1.2 memanfaatkan sarana	B2.1.1.P.2 KRESID	Jumlah ecraft yang di	14.1.Persentase layanan rekreasi	KRESIDA EXPO (Kreasi	100 %	100	100 %	100	100 %	100	100 %	100	100 %	100	APBD	Badan Penelitian, Pengembang

Peta Jalan Pembangunan <i>Smart Branding</i> Jangka Pendek Menengah																	
Sub-Dimensi	Strategi	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Sumber Dana	Leading Sector
						2024		2025		2026		2028		2029			
						Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran		
	incubator kreatif untuk meningkatkan kualitas ecraft	A EXPO (Kreasi Inovasi Daerah Expo)	fasilitasi HKI	public yang dapat dipesan secara daring	Inovasi Daerah Expo) sebuah kegiatan bazar yang memperjual belikan produk-produk kearifan lokal												an dan Inovasi Daerah
B3 Wajah (Tampilan) Kota	B3.1.1 Meningkatkan kolaborasi antara pemerintah daerah dengan institusi pendidikan	B3.1.1.P.1 KRESIDA (Kreasi Inovasi Daerah)	Jumlah riset dan inovasi daerah terkait pendidikan	Persentase layanan rekreasi public yang dapat dipesan secara daring	KRESIDA (Kreasi Inovasi Daerah) sebuah kegiatan yang dilakukan dalam menciptakan inovasi di bidang pariwisata	100 %	100	100 %	100	100 %	100	100 %	100	100 %	100	APBD	Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah

Sumber : Bimbingan Teknis Tahap 2 Kabupaten Buleleng 2023

Tabel 12 Peta Jalan Pembangunan Smart Branding Jangka Panjang

Peta Jalan Pembangunan <i>Smart Branding</i> Jangka Panjang																	
Sub-Dimensi	Strategi	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Sumb er Dana	Leading Sector
						2029		2030		2031		2032		2033			
						Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran		
B1 Pariwisata	B1.1.1 Melakukan pertunjukk an seni, budaya dan ecraft di destinasi wisata	B1.1.1.P.1 PAS (Pekan Apresiasi Seni)	Jumlah kelompok seni yang dipentask an	14.1.Persent ase layanan rekreasi public yang dapat dipesan secara daring	PAS (Pekan Apresiasi Seni) sebuah kegiatan pertunjukk an budaya yang dilakukan di hari-hari penting	100 %	130 0	100 %	130 0	100 %	130 0	100 %	130 0	100 %	130 0	APBD, Non APBD	Dinas Pariwisata dan Dinas Kebudayaan
B2 Daya Saing Bisnis	B2.1.1 Penguatan dan pengelolaan destinasi pariwisata berbasis teknologi informasi kualitas ecraft	B2.1.1.P.1Visiti ng Buleleng	Jumlah kunjunga n platform pariwisata Buleleng	14.1.Persent ase layanan rekreasi public yang dapat dipesan secara daring	(Visiting Buleleng) sebuah aplikasi yang berisi informasi memgenai informasi pariwisata dll	100 %	700	100 %	700	100 %	700	100 %	700	100 %	700	APBD	Dinas Pariwisata
	B2.1.2 memanfaatk	B2.1.1.P.2 KRESIDA	Jumlah ecraft	14.1.Persent ase layanan	KRESIDA EXPO	100 %	100	100 %	100	100 %	100	100 %	100	100 %	100	APBD	Badan Penelitian,

Peta Jalan Pembangunan <i>Smart Branding</i> Jangka Panjang																	
Sub-Dimensi	Strategi	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Sumb er Dana	Leading Sector
						2029		2030		2031		2032		2033			
						Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran		
	an sarana incubartor creativ untuk meningkatk an kualitas ecraft	EXPO (Kreasi Inovasi Darah Expo)	yang di fasilitasi HKI	rekreasi public yang dapat dipesan secara daring	(Kreasi Inovasi Darah Expo) sebuah kegiatan bazar yang memperjua l belikan produk-produk kearifan lokal												Pengembang an dan Inovasi Daerah
B3 Wajah (Tampilan) Kota	B3.1.1 Meningkatkan kolaborasi anantara pemerintah daerah dengan institusi pendidikan	B3.1.1.P.1 KRESIDA (Kreasi Inovasi Daerah)	Jumlah riset dan inovasi daerah terkait pendidika n	14.1.Persent ase layanan rekreasi public yang dapat dipesan secara daring	KRESIDA (Kreasi Inovasi Daerah) sebuah kegiatan yang dilakukan dalam menciptak an inovasi dibidang pariwisata	100 %	100	100 %	100	100 %	100	100 %	100	100 %	100	APBD	Badan Penelitian, Pengembang an dan Inovasi Daerah

Sumber : Bimbingan Teknis Tahap 2 Kabupaten Buleleng 2023

Peta jalan pembangunan *Smart Branding* ini dirancang untuk menjadi landasan implementasi *Smart Branding* di Kabupaten Buleleng. Fokus utama dalam pengembangan dan optimalisasi yang ada di Kabupaten Buleleng adalah sektor pariwisata dan kearifan lokal. Indikator kinerja daerah dan SNI yang dihubungkan, yang disesuaikan dengan kondisi lingkungan saat ini, menjadi dasar peta jalan ini. Peta jalan pembangunan branding pintar menghasilkan strategi untuk masing-masing sub-dimensi branding pintar. Sub-dimensi pariwisata berfokus pada menampilkan seni dan budaya ecraft di destinasi wisata; sub-dimensi kemudahan pelaksanaan bisnis yang berfokus pada penguatan dan pengelolaan destinasi pariwisata melalui TI; dan sub-dimensi kemudahan bisnis yang berfokus pada penggunaan TI sebagai inkubator kreatif untuk meningkatkan ecraft. Kemudian, yang terpenting, adalah bagaimana membuat destinasi wisata menjadi lebih Strategi *Smart Branding* dimulai dengan rencana jangka pendek, menengah, dan jangka panjang. Setiap tahun, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Buleleng bertanggung jawab untuk mencapai tujuan sektor utama. Wisatawan melihat Kabupaten Buleleng di media sosial dan platform lainnya, yang menjadikan pariwisata menarik. Oleh karena itu, penggunaan teknologi dalam *Smart Branding* harus dioptimalkan.

4.3. Peta Jalan Pembangunan *Smart Economy*

Peta jalan pembangunan *Smart Economy* berfokus pada visi dan sasaran konsep *Smart City* dan menjelaskan bagaimana menerapkannya untuk meningkatkan ekonomi Kabupaten Buleleng. Peta jalan ini bertujuan untuk memberikan arahan dan panduan kepada stakeholder tentang bagaimana merespon perubahan teknologi dan global. Memberikan alur pelaksanaan untuk ekonomi pintar karena ada tujuan utama yang akan dicapai. Sangat penting untuk memperhatikan peningkatan produktivitas dan penciptaan lapangan kerja baru karena ini adalah inti dari sektor ekonomi yang dapat meningkatkan pendapatan daerah dan berdampak langsung pada masyarakat.

Peta jalan ini akan memberikan rumusan dalam pelaksanaan sesuai dengan program yang sudah dirumuskan. Untuk lebih detail dapat dilihat dalam tabel *Smart Economy* sebagai berikut:

Tabel 13 Peta Jalan Pembangunan *Smart Economy* Jangka Pendek Menengah

Peta Jalan Pembangunan <i>Smart Economy</i> Pendek Menengah																	
Sub-Dimensi	Strategi	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Sumbe r Dana	Leading Sector
						2024		2025		2026		2027		2028			
						Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran		
Ec1 Ekosistem Industri	Ec1.1.1 Peningkata n Produk UMKM Lokal yang terdigitalisa si dengan tujuan optimalisas i dan penjualan produk	Ec1.1.1.P.1 Peningkatan UMKM yang berdaya saing	Jumlah UMKM yang mendapat pendamping an dan pelatihan	20.3. persentase luas tanah kota yang dicakup oleh sistem pemetaan pemasok makanan daring	Pengembang an Pusat Layanan terpadu (PLUT UMKM) sebuah pengembang an kapasitas bagi pelaku UMKM untuk bisa meningkatka n pendapatan	100 %	10 0	150 %	11 0	200 %	12 0	250 %	13 0	130 %	30 0	APBD/ APBN	DISDAG PRINKOPUK M
Ec2 Kesejahtera an Masyarakat	Ec2.1.1 Peningkata n lapangan kerja	Ec2.1.1.P.1 Peningkatan kewirausaha an	Terwujudny a peningkatan kesejahteraa n masyarakat	5.3. persentase tenaga kerja yang bekerja di sektor teknologi informasi dan komunika si (TIK)	Peningkatan kewirausahaa n (SIAP KERJA) sebuah inovasi untuk memberikan perbekalan menghadapi dunia kerja	14 pake t Pela- tihan	50 0	15 pake t	55 0	17 pake t	56 0	18 pake t	60 0	20 pake t	65 0	APBD/ APBN	DISNAKER

Peta Jalan Pembangunan <i>Smart Economy</i> Pendek Menengah																	
Sub-Dimensi	Strategi	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Sumbe r Dana	Leading Sector
						2024		2025		2026		2027		2028			
						Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran		
Ec3 Ekosistem Transaksi Keuangan	Ec3.1.1 Peningkata n pemsaran produk berbasis <i>cashless Transaction</i>	Ec3.1.1.P.1 Peningkatan penggunaan transaksi Non tunai di semua sektor	Peningkatan jumlah layanan pembayaran <i>cashless transaction</i>	9.2. persentase pembayar an ke kota yang dibayar secara elektronik berdasarka n faktur elektronik	Gebyar Penggunaan QRIS untuk menekan penggunaan uang kertas di kalangan masyarakat	10 ribu	15 0	15 irbu	20 0	20 ribu	20 0	25 ribu	20 0	30 ribu	20 0	APBD	BPKAD/ BANK BPD

Sumber : Bimbingan Teknis Tahap 2 Kabupaten Buleleng 2023

Tabel 14 Peta Jalan Pembangunan *Smart Economy* Jangka Panjang

Peta Jalan Pembangunan <i>Smart Economy</i> Jangka Panjang																	
Sub-Dimensi	Strategi	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Sumbe r Dana	Leading Sector
						2029		2030		2031		2032		2033			
						Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran		
Ec1 Ekosistem Industri	Ec1.1.1 Peningkata n Produk UMKM Lokal yang terdigitalisa si dengan tujuan optimalisas i dan penjualan produk	Ec1.1.1.P.1 Peningkatan UMKM yang berdaya saing	Jumlah UMKM yang mendapat pendamping an dan pelatihan	20.3. persentase luas tanah kota yang dicakup oleh sistem pemetaan pemasok makanan daring	Pengembang an Pusat Layanan terpadu (PLUT UMKM) sebuah pengembang an kapasitas bagi pelaku UMKM untuk bisa meningkatka n pendapatan	100 %	10 0	150 %	11 0	200 %	12 0	250 %	13 0	130 %	30 0	APBD/ APBN	DISDAG PRINKOPUK M
Ec2 Kesejahtera an Masyarakat	Ec2.1.1 Peningkata n lapangan kerja	Ec2.1.1.P.1 Peningkatan kewirausaha an	Terwujudny a peningkatan kesejahteraa n masyarakat	5.3. persentase tenaga kerja yang bekerja di sektor teknologi informasi dan komunika si (TIK)	Peningkatan kewirausahaa n (SIAP KERJA) sebuah inovasi untuk memberikan perbekalan dalam menghadapi dunai kerja	14 pake t Pela- tihan	50 0	15 pake t	55 0	17 pake t	56 0	18 pake t	60 0	20 pake t	65 0	APBD/ APBN	DISNAKER

Peta Jalan Pembangunan <i>Smart Economy</i> Jangka Panjang																	
Sub-Dimensi	Strategi	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Sumbe r Dana	Leading Sector
						2029		2030		2031		2032		2033			
						Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran		
Ec3 Ekosistem Transaksi Keuangan	Ec3.1.1 Peningkata n pemasaran produk berbasis <i>cashless Transaction</i>	Ec3.1.1.P.1 Peningkatan penggunaan transaksi Non tunai di semua sektor	Peningkatan jumlah layanan pembayaran <i>cashless transaction</i>	9.2. persentase pembayar an ke kota yang dibayar secara elektronik berdasarka n faktur elektronik	Gebyar Penggunaan QRIS untuk menekan penggunaan uang kertas di kalangan masyarakat	10 ribu	15 0	15 irbu	20 0	20 ribu	20 0	25 ribu	20 0	30 ribu	20 0	APBD	BPKAD/ BANK BPD

Sumber : Bimbingan Teknis Tahap 2 Kabupaten Buleleng 2023

Peta jalan pembangunan ekonomi pintar ini dirancang untuk menunjukkan bagaimana menerapkan *Smart City*, yaitu *Smart Economy* di Kabupaten Buleleng. Fokus utama dari peta jalan ini adalah untuk meningkatkan dan mempromosikan UMKM dan menciptakan lapangan kerja. Peta jalan ini dirancang untuk jangka waktu pendek, menengah, dan jangka panjang, dan mencakup capaian kinerja dan anggaran yang sudah dibuat setiap tahunnya. Setelah mempertimbangkan keadaan sebenarnya di Kabupaten Buleleng, strategi ini dirancang untuk memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat dan daerah.

4.4. Peta Jalan Pembangunan *Smart Living*

Peta jalan pembangunan *Smart Living* menekankan peningkatan kualitas hidup melalui integrasi teknologi dan inovasi dalam bidang kehidupan sehari-hari seperti perumahan, transportasi, kesehatan. Peta jalan pembangunan *Smart Living* adalah kumpulan rencana strategis yang mencakup berbagai tindakan, inisiatif, dan aksi yang dimaksudkan untuk mengubah cara hidup masyarakat ke arah yang lebih cerdas dengan memanfaatkan teknologi, inovasi, dan solusi berkelanjutan. Adapun tujuannya adalah untuk memberikan arahan kepada pemangku kebijakan untuk bisa memanfaatkan teknologi dan inovasi dalam menciptakan lingkungan yang baik. Peta jalan pada *Smart Living* mengacu visi misi *Smart City* Kabupaten Buleleng sehingga inovasi yang dibuat sesuai dengan jalan dari visi misi tersebut.

Peta jalan ini dibuat berdasarkan kondisi yang berada di Kabupaten Buleleng. Maka untuk lebih detailnya pada peta jalan *Smart Branding* dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 15 Peta Jalan Pembangunan *Smart Living* Jangka Pendek Menengah

Peta Jalan Pembangunan <i>Smart Living</i> Jangka Pendek Menengah																	
Sub-Dimensi	Strategi	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Sumbe r Dana	Leading Sector
						2024		2025		2026		2027		2028			
						Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran		
Lv1 Harmonisa si Tata Ruang	Lv1.1.1 Peningkatan konsistensi penataan ruang	Lv1.1.1.P.1 Program pengembanga n perumahan, program Kawasan permukiman dan program perumahan dan Kawasan permukiman kumuh	1. persentase rumah korban bencana alam 2. persentase penanganan Kawasan kumuh 3. persentase penanganan RTLH diluar Kawasan kumuh	21.4. persentase populasi kota yang hidup dalam kepadatan populasi sedang hingga tinggi	Sipermata (sistem informasi perumaha n kawasan pemukima n dan pertanaha n) sebuah sistem untuk memantau pemukima n dan pertanaha n	100 %	240 0	100 %	240 0	100 %	250 0	100 %	250 0	100 %	250 0	APBD	Disper- kimta
Lv2 Kesehatan	Lv2.1.1 Mewujudkan pelayanan kesehatan yang berkualitas	Lv2.1.1.P.1 Pembinaan keluarga berencana (KB)	Persentase peserta KB aktif (PA) metode kontrasepsi jangka	11.1 persentase populasi yang masuk dalam file Kesehatan	Mobil unit pelayanan KB (MULYA KB) mobil layanan pasien	90%	500	95%	510	91%	520	91%	530	92%	540	APBD	Dinas P2KBP3 A

Peta Jalan Pembangunan <i>Smart Living</i> Jangka Pendek Menengah																	
Sub-Dimensi	Strategi	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Sumbe r Dana	Leading Sector
						2024		2025		2026		2027		2028			
						Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran		
	Lv2.1.2 Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan dasar		Panjang (MJKP)	terpadu daring yang dapat diakses oleh penyedia layanan kesehatan	untuk kerumah sakit												
		Lv2.1.1.P.2 Pelayanan Kesehatan online (Yan Kesi Buleleng)	Persentase masyarakat yang membentuk pelayanan Kesehatan secara online dilayani dengan baik	11.2. jumlah janji temu medis tahunan yang dilakukan melalui jarak jauh per 100.000 penduduk	Pelayanan Kesehatan online (Yan Kesi Buleleng) Merupakan sebuah layanan online yang bisa diakses selama 24 jam oleh masyarakat	100 %	250	100 %	280	100 %	290	100 %	300	100 %	310	APBD	Dinkes
		Lv2.1.1.P.3 Rekam medis terintegrasi	Persentase rekam medis yang dikelola	11.1. persentase populasi kota yang	Rekam medis terintegrasi (ERIM)	100 %	250	100 %	270	100 %	300	100 %	310	100 %	320	APBD	Dinkes

Peta Jalan Pembangunan <i>Smart Living</i> Jangka Pendek Menengah																	
Sub-Dimensi	Strategi	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Sumbe r Dana	Leading Sector
						2024		2025		2026		2027		2028			
						Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran		
			secara elektronik	masuk dalam file Kesehatan terpadu daring yang dapat diakses oleh penyedia layanan kesehatan	sebuah sistem data rumah sakit yang tergabung dengan riwayat penyakit pasien sebelumnya												
Lv3 Transportasi	Lv3.1.1 Menambahkan armada transportasi untuk mobilitas kebutuhan masyarakat	Lv3.1.1.P.1 Terlaksananya peningkatan sarana, prasarana dan fasilitas perhubungan	Persentase ketersediaa n prasarana dan fasilitas perhubungan	19.12. persentase rute angkutan umum dengan konektivitas internet yang disediakan kota dan/atau dikelola untuk komuter	layanan jas antar jemput sekolah Buleleng gratis dengan rute online (JAS Buleleng Gratis) sebuah layanan antar jemput	100 %	40	100 %	50	100 %	100	100 %	110	100 %	110	APBD CSR	Dishub

Peta Jalan Pembangunan <i>Smart Living</i> Jangka Pendek Menengah																	
Sub-Dimensi	Strategi	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Sumbe r Dana	Leading Sector
						2024		2025		2026		2027		2028			
						Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran		
					bagi anak sekolah												

Sumber : Bimbingan Teknis Tahap 2 Kabupaten Buleleng 2023

Tabel 16 Peta Jalan Pembangunan *Smart Living* Jangka Panjang

Peta Jalan Pembangunan <i>Smart Living</i> Jangka Panjang																	
Sub-Dimensi	Strategi	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Sumbe r Dana	Leading Sector
						2029		2030		2031		2032		2033			
						Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran		
Lv1 Harmonisa si Tata Ruang	Lv1.1.1 Peningkatan konsistensi penataan ruang	Lv1.1.1.P.1 Program pengembanga n perumahan, program Kawasan permukiman dan program perumahan dan Kawasan permukiman kumuh	1. persentase rumah korban bencana alam 2. persentase penanganan Kawasan kumuh 3. persentase penanganan RTLH diluar Kawasan kumuh	21.4. persentase populasi kota yang hidup dalam kepadatan populasi sedang hingga tinggi	Sipermata (sistem informasi perumaha n kawasan pemukima n dan pertanaha n) sebuah sistem untuk memantau pemukima n dan pertanaha n	100 %	240 0	100 %	240 0	100 %	250 0	100 %	250 0	100 %	250 0	APBD	Disper- kimta
Lv2 Kesehatan	Lv2.1.1 Mewujudkan pelayanan Kesehatan yang berkualitas	Lv2.1.1.P.1 Pembinaan keluarga berencana (KB)	Persentase peserta KB aktif (PA) metode kontrasepsi jangka	11.1 persentase populasi yang masuk dalam file Kesehatan	Mobil unit pelayanan KB (MULYA KB) mobil layanan pasien	100 %	950	100 %	960	100 %	970	100 %	980	100 %	990	APBD	Dinas P2KBP3 A

Peta Jalan Pembangunan <i>Smart Living</i> Jangka Panjang																	
Sub-Dimensi	Strategi	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Sumbe r Dana	Leading Sector
						2029		2030		2031		2032		2033			
						Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran		
	Lv2.1.2 Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan dasar		Panjang (MJKP)	terpadu daring yang dapat diakses oleh penyedia layan kesehatan	untuk kerumah sakit												
		Lv2.1.1.P.2 Pelayanan Kesehatan online (Yan Kesi Buleleng)	Persentase masyarakat yang membentuk pelayanan Kesehatan secara online dilayani dengan baik	11.2. jumlah janji temu medis tahunan yang dilakukan melalui jarak jauh per 100.000 penduduk	Pelayanan Kesehatan online (Yan Kesi Buleleng) Merupaka n sebuah layanan online yang bisa diakses selama 24 jam oleh masyaraka t	100 %	530	100 %	530	100 %	530	100 %	530	100 %	530	APBD	Dinkes
		Lv2.1.1.P.3 Rekam medis terintegrasi	Persentase rekam medis yang terkelola	11.1. persentase populasi kota yang	Rekam medis terintegrasi (ERIM)	100 %	150	100 %	150	100 %	150	100 %	150	100 %	150	APBD	Dinkes

Peta Jalan Pembangunan <i>Smart Living</i> Jangka Panjang																	
Sub-Dimensi	Strategi	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Sumbe r Dana	Leading Sector
						2029		2030		2031		2032		2033			
						Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran		
			secara elektronik	masuk dalam file Kesehatan terpadu daring yang dapat diakses oleh penyedia layanan kesehatan	sebuah sistem data rumah sakit yang tergabung dengan riwayat penyakit pasien sebelumnya												
Lv3 Transportasi	Lv3.1.1 Menambahkan armada transportasi untuk mobilitas kebutuhan masyarakat	Lv3.1.1.P.1 Terlaksananya peningkatan sarana, prasarana dan fasilitas perhubungan	Persentase ketersediaan prasarana dan fasilitas perhubungan	19.12. persentase rute angkutan umum dengan konektivitas internet yang disediakan kota dan/atau dikelola untuk komuter	1. layanan jasa antar jemput sekolah Buleleng gratis dengan rute online (JAS Buleleng Gratis) sebuah layanan antar jemput	100 %	210	100 %	220	100 %	230	100 %	240	100 %	250	APBD CSR	Dishub

Peta Jalan Pembangunan <i>Smart Living</i> Jangka Panjang																	
Sub-Dimensi	Strategi	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Sumbe r Dana	Leading Sector
						2029		2030		2031		2032		2033			
						Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran		
					bagi anak sekolah												

Sumber : Bimbingan Teknis Tahap 2 Kabupaten Buleleng 2023

Peta jalan pembangunan *Smart Living* dirangkai untuk memaksimalkan program inovasi yang sudah dibuat berdasarkan kebutuhan kemajuan dan pengembangan *Smart Living*. Peta jalan ini menggambarkan ritme tahunan dengan target kinerja tertentu untuk pencapaian. Selanjutnya, indikator SNI yang sesuai digunakan untuk menghubungkan strategi, program, dan indikator kinerja. Ini membentuk dasar untuk kebijakan inovasi. Peta jalan pembangunan *Smart Living* berfokus pada subdimensi berikut: harmonisasi tata ruang, yang berarti meningkatkan konsistensi penataan ruang; sarana dan promosi kesehatan, yang berarti meningkatkan derajat kesehatan masyarakat; dan promosi transportasi, yang berarti meningkatkan akses ke sarana dan prasarana. Pemerintah Kabupaten Buleleng sudah melakukan penelitian khusus untuk ketiga strategi tersebut, yang disesuaikan dengan kebutuhan daerah. Untuk mengembangkan program perumahan di kawasan permukiman kumuh, tata ruang harus disesuaikan dengan inovasi SIPERMATA. Inovasi ini dapat menentukan lokasi pemukiman kumuh agar dapat dipulihkan untuk keindahan kota. Selain itu, inovasi MULYA KB, Yan Kesi Buleleng, dan ERIM memungkinkan akses lebih mudah ke fasilitas kesehatan masyarakat. Terakhir, tetapi tidak kalah penting, adalah sarana transportasi dan promosi Jas Bule, yang merupakan layanan antar jemput gratis Buleleng. Inovasi ini dirancang untuk membantu anak-anak sekolah pergi ke sekolah dan mengurangi kemacetan di beberapa jam karena pemerintah Kabupaten Buleleng memberikan layanan transportasi gratis.

4.5. Peta Jalan Pembangunan *Smart Society*

Peta jalan pembangunan *Smart Society* merupakan rencana terstruktur yang menjelaskan langkah-langkah, kebijakan, dan inisiatif yang perlu diambil untuk menciptakan masyarakat yang berkarakter cerdas. Kemudian peta jalan pembangunan *Smart Society* memberikan solusi inovatif lainnya untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, mendorong pembangunan berkelanjutan, dan menciptakan interaksi yang lebih efisien antara pemerintah, masyarakat dan berbagai *stakeholder* lainnya. Pada peta jalan ini dapat mengidentifikasi sumber daya yang diperlukan, potensi hambatan, dan startegi untuk mengatasi tantangan tersebut hal ini bertujuan untuk memastikan pembangunan *Smart Society* yang berkesinambungan dan berdampak positif bagi seluruh anggota masyarakat.

Peta jalan pembangunan *Smart Society* ini dirumuskan berdasarkan kebutuhan pemerintah Kabupaten Buleleng. Maka untuk lebih detail dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 17 Peta Jalan Pembangunan *Smart Society* Jangka Pendek Menengah

Peta Jalan Pembangunan <i>Smart Society</i> Jangka Pendek Menengah																	
Sub-Dimensi	Strategi	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Sumbe r Dana	Leading Sector
						2024		2025		2026		2027		2028			
						Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran		
S1 Interaksi Masyarak	S1.1.1 Mengajak masyarak at untuk bersekola h	S1.1.1.P.1 Program pengelolaan pendidikan	1.APS 2.Angka literasi 3.Angka numerasi	1.6.2. jumlah computer, laptop, tablet atau perangkat pembelaja ran digital lainnya yang tersedia per 1.000 siswa	(Sekolah Smart) merupakan pengentasa n buta angka dan huruf kepada anak-anak	100%	200 0	100%	220 0	100%	242 0	100%	266 2	100%	290 0	Bantua n Keuang an Khusus (BKK)	Disdik
				2.6.3. jumlah tingkat Pendidika n tinggi sains, teknologi, Teknik dan matematik a (STEM) per	(Posko DO) merupakan sebuah porgram untuk menjaring anak-anak yang putus sekolah	55,5 %	200 0	56,5%	220 0	57,5 %	242 0	58,5 %	266 2	59,5 %	290 0	Bantua n Keuang an Khusus (BKK)	Disdik

Peta Jalan Pembangunan <i>Smart Society</i> Jangka Pendek Menengah																	
Sub-Dimensi	Strategi	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Sumbe r Dana	Leading Sector
						2024		2025		2026		2027		2028			
						Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran		
				100.000 penduduk													
	S1.1.2 Menyedia kan sarana informasi klarifikasi isu hoaks	S1.1.1.P.2 Penyelengga raan Persandian untuk pengamanan informasi	Persentas e keamanan data dan informasi sesuai standart	13.4 persentase anggaran kota yang dialokasik an untuk penyediaa n program yang ditujukan untuk menjemba tani kesenjangan digital	Informasi klarifikasi melalui konten “Buleleng Cegat hoaks” Merupaka n antisipasi pemerintah dalam memberant as hoaks	12 lapor an	120	12 Lapor an	125	12 lapor an	126	12 lapor an	127	12 Lapor an	128	APBD	Kominf- santi
S2 Ekosistem Belajar/Pendid ikan	S2.1.1 Memberik an edukasi dongeng kepada anak, sesuai himbau an pemerinta h daerah	S2.1.1.P.1 Pembinaan perpustakaan	Meningka t nya pengelola an perpustaka an	1.17.4. persentase populasi kota yang merupaka n pengguna perpustaka an umum yang aktif	(Buleleng Mesatua) merupakan edukasi kepada anak-anak sebelum tidur	100%	250	100%	260	100%	270	100%	280	100%	290	APBD	DAPD
				Perpustaka an keliling “pusling”	48 layan an	250	48 layan an	260	48 layan an	270	48 layan an	280	48 layan an	290	APBD	DAPD	

Peta Jalan Pembangunan <i>Smart Society</i> Jangka Pendek Menengah																	
Sub-Dimensi	Strategi	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Sumbe r Dana	Leading Sector
						2024		2025		2026		2027		2028			
						Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran		
					Merupaka n sebuah program untuk meningkat kan minat baca kepada anak-anak												
				17.3 jumlah buku perpustaka an umum dan judul e-book per 100.000 penduduk	E-Library, merupakan sebuah program untuk memudahk an pembaca agar bisa diakses melalui <i>smart phone</i>	500 Judul e- book	10	520 Judul e- book	12	540 Judul e- book	14	560 Judul e- book	16	580 Judul e- book	18	APBD	DAPD
S3 Keamanan Masyarakat	S3.1.1 Tersedian ya pemantau an visual	S3.1.1.P.1 Peningkatan ketentraman dan ketertiban umum	Tingkat penyelesa ian pelanggar an ketertiban	1.15.1. Persentase area kota yang dicakup oleh	Pemantaua n (ip camera) di ruang publik/terb uka hijau,	100%	55	100%	75	100%	100	100%	115	100%	125	APBD	Satpol PP & Kominfos anti

Peta Jalan Pembangunan <i>Smart Society</i> Jangka Pendek Menengah																	
Sub-Dimensi	Strategi	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Sumbe r Dana	Leading Sector
						2024		2025		2026		2027		2028			
						Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran		
			, ketentraman, keindahan	kamera pengintai digital	merupakan sebuah inobasi untuk memantau pergerakan masyaraka t di daerah- daerah rawan												

Sumber : Bimbingan Teknis Tahap 2 Kabupaten Buleleng 2023

Tabel 18 Peta Jalan Pembangunan *Smart Society* Jangka Panjang

Peta Jalan Pembangunan <i>Smart Society</i> Jangka Panjang																	
Sub-Dimensi	Strategi	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Sumbe r Dana	Leading Sector
						2029		2030		2031		2032		2033			
						Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran		
S1 Interaksi Masyarakat	S1.1.1 Mengajak masyaraka t untuk bersekolah	S1.1.1.P.1 Program pengelolaan pendidikan	1.APS 2.Angka literasi 3.Angka numerasi	1.6.2. jumlah computer, laptop, tablet atau perangkat pembelajar an digital lainnya	(Sekolah Smart) merupakan pengentasa n buta angka dan huruf kepada anak-anak	100%	345, 6	100%	37 7	100%	38 0	100%	38 2	100%	38 5	Bantua n Keuang an Khusus (BKK)	Disdik
				yang tersedia per 1.000 siswa 2.6.3. jumlah tingkat Pendidikan tinggi sains, teknologi, Teknik dan matematik a (STEM) per	(Posko DO) merupakan sebuah porgram untuk menjaring anak-anak yang putus sekolah	55,5 %	345, 6	56,5%	37 7	57,5 %	38 0	58,5 %	38 2	59,5 %	38 5	Bantua n Keunga n Khusus (BKK)	Disdik

Peta Jalan Pembangunan <i>Smart Society</i> Jangka Panjang																	
Sub-Dimensi	Strategi	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Sumbe r Dana	Leading Sector
						2029		2030		2031		2032		2033			
						Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran		
				100.000 penduduk													
	S1.1.2 Menyedia kan sarana informasi klarifikasi isu hoaks	S1.1.1.P.1 Penyelenggar aan Persandian untuk pengamanan informasi	Persentas e keamanan data dan informasi sesuai standart	13.4 persentase anggaran kota yang dialokasik an untuk penyediaa n program yang ditujukan untuk menjembat ani kesenjanga n digital	Informasi klarifikasi melalui konten “Buleleng Cegat hoaks” Merupakan antisipasi pemerintah dalam memberant as hoaks	12 lapor an	108	12 Lapor an	12 5	12 lapor an	12 6	12 lapor an	12 7	12 Lapor an	12 8	APBD	Kominf- santi
S2 Ekosistem Belajar/Pendid ikan	S2.1.1 Memberik an edukasi dongeng kepada anak, sesuai himbauan pemerinta h daerah	S2.1.1.P.1 Pembinaan perpustakaan	Meningka t nya pengelola an perpustak aan	1.17.4. persentase populasi kota yang merupakan pengguna perpustaka an umum yang aktif	(Buleleng Mesatua) merupakan edukasi kepada anak-anak sebelum tidur	100%	290	100%	29 0	100%	29 0	100%	29 0	100%	29 0	APBD	DAPD
				Perpustaka an Keliling “pusling”	48 layan an	120	48 layana n	12 5	48 layan an	13 0	48 layan an	13 5	48 layan an	14 0	APBD	DAPD	

Peta Jalan Pembangunan <i>Smart Society</i> Jangka Panjang																	
Sub-Dimensi	Strategi	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Sumbe r Dana	Leading Sector
						2029		2030		2031		2032		2033			
						Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran		
					Merupakan sebuah program untuk meningkatkan minat baca kepada anak-anak												
				17.3 jumlah buku perpustakaan umum dan judul e-book per 100.000 penduduk	E-Library, merupakan sebuah program untuk memudahkan pembaca agar bisa diakses melalui <i>smart phone</i>	590 Judul e-book	20	600 Judul e-book	22	620 Judul e-book	24	640 Judul e-book	26	660 Judul e-book	28	APBD	DAPD
S3 Keamanan Masyarakat	S3.1.1 Tersedianya pemantauan visual	S3.1.1.P.1 Peningkatan ketentraman dan ketertiban umum	Tingkat penyelesaian pelanggaran ketertiban	1.15.1. Persentase area kota yang dicakup oleh	Pemantauan (ip camera) di ruang publik/terbuka hijau,	100%	125	100%	130	100%	135	100%	155	100%	175	APBD	Satpol PP & Kominfo anti

Peta Jalan Pembangunan <i>Smart Society</i> Jangka Panjang																	
Sub-Dimensi	Strategi	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Sumbe r Dana	Leading Sector
						2029		2030		2031		2032		2033			
						Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran		
			, ketentram an, keindahan	kamera pengintai digital	merupakan sebuah inobasi untuk memantau pergerakan masyarakat di daerah- daerah rawan												

Sumber: Bimbingan Teknis Tahap 2 Kabupaten Buleleng 2023

Peta jalan pembangunan *Smart Society* dirancang agar Kabupaten Buleleng dapat menerapkan program inovasi untuk menyelesaikan masalah sosial yang ada. Dengan menetapkan target kinerja tahunan, peta jalan ini dapat digunakan sebagai ritme harapan masa depan, dengan capaian-capaian tertentu untuk mencapai inovasi yang telah direncanakan setiap tahun. Dengan kata lain, peta jalan ini berfungsi sebagai jalan menuju inovasi yang akan berdampak positif pada pertumbuhan sosial Kabupaten Buleleng. Peta jalan pembangunan ini mencakup rencana jangka pendek, menengah, dan jangka panjang. Pembuatan rencana jangka panjang ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah untuk mengembangkan inovasi yang berkelanjutan untuk kepentingan masyarakat banyak. Setiap subdimensi memiliki tujuan khusus. Misalnya, subdimensi interaksi masyarakat yang efisien berkonsentrasi pada mendorong masyarakat untuk bersekolah, subdimensi ekosistem belajar berkonsentrasi pada mendongengkan anak sebelum tidur, dan subdimensi sistem keamanan dan keselamatan masyarakat berkonsentrasi pada ketersediaan pemantauan virtual. Indikator SNI yang sudah ditentukan digunakan sebagai dasar untuk strategi ini, yang berhubungan dengan indikator kinerja. Inovasi yang dibuat dalam strategi mengajak masyarakat untuk bersekolah adalah sekolah pintar dan POSKO DO, yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan situasi sosial di Kabupaten Buleleng. Selanjutnya, dalam strategi mendongengkan anak, inovasi yang dibuat adalah mendongengkan anak sebelum tidur, yang merupakan pendidikan sejak usia dini yang diberikan kepada anak-anak oleh orang tua mereka untuk dapat pendidikan karakter sejak dini. Selain itu, pendekatan inovasinya untuk pemantauan virtual yang tersedia adalah menempatkan kamera pemantau di tempat-tempat yang mungkin menimbulkan konflik.

4.6. Peta Jalan Pembangunan *Smart Environment*

Peta jalan pembangunan *Smart Environment* adalah sebuah proyek khusus yang berfokus pada masalah lingkungan, baik dalam hal pencegahan maupun pengelolaan. Pemerintah Kabupaten Buleleng telah merancang peta jalan ini untuk menghasilkan inovasi untuk memecahkan masalah. Pendekatan yang komprehensif diperlukan untuk memahami, menilai, dan meningkatkan strategi yang telah dibuat untuk membangun lingkungan pintar. Peta jalan pembangunan lingkungan pintar membantu memastikan bahwa tindakan yang diambil sesuai prosedur untuk menciptakan lingkungan yang berkelanjutan dan berdampak positif bagi warganya. Dalam manajemennya, fokus utamanya adalah pengelolaan sampah dan limbah, pengelolaan sumber daya yang tidak terpakai menjadi terbarukan, dan pengelolaan air dalam lingkungan yang baik.

Tabel 19 Peta Jalan Pembangunan *Smart Environment* Jangka Pendek Menengah

Peta Jalan Pembangunan <i>Smart Environment</i> Jangka Pendek Menengah																	
Sub-Dimensi	Strategi	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Sumbe r Dana	Leading Sector
						2024		2025		2026		2027		2028			
						Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran		
En1 Proteksi Lingkunga n	En1.1.1 Meningkatka n kualitas air dan udara	En1.1.1.P.1 Program perencanaa n lingkungan hidup	Jumlah dokumen RPPLH (Rencana Perlindunga n dan Pengelolaan lingkungan hidup) yang tersusun	8.2 jumlah stasiun pemantauan kualitas udara jarak jauh secara langsung (real-time) per kilometer persegi (km2)	Sadar Dokling (Sadar Dokumen Lingkungan) Merupakan sebuah dokumen yang berisi edukasi pemeliharaaa n lingkungan	3 Doku men	25 0	3 Doku men	30 0	3 Doku men	30 0	3 Doku men	30 0	3 Doku men	35 0	APBD	DLH
	En1.2.1 Peningkatan tutup vegetasi pada lahan perkotaan dan lahan kritis		Jumlah dokumen KLHS (kajian lingkungan hidup strategi) yang tersusun		Singaku (Sistem Informasi Pembinaan dan Pengawasan Pelaku Usaha Kabupaten Buleleng)	3 Doku men	40 0	3 Doku men	40 0	3 Doku men	40 0	3 Doku men	40 0	3 Doku men	45 0	APBD	DLH

Peta Jalan Pembangunan <i>Smart Environment</i> Jangka Pendek Menengah																	
Sub-Dimensi	Strategi	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Sumbe r Dana	Leading Sector
						2024		2025		2026		2027		2028			
						Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran		
					Relawan Pemadam Kebakaran (REDKAR) Sebuah inovasi yang cepat tanggap dalam kebakaran	9 Klmpk	50	9 klmpk	300	9 klmpk	330	9 klmpk	350	9 klmpk	400	APBD	Dinas Pemadam
En2 Pengelolaa n sampah dan limbah	En2.1.1 Meningkatka n pengelolaan sampah sesuai ketentuan	En2.1.1.P.1 Program pengendalia n bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah bahan berbahaya serta beracun (limbah B3)	Jumlah dokumen fasilitasi pemenuhan komitmen izin penyimpana n sementara limbah B3 (Bahan Berbahaya Beracun)	16.2. persentase populasi kota yang memiliki pengumpula n sampah dari 54rganic54 pintu dengan pemantauan individu terhadap	Unit sapu bersih (USB) Sebuah inovasi yang menerjunka n personil pembersih jalan	27 Doku men	75	30 Doku men	80	27 Doku men	80	30 Doku men	95	35 Doku men	100	APBD	DLH

Peta Jalan Pembangunan <i>Smart Environment</i> Jangka Pendek Menengah																	
Sub-Dimensi	Strategi	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Sumbe r Dana	Leading Sector
						2024		2025		2026		2027		2028			
						Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran		
			Persentase penanganan sampah	jumlah sampah rumah tangga	Buleleng kelola sampah organic (Bule Kepo)	23%	80	25%	85	27%	90	29%	95	31%	100	APBD	DLH
			Persentase pengurangan sampah	16.4. persentase dari jumlah total sampah plastic yang didaur ulang di kota	Sebuah inovasi pengelolaan sampah organik												
					Buleleng kelola sampah anorganik (Bulan Melah) Sebuah inovasi pengelolaan sampah anorganik	20%	100	22%	110	24%	120	26%	130	28%	140	APBD	DLH

Peta Jalan Pembangunan <i>Smart Environment</i> Jangka Pendek Menengah																	
Sub-Dimensi	Strategi	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Sumbe r Dana	Leading Sector
						2024		2025		2026		2027		2028			
						Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran		
					JKD : jaminan Kesehatan desa (Asuransi lingkup desa dengan premi sampah yang berintegrasi program bank sampah)	73%	15 7	74%	16 0	75%	16 5	76%	18 0	77%	20 0	APBDe s	Desa
En3 Tata Kelola Energi	En3.1.1 Merubah sampah menjadi energi terbarukan	En3.1.1.P.1 Program pengelolaan persampaha n	Persentase penanganan sampah	7.3. energi listrik dan panas (GJ) dihasilkan dari limbah padat atau pengolahan limbah cair perkapita pertahun	WTE (Waste to Energy) sebuah inovasi untuk mengelola sampah menjadi energi	0	0	0	0	0	0	20%	20 0	21%	25 0	APBD CSR	DLH

Sumber : Bimbingan Teknis Tahap 2 Kabupaten Buleleng 2023

Tabel 20 Peta Jalan Pembangunan Smart Environment Jangka Panjang

Peta Jalan Pembangunan <i>Smart Environment</i> Jangka Panjang																	
Sub-Dimensi	Strategi	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Sumbe r Dana	Leading Sector
						2029		2030		2031		2032		2033			
						Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran		
En1 Proteksi Lingkunga n	En1.1.1 Meningkatka n kualitas air dan udara	En1.1.1.P.1 Program perencanaa n lingkungan hidup	Jumlah dokumen RPPLH (Rencana Perlindunga n dan Pengelolaan lingkungan hidup) yang tersusun	8.2 jumlah stasiun pemantauan kualitas udara jarak jauh secara langsung (real-time) per kilometer persegi (km2)	Sadar Dokling (Sadar Dokumen Lingkungan) Merupakan sebuah dokumen yang berisi edukasi pemeliharaa n lingkungan	100%	16 0	100%	16 0	100%	17 0	100%	18 0	100%	20 0	APBD	DLH
	En1.2.1 Peningkatan tutup vegetasi pada lahan perkotaan dan lahan kritis		Jumlah dokumen KLHS (kajian lingkungan hidup strategi) yang tersusun		Singaku (Sistem Informasi Pembinaan dan Pengawasan Pelaku Usaha Kabupaten Buleleng)	100%	17 5	100%	18 0	90%	19 0	95%	20 0	100%	22 0	APBD	DLH

Peta Jalan Pembangunan <i>Smart Environment</i> Jangka Panjang																	
Sub-Dimensi	Strategi	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Sumbe r Dana	Leading Sector
						2029		2030		2031		2032		2033			
						Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran		
					Relawan Pemadam Kebakaran (REDKAR) Sebuah inovasi yang cepat tanggap dalam kebakaran	9 Klmpk	100	9 klmpk	110	9 klmpk	120	9 klmpk	130	9 klmpk	140	APBD	Dinas Pemadam
En2 Pengelolaa n sampah dan limbah	En2.1.1 Meningkatka n pengelolaan sampah sesuai ketentuan	En2.1.1.P.1 Program pengendalia n bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah bahan	Jumlah dokumen fasilitasi pemenuhan komitmen izin penyimpanan sementara limbah B3	16.2. persentase populasi kota yang memiliki pengumpulana n sampah dari 58rganic58	Unit sapu bersih (USB) Sebuah inovasi yang menerjunkana n personil pembersih jalan	100%	120	100%	130	100%	130	100%	140	100%	140	APBD	DLH

Peta Jalan Pembangunan <i>Smart Environment</i> Jangka Panjang																	
Sub-Dimensi	Strategi	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Sumbe r Dana	Leading Sector
						2029		2030		2031		2032		2033			
						Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran		
		berbahaya dan beracun (limbah B3)	(Bahan Berbahaya Beracun) Persentase penanganan sampah Persentase pengurangan sampah	pintu dengan pemantauan individu terhadap jumlah sampah rumah tangga 16.4. persentase dari jumlah total sampah plastic yang didaur ulang di kota	Buleleng kelola sampah organik (Bule Kepo) Sebuah inovasi pengelolaan sampah organik Buleleng kelola sampah anorganik (Bulan Melah) Sebuah inovasi pengelolaan sampah anorganik	33%	600	35%	120	37%	140	40%	160	42%	130	APBD	DLH
						20%	130	32%	600	34%	150	36%	180	38%	200	APBD	DLH

Peta Jalan Pembangunan <i>Smart Environment</i> Jangka Panjang																	
Sub-Dimensi	Strategi	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Sumbe r Dana	Leading Sector
						2029		2030		2031		2032		2033			
						Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran		
					JKD : jaminan Kesehatan desa (Asuransi lingkup desa dengan premi sampah yang berintegrasi program bank sampah)	65%	250	70%	300	75%	350	80%	400	85%	450	APBDes	Desa
En3 Tata Kelola Energi	En3.1.1 Merubah sampah menjadi energi terbarukan	En3.1.1.P.1 Program pengelolaan persampahan	Persentase penanganan sampah	7.3. energi listrik dan panas (GJ) dihasilkan dari limbah padat atau pengolahan limbah cair perkapita pertahun	WTE (Waste to Energy) sebuah inovasi untuk mengelola sampah menjadi energi	22%	300	23%	350	24%	370	25%	380	26%	400	APBD CSR	DLH

Sumber : Bimbingan Teknis Tahap 2 Kabupaten Buleleng 2023

Peta jalan pembangunan *Smart Environment* dirancang untuk memungkinkan untuk memulai inovasi program yang berbasis lingkungan yang berkaitan dengan masalah lingkungan yang ada di Kabupaten Buleleng. Permasalahan sampah dan limbah menjadi masalah utama karena jumlah penduduk Buleleng dan turis yang terus meningkat, yang berarti akan ada peningkatan volume sampah dan limbah. Untuk menanganinya, diperlukan penanganan khusus. Setiap tahun, peta jalan ini akan memberikan alur pelaksanaan untuk tujuan jangka pendek, menengah, dan jangka panjang. Ini dilakukan karena setiap tahun ada prioritas pengembangan yang sudah ditentukan. Indikator kinerja kemudian menghubungkan strategi yang sudah dibuat berdasarkan masalah yang ada, dan indikator SNI digunakan sebagai landasannya. Selain itu, *Smart Environment* terdiri dari beberapa subdimensi yang masing-masing memiliki strategi untuk dilaksanakan. Misalnya, subdimensi proteksi lingkungan berfokus pada meningkatkan kualitas air dan udara, meningkatkan tutup vegetasi di lahan perkotaan dan lahan kritis, subdimensi pengelolaan sampah dan limbah berfokus pada pengelolaan sampah yang lebih baik, dan subdimensi tata kelola energi berfokus pada mengubah sampah menjadi Tidak diragukan lagi, program ini menghasilkan berbagai solusi untuk mengatasi masalahnya. Salah satunya adalah program sadar dokumen lingkungan (sadar dokling), sistem informasi pembinaan dan pengawasan pelaku usaha Kabupaten Buleleng (singaku) dan Relawan Pemadam Kebakaran (REDKAR). Untuk strategi pengelolaan sampah dan limbah, inovasi yang dibuat adalah Unit Sapu Bersih (USB), Buleleng Kelola Sampah Organik (Bule Kepo), dan Buleleng Kelola Sampah Limbah (Bule Kepo). Akhir sekali, pendekatan Waste to Energy (WTE) adalah pendekatan yang digunakan untuk mengubah sampah menjadi energi melalui inovasi.

5. PENUTUP

Transformasi menuju sebuah *Smart City* tidak hanya mencakup penerapan teknologi terbaru dan hal itu mencakup bagaimana teknologi tersebut dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat, memastikan, pembangunan berkelanjutan, dan menjamin keberlangsungan sumber daya daerah. Kabupaten Buleleng memiliki banyak potensi untuk memanfaatkan ide *Smart City*. Penciptaan *Smart City* Kabupaten Buleleng adalah awal siklus panjang inovasi dan perubahan. Untuk mewujudkan visi ini yang sudah dirumuskan secara bersama, semua bagian masyarakat, pemerintah, dan sektor swasta harus bekerja sama dan berkomitmen.

Dalam buku eksekutif *summary* ini, pemerintah Kabupaten Buleleng terus berupaya menyajikan gambaran umum, strategi, rencana prioritas dan peta jalan terkait pengembangan *Smart City* di Kabupaten Buleleng. Dalam hal ini pemerintah Kabupaten Buleleng telah memberikan kepercayaan dengan seluruh lapisan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan lapisan masyarakat untuk berkolaborasi dan tekad yang kuat. Kabupaten Buleleng tidak hanya akan berhasil menerapkan konsep *Smart City* tetapi juga akan menjadi contoh dan inspirasi daerah lain di Indonesia dalam melaksanakan dan pengembangan konsep *Smart City*.

6. REFERENSI

- Faidat, N., & Khozin, M. (2018). Analisa Strategi Pengembangan Kota Pintar (Smart City): Studi Kasus Kota Yogyakarta. *JIP (Jurnal Ilmu Pemerintahan) : Kajian Ilmu Pemerintahan Dan Politik Daerah*, 3(2), 171–180.
<https://doi.org/10.24905/jip.3.2.2018.171-180>
- Kominfo. (2021). *Buku Panduan Penyusunan Masterplan Smart City 2021 Gerakan Menuju Smart City*. Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia.
[file:///C:/Users/ASUS ROG/Downloads/Panduan Penyusunan Masterplan Smart City - Kominfo 2021 -Rev19Juni2022 \(1\).pdf](file:///C:/Users/ASUS ROG/Downloads/Panduan%20Penyusunan%20Masterplan%20Smart%20City%20-%20Kominfo%202021%20-%20Rev19Juni2022%20(1).pdf)
- Putra, A. S. (2019). Smart City: konsep Kota pintar di DKI Jakarta. *Tekinfo*, 20(2), 73–79.
<https://journals.upi-yai.ac.id/index.php/TEKINFO/article/download/1168/953>
- Suradnyana, P. A. (2022). *Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng*. 1–371.

BUKU IV

QUICK WIN SMART CITY KABUPATEN BULELENG TAHUN 2024-2033



BUKU 4 QUICKWIN MASTERPLAN SMART CITY KABUPATEN BULELENG 2023

**"BULELENG CERDAS MENUJU KERTA
RAHARJA BERLANDASKAN TRI HITA
KARANA"**



KABUPATEN BULELENG 2023

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
1. VISI DAN PRIORITAS RPD KABUPATEN BULELENG	1
1.1. Visi Kabupaten Buleleng	1
1.2. Misi Kabupaten Buleleng	2
1.3. Sasaran Kabupaten Buleleng	3
1.4. Pemetaan Misi dan Sasaran RPD Kabupaten Buleleng Terhadap Dimensi <i>Smart City</i>	5
2. VISI DAN SASARAN <i>SMART CITY</i> DAERAH	10
2.1. Visi <i>Smart City</i> Daerah	10
2.2. Sasaran <i>Smart City</i>	11
2.2.1. Sasaran Jangka Pendek <i>Smart Governance</i>	11
2.2.2. Sasaran Jangka Pendek <i>Smart Branding</i>	14
2.2.3. Sasaran Jangka Pendek <i>Smart Economy</i>	15
2.2.4. Sasaran Jangka Pendek <i>Smart Society</i>	17
2.2.5. Sasaran Jangka Pendek <i>Smart Living</i>	19
2.2.6. Sasaran Jangka Pendek <i>Smart Environment</i>	21
3. PROFIL QUICKWINS <i>SMART CITY</i> DAERAH	24
3.1. Quickwin <i>Smart Governance</i>	24
3.2. Quickwin <i>Smart Branding</i>	26
3.3. Quickwin <i>Smart Economy</i>	27
3.4. Quickwin <i>Smart Living</i>	29
3.5. Quickwin <i>Smart Society</i>	31
3.6. Quickwin <i>Smart Environment</i>	33
4. MANAJEMEN RISIKO QUICKWINS	37
4.1. Identifikasi Risiko	38
4.2. Analisis Risiko	40
4.3. Mitigasi Risiko	42
4.4. Manajemen Risiko <i>Smart Governance</i>	43
4.5. Manajemen Risiko <i>Smart Branding</i>	48
4.6. Manajemen Risiko <i>Smart Economy</i>	52
4.7. Manajemen Risiko <i>Smart Living</i>	57
4.8. Manajemen Risiko <i>Smart Society</i>	61

4.9.	Manajemen Risiko <i>Smart Environment</i>	66
5.	PENUTUP.....	72
6.	REFERENSI	73

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Misi Kabupaten Buleleng.....	2
Tabel 2 Sasaran RPD Kabupaten Buleleng.....	3
Tabel 3 Pemetaan Misi dan Sasaran RPD Kabupaten Buleleng Terhadap Dimensi <i>Smart City</i>	5
Tabel 4 Sasaran Jangka Pendek <i>Smart Governance</i>	12
Tabel 5 Sasaran Jangka Pendek <i>Smart Branding</i>	14
Tabel 6 Sasaran Jangka Pendek <i>Smart Economy</i>	16
Tabel 7 Sasaran Jangka Pendek <i>Smart Society</i>	17
Tabel 8 Sasaran Jangka Pendek <i>Smart Living</i>	20
Tabel 9 Sasaran Jangka Pendek <i>Smart Environment</i>	22
Tabel 10 Quickwin <i>Smart Governance</i>	24
Tabel 11 Quickwin <i>Smart Branding</i>	26
Tabel 12 Quickwin <i>Smart Economy</i>	28
Tabel 13 Quickwin <i>Smart Living</i>	30
Tabel 14 Quickwin <i>Smart Society</i>	31
Tabel 15 Quickwin <i>Smart Environment</i>	33
Tabel 16 Identifikasi Risiko	38
Tabel 17 Analisis Risiko 1	40
Tabel 18 Analisis Risiko 2	40
Tabel 19 Rumus Pengukuran Tingkat Risiko.....	41
Tabel 20 Analisis Risiko 3	41
Tabel 21 Mitigasi Risiko	42
Tabel 22 Manajemen Risiko <i>Smart Governance</i>	44
Tabel 23 Manajemen Risiko <i>Smart Branding</i>	49
Tabel 24 Manajemen Risiko <i>Smart Economy</i>	53
Tabel 25 Manajemen Risiko <i>Smart Living</i>	58
Tabel 26 Manajemen Risiko <i>Smart Society</i>	62
Tabel 27 Manajemen Risiko <i>Smart Environment</i>	67

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Identifikasi Risiko	38
Gambar 2 Ilustrasi Tingkat Risiko	42

1. VISI DAN PRIORITAS RPD KABUPATEN BULELENG

Visi dan prioritas pembangunan daerah khusus nya Kabupaten Buleleng memiliki karakteristik dan keunikan tersendiri, visi dan prioritas ini dirumuskan menyesuaikan kondisi wilayah, budaya dan lingkungan masyarakat. Visi yang di gagas oleh Penjabat Bupati Buleleng mengedepankan pembangunan berkelanjutan sesuai dengan kearifan lokal, tentu terdapat prioritas-prioritas pembangunan di Kabupaten Buleleng yang menjadi fokus utama dalam meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.

1.1. Visi Kabupaten Buleleng

Pemerintah daerah sering menggunakan visi daerah dalam perencanaan pembangunan regional atau strategis. Visi daerah merupakan sebuah gambaran jangka panjang tentang tujuan atau kondisi ideal yang ingin dicapai oleh suatu wilayah atau daerah dalam jangka waktu tertentu. Visi daerah mencakup banyak hal seperti infrastruktur, ekonomi, sosial, lingkungan dan budaya. Dalam hal ini visi membantu pihak yang berwenang dan stakeholder lokal memiliki pandangan yang jelas tentang arah yang ingin diambil oleh daerah tersebut. Selain itu, visi juga berfungsi sebagai dasar untuk rencana pembangunan, kebijakan, dan program strategis yang dapat membantu mencapai tujuan jangka panjang.

Kabupaten Buleleng yang mempunyai visi berdasarkan kebutuhan dan melihat strategi pembangunan daerah mempunyai cita-cita yang baik. Visi yang dibuat oleh Kabupaten Buleleng bertujuan untuk menciptakan gambaran yang jelas tentang kondisi ideal yang ingin dicapai oleh daerah dalam periode waktu tertentu sehingga dalam pembuatan visi ini melibatkan banyak ide dan inovasi agar pembangunan daerah selaras dengan kondisi yang sebenarnya. Kabupaten Buleleng mempunyai visi sebagaimana yang tercantum dalam dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2023-2026 sebagai berikut:

“Buleleng Kerta Raharja Mengantarkan Bali Dwipa Jaya Berlandaskan Tri Hita Karana”

Buleleng Kerta Raharja berarti Buleleng aman dan sejahtera. Mengantarkan Bali Dwipa Jaya mengandung makna Buleleng berada pada garda terdepan menuju Bali Dwipa Jaya yang merupakan visi pembangunan daerah provinsi Bali. Sedangkan arti dari Berlandaskan Tri Hita Karana berarti pembangunan Buleleng berlandaskan filsafat hidup masyarakat Bali. Filsafat Tri Hita Karana adalah filsafat harmoni yang melandasi adat dan budaya Bali yang dijiwai oleh

nilai-nilai hindu. Secara harafiah Tri Hita Karana berarti tiga unsur yang menyebabkan kebahagiaan. Tiga unsur itu adalah, parahyangan yang maknanya hubungan manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa, pawongan yang bermakna hubungan manusia dengan sesama manusia, dan pelemahan yang bermakna manusia dengan lingkungan. Sebagai filsafat harmoni, keserasian dan keseimbangan, filsafat Tri Hita Karana menghendaki harmoni, keserasian, dan keseimbangan hubungan pada tiga unsur itu agar manusia dan masyarakat menjadi sejahtera dan bahagia. (Suradnyana, 2022)

1.2. Misi Kabupaten Buleleng

Untuk mewujudkan visi yang sudah dituangkan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Buleleng 2023-2026 maka diperlukan misi agar bisa menjalankannya untuk mewujudkan cita-cita daerah. Adapun visi Kabupaten Buleleng sebagai berikut:

Tabel 1 Misi Kabupaten Buleleng

No	Pernyataan Misi
Misi 1	Mewujudkan masyarakat Buleleng yang unggul, kompetitif, dan bertaqwa kepada Tuhan, dengan jalan membangun sumber daya manusia yang berkualitas, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, serta memiliki daya saing, melalui penyelenggaraan responsif dan pelayanan responsif yang berkualitas untuk semua warga masyarakat
Misi 2	Mewujudkan masyarakat yang mampu memenuhi kebutuhan hidup, dengan jalan melaksanakan pembangunan bidang ekonomi untuk meningkatkan pendapatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, mengurangi pengangguran dan kemiskinan
Misi 3	Mewujudkan keamanan daerah dan masyarakat, dengan menyelenggarakan pemerintahan yang baik, memperkuat sistem keamanan, meningkatkan peran masyarakat sipil, mendorong pengarusutamaan gender, menegakkan budaya hukum dan politik, dan memantapkan pelaksanaan otonomi daerah.
Misi 4	Mewujudkan kebudayaan yang responsif terhadap perkembangan zaman dan lingkungan global, melalui pelestarian, pewarisan dan pengembangan nilai-nilai budaya yang dijiwai oleh agama Hindu, pemantapan kelembagaan, dan aktivitas budaya.
Misi 5	Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, dengan jalan melaksanakan pembangunan yang seimbang antar lapisan masyarakat, antar sektor, dan antar

No	Pernyataan Misi
	wilayah, mempertahankan dan meningkatkan kemampuan lingkungan untuk menopang pembangunan, sehingga pembangunan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat saat ini dengan tidak mengurangi hak generasi berikutnya akan sumber daya alam.

Sumber : RPD Kabupaten Buleleng 2023

1.3. Sasaran Kabupaten Buleleng

Sasaran dalam sebuah pembangunan daerah merupakan sebuah tujuan yang ingin dicapai oleh pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan penduduknya. Sasaran ini dapat berbeda-beda tergantung pada kebijakan dan kondisi daerah. Kabupaten Buleleng yang membuat sasaran berdasarkan visi dan misi daerah menyesuaikan kondisi dan karakteristik. Maka sasaran itu harus tepat dalam pembuatan sehingga berdampak bagi seluruh lapisan masyarakat. Perencanaan dan pengukuran kemajuan untuk mencapai sasaran-sasaran ini penting untuk memastikan bahwa pembangunan daerah berjalan sesuai rencana dan dapat memberikan manfaat bagi penduduknya. Sasaran ini merupakan aspirasi dan kebutuhan masyarakat daerah serta merupakan bagian dari rencana pembangunan daerah yang lebih luas.

Tabel 2 Sasaran RPD Kabupaten Buleleng

No	Tujuan	Sasaran
1	Terwujudnya SDM unggul dan Kompetitif	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
		Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat
		Meningkatnya kesetaraan dan keadilan gender (KKG)
		Meningkatnya kompetensi tenaga kerja
2	Terwujudnya perekonomian daerah yang berdaya saing	Meningkatnya produktivitas perekonomian daerah
		Meningkatnya pemberdayaan kawasan perdesaan
		Stabilitas harga-harga bahan pokok penting
3	Meningkatnya kualitas infrastruktur	Meningkatnya kualitas infrastruktur publik
4	Meningkatnya penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial	Menurunnya penduduk miskin
		Meningkatnya penanganan PMKS







No	Tujuan	Sasaran
5	Terwujudnya stabilitas keamanan dan kenyamanan masyarakat	Meningkatnya rasa aman dan nyaman masyarakat
6	Terwujudnya adat dan budaya lokal yang lestari	Meningkatnya pelestarian adat dan budaya
7	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Meningkatnya kualitas air
		Meningkatnya kualitas udara
		Meningkatnya tutupan lahan
		Terwujudnya kesesuaian peruntukan ruang
8	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien	Optimalnya implementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik (<i>Smart Governance</i>)
		Meningkatnya kualitas layanan publik
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan
		Meningkatnya akuntabilitas keuangan
		Meningkatnya kualitas manajemen ASN
		Meningkatnya kualitas pengawasan







Sumber : RPD Kabupaten Buleleng 2023-2026







1.4. Pemetaan Misi dan Sasaran RPD Kabupaten Buleleng Terhadap Dimensi *Smart City*








Tabel dibawah ini merupakan sebuah gambaran dari pengelompokkan konsep *Smart City* terhadap misi dan sasaran yang berada didalam dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Buleleng, pengelompokkan tersebut sudah berdasarkan karakteristik dari masing-masing konsep *Smart City* yang kemudian disesuaikan. Untuk lebih detail dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3 Pemetaan Misi dan Sasaran RPD Kabupaten Buleleng Terhadap Dimensi *Smart City*

No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Dimensi <i>Smart City</i>					
						<i>Smart Governance</i>	<i>Smart Branding</i>	<i>Smart Economy</i>	<i>Smart Living</i>	<i>Smart Society</i>	<i>Smart Environment</i>
1	Mewujudkan masyarakat Buleleng yang unggul, kompetitif, dan bertaqwa kepada Tuhan, dengan jalan membangun sumberdaya manusia yang berkualitas, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, serta memiliki daya saing, melalui penyelenggaraan pendidikan dan pelayanan kesehatan yang berkualitas untuk semua warga masyarakat.	Terwujudnya SDM unggul dan kompetitif	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Umur harapan hidup						
				Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	Rata-rata lama sekolah						
					Rata-rata harapan lama sekolah						
					Angka Partisipasi Sekolah (APS)						
				Meningkatnya kesetaraan dan keadilan gender (KKG)	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)						
				Meningkatnya kompetensi ketenaga kerjaan	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)						

No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Dimensi Smart City					
						Smart Governance	Smart Branding	Smart Economy	Smart Living	Smart Society	Smart Environment
2	Mewujudkan masyarakat yang mampu memenuhi kebutuhan hidup, dengan jalan melaksanakan pembangunan bidang ekonomi untuk meningkatkan pendapatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, mengurangi pengangguran dan kemiskinan.	Terwujudnya perekonomian daerah yang berdaya saing	PDRB dan PDRB Perkapita	Meningkatnya produktivitas perekonomian daerah	Pertumbuhan ekonomi daerah						
				Meningkatnya pemberdayaan kawasan perdesaan	Indek Perkembangan Kawasan Perdesaan						
				Stabilitas harga - harga bahan pokok penting	Laju Inflasi						
		Meningkatnya penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial	Persentase penduduk miskin	Menurunnya penduduk miskin	Persentase penduduk miskin						
			Persentase PMKS tertangani	Meningkatnya penanganan PMKS	Persentase penanganan PMKS						
3	Mewujudkan keamanan daerah dan masyarakat,	Terwujudnya stabilitas keamanan	Persentase Penanganan,		Persentase Penanganan bencana						

No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Dimensi Smart City					
						Smart Governance	Smart Branding	Smart Economy	Smart Living	Smart Society	Smart Environment
	dengan menyelenggarakan pemerintahan yang baik, memperkuat sistem keamanan, meningkatkan peran masyarakat sipil, mendorong pengarusutamaan gender, menegakkan budaya hukum dan politik, dan memantapkan pelaksanaan otonomi daerah.	dan kenyamanan masyarakat	ketertiban umum dan perlindungan masyarakat (Trantibum linmas)	Meningkatnya rasa aman dan nyaman masyarakat	Persentase Penanganan pelanggaran ketertarikan dan ketertiban umum (Trantibum)						
		Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien	Indeks reformasi birokrasi	Optimal implementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik (<i>Smart Governance</i>)	Terwujudnya reformasi birokrasi daerah yang berkualitas						
					Nilai sistem pemerintahan berbasis (SPBE)						
					Meningkatnya kualitas layanan publik						
					Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan						
				Meningkatnya akuntabilitas keuangan	Indeks pengelolaan keuangan daerah						

No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Dimensi Smart City					
						Smart Governance	Smart Branding	Smart Economy	Smart Living	Smart Society	Smart Environment
				Meningkatnya kualitas manajemen ASN	Indeks merit sistem						
				Meningkatnya kualitas pengawasan	Meningkatnya kualitas pengawasan internal yang akuntabel						
4	Mewujudkan kebudayaan yang responsif terhadap perkembangan zaman dan lingkungan global, melalui pelestarian, pewarisan dan pengembangan nilai-nilai budaya yang dijiwai oleh agama Hindu, pemantapan kelembagaan, dan aktivitas budaya.	Terwujudnya adat dan budaya lokal yang lestari	Persentase pelestarian adat budaya	Meningkatnya pelestarian adat dan budaya	Persentase Cagar budaya yang lestari						
					Persentase budaya tak benda yang lestari						
					Persentase desa adat yang lestari						
5	Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, dengan jalan melaksanakan pembangunan yang seimbang antar lapisan masyarakat, antar sektor, dan antar	Meningkatnya kualitas infrastruktur	Indeks infrastruktur wilayah	Meningkatnya kualitas infrastruktur publik	Persentase kondisi jalan dan jembatan mantap						
					Persentase keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas perhubungan						

No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Dimensi Smart City					
						Smart Governance	Smart Branding	Smart Economy	Smart Living	Smart Society	Smart Environment
	wilayah, mempertahankan dan meningkatkan kemampuan lingkungan untuk menopang pembangunan, sehingga pembangunan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat saat ini dengan tidak mengurangi hak generasi berikutnya akan sumberdaya alam.				Persentase infrastruktur pengairan yang mantap						
					Persentase capaian pelayanan air minum						
					Persentase pelayanan air limbah						
					Persentase panjang saluran drainase dalam kondisi baik						
					Persentase pengembangan sistem persampahan						
		Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH)	Meningkatnya kualitas air	Indeks kualitas air						
				Meningkatnya kualitas udara	Indeks kualitas udara						
				Meningkatnya tutupan lahan	Indeks tutupan lahan						
				Terwujudnya kesesuaian peruntukan ruang	Persentase ketaatan pemanfaatan ruang						

Sumber : Bimbingan Teknis Tahap 1 Kabupaten Buleleng 2023, RPD Kabupaten Buleleng 2023-2026

2. VISI DAN SASARAN *SMART CITY* DAERAH

Visi merupakan sebuah gambaran besar untuk tujuan jangka panjang dari sebuah kota dalam mewujudkan konsep *Smart City*. Sebab visi merupakan sebuah cerminan aspirasi untuk menciptakan lingkungan perkotaan yang lebih berkelanjutan dan inklusif yang berorientasi kepada warga maka jika dilihat secara mendalam visi tersebut terdapat sasaran-sasaran tertentu untuk mencapainya sebab sasaran merupakan tujuan spesifik yang ingin dicapai dalam jangka waktu tertentu untuk mewujudkan visi tersebut karena sasaran lebih spesifik, dapat diukur dan berorientasi kepada kebutuhan masyarakat.

2.1. Visi *Smart City* Daerah

Sebagaimana sudah ditetapkan bahwa visi *Smart City* Kabupaten Buleleng untuk menerapkan keenam konsep *Smart City* dalam hal ini visi *Smart City* Kabupaten Buleleng adalah sebagai berikut :

“Buleleng Cerdas Menuju Kerta Raharja Berlandaskan Tri Hita Karana”

visi tersebut mempunyai dapat di filosofikan sebagai meningkatkan pelayanan yang berlandaskan konsep *Smart City* yang aman dan nyaman sejahtera untuk kepentingan masyarakat Buleleng. Serta hal ini selaras dengan Tri Hita Karana merupakan konsep atau ajaran dalam agama Hindu yang selalu menitikberatkan bagaimana antara sesama bisa hidup berdampingan, saling bertegur sapa satu dengan yang lain, tidak ada riak-riak kebencian, penuh toleransi dan penuh rasa damai. Tri Hita Karana bisa diartikan secara leksikal yang berarti tiga penyebab kesejahteraan. Istilah ini terambil dari kata tri yang artinya tiga, hita yang artinya keseimbangan atau sejahtera, dan karana yang artinya penyebab. Ketiga hal tersebut adalah Parahyangan, Pawongan, dan Palemahan.

Dalam visi *Smart City* Kabupaten Buleleng mempunyai arti sebagai berikut:

1. **Buleleng Cerdas** : Mempunyai arti yaitu memiliki masyarakat yang unggul dalam pengetahuan, menerapkan teknologi secara cergas dalam pelayanan masyarakat serta memiliki kemampuan dalam beradaptasi sesuai dengan perkembangan zaman.
2. **Menuju Kerta Raharja** : Mempunyai tatanan kehidupan yang sejahtera lahir dan batin secara seimbang, serasi adil dan merata

3. **Berlandaskan Tri Hita Karana** : Berlandaskan hubungan yang harmonis antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan lingkungan alam dan isinya, dan manusia dengan manusia.

Sebagaimana visi *Smart City* sudah dirumuskan maka untuk menjalankan visi tersebut harus ada misi sebagai landasan pelaksanaannya, sehingga dalam menerapkan dan mewujudkan visi *Smart City* sesuai dengan ketentuan dan cita-cita daerah. Adapun misi *Smart City* Kabupaten Buleleng sebagai berikut:

1. Mewujudkan masyarakat Buleleng berkualitas, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi informasi, yang didukung dengan lingkungan aman dan nyaman (*Smart Society*)
2. Mewujudkan masyarakat Buleleng yang memiliki keunggulan ekonomi dengan memanfaatkan teknologi informasi berlandaskan kearifan lokal (*Smart Economy*)
3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel berbasis teknologi (*Smart Governance*)
4. Mewujudkan digitalisasi pariwisata budaya yang berbasis pelestarian pewarisan dan pengembangan nilai budaya lokal (*Smart Branding*)
5. Mewujudkan tata kelola pembangunan menuju pelestarian lingkungan berbasis teknologi (*Smart Environment*)
6. Mewujudkan kualitas dan kuantitas hidup masyarakat melalui infrastruktur dan pelayanan publik berbasis teknologi informasi (*Smart Living*)

2.2. Sasaran *Smart City*

Sasaran *Smart City* merupakan tujuan atau hasil yang ingin dicapai melalui penerapan konsep *Smart City*. Sasaran yang lebih spesifik yang mengutamakan kebutuhan dari pelayanan publik merupakan sebuah prioritas dari pemerintah daerah. Kabupaten Buleleng yang sudah merencanakan pembangunan melalui dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) tahun 2023-2026 yang mana kemudian rencana tersebut rangkum dalam jangka pendek untuk bisa mempercepat pengembangan dan pembangunan sesuai dengan rencana program yang sudah ditentukan sebagai mana sudah disesuaikan dengan keenam konsep *Smart City*.

2.2.1. Sasaran Jangka Pendek *Smart Governance*

Sasaran jangka pendek pada *Smart Governance* merupakan sebuah pengembangan dalam meningkatkan efisiensi, transparansi dan partisipasi warga dalam proses pengambilan keputusan pemerintah. Selain itu, dari sistem layanan publik perlu adanya perhatian khusus

agar hak dan kewajiban dalam administrasi dasar warga Kabupaten Buleleng bisa terpenuhi. Beberapa kekurangan pada sistem pelayanan di Kabupaten Buleleng yang berkaitan dengan Smart Governance maka dari itu untuk menyelesaikan masalah tersebut, sasaran yang telah ditetapkan sesuai dengan RPD Kabupaten Buleleng dan dihubungkan dengan indikator SNI akan digunakan. Secara umum, semakin banyak orang yang memiliki dokumen administrasi kependudukan. Ini sebagian besar disebabkan oleh peningkatan kesadaran publik akan pentingnya memiliki semua dokumen kependudukan yang digunakan dalam layanan publik.

Tabel 4 Sasaran Jangka Pendek *Smart Governance*

DIMENSI	MISI	SUB-DIMENSI	SASARAN	DASAR PEMIKIRAN
SMART GOVERNANCE	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel berbasis teknologi	G1 Layanan Publik	G1.1 Meningkatnya kualitas layanan publik dan melakukan integrasi NIK dengan semua jenis layanan	UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Presiden No. 95 tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, untuk itu pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan pelayanan publik perlu digencarkan dalam menunjang kebutuhan masyarakat
		G2 Birokrasi	G2.1 Meningkatnya efisiensi manajemen birokrasi	UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023 dan Permenpan No. 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Permenpan No. 25 Tahun 2020 tentang Road Map

DIMENSI	MISI	SUB-DIMENSI	SASARAN	DASAR PEMIKIRAN
				RB Tahun 2020-2024, sebab perlu adanya peningkatan kapisitas dan efisiensi bagi birokrat di Buleleng
		G3 Perancangan Kebijakan	G3.1 Meningkatnya keterlibatan publik dalam manajemen kebijakan publik	UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, sebab saat ini transparansi mengenai keterbukaan informasi yang dilakukan oleh pemerintah sangat diperlukan untuk meningkatkan kepercayaan publik

Sumber : Bimbingan Teknis Tahap 2 Kabupaten Buleleng 2023

Sasaran *Smart Governance* sudah ditentukan, jika dilihat dari hubungannya antara RPD dan SNI 37122. Pemerintah daerah berupaya memberikan pemahaman dan kompetensi kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) tentang bagaimana mengoptimalkan layanan birokrasi, termasuk administrasi kependudukan pencatatan sipil, pengelolaan informasi, dan pemanfaatan data kependudukan. Sasaran tersebut muncul sebagai hasil dari masalah yang ada dalam layanan birokrasi. Selain itu, partisipasi publik dalam perumusan kebijakan masih belum optimal. Pemerintah daerah mengharapkan masyarakat terlibat dalam memberikan gagasan dan masukan melalui media sosial untuk memberikan perhatian pada kebijakan yang akan dibuat. Selanjutnya, kebijakan tersebut akan diinformasikan melalui platform JDIH sehingga masyarakat dapat mengaksesnya.

2.2.2. Sasaran Jangka Pendek *Smart Branding*

Sasaran dari *Smart Branding* berasal dari potensi dan ciri-ciri yang dimiliki Kabupaten Buleleng yang berkarakteristik kebudayaan. Diharapkan bahwa dengan modal tersebut, Kabupaten Buleleng dapat menarik wisatawan untuk berwisata dan menjadikan industri pariwisata (akomodasi, makan, minuman, biro perjalanan, hiburan, dan rekreasi) sebagai bagian penting dari pengembangan dan peningkatan struktur perekonomian daerah. *Smart Branding* memfokuskan kepada pariwisata dan kearifan lokal maka perlunya kegiatan yang intensif untuk bisa memaksimalkan sumber daya yang dimiliki.

Tabel 5 Sasaran Jangka Pendek *Smart Branding*

DIMENSI	MISI	SUB-DIMENSI	SASARAN	DASAR PEMIKIRAN
SMART BRANDING	Mewujudkan digitalisasi pariwisata budaya yang berbasis pelestarian pewarisan dan pengembangan nilai budaya kecil.	B1 Pariwisata	B1.1 Meningkatkan daya saing destinasi pariwisata kualitas pemasaran pariwisata, SDM pariwisata, kualitas ekonomi kreatif dan peningkatan PDRB sektor pariwisata	Peraturan Pemerintah No.50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025, maka dari itu perlunya membangun dan memasarkan ekosistem pariwisata
		B2 Daya Saing Bisnis	B2.1 Meningkatnya kualitas dan kuantitas investasi ke Kabupaten Buleleng	Peraturan Menteri Investasi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kemitraan Di Bidang Penanaman Modal Antara Usaha Besar Dengan Usaha, Kecil, Dan Menengah Di Daerah, maka dari itu perlu membangun <i>platform</i> dan memasarkan

DIMENSI	MISI	SUB-DIMENSI	SASARAN	DASAR PEMIKIRAN
				ekosistem bisnis daerah
		B3 Wajah (Tampilan) Kota	B3.1 Mengembangkan DTW dan Kawasan Pariwisata dan peningkatan pengembangan, dan pelestarian benda situs cagar budaya dan lembaga adat	Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan, untuk itu perlu adanya penataan kembali wajah Buleleng dan menonjolkan situs cagar budaya dan lembaga adatnya

Sumber: Bimbingan Teknis Tahap 2 Kabupaten Buleleng 2023

Setelah sasaran *Smart Branding* ditetapkan dan dihubungkan dengan indikator RPD, tujuan utama adalah meningkatkan pemasaran pariwisata Kabupaten Buleleng. Ini disebabkan oleh fakta bahwa menampilkan potensi wisata Kabupaten Buleleng dapat meningkatkan ekonomi dan menarik wisatawan dengan karakteristik budayanya. Pariwisata Buleleng harus dikembangkan dengan cara yang berkelanjutan untuk menarik investor. Selain itu, daerah akan bekerja sama dengan perguruan tinggi untuk mengidentifikasi potensi wisata Buleleng untuk dikelola dengan baik dan meningkatkan pendapatan daerah.

2.2.3. Sasaran Jangka Pendek *Smart Economy*

Sasaran pada *Smart Economy* berasal dari pemetaan masalah lokal sesuai dengan keadaan saat ini. Terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan: industri berdaya saing pada UMKM harus ditingkatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menciptakan lapangan pekerjaan baru, dan menurunkan jumlah uang kertas yang digunakan dalam transaksi.

Tabel 6 Sasaran Jangka Pendek *Smart Economy*

DIMENSI	MISI	SUB-DIMENSI	SASARAN	DASAR PEMIKIRAN
SMART ECONOMY	Mewujudkan masyarakat Buleleng yang memiliki keunggulan ekonomi dengan memanfaatkan teknologi informasi berlandaskan kearifan lokal	Ec1 Ekosistem Industri	Ec1.1 Meningkatkan sebaran industri pengolahan meningkatkan jumlah dan daya saing UMKM Meningkatkan jumlah dan daya saing koperasi	Peraturan Menteri Investasi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kemitraan Di Bidang Penanaman Modal Antara Usaha Besar Dengan Usaha, Kecil, Dan Menengah Di Daerah, sebab harus adanya kemudahan investasi sangat penting untuk menunjang pembangunan <i>Smart Economy</i>
		Ec2 Kesejahteraan Masyarakat	Ec2.1 Meningkatkan Kuantitas, kualitas produk pertanian, perkebunan, kehutanan dan perikanan	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, karena perlu meningkatkan kuantitas, kualitas produk pertanian, perkebunan, kehutanan dan perikanan dapat mendukung pembangunan
		Ec 3 Ekosistem Transaksi Keuangan	Ec3.1 Meningkatkan Kemudahan berinvestasi dan membangun <i>platform</i> investasi bagi pembangunan di Kabupaten Buleleng	Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi Daerah, sebab perlu adanya pendataan sebagai upaya mendukung

DIMENSI	MISI	SUB-DIMENSI	SASARAN	DASAR PEMIKIRAN
				bagi pembangunan <i>Smart Economy</i>

Sumber : Bimbingan Teknis Tahap 2 Kabupaten Buleleng 2023

Jika dilihat dari sasaran yang sudah dirumuskan dalam *Smart Economy*, kemudian dihubungkan dengan indikator dalam RPD, kemudian pada tahap berikutnya, dihubungkan dengan indikator SNI, UMKM menunjukkan tingkat produktivitas yang rendah. Ini menunjukkan bahwa skala yang dikelola, terutama skala mikro kecil, tidak ekonomis. Akibatnya, usaha mikro, kecil, dan menengah harus didorong untuk maju melalui berbagai program yang membantu mereka berkembang, seperti meningkatkan kemampuan pengelola melalui bimbingan, pelatihan, dan pendampingan dalam mengelola bisnis mereka; membangun badan hukum koperasi untuk memperkuat posisi mereka dan mendorong kerja sama antar koperasi. Selain itu, kurangnya pengetahuan manajemen, kurangnya pengetahuan tentang teknologi dan pemasaran, serta kurangnya kemampuan kewirausahaan UMKM menyebabkan rendahnya produktivitas. Selanjutnya, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Buleleng, pemerintah daerah akan membuka lapangan kerja sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan daerah. Pemerintah daerah menggunakan platform yang sudah ada untuk melakukan *cashless transaction* untuk mengurangi penggunaan uang kertas di masyarakat.

2.2.4. Sasaran Jangka Pendek *Smart Society*

Diharapkan Kabupaten Buleleng akan melakukan lebih banyak inovasi yang inovatif, responsif, dan kreatif untuk menanggapi perubahan lingkungan dan tantangan dalam upaya mewujudkan perencanaan pembangunan bidang sosial yang berkualitas. Peningkatan kualitas dapat dicapai melalui peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM, pemantapan sistem perencanaan di tingkat dasar, dan koordinasi dan komunikasi antar pemangku kepentingan.

Tabel 7 Sasaran Jangka Pendek *Smart Society*

DIMENSI	MISI	SUB-DIMENSI	SASARAN	DASAR PEMIKIRAN
SMART SOCIETY	Mewujudkan masyarakat Buleleng yang memiliki	S1 Interaksi Masyarakat	S1.1 Meningkatkan pelayanan publik, kualitas pelayanan internet dan	UU No 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan

DIMENSI	MISI	SUB-DIMENSI	SASARAN	DASAR PEMIKIRAN
	keunggulan ekonomi dengan memanfaatkan teknologi informasi berlandaskan kearifan lokal		pengembangan aplikasi	Permenkominfo RI No 8 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Jasa Internet Telepon Untuk Keperluan Publik, sebab masih banyak nya daerah yang masih belum terjangkau sinyal
		S2 Ekosistem Belajar/ Pendidikan	S2.1 Meningkatkan kualitas belajar dan pendidikan di Kabupaten Buleleng	Permendagri 59 tahun 2021 tentang standart pelayanan minimal, sebab perlu adanya edukasi sejak dini untuk menciptakan generasi yang cerdas
		S3 Keamanan Masyarakat	S3.1 Meningkatkan Keamanan dan Kenyamanan Masyarakat	Perda No. 6 tahun 2009 tentang ketentraman dan ketertiban umum dan Perda No. 2 th 2021 jo.Perda no. 1 tentang perijinan, sebab masih terdapat potensi kejahatan pada setiap Kecamatan

Sumber : Bimbingan Teknis Tahap 2 Kabupaten Buleleng 2023

Jika dilihat dari sasaran yang telah dibuat oleh *Smart Society*, sasaran tersebut kemudian dihubungkan dengan indikator dalam RPD. Namun, aplikasi yang ada di Pemkab Buleleng hanya sebagian kecil yang terintegrasi satu sama lain dari jumlah data yang tersedia, yang menyebabkan inefisiensi data karena sistem informasi yang berbeda harus menggunakan daya yang sama untuk masing-masing sistem. Selanjutnya, dalam hal pendidikan di Kabupaten Buleleng, diperlukan peningkatan kemampuan literasi dan numerasi melalui penerapan strategi pengembangan perpustakaan dan pameran pendidikan yang melibatkan siswa. Selain itu, perlu

ada pengawasan lingkungan yang sensitif di setiap area masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman.

2.2.5. Sasaran Jangka Pendek *Smart Living*

Masalah pembangunan lokal dapat berasal dari kelemahan yang tidak diatasi, kekuatan yang tidak dioptimalkan, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi. Selain itu, setiap masalah ditentukan untuk menentukan faktor-faktor yang menentukan keberhasilan di masa mendatang. Faktor kritis, hasil kinerja, dan faktor lainnya adalah faktor penentu keberhasilan karena sangat penting untuk menyelesaikan masalah pembangunan atau mewujudkan keberhasilan penyelenggaraan urusan pemerintahan. Rencana struktur ruang wilayah kabupaten yang mencakup pusat-pusat kegiatan, sistem prasarana utama, dan sistem prasarana lainnya harus memiliki hubungan fungsional dengan susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat, sehingga ruang publik dapat dianggap berhasil. Kawasan peruntukan permukiman dan kawasan peruntukan fasilitas penunjang permukiman adalah dua jenis kawasan budidaya yang dikembangkan. Kawasan permukiman termasuk kawasan yang diperuntukkan untuk kegiatan permukiman atau didominasi oleh lingkungan hunian, termasuk kawasan permukiman perkotaan dan pedesaan. Peruntukan fasilitas penunjang permukiman juga merupakan bagian dari kawasan permukiman baik permukiman perkotaan maupun pedesaan.

Tabel 8 Sasaran Jangka Pendek *Smart Living*

DIMENSI	MISI	SUB-DIMENSI	SASARAN	DASAR PEMIKIRAN
<i>SMART LIVING</i>	Mewujudkan kualitas dan kuantitas hidup masyarakat melalui infrastruktur dan pelayanan publik berbasis teknologi informasi	Lv1 Harmonisasi Tata Ruang	Lv1.1 Mewujudkan pola ruang yang sesuai dengan peruntukan ruang	Peraturan Pemerintah No.34 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Kawasan Perkotaan, karena masih banyaknya pembangunan yang tidak sesuai dengan peruntukkan ruang
		Lv2 Kesehatan	Lv2.1 Meningkatnya cakupan kepesertaan PUS ber KB dan meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat Peraturan BKKBN Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pemenuhan Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Bagi Pasangan Usia Subur Dalam Pelayanan Keluarga Berencana, karena untuk menciptakan pertumbuhan penduduk yang seimbang, Kesehatan merupakan suatu hak dasar masyarakat untuk memperoleh pelayanan dasar masyarakat

DIMENSI	MISI	SUB-DIMENSI	SASARAN	DASAR PEMIKIRAN
		Lv3 Transportasi	Lv3.1 Mewujudkan Keselamatan Transportasi	Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 26 Tahun 2015 tentang Standart Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, masih rendahnya capaian PAD dari Uji kendaraan bermotor sehingga dengan tertibnya uji kendaraan dapat mengantisipasi terjadinya kecelakaan lalu lintas

Sumber : Bimbingan Teknis Tahap 2 Kabupaten Buleleng 2023

Jika dilihat dari sasaran *Smart Living* yang sudah dirumuskan dan dihubungkan dengan indikator RPD, kemudian pada tahap berikutnya, yang berkaitan dengan indikator SNI, harmonisasi tata ruang dan pemanfaatan tata ruang sesuai dengan fungsinya memerlukan perhatian khusus. Karena kawasan permukiman dan RTH yang kurang optimal, tata ruang tidak berfungsi sebagaimana mestinya, sehingga perlu dilakukan penataan ulang agar efektif sesuai dengan fungsi. Dalam hal persentase ketersediaan fasilitas perhubungan, terbatasnya dana untuk pembangunan sarana dan prasarana transportasi. Ini adalah faktor yang mempengaruhi karena mengatasi masalah transportasi belum menjadi prioritas utama bagi pemerintah daerah.

2.2.6. Sasaran Jangka Pendek *Smart Environment*

Untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan wilayah, kebijakan, rencana, atau program yang sudah dibuat, fokus utamanya adalah lingkungan hidup. Kajian lingkungan hidup didorong dapat membantu mengukur dan mengarahkan keberlangsungan pengembangan pembangunan daerah dengan membuat pedoman untuk penggunaan sumber daya yang tepat.

Tabel 9 Sasaran Jangka Pendek *Smart Environment*

DIMENSI	MISI	SUB-DIMENSI	SASARAN	DASAR PEMIKIRAN
SMART ENVIRONMENT	Mewujudkan tata kelola pembangunan menuju pelestarian lingkungan berbasis teknologi	En1 Proteksi Lingkungan	En1.1 Membuat kebijakan dan penyusunan dokumen KLHS serta penyusunan dokumen RPPLH	Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, sebab perlunya memastikan bahwa rencana pembangunan berkelanjutan telah terintegrasi dengan aspek lingkungan, dan juga perlu adanya dokumen tertulis yang membuat potensi, masalah lingkungan hidup serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu
		En2 Pengelolaan Sampah Dan Limbah	En2.1 Membentuk Bank Sampah Unit untuk mengurangi timbunan sampah yang masuk ke TPA serta melakukan pengolah sampah organik dan anorganik	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Reduce, Reuse dan Recycle Melalui Bank Sampah, sebab masalah sampah dan limbah masalah bersama yang perlu diselesaikan dengan melibatkan berbagai pihak

DIMENSI	MISI	SUB-DIMENSI	SASARAN	DASAR PEMIKIRAN
		En3 Tata Kelola Energi	En3.1 Melakukan inovasi tempat pengolahan sampah menjadi energi listrik dan pengolahan sampah menjadi briket	Peraturan Menteri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Abu Dasar dan Abu Terbang Hasil Pengolahan Sampah Secara Termal, karena sampah dan limbah berpotensi menghasilkan energi baru

Sumber : Bimbingan Teknis Tahap 2 Kabupaten Buleleng 2023

Jika dilihat dari sasaran yang sudah dirumuskan dalam *Smart Environment*, kemudian dihubungkan dengan indikator dalam RPD, kemudian pada tahap berikutnya, yang berkaitan dengan indikator SNI, perlu diperhatikan bahwa proteksi lingkungan dengan mempertimbangkan kembali kebijakan yang mendukung lingkungan. Salah satu cara untuk memantau dengan baik pergerakan pemanfaatan lingkungan adalah dengan melakukan monitoring dan evaluasi kebijakan lingkungan. Selain itu, masalah lingkungan lainnya adalah masalah sampah. Sampah dapat diatasi dengan izin pembuangan sampah dan pengelolaan sampah dapat diubah menjadi energi terbarukan. Pemerintah daerah bertanggung jawab untuk mengolah sampah sehingga tidak berdampak buruk pada lingkungan.

3. PROFIL QUICKWINS *SMART CITY* DAERAH

Dalam konteks *Smart City* profil quickwins merujuk pada inisiatif atau solusi yang dapat dilaksanakan dengan cepat dan memberikan hasil positif yang langsung terlihat atau dirasakan oleh masyarakat dalam jangka waktu yang singkat. Tujuan dari quickwins adalah untuk menunjukkan manfaat dari pendekatan *Smart City* dan mendapatkan dukungan dari masyarakat. Tentu dalam praktiknya quickwins dapat berupa implementasi teknologi tertentu, peluncuran aplikasi, atau inisiatif lain yang menawarkan solusi cepat untuk masalah kota tertentu. Namun, penting untuk mengingat bahwa quickwins seharusnya hanya langkah awal atau pendekatan untuk memulai transformasi kota menjadi *Smart City* yang lebih mendalam. Quickwins juga dapat membangun momentum dan mendapatkan dukungan dari stakeholder dan menunjukkan nilai investasi *Smart City* kepada publik.

3.1. Quickwin *Smart Governance*

Quickwin *Smart Governance* merupakan sebuah strategi atau inisiatif untuk menerapkan *Smart Governance* yang menghasilkan luaran yang positif dalam pelayanan publik serta mendapatkan kepercayaan publik. Dalam hal ini pada *Smart Governance* di Kabupaten Buleleng mengembangkan aplikasi AKU ONLINE sebagai quickwin sebagai pendukung bidang administrasi.

Tabel 10 Quickwin *Smart Governance*

Butir Pengisian Formulir	Penjelasan
1. Nama singkat inovasi	Aplikasi Administrasi Kependudukan Online (Aku Online)
2. Penjelasan singkat	Untuk meningkatkan kepuasan masyarakat secara signifikan mengingat dominasi keluhan masyarakat masyarakat setiap hari adalah terbatasnya quota pengajuan permohonan, terbatasnya waktu pelayanan pelayanan menjadi lebih efektif dan karena aplikasi ini membantu masyarakat dengan mendekatkan lokasi pelayanan di tingkat kecamatan bahkan sampai ke tingkat desa/kelurahan untuk memudahkan masyarakat di dalam mengajukan permohonan, Dinas lebih mudah untuk memonitoring permohonan yang masuk dan terselesaikan.
3. Status saat ini	Kode Status: dalam siklus manajemen inovasi yaitu kode 6 adalah evaluasi dan rencana pengembangan lebih lanjut sedang berlangsung Persentase Selesai: 100% Penjelasan : Dalam tahap pengembangan server di Kabupaten Buleleng, Didukung melalui web aplikasi atau mobile aplikasi (android/ios), dapat diakses melalui http://akuonline.bulelengkab.go.id/ , adanya pelaksanaan dan ditetapkan dengan SK Kepala Perangkat Daerah, jumlah dokumen

Butir Pengisian Formulir	Penjelasan
	yang telah diselesaikan sampai dengan saat ini sebanyak 48.374, evaluasi dan rencana pengembangan lebih lanjut sedang berlangsung
4. Manfaat dari inovasi	Pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih dekat melalui loket desa/kelurahan dan kecamatan
5. Keunikan/kreativitas	Aplikasi Aku Online ini juga sangat mudah, masyarakat secara mandiri dapat mengajukan permohonan tanpa batas, juga bisa diajukan dalam waktu 24 jam dari hari Senin sampai hari Minggu. dan dapat terselesaikan dalam kurun waktu kurang dari 24 jam.
6. Kemitraan	Bekerjasama dengan pihak Kabupaten Wonogiri yang mana Kabupaten Wonofiri berperan sebagai penyedia server utama aplikasi AKU Online. Persentase progres kemitraan 100%
7. Potensi untuk pengembangan lebih lanjut	Dengan melihat antusias masyarakat khususnya di bidang pelayanan administrasi kependudukan, kedepannya aplikasi AKU Online akan dikembangkan dengan server sendiri yang ada di Kabupaten Buleleng dan juga akan melakukan evaluasi untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan dari Aplikasi AKU Online.
8. Strategi menjaga keberlangsungan	Meningkatkan kualitas SDM yang berkompeten dalam pelayanan publik, menetapkan Pedoman teknis berupa buku yang dapat diakses secara online atau berupa video tutorial, mengembangkan server yang lebih optimal dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan AKU Online
9. Sumber daya yang digunakan	APBD Kabupaten Buleleng
10. Analisa risiko	<ul style="list-style-type: none"> Masyarakat pengguna Iphone masih belum bisa mengajukan layanan administrasi kependudukan pada aplikasi AKU ONLINE karena aplikasi tersebut berbasis android. Maka untuk itu masyarakat bisa mengajukannya melalui loket yang ada di desa. Permasalahan dukungan jaringan internet, maka dari itu memperluas jangkauan sinyal dengan berkoordinasi kepada Diskominfo untuk memperluas akses jaringan

Sumber : Bimbingan Teknis Tahap 3 Kabupaten Buleleng 2023

Inovasi AKU ONLINE yang menjadi quickwins *Smart Governance* dipilih sebagai sebuah solusi permasalahan administrasi yang rumit di Buleleng. Aplikasi AKU ONLINE yang bisa di akses tanpa batas yaitu secara 24 jam memberikan kemudahan masyarakat dalam menjangkaunya, pelayanan ini bahkan sampai ke tingkat desa dan kecamatan yang mana sangat memudahkan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan administrasi. Pelayanan AKU ONLINE sangat efektif dari segi waktu karna pelayanan ini tidak mengenal hari libur serta bisa terselesaikan dalam kurun waktu kurang dari 24 jam. Pelayanan ini memudahkan masyarakat di dalam proses pengajuan layanan dan memantau permohonannya. Selain itu, dinas lebih mudah untuk memonitoring permohonan yang masuk dan terselesaikan. Inovasi ini

bekerjasama dengan pihak Kabupaten Wonogiri sebagai server utama saat ini. Dengan melihat antusias masyarakat khususnya di bidang pelayanan administrasi kependudukan, kedepannya aplikasi AKU ONLINE akan dikembangkan dengan server sendiri yang ada di Kabupaten Buleleng.

3.2. Quickwin Smart Branding

Quickwin *Smart Branding* merupakan sebuah program dengan implementasi yang mudah dan cepat dilaksanakan untuk membangun dan mengembangkan program sebagai kebutuhan pemerintah daerah. Saat ini *Smart Branding* mengambil sebuah keputusan quickwin yaitu Visiting Buleleng yang mana aplikasi ini berfungsi sebagai media informasi promosi dan edukasi, memudahkan wisatawan untuk mengakses informasi kepariwisataan dan ekonomi kreatif selain itu Visiting Buleleng juga sebagai tanda bahwa Kabupaten Buleleng sudah menerapkan digitalisasi dalam memberikan informasi pariwisata.

Tabel 11 Quickwin *Smart Branding*

Butir Pengisian Formulir	Penjelasan
1. Nama singkat inovasi	Visiting Buleleng
2. Penjelasan singkat	Informasi kepariwisataan tentang Buleleng baik dari sisi potensi, atraksi, maupun fasilitas lainnya belum banyak diketahui oleh calon wisatawan yang ingin berkunjung ke Kabupaten Buleleng. Berdasarkan hal tersebut Kabupaten Buleleng berinisiasi membuat program dalam bentuk aplikasi Visiting Buleleng dalam upaya untuk memudahkan wisatawan dalam memperoleh informasi tentang kepariwisataan di Kabupaten Buleleng. Disamping itu juga, aplikasi ini dapat digunakan sebagai media promosi.
3. Status saat ini	Kode status: dalam siklus manajemen inovasi yaitu kode 3 adalah rencana pembangunan/implementasi dalam pembuatan Presentase selesai: 50% Penjelasan: program tersebut saat ini sudah dimiliki website yang sudah beroperasi, tahap selanjutnya adalah melaksanakan pengembangan dengan membangun aplikasi yang nantinya <i>mensupport</i> di android https://bulelengnorthbali.id
4. Manfaat dari inovasi	Memberikan informasi kepada wisatawan terkait daya tarik wisata, kuliner, akomodasi, jenis budaya dan tradisi, <i>money changer</i> , peta wisata serta informasi lainnya yang berhubungan dengan pariwisata
5. Keunikan/kreativitas	Mendapatkan informasi tentang potensi dan saran pariwisata secara detail dan lengkap dalam satu aplikasi yang terhubung dengan aplikasi pembayaran dan <i>market place</i>
6. Kemitraan	Lembaga pariwisata : PHRI, ASITA, GAHAWISRI, BPPD, Perguruan Tinggi (Memberikan data & informasi tentang fasilitas pendukung pariwisata, seperti : akomodasi, paket wisata) Progres kemitraan 100%.

Butir Pengisian Formulir	Penjelasan
	Kelompok masyarakat terkait pariwisata : kelompok sadar wisata (memberikan data & informasi tentang atraksi wisata) Progres kemitraan 100%.
7. Potensi untuk pengembangan lebih lanjut	Kemudahan untuk mengakses informasi pariwisata bagi semua kalangan
8. Strategi menjaga keberlangsungan	Peningkatan kompetensi SDM terhadap pengembangan aplikasi, mengadvokasi wisatawan untuk mengunduh aplikasi pada saat masuk ke Buleleng, melengkapi dengan nomor-nomor <i>emergency</i> , melengkapi dengan kalender event di Buleleng
9. Sumber daya yang digunakan	Tenaga ahli terkait aplikasi dan anggaran dari APBN, APBD
10. Analisa risiko	Adanya resiko <i>hacking</i> terhadap jaringan, <i>server down</i> , kerusakan <i>hardware/software</i> , koneksi jaringan terputus, maka dari itu perlu untuk mengatasi resiko tersebut dengan melakukan <i>backup</i> data secara berkala dan memasang antivirus

Sumber : Bimbingan Teknis Tahap 3 Kabupaten Buleleng 2023

Inovasi Visiting Buleleng dipilih sebagai solusi dari permasalahan yang berkaitan dengan sektor pariwisata di Kabupaten Buleleng, aplikasi Visiting Buleleng rencananya berbasis web yang tentunya tidak menutup kemungkinan akan terus dikembangkan sebagai aplikasi berbasis android dan IOS. Visiting Buleleng ditentukan sebagai quickwin *Smart Branding* akan memuat konten yang berisi daya tarik wisata berupa informasi destinasi wisata alam, budaya, buatan dan spiritual. Kemudian aplikasi ini rencananya juga memuat atraksi wisata seperti informasi tentang atraksi wisata diantaranya snorkeling/diving, hiking, tracking dan lain sebagainya. Selain menampilkan sektor pariwisata, pada aplikasi ini juga rencananya akan memuat fasilitas kesehatan seperti menyajikan informasi fasilitas kesehatan yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Buleleng.

3.3. Quickwin *Smart Economy*

Quickwin *Smart Economy* merupakan sebuah program percepatan untuk bisa menyelesaikan masalah secara cepat dan tepat, pada *Smart Economy* menghasilkan quickwin program PLUT UMKM yang merupakan fasilitas untuk memberikan dukungan dan pelayanan kepada koperasi, usaha kecil dan menengah Kabupaten Buleleng dalam berbagai bidang, meliputi bidang kelembagaan, bidang SDM, bidang produksi, bidang pembiayaan, bidang pemasaran, bidang pengembangan teknologi informasi dan bidang pengembangan jaringan kerjasama.

Tabel 12 Quickwin *Smart Economy*

Butir Pengisian Formulir	Penjelasan
1. Nama singkat inovasi	PLUT UMKM
2. Penjelasan singkat	PLUT UMKM mengatasi permasalahan UMKM dalam hal produksi, kemasan, pemasaran, promosi. Selain itu PLUT UMKM juga memfasilitas UMKM dalam mengakses permodalan, temu mitra, dan meningkatkan kapasitas UMKM melalui pelatihan-pelatihan usaha, manajemen usaha dan promosi transaksi. PLUT akan menuju pelayanan online, dimana UMKM bisa mengakses layanan PLUT secara online (mengakses pelatihan, akses permodalan, temu mitra melalui website atau aplikasi online yang dikembangkan)
3. Status saat ini	Kode status: dalam siklus manajemen inovasi yaitu kode 4 adalah inovasi dan komponen pendukungnya dalam pembangunan Persentase penyelesaian: 50% Penjelasan: PLUT UMKM akan mengakomodasi pelaku UMKM untuk mendapatkan segala kebutuhan para UMKM mulai dari pelatihan, permodalan, dan temu mitra selain itu dilatih dalam pengelolaan UMKM agar bisa bertahan dan bersaing.
4. Manfaat dari inovasi	Penerima manfaat tentunya adalah UMKM di Kabupaten Buleleng yang mana dapat meningkatkan kapasitas UMKM untuk berdaya saing dalam hal tata kelola usaha, akses permodalan, produksi, promosi dan pemasaran.
5. Keunikan/kreativitas	Inisiatif pelaku usaha di Buleleng untuk mendapat pendampingan/pelatihan usaha melalui PLUT sangat tinggi, adanya dukungan pemerintah daerah dalam mengembangkan produk unggulan daerah sebagai bentuk hilirisasi produk melihat potensi SDA Buleleng yang cukup besar.
6. Kemitraan	Pihak perbankan, pengusaha/UMKM sukses yang masing-masing memiliki peran menjadi motivator dan memberikan tips and trick cara mengembangkan UMKM yang sukses bagi UMKM lainnya Persentase progres kemitraan 50%
7. Potensi untuk pengembangan lebih lanjut	Pengembangan layanan PLUT berbasis digital (online) melalui website atau aplikasi, pengembangan PLUT terintegrasi dengan rumah kemasan (dalam proses pengusulan)
8. Strategi menjaga keberlangsungan	Pilihan pendekatan/langkah yang diambil dalam rangka memastikan keberlangsungan implementasi dan pengembangan dari inovasi dapat terjadi melalui kebijakan/regulasi, kelembagaan, penyediaan infrastruktur, sumber daya dan kompetensi. Sebab keberadaan PLUT dilandasi dasar hukum Perbup 28 Tahun 2023 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT). Kemudian dukungan pemerintah daerah terkait penyediaan infrastruktur PLUT, sumberdaya dan kompetensi melalui tahap perencanaan dan penganggaran APBD atau sumber daya pembiayaan lainnya.
9. Sumber daya yang digunakan	Sumber Daya yang diperlukan dalam perencanaan, pembangunan, implementasi dari inovasi. Bentuknya dapat berupa pendanaan, tenaga ahli, sarana dan bentuk lain. Pilihan-pilihan sumber penyediaan yang ada. Kemudian diperlukan narasumber pelatihan,

Butir Pengisian Formulir	Penjelasan
	tenaga ahli/akademisi, pendanaan layana PLUT dan kemitraan dengan pihak lain (pihak perbankan seperti Bank BPD Bali dan Pegadaian)
10. Analisa risiko	Dari sisi lingkungan bangunan PLUT perlu dimitigasi dari risiko terkena banjir karena PLUT berdekatan dengan badan sungai. Kemudian dari sisi SDM PLUT perlu didukung keberadaan tenaga ahli yang mengikuti uji kompetensi (bersertifikat). Kemudian lebih lanjut untuk meminimalisir risiko yang ada maka Dinas Perindagkop UKM pada tahun 2025 telah merancang pembangunan tembok pembatas antara PLUT dengan sungai sehingga ke depan risiko masyarakat yang berkunjung ke lokasi PLUT aman dari risiko jatuh ke sungai demikian pula risiko banjir dapat terminimalisir risiko tersebut.

Sumber : Bimbingan Teknis Tahap 3 Kabupaten Buleleng 2023

Inovasi PLUT UMKM pada *Smart Economy* merupakan sebuah gagasan untuk menjaring UMKM dalam pemberdayaan untuk keberlanjutan sehingga dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ekonomi daerah. PLUT UMKM ini akan meningkatkan produktivitas usaha koperasi dan UMKM, meningkatkan kualitas produk dan pelayanan koperasi dan UMKM, meningkatkan permodalan dan omzet usaha koperasi dan UMKM, meningkatkan peluang pemasaran koperasi dan UMKM, meningkatkan pendapatan koperasi dan UMKM, meningkatkan status koperasi dan UMKM. Adapun quickwin yang diusulkan ini merupakan perwujudan Lembaga Pelayanan PLUT yang kuat dan mandiri sehingga dapat meningkatkan kualitas SDM pelaku UMKM dan pengelola koperasi dalam rangka meningkatkan pendapatan koperasi dan pelaku UMKM guna meningkatkan perekonomian Kabupaten Buleleng sesuai dengan faslsafah Tri Hita Karana.

3.4. Quickwin *Smart Living*

Quickwin *Smart Living* merupakan salah satu sebuah solusi permasalahan yang dimiliki oleh pemerintah Kabupaten Buleleng yaitu inovasi nya adalah Jas Bule Gratis. Inovasi ini lahir dari keresahan masyarakat dalam mengakses moda transportasi bagi anak-anak yang ingin bersekolah. Diharapkan adanya inovasi Jas Bule Gratis dapat membantu masyarakat yang mempunyai anak menuju sekolah dengan memanfaatkan fasilitas layanan yang dimiliki oleh pemerintah Kabupaten Buleleng.

Tabel 13 Quickwin *Smart Living*

Butir Pengisian Formulir	Penjelasan
1. Nama singkat inovasi	Jas Bule Gratis
2. Penjelasan singkat	Terdapat dua Bus sekolah Dishub lengkap dengan Sopir dan Kondektur Melaksanakan pelayanan Bus Sekolah gratis dengan rute T, Penarukan - TSukasada dan sebaliknya T Sukasada - T Penarukan pada jam sibuk pagi dan siang sekolah yaitu pukul 6.20 - 7.20 dan jam 11.40 - 12.40 dengan aplikasi rute bus sekolah (Jas Bule Gratis)
3. Status saat ini	<p>Kode status: dalam siklus manajemen inovasi yaitu kode 5 adalah implementasi inovasi sedang berlangsung</p> <p>Penjelasan: Sudah Terdapat dua Bus sekolah Dishub lengkap dengan Sopir dan Kondektur Melaksanakan pelayanan Bus Sekolah gratis dengan rute T, Penarukan - TSukasada dan sebaliknya T Sukasada - T Penarukan pada jam sibuk pagi dan siang sekolah yaitu pukul 6.20 - 7.20 dan jam 11.40 - 12.40 dengan aplikasi rute bus sekolah (Jas Bule Gratis) dan akan dipasang GPS sehingga siswa sekolah yang sering memakai jasa bus sekolah dapat melacak keberadaan Bus Sekolah</p> <p>Persentase penyelesaian: 85 %</p>
4. Manfaat dari inovasi	Dapat membantu mengurangi kemacetan lalu lintas pada jam sibuk pagi dan siang sekolah karena mengurangi penggunaan kendaraan pribadi dari siswa sekolah. Dapat membantu siswa yang berada dibawah garis kemiskinan dalam operasional sekolah.
5. Keunikan/kreativitas	Siswa Pengguna Bus Sekolah Gratis (Jas Bule Gratis) dapat mengetahui letak bus sekolah yang sudah terpasang alat GPS terkini melalui aplikasi, sehingga dapat mengatur keberangkatan ke sekolah
6. Kemitraan	<p>Dinas Pendidikan : memberikan sosialisasi dan penyuluhan kepada Siswa agar menggunakan Bus sekolah demi keselamatan dan kenyamanan berangkat dan pulang sekolah</p> <p>Dinas Kominfo : Pembuatan Aplikasi dan pemasangan GPS agar keberadaan Bus sekolah dapat terdeteksi</p> <p>Persentase progres kemitraan 75%.</p>
7. Potensi untuk pengembangan lebih lanjut	Untuk Bus Sekolah gratis nantinya dapat berbayar dengan menggunakan sampah plastik dengan bekerjasama dengan Bank sampah.
8. Strategi menjaga keberlangsungan	Dengan Memasukkan biaya operasional (BBM, Servis kendaraan, Gaji sopir dan kondektur) dalam DPA Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng.
9. Sumber daya yang digunakan	Bus Sekolah sumbangan Hibah dari Kementrian Perhubungan, Biaya Operasional Kendaraan dari Dpa Dishub, GPS dan aplikasi dari Kominfo.
10. Analisa risiko	<ul style="list-style-type: none"> Resikonya adalah kecelakaan lalu lintas yang menimpa bus sekolah, untuk itu diperlukan Standar Operasional Prosedur (SOP) saat mengoperasikan bus sekolah harus sudah dalam keadaan laik jalan dan juga bekerjasama dengan PT AK Jasa Raharja Singaraja terhadap asuransi kecelakaan pada penumpang dan awak bus sekolah.

Butir Pengisian Formulir	Penjelasan
	<ul style="list-style-type: none"> Resiko bus sekolah rusak sehingga tidak bisa dipakai untuk operasional, untuk itu disiapkan biaya pemeliharaan dan operasional pada bus sekolah.

Sumber : Bimbingan Teknis Tahap 3 Kabupaten Buleleng 2023

Inovasi Jas Bule Gratis merupakan gagasan dari Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng, inovasi ini lahir dari keresahan masyarakat yang sangat sulit menjangkau transportasi publik yang minim di Buleleng. Saain itu, biaya yang harus dikeluarkan juga tidak sedikit ketika anak-anak mereka ingin pergi ke sekolah. Maka dari itu inovasi ini hadir sebagai solusi permasalahan tersebut sehingga dapat membantu meringankan masyarakat. Kemudian inovasi Jas Bule Gratis dapat mengurangi kemacetan lalu lintas perkotaan pada saat jam sibuk pagi dan sibuk siang sekolah, dapat mengurangi tingkat kecelakaan lalu lintas perkotaan yang banyak dialami anak-anak sekolah, dan dapat membantu siswa yang berada dibawah garis kemiskinan dalam operasional sekolah di wilayah perkotaan. Jas Bule Gratis mempunyai rute-rute tertentu dalam jangkauannya dan rute tersebut sudah dikeluarkan SK Bupati Buleleng tentang Waktu Operasional dan Rute Bus Sekolah Untuk Angkutan Perkotaan Tahun 2023.

3.5. Quickwin *Smart Society*

Kasus anak putus sekolah merupakan tantangan dalam mewujudkan salah satu agenda strategis pemerintah Kabupaten Buleleng yaitu meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pendidikan. Terdapat banyak faktor yang melatarbelakangi anak putus sekolah yaitu faktor ekonomi, faktor geografis dan faktor sosial. Pemerintah Kabupaten Buleleng hadir menciptakan inovasi untuk anak yang putus sekolah yaitu POSKO DO. Inovasi tersebut memberikan kembali hak dan kewajiban anak-anak untuk dapat bersekolah kembali dengan memberikan peluang dan subsidi yang dibiayai oleh pemerintah Kabupaten Buleleng dibawah naungan Dinas Pendidikan Buleleng.

Tabel 14 Quickwin Smart Society

Butir Pengisian Formulir	Penjelasan
1. Nama singkat inovasi	POSKO DO
2. Penjelasan singkat	Pada tahun 2022 masih terdapat angka drop-out atau siswa yang tidak melanjutkan sekolah di Kabupaten Buleleng pada jenjang SD dan SMP sebanyak 66 orang siswa yang terdiri dari siswa SD sebanyak 52 siswa dan SMP sebanyak 14 siswa. Kondisi ini harus segera ditangani mengingat menjadi sesuatu yang “berulang tahun” yaitu

Butir Pengisian Formulir	Penjelasan
	setiap tahun pelajaran baru akan terjadi peristiwa dimana anak-anak sekolah ada yang enggan melanjutkan sekolahnya ke jenjang yang lebih tinggi dengan berbagai alasan dan kondisi yang ada. hal ini juga menyumbang angka yang tidak sedikit dalam menambah angka drop-out di Kabupaten Buleleng. berangkat dari permasalahan tersebut pemerintah Kabupaten Buleleng terus berupaya menekan angka putus sekolah, salah satunya dengan program POSKO DO dalam upaya menyelamatkan generasi bangsa untuk bisa memperoleh akses pendidikan yang layak sesuai jenjangnya masing-masing
3. Status saat ini	Kode status: dalam siklus manajemen inovasi yaitu kode 5 adalah implementasi inovasi sedang berlangsung Persentase penyelesaian: 100% Penjelasan: inovasi ini membidik anak-anak di Kabupaten Buleleng yang putus sekolah, namun dalam inovasi ini masih minimnya pembiayaan dari pihak terkait maka perlu pengembangan koalisi dalam meningkatkan partisipasi donatur
4. Manfaat dari inovasi	Dengan diadakannya kegiatan ini tentunya dapat menekan angka putus sekolah setiap tahun disamping itu juga meningkat APS di Kabupaten Buleleng
5. Keunikan/kreativitas	Sebagai penumbuhan rasa solidaritas sesama anak negeri dalam memanifestasikan Tujuan Pendidikan Nasional yang merata dan berkualitas dengan berpegang pada <i>frame Education For all</i> (Pendidikan dari kita, oleh kita dan untuk kita semua). Pemerataan aksesibilitas dalam memperoleh pendidikan yang baik sesuai dengan amanat undang-undang 1945 disamping itu juga membantu meringankan beban orangtua siswa dalam pembiayaan pendidikan
6. Kemitraan	Masyarakat Buleleng yang menjadi donatur (CSR) Persentase progres kemitraan 100%
7. Potensi untuk pengembangan	Bekerjasama dengan pihak desa dalam rangka membuka akses pendidikan kesetaraan/non formal di masing-masing desa sebagai upaya untuk memfasilitas anak-anak atau masyarakat yang ingin melanjutkan pendidikan
8. Strategi menjaga keberlangsungan	Dengan menerbitkan SK Bupati Buleleng tentang Petunjuk teknis penyaluran bantuan perlengkapan sekolah dan melakukan forum discussion group (FGD) dengan kepala sekolah dan kepala desa secara berkala untuk melakukan pendataan peserta didik yang putus sekolah atau tidak pernah bersekolah sama sekali
9. Sumber daya yang digunakan	Anggaran dari APBD, dana CSR, Tim dari Disdikpora Buleleng, koordinator wilayah di masing-masing Kecamatan, Musyawarah Kerja kepala Sekolah SMP, Kelompok Kerja Kepala Sekolah SD
10. Analisa risiko	Terbatasnya anggaran APBD menyebabkan tidak semua siswa tidak mampu diberikan bantuan. (Beresiko meningkatkan jumlah siswa putus sekolah) Upaya mengatasi resiko tersebut sebagai berikut: Mengajukan proposal bantuan (CSR) kepada perusahaan/pihak ketiga Memaksimalkan usulan kuota bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) ke pemerintah pusat agar semakin banyak siswa tidak mampu yang terbantu

Sumber: Bimbingan Teknis Tahp 3 Kabupaten Buleleng 2023

Inovasi POSKO DO hadir untuk menjaring anak-anak di Kabupaten Buleleng yang putus sekolah, disisi lain inovasi ini menggugah para dermawan yang ada di Kabupaten Buleleng maupun daerah yang lain untuk menyisihkan pendapatannya membantu anak-anak Buleleng yang tidak dapat melanjutkan pendidikan, kemudian mensukseskan program wajar, dan program 12 PAS Kabupaten Buleleng yaitu kualitas dan aksesibilitas pendidikan. Inovasi ini selain dibiayai dari APBD, program POSKO DO ini juga didanai CSR yang merupakan wujud nyata dalam bentuk implementasi dari kepedulian badan usaha terhadap tanggung jawab sosial. Selain itu, pihak ketiga juga turut berpartisipasi dalam program POSKO DO ini mulai dari musyawarah kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMP memberikan bantuan seperti seragam sekolah. Adapun mekanisme bantuan yang diberikan dari POSKO DO adalah bantuan yang diberikan dapat berupa barang ataupun uang yang dapat menunjang pendidikan sesuai dengan kebutuhan siswa, kemudian penyaluran bantuan diberikan langsung kepada siswa yang bersangkutan tanpa melalui perantara pejabat/pegawai dinas, namun tetap berkoordinasi dengan Kepala Sekolah dan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng melalui POSKO DO.

3.6. Quickwin *Smart Environment*

Quickwin *Smart Environment* merupakan sebuah inovasi yang dibangun untuk menjawab permasalahan lingkungan adapun inovasi tersebut yang menjadi quickwin adalah BULAN MELAH, inovasi ini telah diimplementasikan di Kabupaten Buleleng sejak tahun 2019 dan mendukung Perda Kabupaten Buleleng No 1 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah melalui pembentukan BSI E-Darling dan BSU yang berkontribusi dalam pengurangan sampah. Inovasi yang terdiri dari BSI E-Darling dan seluruh BSU memiliki kebaruan/nilai tambah dalam menunjang program Buleleng menabung (BU MENA) yang merupakan salah satu program TPAKD Kabupaten Buleleng dalam meningkatkan inklusif dan literasi keuangan. Kemudian keunikan BULAN MELAH ini merupakan bentukan beberapa produk tabungan sampah BSU di konversi menjadi tabungan emas bersinergi dengan PT. Pegadaian Singaraja

Tabel 15 Quickwin *Smart Environment*

Butir Pengisian Formulir	Penjelasan
1. Nama singkat inovasi	BULAN MELAH (Buleleng Kelola Sampah Anorganik Melalui Bank Sampah)
2. Penjelasan singkat	Bulan Melah merupakan inovasi yang dikembangkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng untuk mengatasi jumlah

Butir Pengisian Formulir	Penjelasan
	<p>timbunan sampah, khususnya sampah anorganik. Masyarakat menabung sampah anorganik ke Bank Sampah Unit (BSU) yang ada di masing-masing desa/kelurahan. Sampah yang dikumpulkan oleh masing-masing BSU kemudian diambil oleh Bank Sampah Induk (BSI). Sampah yang sudah terkumpul dari seluruh BSU disalurkan ke pengepul sampah sesuai dengan perjanjian/ MoU.</p> <p>Bank Sampah Unit (BSU) yakni bank sampah yang berlokasi di tingkat masyarakat (RT/RW), sekolah/ fasilitas pendidikan dan dunia usaha. BSU ini digunakan sebagai tempat untuk mengumpulkan sampah yang sudah dipilah-pilah.</p> <p>Bank Sampah Induk (BSI) adalah bank sampah yang dibentuk di setiap kota dan kabupaten administrasi yang berfungsi untuk menampung sampah yang sudah terpilah dari BSU dan menyalurkannya ke industri daur ulang dan/atau pemanfaat lainnya.</p>
3. Status saat ini	<p>Kode status: dalam siklus manajemen inovasi yaitu kode 5 adalah Implementasi inovasi sedang berlangsung</p> <p>Persentase penyelesaian: 75%</p> <p>Penjelasan: inovasi ini sedang dilaksanakan setiap tahun dan berkelanjutan</p>
4. Manfaat dari inovasi	<p>Dapat mengurangi jumlah timbunan sampah anorganik di Kabupaten Buleleng, memberikan keuntungan ekonomis kepada nasabah/masyarakat yang menabung sampah di BSU, sampah memiliki nilai ekonomis, meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memilah sampah di sumbernya, mendukung program Buleleng Menabung (BU MENA)</p>
5. Keunikan/kreativitas	<p>Sampah bernilai ekonomis. Tabungan BSU saat ini sudah dapat dikonversi menjadi tabungan emas berkerjasama dengan PT Pegadaian Singaraja. Selain itu sampah juga dapat digunakan untuk membayar kegiatan: les tari, les bahasa Inggris, lesa dolanan, dll.</p>
6. Kemitraan	<p>Pihak yang terlibat antara lain: Bank BPD Bali, PT Pegadaian Cabang Singaraja, Desa/Kelurahan, dan relawan pendidikan/seni-budaya.</p> <p>Bank BPD Bali, merupakan mitra perbankan dari BSU dan BSI untuk menyimpan hasil penjualan sampah anorganik berupa nominal uang;</p> <p>PT Pegadaian Cabang Singaraja, merupakan mitra terbaru dari Bank Sampah Unit dan Bank Sampah Induk yang melakukan kerja sama, dimana capaian hasil pengumpulan sampah sudah mencapai 5 gram emas.</p> <p>Desa/ Kelurahan: merupakan tempat kedudukan dimana lokasi Bank Sampah Unit berada;</p> <p>Relawan Pendidikan Seni/Budaya merupakan sekelompok orang yang membantu mempunyai kepedulian tinggi terhadap permasalahan lingkungan terutama sampah. kelompok ini membantu pemerintah, karena berperan aktif dalam hal sosialisai pengelolaan lingkungan yang baik kepada masyarakat umum.</p>

Butir Pengisian Formulir	Penjelasan
	Progres kemitraan sudah mencapai 75% sampai dengan akhir Tri Wulan III.
7. Potensi untuk pengembangan lebih lanjut	Inovasi ini berpeluang untuk dikembangkan terus, mengingat sampah anorganik tidak pernah habis dan minat masyarakat semakin tinggi untuk mendapatkan nilai ekonomis dari sampah
8. Strategi menjaga keberlangsungan	Adanya Peraturan Bupati Nomor 1 tahun 2019 tentang kebijakan dan strategi Kabupaten Buleleng dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga, adanya Instruksi Bupati Buleleng Nomor 367/DLH/2019 tentang pengurangan penggunaan plastik sekali pakai, berkoordinasi dengan stakeholder untuk menjamin pelaksanaan inovasi agar sesuai dengan regulasi yang berlaku, melakukan pendekatan kepada masyarakat untuk berkolaborasi membentuk Bank Sampah Unit (BSU), mendorong masyarakat untuk mengelola sampah pada sumbernya dengan melakukan pemilahan
9. Sumber daya yang digunakan	APBD, CSR, Pendapatan Usaha, Sumber daya manusia (pengelola BSU dan penyuluh BSI), Gedung BSI
10. Analisa risiko	<ul style="list-style-type: none"> Keterlambatan pengambilan sampah oleh BSI ke masing-masing BSU berpotensi menyebabkan penumpukan sampah di masing-masing unit BSU, sehingga BSI perlu membuat jadwal jelas pengambilan sampah ke BSU. Kendala dalam proses penarikan uang tunai oleh nasabah, hal ini bisa terjadi karena BSI juga bekerja sama dengan BPD dalam penyimpanan uang nasabah sehingga perlu dibuatkan jadwal-jadwal penarikan Pada saat musim hujan, sampah anorganik dengan jenis tertentu (kardus, kertas) rentan rusak, sehingga memerlukan gedung tempat penyimpanan sehingga aman dari hujan

Sumber: Bimbingan Teknis Tahap 3 Kabupaten Buleleng 2023

Saat ini inovasi BULAN MELAH sudah berkontribusi terhadap peningkatan jumlah sampah anorganik yang dikelola di Kabupaten Buleleng yaitu pada tahun 2021 sebanyak 81,73 Ton dan meningkat menjadi 104,77 Ton pada tahun 2022. Secara tidak langsung peningkatan jumlah sampah anorganik yang dikelola ini berkontribusi terhadap peningkatan jumlah sampah yang dikelola di Kabupaten Buleleng. Dalam hal ini inovasi yang dibangun oleh BULAN MELAH yaitu dengan mengimplementasi BSU yang menjadi salah satu percontohan dalam pengurangan sampah dengan program Les tukar sampah dan diadopsi oleh beberapa satuan pendidikan, kelompok masyarakat dan instansi pemerintah di Kabupaten Buleleng. Kegiatan BSU Kaliber mudah direplikasi dan diimplementasikan dimana saja

sehingga tidak memerlukan tempat khusus untuk operasional bank sampah. Namun inovasi ini masih terkendala yaitu salah satu diantaranya adalah keengganan masyarakat untuk memilah sampah anorganik sesuai jenisnya sehingga dibeli murah oleh BSU.

4. MANAJEMEN RISIKO QUICKWINS

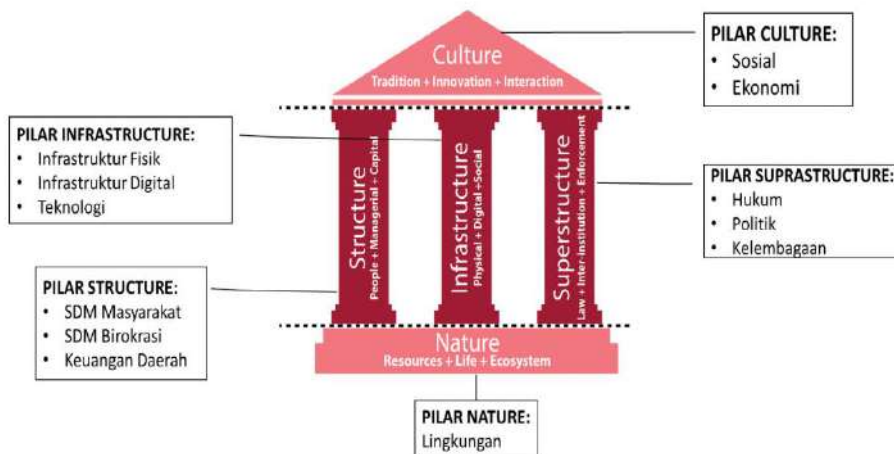
Setiap daerah wajib untuk membentuk atau merumuskan dampak risiko yang mungkin terjadi, manajemen risiko harus dilakukan. Dalam hal ini, untuk mencapai tujuan inisiatif, risiko harus dikelola. Selain itu, Manajemen Risiko dilatih untuk siap untuk bertindak jika terjadi risiko. Risiko adalah efek ketidakpastian tentang suatu keadaan yang akan terjadi di masa depan (future), yang apabila terjadi dapat menimbulkan kerugian (risiko negatif) atau peluang (risiko positif). Beberapa contoh risiko negatif dari alam adalah Tsunami, Banjir, Tanah Longsor, dan Gempa Bumi.

Manajemen risiko adalah proses identifikasi, analisis, pengendalian, dan upaya untuk menghapus, menghindari, atau setidaknya meminimalkan risiko yang tidak dapat diterima. Secara garis besar, pengendalian dan upaya untuk menghapus, menghindari, atau meminimalkan risiko disebut mitigasi risiko. Proses Manajemen Risiko sangat penting dalam hal ini karena Quickwins *Smart City* adalah program unggulan yang dirancang untuk menguntungkan masyarakat. Oleh karena itu, sangat penting bagi pemerintah daerah untuk melakukan Manajemen Risiko, khususnya untuk Quickwins *Smart City*, untuk menghilangkan, menghindari, atau meminimalkan risiko yang dapat mengganggu kinerja program.

Mitigasi Risiko juga dapat disebut sebagai suatu upaya yang dilakukan untuk mengurangi atau menghapus kerugian yang mungkin terjadi akibat risiko yang terjadi (bencana) yaitu dengan cara membuat persiapan sebelum terjadinya bencana. Adapun bentuk mitigasi risiko terbagi menjadi 2 (dua), yaitu yang bersifat struktural dan non- struktural. Mitigasi Struktural adalah upaya untuk meminimalkan bencana yang dilaksanakan melalui pembangunan prasarana fisik dan memakai pendekatan teknologi, sedangkan Mitigasi Non-Struktural adalah upaya mengurangi akibat bencana dengan pembuatan kebijakan seperti suatu peraturan. (Kominfo, 2021)

4.1. Identifikasi Risiko

Untuk mengidentifikasi berbagai risiko yang dapat menyebabkan kegagalan atau kerugian adalah tahapan pertama dalam proses manajemen risiko. Untuk Quickwins *Smart City*, parameter risiko *Smart City* digunakan dalam proses identifikasi risiko, berikut gambar dalam mengidentifikasi risiko



Sumber: Buku Panduan Penyusunan Masterplan *Smart City* 2021

Gambar 1 Identifikasi Risiko

Gambar diatas merupakan pengelompokan identifikasi risiko yang mana pengelompokan tersebut berdasarkan potensi-potensi yang akan terjadi. Tentunya dalam ketentuan tersebut pada di gambar yang sudah cantumkan merupakan penyesuaian dari lingkungan pada setiap Kabupaten/Kota .

Kemudian dampak ataupun risiko yang akan timbul nanti pada program quickwin yang sudah ditentukan oleh setiap daerah pada penyusunan masterplan *Smart City* dapat diidentifikasi mengacu kepada kategori Nature, Infrastructure, Structure, Suprastructure dan juga Culture.

Tabel 16 Identifikasi Risiko

Kategori	Sub-Kategori	Deskripsi
Natur	Lingkungan	Lingkungan hidup hayati : > daya dukung & tampung lingkungan; kualitas air-tanah-udara; flora-fauna; keanekaragaman hayati; bencana alam; dll.
Infrastruktur	Infrastruktur Fisik	Infrastruktur yang berfungsi untuk mendorong pada

Kategori	Sub-Kategori	Deskripsi
		kegiatan sosial, budaya dan ekonomi: > Jalan; jembatan; pasar; gedung pemerintahan; waduk; sekolah; rumah sakit, JPO, Pedestrian; alun-alun; taman; rumah ibadah; RTH; panti jompo/piatu; dll.
	Infrastruktur Digital	Infrastruktur yang berbasis TIK: > FO; tower/BTS; Wi-Fi; dll.
	Teknologi	Segala sesuatu yang dapat mempercepat, mempermudah layanan dan prosedur operasi > Perangkat lunak; aplikasi; sistem informasi, dll > Peralatan teknologi: Komputer, ponsel, sensor, CCTV, drone, satelit, pesawat terbang, robot, mesin, dll
Suprastruktur	Hukum	Hukum positif: > Undang-Undang; Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, dll
	Politik	kebijakan publik, dan aspek politik lainnya > Kebijakan; pemilihan kepala daerah; dll
	Kelembagaan	Organisasi pemerintah daerah dan organisasi yang ada di masyarakat > OPD, LSM, dll
Struktur	SDM	Kualitas sumber daya manusia di daerah: > tingkat pendidikan; tingkat kesehatan; pendapatan per kapita; produktivitas/PDRB; dll
	SDM Pemerintahan	Kualitas dan kapasitas sumber daya aparatur pemerintah daerah > Tingkat pendidikan; kompetensi & keahlian; dll.

Kategori	Sub-Kategori	Deskripsi
	Keungan Daerah	Keuangan yang dapat dikelola/diatur oleh pemerintah daerah: > PAD; Dana Perimbangan; Pembiayaan Daerah; CSR; dll.
Kultur	Sosial	Tatanan sosial yang ada di masyarakat > budaya, adat-istiadat, hukum adat, dll.
	Ekonomi	Aspek perekonomian masyarakat > perdagangan; transaksi elektronik; investasi; dll

Sumber: Buku Panduan Penyusunan Masterplan *Smart City* 2021

4.2. Analisis Risiko

Pada dasarnya, analisis risiko adalah proses untuk menilai tingkat risiko dengan mengacu pada dua (dua) faktor: tingkat kemungkinan terjadinya risiko dan tingkat dampak yang ditimbulkan jika risiko tersebut terjadi. Hasil perkalian antara skor tingkat kemungkinan dan skor dampak dari risiko kemudian digunakan untuk menghitung tingkat risiko. Selama proses analisis risiko *Smart City* Quickwins. Maka digunakan tabel berikut untuk menilai tingkat kemungkinan terjadinya risiko:

Tabel 17 Analisis Risiko 1

Tingkat	Kemungkinan	Deskripsi
1	Kecil	Kemungkinan terjadi 1-2 kali dalam satu periode
2	Sedang	Kemungkinan terjadi 3-4 kali dalam satu periode
3	Besar	Kemungkinan terjadi >5 kali dalam satu periode

Sumber: Buku Panduan Penyusunan Masterplan *Smart City* 2021

Dimana 1 (satu) periode dalam hal ini adalah sama dengan 1 (satu) tahun. Sedangkan untuk memberikan nilai pada dampak yang ditimbulkan sebuah risiko jika terjadi diberikan sebagai berikut :

Tabel 18 Analisis Risiko 2

Tingkat	Dampak	Deskripsi
1	Kecil	Dampak secara finansial atau non-finansial tidak terlalu serius, tidak menyebabkan banyak masalah atau kerusakan
2	Sedang	Dampak secara finansial atau non-finansial besar atau punya pengaruh untuk mendapatkan tindakan lebih lanjut
3	Besar	Dampak secara finansial atau non-finansial sangat buruk, serius, atau kerusakan yang tidak dikehendaki

Sumber: Buku Panduan Penyusunan Masterplan *Smart City* 2021

Kemudian selanjutnya, tingkat risiko di hitung dengan mengacu pada rumus dan tabel sebagai berikut:

Tabel 19 Rumus Pengukuran Tingkat Risiko

Pengukuran Tingkat Risiko:
Tingkat Risiko = Tingkat Kemungkinan x Tingkat Dampak

Sumber: Buku Panduan Penyusunan Masterplan *Smart City* 2021

Tabel 20 Analisis Risiko 3

Tingkat Risiko	Deskripsi	Aksi
≥ 7	Tinggi	Harus ada aksi perbaikan dalam maksimum 3 bulan ke depan
4-6	Sedang	Harus ada aksi perbaikan dalam maksimum 6 bulan ke depan
1-3	Rendah	Perlu ada perhatian

Sumber: Buku Panduan Penyusunan Masterplan *Smart City* 2021

Matriks tingkat risiko dan keterhubungan dengan tingkatan deskripsi Rendah, Sedang dan Tinggi diilustrasikan pada gambar berikut:

		Tingkat Kemungkinan		
		1	2	3
Tingkat Dampak	1	Rendah	Rendah	Rendah
	2	Rendah	Sedang	Sedang
	3	Rendah	Sedang	Tinggi

Gambar 2 Ilustrasi Tingkat Risiko

Sumber: Buku Panduan Penyusunan Masterplan *Smart City* 2021

4.3. Mitigasi Risiko

Tahapan akhir dari proses Manajemen Risiko adalah mendefinisikan upaya-upaya yang akan dilakukan guna mengelola risiko yang telah diidentifikasi serta dianalisis sebelumnya. Dalam hal ini, upaya yang disebut sebagai mitigasi tersebut dibagi menjadi 2 (dua) bentuk yaitu, Mitigasi Struktural dan Mitigasi Non-Struktural. Contoh dari mitigasi yang dirancang terhadap risiko yang telah diidentifikasi dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 21 Mitigasi Risiko

No	Risiko	Mitigasi Struktural	Mitigasi Non-Struktural
R-1	Banjir	Membangun layanan berbasis elektronik	Melakukan pelatihan dan penyuluhan
		Membangun tanggul sungai	Membentuk kelompok kerja atau POKJA
		Membersihkan sungai dan pembuatan sudetan	Membuat prosedur operasi standar berncan banjir

Sumber: Buku Panduan Penyusunan Masterplan *Smart City* 2021

Perumusan manajemen risiko di Kabupaten Buleleng yang merupakan turunan dari program quickwin yang sudah ditentukan. Kemudian rumusan ini nantinya akan mengetahui dampak dan risiko yang ditimbulkan sehingga bisa mengetahui apa yang akan dilakukan.

4.4. Manajemen Risiko *Smart Governance*

Manajemen risiko *Smart Governance* merupakan sebuah serangkaian penanganan mitigas kemungkinan yang akan terjadi dimasa yang akan datang. Pada manajemen risiko *Smart Governance* yang bersumber pada program quickwin harus selaras dan efektif. Manajemen risiko *Smart Governance* ini merupakan metode dan alat yang digunakan untuk mengidentifikasi mengevaluasi dan mengendalikan risiko yang terkait dengan penerapan teknologi, proses dan kebijakan dalam tata kelola pemerintahan yang cerdas tentunya dengan mengedepankan kepentingan publik sehingga keputusan atau kebijakan yang dikeluarkan dapat dirasakan secara maksimal oleh masyarakat.

Manajemen Risiko pada *Smart Governance* merupakan kemungkinan yang akan terjadi ketika program quickwin itu dilaksanakan. Banyak risiko yang akan terjadi maka dibuatlah manajemen risiko agar mengetahui potensi-potensi yang akan muncul sehingga dapat terminimalisir dan teratasi. Program quickwin yang dibuat manajemen risiko nya harus menyesuaikan kondisi dan harus sesuai penanganannya agar nantinya tidak terjadi kesalahpahaman dalam memberikan penanganan. Manajemen risiko dalam *Smart Governance* tentunya mengacu pada serangkaian praktik yang memastikan penerapan teknologi digital dan solusi *Smart City* dalam tata kelola pemerintah yang efektif dan efisien serta berkelanjutan. Aplikasi AKU ONLINE yang menjadi sebuah program quickwin yang melibatkan integrasi teknologi informasi dengan meningkatkan layanan publik, partisipasi masyarakat, transparansi dan efisien. Tentunya ini menjadi sebuah tanggapan yang penting dari pemerintah Kabupaten Buleleng untuk bisa menjaga dan merawat sistem ini agar pelayanan di Kabupaten Buleleng terus mengalami peningkatan yang aman output dari semua itu adalah kepuasan masyarakat memberikan kepercayaan kepada pemerintah dalam melayani masyarakat.

Kota/Kab	Buleleng
Dimensi	<i>Smart Governance</i>
Program Quickwin	Pengembangan aplikasi AKU ONLINE
Keterangan	Program ini diluncurkan sebagai salah satu upaya meningkatkan pelayanan kependudukan di Kabupaten Buleleng
Manfaat	Mengoptimalkan pelayanan kependudukan kepada masyarakat sehingga terciptanya pelayanan yang efektif dan efisien

Tabel 22 Manajemen Risiko *Smart Governance*

N O	IDENTIFIKASI RISIKO (RISK IDENTIFICATION)						ANALISA RISIKO (RISK ANALYSIS)			PENANGANAN RISIKO (RISK TREATMENT)			MITIGASI RISIKO	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Kategori	Sub Kategori	Risiko	Dampak Risiko	Kerawanan (Penyebab Risiko)	Opportunity (Risiko Positif)	Nilai Kemungkinan	Nilai Dampak	Nilai Risiko	Penanggung Jawab	Target Waktu/Frekuensi	Kebutuhan Sumber daya	Struktural	Non Struktural
1	Nature	Lingkungan	Kebakaran Server dan Jaringan Internet	Server dan Jaringan Internet Rusak	Konsleting listrik/Tersambar Petir	Tempat penyimpanan data dan akses layanan online	1	3	3 (Rendah)	Pemerintah Kabupaten Buleleng dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Serta Dinas terkait	1x setahun	Anggaran untuk pengadaan sarana prasarana pendukung, pengembangan SDM, sosialisasi, dan pembuatan regulasi/kebijakan yang mendukung	Ketersediaan APAR, pemeliharaan instalasi kelistrikan secara berkala dan pencadangan server	Latihan mitigasi bencana
2	Structure	SDM	Keterbatasan kemampuan menggunakan aplikasi	Pelayanan terhambat	Pergantian Operator	Regenerasi SDM	1	2	2 (Rendah)				Ketersediaan SDM yang memadai	Membuat SOP, Pelatihan SDM, pelaksanaan rapat

N O	IDENTIFIKASI RISIKO (RISK IDENTIFICATION)						ANALISA RISIKO (RISK ANALYSIS)			PENANGANAN RISIKO (RISK TREATMENT)			MITIGASI RISIKO	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Kategori	Sub Kategori	Risiko	Dampak Risiko	Kerawanan (Penyebab Risiko)	Opportunity (Risiko Positif)	Nilai Kemungkinan	Nilai Dampak	Nilai Risiko	Penanggung Jawab	Target Waktu/Frekuensi	Kebutuhan Sumber daya	Struktural	Non Struktural
														evaluasi rutin
				Penggunaan layanan aplikasi kurang maksimal	Masyarakat kurang memahami penggunaan aplikasi	Masyarakat secara tidak langsung dituntut untuk menguasai teknologi	1	1	1 (Rendah)				Pemasangan banner/pamflet	Membuat pedoman teknis berupa video tutorial, melakukan sosialisasi
				Terlambatnya penerbitan dokumen administrasi kependudukan	Pemanfaatan dokumen kependudukan oleh pemohon tidak bisa tepat waktu	Pergantian operator	1	2	2 (Rendah)					
3	Infrastruktur	Ketersediaan	Kerusakan pada database	Tidak bisa akses aplikasi	Listrik human error, kesulitan reset password pengguna	Tidak ada	1	2	2 (Rendah)				Penyediaan genset, penyediaan penyimpanan cadangan server	Membuat SOP terkait, pelatihan SDM, membuat pedoman dengan video tutorial melalui media sosial

NO	IDENTIFIKASI RISIKO (RISK IDENTIFICATION)						ANALISA RISIKO (RISK ANALYSIS)			PENANGANAN RISIKO (RISK TREATMENT)			MITIGASI RISIKO	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Kategori	Sub Kategori	Risiko	Dampak Risiko	Kerawanan (Penyebab Risiko)	Opportunit y (Risiko Positif)	Nilai Kemungkin an	Nilai Damp ak	Nilai Risiko	Penanggung Jawab	Target Waktu/ Frekuensi	Kebutuhan Sumber daya	Struktural	Non Struktural
			Penyimpanan data server penuh		Data tidak disimpan dan/atau terhapus	Menyimpan data kependudukan	1	2	2 (Rendah)				Penyediaan penyimpanan cadangan server	Pelatihan SDM
		Keamanan	Jangan terganggu karena gangguan dari eksternal		Serangan virus dan hacker	Mempunyai sistem keamanan ciber yang memadai	1	3	3 (Rendah)				Memperbarui tingkat keamanan data secara berkala	Pelatihan SDM
4	Suprastruktur	Hukum	Kurangnya landasan hukum khusus aplikasi	Tidak adanya aturan yang kuat untuk mengatur pemanfaatan aplikasi	Belum sepenuhnya pemanfaatan aplikasi pada saat digunakan	Adanya aturan yang kuat mengatur tentang pemanfaatan aplikasi	1	1	1 (Rendah)				Membuat aturan (Perda) terkait pemanfaatan aplikasi khusus	Solusi terkait aturan tersebut
		Politik	Terjadi kesalahpahaman terkait penggunaan aplikasi	Pemanfaatan aplikasi tidak dilanjutkan	Adanya pergantian kepemimpinan	Pergantian aplikasi yang lebih optimal	1	1	1 (Rendah)				Menjadikan aplikasi sebagai icon khusus	Sosialisasi mengenai aplikasi
		kelembagaan	Belum terbentuknya lembaga untuk ditingkat kelurahan/desa	Kurangnya optimalnya pelayanan di tingkat kelurahan/desa	Belum adanya SDM yang kompeten	Pelayanan berpusat	1	1	1 (Rendah)				Membuat pedoman serta panduan untuk pembentukan lembaga ditingkat kelurahan/desa	Sosialisasi dan pelatihan meningkatkan kualitas SDM

N O	IDENTIFIKASI RISIKO (RISK IDENTIFICATION)						ANALISA RISIKO (RISK ANALYSIS)			PENANGANAN RISIKO (RISK TREATMENT)			MITIGASI RISIKO	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Kategori	Sub Kategori	Risiko	Dampak Risiko	Kerawanan (Penyebab Risiko)	Opportunity (Risiko Positif)	Nilai Kemungkinan	Nilai Dampak	Nilai Risiko	Penanggung Jawab	Target Waktu/ Frekuensi	Kebutuhan Sumber daya	Struktural	Non Struktural
5	Culture	Sosial	Budaya primordial	Pelayanan AKU ONLINE tidak dimanfaatkan maksimal	Pola pikir masyarakat yang menganggap aplikasi itu ribet	Layanan diterima secara langsung oleh petugas	1	1	1 (Rendah)				Pemasangan banner/pamflet	Sosialisasi secara kontinyu
		Ekonomi	Spesifikasi perangkat elektronik yang digunakan	Diperlukan biaya untuk membeli perangkat elektronik yang mendukung penggunaan aplikasi	Aplikasi dapat diakses dengan sistem android	Masyarakat dapat menggunakan fitur yang ada di perangkat elektronik	1	1	1 (Rendah)				Pelayanan bisa melalui kantor desa/lurah masing-masing	Pelaksanaan layanan secara langsung SIDAKEP dan saat <i>car free day</i>

Sumber: Bimbingan Teknis Tahp 3 Kabupaten Buleleng 2023

4.5. Manajemen Risiko *Smart Branding*

Manajemen risiko pada *Smart Branding* adalah sebuah rumusan yang dihadirkan untuk memberikan gambaran secara khusus untuk memitigasi dampak dari penerapan program quickwin *Smart Branding*. Visiting Buleleng sebagai quickwin di *Smart Branding* ini dipilih sebagai solusi permasalahan sektor pariwisata yang masih perlu nya tata keola yang efektif dan berdampak bagi masyarakat serta pemerintah daerah. Melalui manajemen risiko nantinya bisa mewadahi atau memberikan acuan cara penanganan bagaimana ketika terjadi sebuah permasalahan. Penetapan manajemen risiko sudah didasarkan pada penyesuaian program sehingga rumusan manajemen risiko ini merupakan komponen-komponen penting dalam quickwin Visiting Buleleng yang harus dipenuhi. Analisis risiko pada quickwin *Smart Branding* juga dapat memberi arahan mana solusi yang terbaik dan dapat ditelusuri faktor penyebab terjadinya kesalahan pada program quickwin yang sudah dirumuskan.

Manajemen risiko pada *Smart Branding* merupakan serangkaian metode penanganan dari program quickwin yaitu Visiting Buleleng pada *Smart Branding*. Manajemen risiko pada Visiting Buleleng menyesuaikan perkembangan ataupun rencana yang dibangun oleh program quickwin tersebut sehingga nantinya akan memberikan gambaran dan acuan bagaimana cara untuk mengatasi permasalahan yang ada. Tentu Visiting Buleleng ini dibangun berdasarkan kondisi dan penyesuaian lingkungan pariwisata yang membutuhkan pemanfaatan teknologi dalam mengelola sumber daya pariwisata yang memberikan dampak dari segi ekonomi, pemberdayaan dan pelestarian budaya lokal. Segala kemungkinan bisa terjadi dalam penerapan aplikasi Visiting Buleleng maka manajemen risiko ini memberikan langkah-langkah agar bisa terminimalisir kesalahan yang tidak diharapkan. Selain itu, manajemen risiko juga memberikan gambaran kekurangan-kekurangan pada program quickwin tersebut yang nantinya menjadi bahan monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan program. Melalui pendekatan manajemen risiko yang efektif dalam *Smart Branding* memang memastikan bahwa masyarakat dan pemerintah daerah dapat memanfaatkan peluang yang dihadirkan oleh teknologi digital dengan beriringan meminimalkan dampak risiko yang akan ditimbulkan berdampak pada kerusakan sistem aplikasi dan kerusakan reputasi.

Kota/Kab	Buleleng
Dimensi	<i>Smart Branding</i>
Program Quickwin	Visiting Buleleng
Keterangan	Program ini adalah upaya dari perangkat daerah untuk memudahkan wisatawan dalam memperoleh informasi tentang kepariwisataan di Kabupaten Buleleng
Manfaat	Memberikan informasi terkait daya tarik wisata, kuliner, akomodasi, jenis budaya dan tradisi, money changer, peta wisata serta informasi lainnya yang berhubungan dengan pariwisata

Tabel 23 Manajemen Risiko *Smart Branding*

NO	IDENTIFIKASI RISIKO (RISK IDENTIFICATION)						ANALISA RISIKO (RISK ANALYSIS)			PENANGANAN RISIKO (RISK TREATMENT)			MITIGASI RISIKO	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Kategori	Sub Kategori	Risiko	Dampak Risiko	Kerawanan (Penyebab Risiko)	Opportunity (Risiko Positif)	Nilai Kemungkinan	Nilai Dampak	Nilai Risiko	Penanggung Jawab	Target Waktu/Frekuensi	Kebutuhan Sumber daya	Struktural	Non Struktural
1	Nature	Lingkungan	Bencana Alam	Aplikasi berjalan lambat	Cuaca yang tidak menentu	Tidak ada	3	2	6 (Sedang)	Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng dan Dinas Pariwisata	1x setahun	Anggaran pemerintah daerah dan anggaran pemerintah pusat	Membangun tower yang tahan cuaca	Menyediakan alat pendeteksi dini bencana
2	Structure	SDM	Update data aplikasi	Informasi yang tidak diterima secara maksimal	Kurang ketersediaan SDM	Menyediakan sumber daya manusia yang kompeten	2	2	4 (Sedang)				Menyediakan hardware/software yang mendukung	Menambah peningkatan kompetensi SDM
3	Infrastruktur	Ketersediaan	Kerusakan data pada database	Tidak bisa akses aplikasi	Listrik mati, human error	Menyediakan tenaga	1	2	2 (Rendah)				Genset	SOP

N O	IDENTIFIKASI RISIKO (RISK IDENTIFICATION)						ANALISA RISIKO (RISK ANALYSIS)			PENANGANAN RISIKO (RISK TREATMENT)			MITIGASI RISIKO	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Kategori	Sub Kategori	Risiko	Dampak Risiko	Kerawanan (Penyebab Risiko)	Opportunity (Risiko Positif)	Nilai Kemungkinan	Nilai Dampak	Nilai Risiko	Penanggung Jawab	Target Waktu/Frekuensi	Kebutuhan Sumber daya	Struktural	Non Struktural
						listrik cadangan								
			Hardisk penuh		Data dan file ganda atau diduplikat	Memverifikasi data	1	2	2 (Rendah)					
		Keamanan	Jaringan terganggu karena gangguan dari eksternal		Serangan hacker	Menambah pengamanan data	1	3	3 (Rendah)					
4	Suprastruktur	Hukum	Belum ada regulasi sehingga tidak kuat pelaksanaannya	Aplikasi tidak wajib digunakan	Belum tersusunnya kebijakan yang mengatur terkait penggunaan aplikasi	Menyiapkan SOP terkait penggunaan aplikasi	1	1	1 (Rendah)				Menyusun aturan tentang penggunaan aplikasi	Mensosialisasi kan penggunaan aplikasi kepada para wisatawan yang berkunjung ke Buleleng
		Politik	Perubahan sasaran prioritas	Informasi tidak dapat disampaikan ke pengguna aplikasi	Aplikasi tidak bisa digunakan	Mengupdate aplikasi	1	1	1 (Rendah)				Menyediakan hardware/software yang mendukung	Review dokumen aplikasi
		Kelembagaan	Lembaga dan kelompok parwisata belum semua menggunakan aplikasi	Informasi tidak dapat disampaikan	Belum diwajibkannya penggunaan aplikasi kepada kelompok dan	Perlu bekerjasama dengan provider untuk broadcats	1	1	1 (Rendah)				Menyusun aturan tentang penggunaan aplikasi	Mensosialisasi kan penggunaan aplikasi kepada para wisatawan yang

N O	IDENTIFIKASI RISIKO (RISK IDENTIFICATION)						ANALISA RISIKO (RISK ANALYSIS)			PENANGANAN RISIKO (RISK TREATMENT)			MITIGASI RISIKO	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Kategori	Sub Kategori	Risiko	Dampak Risiko	Kerawanan (Penyebab Risiko)	Opportunity (Risiko Positif)	Nilai Kemungkinan	Nilai Dampak	Nilai Risiko	Penanggung Jawab	Target Waktu/Frekuensi	Kebutuhan Sumber daya	Struktural	Non Struktural
				pengguna aplikasi	lembaga pariwisata	terkait Visiting Buleleng								berkunjung ke Buleleng
5	Culture	Sosial	Pengguna belum memahami penggunaan aplikasi	informasi tidak dapat disampaikan ke pengguna aplikasi	Pengguna belum terbiasa menggunakan aplikasi	Perlu bekerjasama dengan provider untuk broadcats terkait Visiting Buleleng	1	1	1 (Rendah)				Menyusun aturan tentang penggunaan aplikasi	Mensosialisasikan penggunaan aplikasi kepada para wisatawan yang berkunjung ke Buleleng
		Ekonomi	Belum maksimalnya pendapatan yang diperoleh melalui aplikasi	PAD belum maksimal	fitur dari aplikasi kurang maksimal penggunaannya	Kerjasama dengan market place lokal	1	1	1 (Rendah)				Menyediakan hardware/software yang mendukung	Review dokumen aplikasi

Sumber: Bimbingan Teknis Tahap 3 Kabupaten Buleleng 2023

4.6. Manajemen Risiko *Smart Economy*

Manajemen risiko pada *Smart Economy* merupakan sebuah gambaran khusus yang memberikan alur dan ritmet dalam menangani kejadian yang akan muncul pada pelaksanaan program, berbagai kemungkinan akan terjadi jika pelaksanaan tidak sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan, maka manajemen risiko ini hadir sebagai solusi penanganan yang nanti dapat menjadi sebuah panduan. Pelaksanaan program quickwin dengan memanfaatkan teknologi agar terciptanya ekosistem yang efektif, transparan dan efisien. Strategi manajemen risiko ini harus bersifat holistik dan mencakup identifikasi evaluasi, respon dan pemantauan risiko. Maka dengan kecakapan menggunakan teknologi dapat membantu dalam mendeteksi dan respon terhadap risiko yang akan ditimbulkan, dengan ini manajemen risiko *Smart Economy* menawarkan peluang besar untuk inovasi pertumbuhan yang merupakan hal yang sangat penting bagi sebuah pemangku kepentingan dalam mengelola risiko yang terkait dengan transformasi digital.

Manajemen risiko pada *Smart Economy* merupakan sebuah serangkaian rumusan dalam mengatasi berbagai kemungkinan yang akan terjadi pada program yang sudah ditentukan. Program quickwin pada *Smart Economy* yaitu PLUT UMKM yang mana dalam hal ini merupakan sebuah program peningkatan kuantitas dan kualitas UMKM. Manajemen risiko pada PLUT UMKM sudah menyesuaikan kebutuhan program maka dengan ini agar manajemen risiko itu berjalan dengan dibutuhkan strategi-strategi yang tepat sasaran. PLUT UMKM ini merupakan program yang sudah berjalan di Kabupaten Buleleng akan tetapi masih adanya kekurangan dan perlu adanya peningkatan kapasitas program sehingga program yang sudah dilakukan dapat menjangkau secara luas ke seluruh aspek masyarakat yang ingin menciptakan UMKM ataupun dalam bidang usaha nya. Analisis manajemen risiko ini tentunya menggambarkan kondisi yang sebenarnya sehingga para pemangku kebijakan dapat mengetahui apa risiko yang akan timbulkan maka nantinya akan dilakukan mitigas sesuai dengan risiko yang ditimbulkan. Jika sudah rangkai sedemikian rupa maka manajemen risiko ini dapat menjadi sebuah rujukan pemangku kepentingan dalam melakukan sebuah program yang baik dan efektif.

Kota/Kab	Buleleng
Dimensi	<i>Smart Economy</i>
Program Quickwin	Pengembangan Pusat Layanan Terpadu (PLUT) UMKM
Keterangan	Program ini diluncurkan dalam rangka meningkatkan Jumlah UMKM yang mendapat pendampingan dan pelatihan usaha
Manfaat	Peningkatan UMKM yang berdaya saing

Tabel 24 Manajemen Risiko *Smart Economy*

NO	IDENTIFIKASI RISIKO (RISK IDENTIFICATION)						ANALISA RISIKO (RISK ANALYSIS)			PENANGANAN RISIKO (RISK TREATMENT)			MITIGASI RISIKO	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Kategori	Sub Kategori	Risiko	Dampak Risiko	Kerawanan (Penyebab Risiko)	Opportunity (Risiko Positif)	Nilai Kemungkinan	Nilai Dampak	Nilai Risiko	Penanggung Jawab	Target Waktu/Frekuensi	Kebutuhan Sumber daya	Struktural	Non Struktural
1	Nature	Lingkungan	Terdampak banjir	Bangunan Rusak	Ada Sungai di sebelah Gedung, Tidak Bisa Berenang, Jatuh ke Sungai	Akses kantor dekat dengan jalan utama	1	2	2 (Rendah)	Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UKM dan Dinas Terkait	1x sethaun	Sosialisasi kemitraan dan anggaran Pemkab minim	Tidak menebang pohon di hutan secara liar dan besar-besaran, hutan yang gundul dapat menyebabkan penyerapan air berkurang dan tanah mudah terkikis air hujan sehingga	Prosedur keselamatan kerja dan pelatihan singkat menanggapi keadaan darurat (penjelasan saat apel sebelum kegiatan dimulai)

NO	IDENTIFIKASI RISIKO (RISK IDENTIFICATION)						ANALISA RISIKO (RISK ANALYSIS)			PENANGANAN RISIKO (RISK TREATMENT)			MITIGASI RISIKO	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Kategori	Sub Kategori	Risiko	Dampak Risiko	Kerawanan (Penyebab Risiko)	Opportunity (Risiko Positif)	Nilai Kemungkinan	Nilai Dampak	Nilai Risiko	Penanggung Jawab	Target Waktu/ Frekuensi	Kebutuhan Sumber daya	Struktural	Non Struktural
1													menyebabkan banjir dan longsor	
			Gempa	Meninggal, bangunan rusak	Tidak bisa menyelamatkan diri	Struktur bangunan tahan gempa	1	3	3 (Rendah)				Perlengkapan keselamatan sudah ada, pelampung, perahu, serokan sampah, sepatu karet dll	SOP (standart operasional prosedur) kebencanaan
2	Structure	SDM	Sakit	Adanya virus	Iklum, cuaca	Kota olah raga	1	2	2 (Rendah)				Peningkatan kualitas SDM	SOP (standart operasional prosedur)
			Gaptek (Gagap Teknologi)	SDM kurang handal	Sapras penunjang dan tingkat pendidikan	Meningkatkan daya saing UMKM	1	1	1 (Rendah)				Peningkatan sosialisasi program	
			Kurang minat	Minim peserta	Muncul penangguran	Sosialisasi keberadaan PLUT di medsos	1	1	1 (Rendah)				Memberikan tips and trick cara berUMKM yang baik	Memberikan sosialisasi dengan aktif
3	Infrastruktur	Ketersediaan	Kerusakan gedung	Membuat pelaksanaan pelatihan UMKM	Pelayanan tidak bekerja maksimal	Pemeliharaan sarana dan prasarana secara berkala	1	2	2 (Rendah)				Struktur gedung yang kokoh dan kuat	Merancang bangunan tahan gempa
		Keamanan	Ada maling	Sarana prasarana gedung hilang	Kurang aman	Perlu ditugaskan	1	3	3 (Rendah)				Menempatkan petugas keamanan	Melakukan kontroling

NO	IDENTIFIKASI RISIKO (RISK IDENTIFICATION)						ANALISA RISIKO (RISK ANALYSIS)			PENANGANAN RISIKO (RISK TREATMENT)			MITIGASI RISIKO	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Kategori	Sub Kategori	Risiko	Dampak Risiko	Kerawanan (Penyebab Risiko)	Opportunity (Risiko Positif)	Nilai Kemungkinan	Nilai Dampak	Nilai Risiko	Penanggung Jawab	Target Waktu/Frekuensi	Kebutuhan Sumber daya	Struktural	Non Struktural
						tenaga keamanan								melalui cctv
4	Suprastruktur	Hukum	Peraturan Bupati Buleleng tentang UMKM	Regulasi yang disempurnakan	Regulasi yang tidak memihak UMKM	Perbup 28 Tahun 2023 tentang Pembentukan Badan Layanan Umum	1	1	1 (Rendah)				Penyempurnaan peraturan terhadap hak-hak UMKM	Memberikan hak-hak UMKM dalam peraturan Bupati
		Politik	Pergantian kepemimpinan daerah	Perubahan kepala daerah terpilih menyebabkan perubahan kebijakan	Perubahan kebijakan setiap pimpinan baru	Kepala daerah yang memiliki prioritas pembangunan di bidang UMKM berbasis digital	1	2	2 (Rendah)				Kebijakan secara politis memihak kepentingan masyarakat luas	Sosialisasi kebijakan dari tingkat pusat, provinsi dan kabupaten yang sampai ke masyarakat
		Kelembagaan	Minimnya pendataan organisasi UMKM	Kelembagaan UMKM masih banyak belum terdata dengan baik	Perubahan struktur organisasi	Pengurus iji dalam pembentukan UMKM saat ini sangat mudah	1	1	1 (Rendah)				Melakukan penataan kelembagaan dan pendataan UMKM	Sosialisasi kepada perkumpulan UMKM untuk melakukan pendataan
5	Culture	Sosial	Minimnya peminat	Keinginan UMKM untuk	Para UMKM masih ada	Media promosi dan penjualan	1	1	1				Kultur budaya	Pengaruh IT yang

N O	IDENTIFIKASI RISIKO (RISK IDENTIFICATION)						ANALISA RISIKO (RISK ANALYSIS)			PENANGANAN RISIKO (RISK TREATMENT)			MITIGASI RISIKO	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Kategori	Sub Kategori	Risiko	Dampak Risiko	Kerawanan (Penyebab Risiko)	Opportunity (Risiko Positif)	Nilai Kemungkinan	Nilai Dampak	Nilai Risiko	Penanggung Jawab	Target Waktu/Frekuensi	Kebutuhan Sumber daya	Struktural	Non Struktural
			pengembangan potensi UMKM	mengembangkan usahanya berbasis IT masih rendah	yang gaptek (gagap teknologi)	produk saat ini berbasis IT dan dikuasai generasi milenial merupakan yang potensial							berubah dari tradisional ke cakap teknologi yang berbasis budaya lokal	sangat masif
		Ekonomi	Masih banyaknya pembayaran non tunai di lingkungan masyarakat	Transaksi non tunai di masyarakat masih rendah	Masih nyaman bertransaksi cash	Pusat perbelanjaan/toko warung sudah banyak di arahkan untuk melakukan transaksi non tunai oleh perbankan	1	1	1 (Rendah)				Memperluas penggunaan QRIS atau dompet digital dalam melakukan transaksi, gebyar QRIS	Sosialisasi transaksi non tunai

Sumber : Bimbingan Teknis Tahap 3 Kabupaten Buleleng 2023

4.7. Manajemen Risiko *Smart Living*

Smart Living yang sudah merumuskan manajemen risiko merupakan sebuah konsep gambaran risiko yang akan ditimbulkan nanti ketika pelaksanaan program dapat mengerti langkah yang akan diambil. Manajemen risiko pada *Smart Living* menciptakan lingkungan yang berkelanjutan serta transportasi yang modern dan cerdas. Jas Bule Gratis hadir sebagai solusi transportasi cerdas dan modern yang mana dapat membantu masyarakat dalam mengakses ke sekolah yang mana dapat meminimalisir pengeluaran dari segi ekonomi. Konsep *Smart Living* banyak menawarkan kemudahan dan manfaat namun tidak dapat dipungkiri hal itu bersamaan dengan tantangan dan risiko maka melalui pendekatan manajemen risiko yang tepat mampu memberikan sebuah visualisasi risiko yang akan ditimbulkan.

Manajemen risiko pada *Smart Living* yang merupakan pencegahan dari program quickwin Jas Bule Gratis merupakan sebuah serangkaian rumusan yang sudah dibentuk berdasarkan kondisi dan lingkungan program. Jas Bule Gratis sebagai program quickwin diperlukan mitigasi risiko ketika terjadi diluar perencanaan yang sudah ditentukan dalam program. Maka sebenarnya bahwa manajemen risiko ini mengandung sebuah acuan untuk mengatasi masalah program quickwin dikemudian hari sehingga nantinya pemangku kepentingan yang mempunyai wewenang bisa mengatasi sesuai dengan peruntukkan yang sudah dirumuskan dalam manajemen risiko. Jas Bule Gratis merupakan program dari Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng mewadahi kepada siswa-siswi yang dibawah garis kemiskinan untuk bisa pergi ke sekolah tanpa dipungut biaya. Program ini disambut baik bagi masyarakat karena dinilai sangat membantu perekonomian mereka dari segi operasional sekolah. Selain itu, program Jas Bule Gratis tidak hanya dipakai untuk siswa-siswa miskin saja akan tetapi siswa-siswi yang mampu bisa mengaksesnya. Namun saat ini terjadi keterbatasan jumlah bus operasional sebab antara kebutuhan dengan ketersediaan tidak seimbang maka terjadi penumpukkan penumpang di dalam bus ataupun di pinggir jalan ketika sedang menunggu bus. Jas Bule Gratis ini juga melewati beberapa rute yang mana rute tersebut di analisis berdasarkan tingkat keramaian siswa-siswi dalam mengakses transportasi gratis ini.

Kota/Kab	Buleleng
Dimensi	<i>Smart Living</i>
Program Quickwin	Jas Bule Gratis
Keterangan	Program ini diluncurkan dalam rangka sebagai salah satu upaya mengurangi tingkat kemacetan lalu lintas perkotaan dan penanggulangan kemiskinan
Manfaat	Mengurangi tingkat kemacetan lalu lintas perkotaan dan penanggulangan kemiskinan

Tabel 25 Manajemen Risiko *Smart Living*

NO	IDENTIFIKASI RISIKO (RISK IDENTIFICATION)						ANALISA RISIKO (RISK ANALYSIS)			PENANGANAN RISIKO (RISK TREATMENT)			MITIGASI RISIKO	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Kategori	Sub Kategori	Risiko	Dampak Risiko	Kerawanan (Penyebab Risiko)	Opportunity (Risiko Positif)	Nilai Kemungkinan	Nilai Dampak	Nilai Risiko	Penanggung Jawab	Target Waktu/Frekuensi	Kebutuhan Sumber daya	Struktural	Non Struktural
1	Nature	Lingkungan	Polusi udara	Kesehatan, lingkungan	Kendaraan yang tidak laik jalan	Kendaraan yang laik jalan	1	1	1 (Rendah)	Pemerintah Kab Buleleng dan Dinas Perhubungan Kab Buleleng	1x setahun	Anggaran pemeliharaan kendaraan dishub	Pemeriksaan Secara Berkala Emisi Gas Buang Bus Sekolah	SOP
2	Structure	SDM	Terjadi kecelakaan yang mengancam keselamatan supir	Meninggal	Kondisi supir yang tidak prima saat bertugas	Asuransi kecelakaan dan ketenagakerjaan	1	3	3 (Rendah)			Asuransi kecelakaan	Memberikan pelayanan sesuai dengan standar operasional prosedur	SOP

N O	IDENTIFIKASI RISIKO (RISK IDENTIFICATION)						ANALISA RISIKO (RISK ANALYSIS)			PENANGANAN RISIKO (RISK TREATMENT)			MITIGASI RISIKO	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Kategori	Sub Kategori	Risiko	Dampak Risiko	Kerawanan (Penyebab Risiko)	Opportunity (Risiko Positif)	Nilai Kemungkinan	Nilai Dampak	Nilai Risiko	Penanggung Jawab	Target Waktu/ Frekuensi	Kebutuhan Sumber daya	Struktural	Non Struktural
				Mengalami disabilitas	Kelalaian supir		1	2	2 (Rendah)			Asuransi ketenagakerjaan	Memberikan pelayanan sesuai dengan standar operasional prosedur	SOP
3	Infrastruktur	ketersediaan	Bus sekolah tidak bisa dipakai	Kendaraan tidak bisa digunakan	Bus sekolah rusak	Kendaraan perlu diperbaiki	2	2	4 (Sedang)		4x setahun	Anggaran pemeliharaan kendaraan dishub	Melakukan perawatan secara berkala	SOP
		Keamanan	Aplikasi tidak bisa dipakai	Bus sekolah tidak dapat diketahui keberadaannya	Sinyal kurang baik, GPS rusak	GPS perlu diperbaiki	2	2	4 (Sedang)		2x setahun	SDM yang mampu teknologi GPS	Melakukan perawatan berkala GPS dan aplikasi	SOP
4	Suprasctruk tur	Hukum	Tidak ada dasar hukum yang jelas	Bus sekolah tidak dapat beroperasi secara hukum	Tidak mendapat dukungan dari masyarakat dan pemerintah atasan	Adanya dukungan dari pemerintah atasan dan stake holder	2	2	4 (Sedang)		1x setahun	SDM administrasi yang membuat peraturan hukum	Membuat SK sesuai peraturan perundangan yang berlaku	SK Bupati
		Politik	Terjadinya penurunan operasional karena kurnagnya armada	Bus sekolah sepi penumpang	Tidak mendapat dukungan dari masyarakat at dan	Banyak penumpang dari siswa miskin	2	2	4 (Sedang)		4x setahun	Sopir dan kondektur	Melaksanakan kerjasama dengan Dinas Pendidikan	SOP

NO	IDENTIFIKASI RISIKO (RISK IDENTIFICATION)						ANALISA RISIKO (RISK ANALYSIS)			PENANGANAN RISIKO (RISK TREATMENT)			MITIGASI RISIKO	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Kategori	Sub Kategori	Risiko	Dampak Risiko	Kerawanan (Penyebab Risiko)	Opportunity (Risiko Positif)	Nilai Kemungkinan	Nilai Dampak	Nilai Risiko	Penanggung Jawab	Target Waktu/Frekuensi	Kebutuhan Sumber daya	Struktural	Non Struktural
					pemerintah atasan									
		Kelembagaan	Tidak adanya kelompok peduli transportasi umum gratis	Tidak ada aspirasi	Minimnya pengawasan	Tidak ada aturan yang jelas	2	2	4 (Sedang)		1x setahun	Anggaran sukarelawan	Membuat kelompok peduli transportasi umum gratis	SOP
5	Culture	Sosial	Minimnya kesadaran masyarakat untuk menggunakan layanan ini	Sepi penumpang	Armada tidak terpakai	-	2	2	4 (Sedang)		1x setahun	Anggaran pemeliharaan kendaraan dishub	Melakukan evaluasi terhadap layanan kepada seluruh pemangku kepentingan	Mensosialisasikan layanan kepada masyarakat
		Ekonomi	Adanya iuran untuk menunjang operasional	Turunnya peminat kepada program ini	Adanya iuran yang tidak sesuai di awal	Pelayanan. Meningkat	2	2	4 (Sedang)		1x setahun	Masyarakat	Meninjau kembali kebutuhan operasional program	SOP

Sumber : Bimbingan Teknis Tahap 3 Kabupaten Buleleng 2023

4.8. Manajemen Risiko *Smart Society*

Smart Society sebagaimana sudah merumuskan manajemen risiko yang merupakan untuk mengatasi berbagai kemungkinan terjadi pada pelaksanaan program. Manajemen risiko ini berbasis analisis konstruktif yang sifatnya memberikan gambaran bahwa arah dan langkah ke depan akan menjadi sebuah tantangan dalam penerapan program quickwin. Program quickwin yang sudah dirumuskan pada *Smart Society* ini adalah POSKO DO yaitu merupakan program dari Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga dalam menjaring anak-anak di Kabupaten Buleleng yang rentan putus sekolah. Dengan semangat ingin mencerdaskan kehidupan bangsa maka pemerintah Kabupaten Buleleng memberikan program tersebut untuk mewadahi agar tetap lanjut sekolah minimal sampai jenjang SMP. Manajemen risiko mendeteksi potensi risiko yang akan terjadi sehingga pemangku kepentingan dapat mempersiapkan apa yang perlu dilakukan dalam melakukan mitigasi risiko.

Manajemen risiko pada *Smart Society* merupakan sebuah gambaran yang dirumuskan dalam identifikasi risiko, analisis risiko, penanganan risiko dan mitigasi risiko. Keempat komponen tersebut merupakan suatu hal yang sangat penting dalam Menyusun konsep manajemen risiko yang mana dapat memberikan sebuah acuan kepada program quickwin *Smart Society*. POSKO DO sebagai program quickwin yang digagas oleh Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga adalah berangkat dari keresahan masyarakat yang mengalami keterbatasan ekonomi tetapi mereka ingin mendapatkan hak pendidikan yang diberikan kepada anak nya. Maka dibentuk program POSKO DO tersebut untuk bisa memberikan akses pendidikan bagi masyarakat tidak mampu yang memiliki anak sehingga tetap bisa bersekolah. Manajemen risiko yang bersifat identifikasi untuk potensi yang akan terjadi dimasa yang akan mendatang maka perlu adanya formulasi-formulasi untuk penanganan yang bisa memberikan jawaban terhadap permasalahan yang akan terjadi dengan melakukan pendekatan yang komprehensif melalui manajemen risiko tentunya terdapat aspek yang perlu diperhatikan mulai dari pelaksanaan nya sampai tahap akhir pelaksanaan nya.

Kota/Kab	Buleleng
Dimensi	<i>Smart Society</i>
Program Quickwin	POSKO DO
Keterangan	Program ini diluncurkan dalam rangka pemberian Aksesabilitas Pendidikan kepada Peserta Didik yang rentan putus sekolah dengan berbagai faktor
Manfaat	Menurunnya Angka Putus Sekolah sehingga mempengaruhi Nilai Angka Partisipasi Sekolah Kabupaten Buleleng secara umum

Tabel 26 Manajemen Risiko *Smart Society*

NO	IDENTIFIKASI RISIKO (RISK IDENTIFICATION)						ANALISA RISIKO (RISK ANALYSIS)			PENANGANAN RISIKO (RISK TREATMENT)			MITIGASI RISIKO	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Kategori	Sub Kategori	Risiko	Dampak Risiko	Kerawanan (Penyebab Risiko)	Opportunity (Risiko Positif)	Nilai Kemungkinan	Nilai Dampak	Nilai Risiko	Penanggung Jawab	Target Waktu/Frekuensi	Kebutuhan Sumber daya	Struktural	Non Struktural
1	Nature	Lingkungan	Pergaluan lingkungan yang kurang Baik	Anak lebih memilih tidak sekolah	Pekerjaan yang menjajikan lebih cepat mendapatkan uang	Memberikan pemahaman yang baik akan pentingnya pendidikan di usia mereka	2	2	4 (Sedang)	Pemerintah Kabupaten Buleleng dan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, Dinas Sosial, Dinas P2KBP3A, dan Disnaker	1x setahun	Data siswa rentan putus sekolah, APBD, kepala sekolah, koordinat or wilayah, kepala desa	Memberikan Pemahaman yang Baik akan pentingnya pendidikan untuk masa depan mereka	Data siswa putus sekolah, pembentukk an program bantuan pendidikan
2	Structure	SDM	Kurangnya pemahaman orang tua akan pentingnya a	Diajak bekerja oleh orang tua Lebih memilih menikah	Pergaulan lingkungan dan kurang pentingnya peran orang tua dalam pendidikan	Sosialisasi tentang pemahaman arti pentingnya pendidiakn	1 1	2 2	2 (Sedang) 2 (Sedang)				Sosialisasi lintas sektor bukan hanya kepada masyarakat dengan	

NO	IDENTIFIKASI RISIKO (RISK IDENTIFICATION)						ANALISA RISIKO (RISK ANALYSIS)			PENANGANAN RISIKO (RISK TREATMENT)			MITIGASI RISIKO	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Kategori	Sub Kategori	Risiko	Dampak Risiko	Kerawanan (Penyebab Risiko)	Opportunity (Risiko Positif)	Nilai Kemungkinan	Nilai Dampak	Nilai Risiko	Penanggung Jawab	Target Waktu/ Frekuensi	Kebutuhan Sumber daya	Struktural	Non Struktural
			pendidikan	dibandingkan sekolah									melibatkan kepala desa	
3	Infrastruktur	Ketersediaan	Jarak sekolah jauh dari pemukiman	Peserta didik sering terlambat ke sekolah	Peserta didik sering jalan kaki ke sekolah	Memberi akses transportasi gratis kepada peserta didik	1	2	2 (Rendah)				Transportasi gratis bagi peserta didik	PP Nomor 18 Tahun 2022 tentang Pendanaan Pendidikan, SOP
		Keamanan			Tidak adanya kendaraan umum di lokasi rumah peserta didik	Memberikan akses transportasi gratis kepada peserta didik	1	3	3 (Rendah)			Polisi, Dishub, Linmas dan Pecalang	Transportasi gratis bagi peserta didik	Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 6 Tahun 2009 tentang Ketertiban Umum
4	Suprastruktur	Hukum	UU 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas	Aksesibilitas pendidikan belum merata	Pendataan yang kurang optimal	Setiap sekolah harus memiliki data anak-anak yang putus sekolah dengan bekerjasama dengan pihak desa setempat	1	1	1 (Rendah)			Peserta didik yang rentan putus sekolah	Pemerataan aksesibilitas pendidikan	SK Bupati Buleleng Nomor 100.3.3.2/116/HK/2023

N O	IDENTIFIKASI RISIKO (RISK IDENTIFICATION)						ANALISA RISIKO (RISK ANALYSIS)			PENANGANAN RISIKO (RISK TREATMENT)			MITIGASI RISIKO	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Kategori	Sub Kategori	Risiko	Dampak Risiko	Kerawanan (Penyebab Risiko)	Opportunity (Risiko Positif)	Nilai Kemungkinan	Nilai Dampak	Nilai Risiko	Penanggung Jawab	Target Waktu/ Frekuensi	Kebutuhan Sumber daya	Struktural	Non Struktural
1		Politik	Politik anggaran untuk pendidikan	Minimnya anggaran untuk aksesibilitas pendidikan di program ini	Belum bisa menjangkau secara keseluruhan kepada anak-anak yang putus sekolah dengan berbagai faktor	Dianggarkan setiap tahun	1	2	2 (Rendah)			Disdikpora, Bappeda dan BPKPD	Penganggaran yang optimal dalam aksesibilitas pendidikan	SK Kepala DAPD Nomor 000.4/452/IV/2023
		Kelembagaan	Disdikpora, Dinsos, Dinas P2KBP3A	Bantuan terfokus pada pemberian bantuan peralatan sekolah	Banyaknya faktor penyebab anak putus sekolah	Perlu dipetakan berdasarkan faktor penyebab anak putus sekolah dan perlunya kerjasama dari pihak pemerhati pendidikan	1	1	1 (Rendah)			Disdikpora, Dinsos, Dinas P2KBP3A dan KPAI	Aksesibilitas pendidikan diklasifikasikan berdasarkan faktor-faktor penyebab anak putus sekolah	UU 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas, UU 43/2007 tentang Perpustakaan
5	Culture	Sosial	Kurangnya perhatian orang tua dan masyarakat sekitar tentang	Membiarkan anak tidak sekolah, dan lebih mengutamakan membantu orang tua untuk	Setiap tahun masih ada anak yang putus sekolah	menumbuhkan kesadaran masyarakat dan orang tua akan pentingnya pendidikan	1	1	1 (Rendah)			Masyarakat	Sosialisasi pentingnya pendidikan yang lebih intensif kepada masyarakat	Pergub Bali No 80 Tahun 2018

N O	IDENTIFIKASI RISIKO (RISK IDENTIFICATION)						ANALISA RISIKO (RISK ANALYSIS)			PENANGANAN RISIKO (RISK TREATMENT)			MITIGASI RISIKO	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Kategori	Sub Kategori	Risiko	Dampak Risiko	Kerawanan (Penyebab Risiko)	Opportunity (Risiko Positif)	Nilai Kemungkinan	Nilai Dampak	Nilai Risiko	Penanggung Jawab	Target Waktu/ Frekuensi	Kebutuhan Sumber daya	Struktural	Non Struktural
			pendidikan	mendapatkan penghasilan										
		Ekonomi	Ketakutan Orang tua akan Biaya pendidikan	anak lebih diajak bekerja ketimbang sekolah	Pekerjaan menjajikan lebih cepat dapat uang untuk membantu ekonomi keluarga	Memberikan subsidi pemerintah kepada anak yang rentan putus sekolah dari faktor ekonomi	1	2	2 (Rendah)			Disdikpora, Bappeda, BPKPD dan CSR	Beasiswa Pendidikan bagi peserta didik yang kurang mampu	UU No 20 Tahun 2008, PP No 7 Tahun 2021

Sumber : Bimbingan Teknis Tahap 3 Kabupaten Buleleng 2023

4.9. Manajemen Risiko *Smart Environment*

Smart Environment melakukan rumusan manajemen risiko yang mana rumusan tersebut digunakan sebagai panduan ketika dalam pelaksanaan program terjadi potensi kesalahan. Pada *Smart Environment* dengan program quickwin nya yaitu BULAN MELAH yang mana program ini merupakan penanggulangan sampah di Kabupaten Buleleng agar bisa diolah dengan baik sehingga menghasilkan hal yang bersifat positif. Program BULAN MELAH ini sudah berjalan dengan baik di Kabupaten Buleleng untuk menanggulangi masalah sampah akan tetapi masih perlu adanya optimalisasi program yang mana berdasarkan analisis dan evaluasi program. Program quickwin BULAN MELAH yang dibuat manajemen risiko nya akan menghasilkan monitoring dan evaluasi serta mengidentifikasi sejauh mana program ini dapat berjalan di kalangan masyarakat dan kemungkinan apa yang akan terjadi .

Manajemen risiko pada *Smart Environment* mengacu kepada pendekatan yang digunakan untuk mengidentifikasi, menilai dan mengurangi risiko terkait perkembangan program quickwin. Program quickwin pada *Smart Environment* yaitu BULAN MELAH memberikan wadah untuk masyarakat dan Aparatur Sipil Negara (ASN) agar lebih sadar dalam penanganan sampah. Program tersebut merupakan sebuah inovasi yang melibatkan seluruh lapisan elemen masyarakat dan pemangku kebijakan karena indeks sampah di Kabupaten Buleleng yang cukup tinggi, selain itu manajemen risiko yang dibuat pada BULAN MELAH ini sudah di analisis berdasarkan kekurangan dan kelebihan program artinya sudah berdasarkan kondisi yang sebenarnya sehingga dapat menjadi sebuah gambaran untuk langkah ke depan ketika terjadi sesuatu hal yang bisa mengakibatkan permasalahan yang terjadi. Manajemen risiko dibuat mulai dari identifikasi risiko, analisis risiko, penanganan risiko dan mitigasi risiko. Keempat aspek itu harus selaras dan beriringan karna ketika terjadi suatu permasalahan dalam penanganan nya dapat berjalan dengan baik dan efektif.

Kota/Kab	Buleleng
Dimensi	<i>Smart Environment</i>
Program Quickwin	BULAN MELAH
Keterangan	Bulan Melah merupakan inovasi yang dikembangkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng untuk mengatasi jumlah timbunan sampah, khususnya sampah anorganik. Masyarakat menabung sampah anorganik ke Bank Sampah Unit (BSU) yang ada di masing-masing desa/kelurahan. Sampah yang dikumpulkan oleh masing-masing BSU kemudian diambil oleh Bank Sampah Induk (BSI). Sampah yang sudah terkumpul dari seluruh BSU disalurkan ke pengepul sampah sesuai dengan perjanjian/ MoU.
Manfaat	Mengurangi jumlah timbunan sampah anorganik di Kabupaten Buleleng; Memberikan keuntungan ekonomis kepada nasabah/masyarakat yang menabung sampah di BSU; Sampah memiliki nilai ekonomis; Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memilah sampah di sumbernya; Mendukung program Buleleng Menabung (Bumena)

Tabel 27 Manajemen Risiko *Smart Environment*

NO	IDENTIFIKASI RISIKO (RISK IDENTIFICATION)						ANALISA RISIKO (RISK ANALYSIS)			PENANGANAN RISIKO (RISK TREATMENT)			MITIGASI RISIKO	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Kategori	Sub Kategori	Risiko	Dampak Risiko	Kerawanan (Penyebab Risiko)	Opportunity (Risiko Positif)	Nilai Kemungkinan	Nilai Dampak	Nilai Risiko	Penanggung Jawab	Target Waktu/Frekuensi	Kebutuhan Sumber daya	Struktural	Non Struktural
1	Nature	Lingkungan	Banjir	Sampah di tempat penyimpanan BSU dan BSI hanyut	Tingginya curah hujan dan fungsi drainase di sekitar BSU dan BSI yang kurang baik	-	1	1	1 (Rendah)	Pemerintah Kabupaten Buleleng melalui Dinas Lingkungan Hidup	1x setahun	Sumber daya berupa anggaran yang bersumber APBD, CSR, Pendapatan Usaha. SDM (pengelola BSU)	Membangun gudang penyimpanan yang lebih tinggi dan jauh dari sungai	Prosedur keselamatan kerja, pelatihan singkat menanggapi keadaan darurat (penjelasan saat apel sebelum kegiatan dimulai)

NO	IDENTIFIKASI RISIKO (RISK IDENTIFICATION)						ANALISA RISIKO (RISK ANALYSIS)			PENANGANAN RISIKO (RISK TREATMENT)			MITIGASI RISIKO	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Kategori	Sub Kategori	Risiko	Dampak Risiko	Kerawanan (Penyebab Risiko)	Opportunity (Risiko Positif)	Nilai Kemungkinan	Nilai Dampak	Nilai Risiko	Penanggung Jawab	Target Waktu/Frekuensi	Kebutuhan Sumber daya	Struktural	Non Struktural
2	Structure	SDM	Infeksi virus, jamur, parasit, bakteri	Potensi penyakit kulit	Sampah yang kotor berpotensi menyebabkan penyakit	Petugas pengelola sampah di BSI sudah menjadi anggota BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan	2	2	4 (Sedang)			dan penyuluh BSI) dan gedung BSI	Bersihkan selokan dan aliran sungai agar air mengalir dengan baik serta fungsi selokan dan sungai dapat optimal	Melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat, SOP pemilihan sampah
				Potensi penyakit diare			2	2	4 (Sedang)					
				emam, dengue, chikungunya, infeksi virus Zika			2	2	4 (Sedang)					
3	Infrastruktur	ketersediaan	Kerusakan kendaraan pengangkut sampah	Tidak dapat mengangkut sampah dari BSU ke BSI	Tingginya mobilitas kendaraan pengangkut sampah	Pemeliharaan kendaraan pengangkut sampah masih dibiayai oleh APBD	2	2	4 (Sedang)				Pemeliharaan berkala kendaraan pengangkut sampah	SOP Pemeliharaan kendaraan pengangkut sampah
			Kerusakan mesin pengolahan sampah	Terjadinya penumpukan sampah di gudang BSI	Tingkat pemakaian mesin pengolahan sampah yang tinggi	Pemeliharaan mesin pengolahan sampah masih dibiayai oleh APBD	1	2	2 (Rendah)				Pemeliharaan berkala mesin pengolahan sampah	SOP Pemeliharaan mesin pengolahan sampah
		Keamanan	Tumpukan sampah yang terlalu banyak dapat mengganggu masyarakat	Demo masyarakat	Pengangkutan sampah yang tidak lancar	Penetapan lokasi gudang BSU merupakan kesepakatan bersama	1	2	2 (Rendah)				Perluasan gudang penyimpanan sampah	Sosialisasi kepada masyarakat sekitar

NO	IDENTIFIKASI RISIKO (RISK IDENTIFICATION)						ANALISA RISIKO (RISK ANALYSIS)			PENANGANAN RISIKO (RISK TREATMENT)			MITIGASI RISIKO	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Kategori	Sub Kategori	Risiko	Dampak Risiko	Kerawanan (Penyebab Risiko)	Opportunity (Risiko Positif)	Nilai Kemungkinan	Nilai Dampak	Nilai Risiko	Penanggung Jawab	Target Waktu/Frekuensi	Kebutuhan Sumber daya	Struktural	Non Struktural
			sekitar dan berpotensi menimbulkan gangguan keamanan			masyarakat desa								
4	Suprastruktur	Hukum	Peraturan Bupati Buleleng Nomor 1 Tahun 2019 tentang Kebijakan dan startegi Kabupaten Buleleng dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga, Instruksi Bupati Buleleng Nomor 367/DLH/2019 tentang	Masyarakat harus mengeluarkan dana lebih dalam penggunaan sampah plastik sekali pakai	berpotensi terhadap adanya infasli atau kenaikan harga dan harus membeli barang pengganti sekali pakai	keberadaan BSU dan BSI menjadi sah secara regulasi ada payung hukumnya	1	2	2 (Rendah)				Mengevaluasi dan Menyesuaikan Peraturan sesuai dinamika perkembangan jaman	Sosialisasi kepada masyarakat Sekitar, Pemerintah Desa/Kelurahan

N O	IDENTIFIKASI RISIKO (RISK IDENTIFICATION)						ANALISA RISIKO (RISK ANALYSIS)			PENANGANAN RISIKO (RISK TREATMENT)			MITIGASI RISIKO	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Kategori	Sub Kategori	Risiko	Dampak Risiko	Kerawanan (Penyebab Risiko)	Opportunity (Risiko Positif)	Nilai Kemungkinan	Nilai Dampak	Nilai Risiko	Penanggung Jawab	Target Waktu/ Frekuensi	Kebutuhan Sumber daya	Struktural	Non Struktural
			Pengurangan Penggunaan Sampah Plastik Sekali Pakai											
		Politik	-	Pemerintah Desa, Kelurahan belum dapat membentuk BSU karena terkendala lahan pembuatan gedung penyimpanan sampah	Banyak warga yang mengeluh, tuntutan untuk solusi penanganan sampah	Pemerintah Desa/Kelurahan menyusun perencanaan pembangunan untuk penanggulangan sampah	1	2	2 (Rendah)					Sosialisasi kepada Pemerintah Desa/Kelurahan menyusun anggaran penanggulangan sampah
		kelembagaan	-	Belum terbentuknya kelompok BSU	Masyarakat sulit menemukan BSU terdekat	Masyarakat dapat membentuk BSU bersama	1	2	2 (Rendah)					
5	Culture	Sosial	Adanya sampah tercecer pada waktu proses pengangkutan	Menyebabkan kotornya lingkungan masyarakat sekitar	Muatan yang melebihi kapasitas dan rapinya pemuatan sampah	Mobil pengangkut sudah dimodifikasi sehingga lebih aman	1	1	1 (Rendah)				Memperbanyak kendaraan pengangkut sampah	SOP pengangkutan sampah

N O	IDENTIFIKASI RISIKO (RISK IDENTIFICATION)						ANALISA RISIKO (RISK ANALYSIS)			PENANGANAN RISIKO (RISK TREATMENT)			MITIGASI RISIKO	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Kategori	Sub Kategori	Risiko	Dampak Risiko	Kerawanan (Penyebab Risiko)	Opportunity (Risiko Positif)	Nilai Kemungkinan	Nilai Dampak	Nilai Risiko	Penanggung Jawab	Target Waktu/ Frekuensi	Kebutuhan Sumber daya	Struktural	Non Struktural
1		Ekonomi	Pembayaran yang tidak sesuai dengan perjanjian	Menimbulkan protes dari BSU dan nasabah BSU	Keterbatasan dana kas di BSI	-	1	2	2 (Rendah)				Memperkuat dana cadangan kas BSI	Pelatihan manajemen keuangan BSI

Sumber: Bimbingan Teknis Tahap 3 Kabupaten Buleleng 2023

5. PENUTUP

Kabupaten Buleleng yang ingin mengembangkan pembangunan *Smart City* merupakan awal dari transformasi urban yang berkelanjutan. Dengan adanya kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta bahwa kita memiliki kesempatan untuk menciptakan kota yang lebih inklusif, berkelanjutan dan responsif terhadap kebutuhan warganya. Buku quickwin ini merupakan sebuah gambaran program yang akan dilaksanakan dalam jangka waktu pendek sehingga dapat memberikan dampak yang positif bagi masyarakat dan pertumbuhan daerah Kabupaten Buleleng. Buku ini juga memberikan gambaran secara khusus rumusan manajemen risiko dalam program ketika terjadi berbagai kemungkinan dalam pelaksanaan program ketika nanti kembangkan ataupun dijalankan.

Semoga buku ini menjadi inspirasi dan panduan bagi seluruh pemangku kepentingan untuk terus berinovasi dan membangun Kabupaten Buleleng menjadi contoh *Smart City* yang dapat dikenang oleh generasi-generasi yang akan datang. Terima kasih kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) Kabupaten Buleleng yang sudah membantu merumuskan dan membuat buku ini sehingga kita dapat memberikan yang terbaik bagi daerah kita sendiri demi kepentingan bersama untuk kemajuan Buleleng yang lebih cerdas.

6. REFERENSI

- Kominfo. (2021). *Buku Panduan Penyusunan MASTERPLAN SMART CITY 2021 GERAKAN MENUJU SMART CITY*. file:///C:/Users/ASUS ROG/Downloads/Panduan Penyusunan Masterplan Smart City - Kominfo 2021 -Rev19Juni2022 (1).pdf
- Suradnyana, P. A. (2022). *Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng*. 1–371.

LOGO BULELENG *SMART CITY*



Patung Singa Ambara Raja
sebagai Lambang dari
Kabupaten Buleleng



Gedung melambangkan
perkotaan yang akan
melaksanakan Smart City



Icon Jaringan WIFI/Internet
dalam menunjang smart city
yang pastinya membutuhkan
jaringan Internet

Pj. BUPATI BULELENG,

Ttd.

KETUT LIHADNYANA